



D 282
PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

DISKURSUS KERUSUHAN SOSIAL DALAM MEDIA MASSA

Studi Kekuasaan di Balik Sajian Berita Suratkabar

RINGKASAN

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Komunikasi
pada Universitas Indonesia
yang Dipertahankan dalam Sidang Terbuka
Senat Akademik Universitas Indonesia
di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Indonesia
Pada Hari Selasa, 27 Agustus 2002
Bertempat di Gedung AJB Kampus FISIP UI Depok

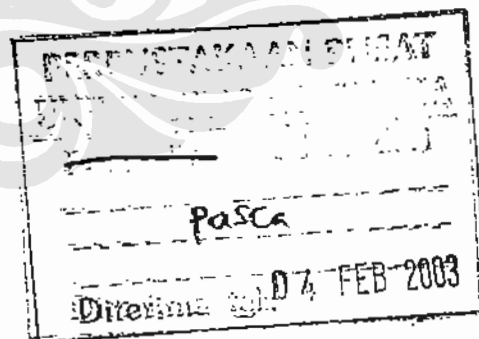
D
303.6
Rus
d

Oleh:
UDI RUSADI
NPM: 3995113028

**BIDANG STUDI ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
2002**

PROMOTOR : Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA.
KO PROMOTOR : Dedy N Hidayat, Ph.D.
Dr. Miftah Wirahadikusumah

00382



ABSTRAK

UDI RUSADI

3995113028

**DISKURSUS KERUSUHAN SOSIAL DALAM MEDIA MASSA - Studi Kekuasaan di
Balik Sajian Berita Surat kabar.**

vii + 387 halaman + 5 tabel + 3 Bagan

Daftar Pustaka : 91 buku, 6 artikel, 1977-2001

Studi ini berangkat dari kajian teoritis yang melihat terbatasnya studi kritikal di bidang komunikasi massa di Indonesia. Sementara itu fenomena empiris menunjukkan terjadinya transisi dari tatanan pemerintahan yang didominasi satu kekuasaan menuju tatanan yang demokratis dan di bidang ekonomi praktek kapitalisme menunjukkan perkembangan yang banyak mempengaruhi karakteristik media massa.

Hal itulah yang mendorong penulis untuk mengkaji fenomena di bidang media massa yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai suatu industri. Studi ini bertujuan untuk mengungkap artikulasi kapitalisme dalam diskursus media (surat kabar) tentang peristiwa kerusuhan sosial dan hubungan kekuasaan yang diproduksi serta direproduksi.

Perspektif yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut ialah kritikal pasca strukturalis, dengan pedoman dan arahan kerangka teoritis mengenai diskursus kritikal, ekonomi politik kultural dan ekonomi politik kekuasaan simbolik. Methodologi yang digunakan ialah analisis diskursus kritikal. Media yang diteliti ialah Kompas, Media Indonesia dan Republika, dengan kasus kerusuhan sosial meliputi kerusuhan Tasikmalaya, Semanggi II, Cibadak Mall dan Glodok Plaza, tawuran antar warga dan antar pelajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa nyata kerusuhan secara tekstual di surat kabar dikembangkan menjadi produksi imaji pertarungan antara kekuasaan mayoritas dengan minoritas pemeluk agama, kekuasaan yang melegitimasi dengan delegitimasi rezim, elit penguasa dengan massa, kekuasaan ekonomi lemah dengan kuat, kekuasaan sipil dengan militer. Hubungan kekuasaan tersebut diakumulasi dengan memberikan nilai tambah terhadap makna yang dikandungnya sehingga media memiliki daya jual yang tinggi.

Akumulasi imaji konflik membiakkan makna konflik, dan merepresentasikan perjuangan aktor pelaku sosial di dalam dan diluar media untuk memperoleh legitimasi dalam posisinya baik di dalam struktur kemasyarakatan maupun pemerintahan (kapital

politik). Selain itu media juga merepresentasikan aktor pelaku sosial untuk memperjuangkan penguasaan sumberdaya ekonomi (kapital material).

Artikulasi media tersebut merefleksikan proses produksi dan konsumsi yang bertumpu pada kapitalisme yang masih belum jelas tatanan dan arahnya. Industri Media cenderung untuk berusaha memelihara kelangsungan hidupnya dan berusaha untuk mengakumulasi kapital sebanyak-banyaknya dengan menggambarkan ketidak pastian dan disharmony sebagai komoditas. Dalam konteks itu, terjadi akumulasi kapital tanpa akhir yang berspiral dengan akumulasi imaji yang terus menerus tanpa akhir pula.

Refeksi teoritis dari temuan tersebut ialah bahwa dalam situasi transisi, struktur yaitu aturan-aturan dan sumber daya menjadi anomi sehingga peranan aktor pelaku sosial (*human agency*) di lingkungan media massa menjadi dominan. Namun demikian peranan dominan pelaku sosial (*human agency*) tersebut berada pada tekanan pasar dan kekuasaan massa. Selain itu temuan penelitian memberikan stimulan kesadaran bahwa media massa dalam konteks transisi cenderung memproduksi imaji ketidak pastian semakin tidak pasti, kemurnian semakin tidak murni karena media kehilangan pegangan dan larut dalam pertarungan kekuasaan. Pertarungan tersebut oleh media dijadikan komoditas dalam memelihara kelanggengan institusi bisnis untuk mempertahankan eksistensinya.

Implikasi sosial dari temuan tersebut ialah diperlukan perjuangan untuk merumuskan *doxa* khususnya di bidang media di Indonesia setelah dominasi kekuasaan otoriter berakhir pada era orde baru. Media sebaiknya merenungkan posisinya untuk tidak larut dalam upaya melanggengkan statusquo institusi bisnis semata, tetapi juga berupaya mengedepankan upaya melakukan pencerahan dan perjuangan dalam mencerdaskan dan menegakkan nilai-nilai moral masyarakat.

Kata Pengantar

Peristiwa kerusuhan di Indonesia terjadi terus menerus dari satu lokasi pindah ke lokasi lain, dari satu komunitas ke komunitas lain dengan skala dan intensitas yang beranekaragam. Setiap peristiwa kerusuhan tersebut diliput oleh media dan yang terungkap tidak saja rekaman peristiwa lemparan batu atau pembakaran rumah dan fasilitas umum, namun lebih dari itu yaitu suatu hiruk pikuk saling klaim dan perang imaji yang berakumulasi terus menerus.

Tulisan dan bahasan mengenai kerusuhan sosial telah banyak dibukukan dan lebih banyak mengungkapkan analisis mengapa kerusuhan itu terjadi, tetapi yang mengkaji hiruk pikuk ungkapan tentang kerusuhan belum banyak dilakukan. Dengan fenomena media sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji diskursus kerusuhan sosial dalam media massa khususnya surat kabar.

Saya mulai memberikan perhatian kepada konsep, teori dan methodology diskursus sejak 1997, waktu itu belum banyak penerbitan baik hasil penelitian maupun textbook mengenai diskursus. Namun demikian perkembangan pesat telah terjadi, sekarang telah terbit puluhan buku baik hasil penelitian maupun terjemahan. Tentunya studi ini diharapkan akan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ini lebih banyak lagi.

Mendalami diskursus dalam perspektif kritikal postrukturalis bagi saya merupakan suatu proses penjelajahan dalam membentuk dan membangun "dunia" melalui kekuatan menafsir fenomena yang hadir disekitar kita. Saya meyakini tidak ada kebenaran yang absolut atau kebenaran universal. Kita menghargai semua kebenaran yang ada menurut sudut pandang dan konteksnya. Apa yang saya lakukan dalam analisis sajian kerusuhan dalam media, juga mengungkapkan suatu kebenaran dari satu perspektif, yang mungkin berbeda dari perspektif lain. Jadi mungkin saja studi ini memperkaya perbedaan, dan ungkapan ada perbedaan merupakan awal dari upaya mencari solusi.

Dalam proses penjelajahan mencari dan membentuk "dunia" tadi saya banyak diberikan stimulan oleh guru-guru saya, khususnya promotor Prof Dr. Harsono Suwardi, MA. Co Promotor : Dedy N Hidayat, Ph.D, dan Dr. Miftah Wirahadikusumah serta staf pengajar lainnya di Universitas Indonesia. Dengan selesainya tulisan ini saya menghentikan untuk sementara pencarian "dunia" ini dan akan menjadi pijakan awal dalam penjelajahan berikutnya.

Untuk itu saya sampaikan penghargaan dan terimakasih kepada para pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran yang sangat berguna. Kepada istri dan anak-anakku saya mohon maaf karena hak mereka untuk mendapatkan kasih sayang sering saya rampas. Namun doa dan pengertian mereka merupakan obat sekaligus sumber inspirasi bagi saya. Kepada teman-teman kantor terimakasih atas segala pengertian dan dukungannya, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semua itu terjadi kiranya hanya dengan ridho dan bimbingan yang maha kuasa. Allah.

Jakarta, Agustus 2002



DAFTAR ISI

	Abstrak	i
	Kata Pengantar	iii
	Daftar Isi	iv
	Daftar Tabel	vi
	Daftar Bagan	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Latar belakang	1
	B Fokus dan Pertanyaan Penelitian	13
	C Tujuan dan Signifikansi Penelitian	16
	D Organisasi Penulisan	18
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	21
	A Perspektif	21
	B Diskursus Kritikal	24
	C Ideologi, Kekuasaan dan Diskursus Kerusuhan Sosial	29
	D Praktek Ekonomi Politik dan Praktek Diskursus	55
BAB III	STRATEGI ANALISIS DISKURSUS	92
	A Implikasi Methodologi	92
	B Kerangka Analisis	99
	C Prosedur Analisis	103
BAB IV	KONTEKS SITUASI HISTORIS DAN PRAKTEK MEDIA MASSA	118
	A Ekonomi Politik Media Dalam Era Transisi di Indonesia	118
	1. Praktek Kapitalisme di Era Orde Baru	118
	2. Praktek Kapitalisme Dalam Industri Media	133
	B Proses Produksi dan Konsumsi Media	145
	1. Orientasi Media	146
	2. Produksi Isi Media	154
	3. Konsumsi Isi Media	162
BAB V	MEDIA MASSA SEBAGAI JARINGAN PERTARUNGAN IMAJI KERUSUHAN SOSIAL	171
	A Kasus Kerusuhan Tasikmalaya	173
	1. Mayoritas Versus Minoritas	176
	2. Elit Penguasa Versus Massa	197

3. Elit Versus Elit	213
4. Ekonomi Lemah Versus Ekonomi Kuat	223
5. Kesimpulan	231
B Kasus Semanggi II	233
1. Rezim Pemerintah Versus Rakyat	234
2. Militer Versus Sipil	261
3. Kesimpulan	281
C Kasus Kerusakan Kawasan Cibadak Mal dan Plaza Glodok	283
1. Cibadak Mal	283
a. Ekonomi Lemah Versus Ekonomi Kuat	284
b. Legitimasi Versus Delegitimasi Rezim Pemerintah	292
2. Plaza Glodok	294
a. Ekonomi Lemah Versus Ekonomi Kuat	295
b. Legitimasi Versus Delegitimasi Rezim Pemerintah	305
3. Kesimpulan	316
C Kasus Tawuran Antar Warga dan Antar Pelajar	318
1. Tawuran Antar Warga	318
a. Ekonomi Lemah Versus Ekonomi Kuat	319
b. Legitimasi Versus Delegitimasi Rezim Pemerintah	325
2. Tawuran Antar Pelajar	330
a. Ekonomi Lemah Versus Ekonomi Kuat	331
3. Kesimpulan	345
BAB VI IDEOLOGI DAN PERTARUNGAN SUMBERDAYA KEKUASAAN	348
A Dimensi Ontologi dan Tekstual	348
a. Perebutan Kapital Politik	351
b. Perebutan Kapital Material	358
B Genealogi Berita Kerusakan Sosial	360
C Epistemologi Sajian Media	367
BAB VII PENUTUP : REFLEKSI TEORITIS DAN IMPLIKASI SOSIAL	369
A Kesimpulan	369
B Refleksi Teoritis	373
B Implikasi Sosial	376
Daftar Kepustakaan	380
Daftar Riwayat Hidup	387

Daftar Tabel

Tabel 1	Subyek dan Lokus Analisis	103
Tabel 2	Aspek Yang Digali, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data	106
Tabel 3	Perangkat Analisis Frame Teks Kerusuhan Sosial	109
Tabel 4	Kasus Kerusuhan Sosial dan Lingkup Waktu Penelitian	117
Tabel 5	<i>Common Sense</i> Yang Diproduksi Dari Peristiwa Kerusuhan Sosial	351

Daftar Bagan

Bagan 1	Proses Diskursus Isu Kerusuhan Sosial Melalui Berita Surat Kabar	40
Bagan 2	Model Produksi Berita Komersial	67
Bagan 3	Kerangka Kerja Analisis Diskursus Kritis	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini berkaitan dengan kajian kekuatan media dan kekuatan dalam media dengan asumsi bahwa media memiliki kekuatan dan dalam media terdapat berbagai kekuatan atau terdapat berbagai kekuatan. Konsep kekuatan pertama mengandung pengertian media memiliki pengaruh tertentu terhadap khalayak atau isi media memberikan kontribusi terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku khalayak sebagai individu, kelompok atau masyarakat. Konsep kekuatan media yang kedua mempunyai arti sebagai sumber daya yang mengendalikan isi media yang akan disampaikan kepada khalayak.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan konsep kekuatan yang pertama telah banyak dilakukan terutama oleh para ilmuwan aliran Liberal-Pluralis, sejak permulaan perang dunia I tahun 1914, yang mempelajari kekuatan propaganda antara lain disertasi Harold D Lasswell tentang teknik propaganda pada perang dunia yang diterbitkan tahun 1927. Dari studi-studi mereka, ternyata menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan ketidakajegan. Pada awalnya media massa dipandang mempunyai kekuatan perkasa, tetapi kemudian kekuatan itu dinilai terbatas, setelah itu dinilai moderat dan terakhir media massa kembali dinilai memiliki kekuatan penuh (Severin & Tankard, 1986: 247). Studi-studi yang terkait pada konsep kekuatan yang kedua tampak dalam studi-studi oleh para ilmuwan yang berada pada aliran Marxist-Kritikal, yang melihat peranan ideologis dalam memproduksi dan

mereproduksi konsensus, dan menjelaskan bagaimana peranan itu dibentuk dan konsensus bisa dicapai.

Studi-studi yang dilakukan kedua aliran pemikiran tersebut secara terpisah memberikan pemahaman mengenai kekuatan media menurut sudut pandang masing-masing. Namun demikian Blummer dan Gurevitch (1986: 261-2), melihat ada kebutuhan masing-masing aliran untuk memahami gejala yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda tersebut, dan kemudian menyimpulkan dua pengembangan konseptual mengenai efek media yaitu: (1) Efek media dirumuskan terutama dalam aspek pembentukan kategori dan kerangka pesan sehingga anggota khalayak menerima pesan dalam konteks realitas sosial dan politik. (2) Dampak media dalam memproduksi dan mengkomunikasikan pesan lebih disebabkan oleh karakteristik organisasi media dan kerja profesional yang terlibat daripada oleh proses persuasinya.

Konsep Blummer dan Gurevitch menunjukkan orientasi kajian komunikasi yang menitik beratkan pada kekuatan isi media dalam memproduksi dan mereproduksi realitas dan kemampuan ini dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal media. Selain faktor internal, faktor eksternal pun mempengaruhi produksi dan penyampaian pesan, sebagaimana dikemukakan oleh Gallagher (1981: 154), bahwa organisasi komunikasi mempunyai hubungan dengan kekuatan dalam masyarakat.

Salah satu topik studi yang mengarah pada konvergensi kedua perspektif

tersebut menurut Gurevitch, ialah teori efek *agenda setting*, yang mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara apa yang dinilai penting oleh media dengan apa yang dinilai penting oleh khalayak. Teori itu memberikan gambaran kekuatan media dalam membentuk kognisi khalayak, dimana kekuatan media tergantung pada media itu sendiri dalam membentuk atau memberi penekanan terhadap isinya, yaitu dengan memberikan perhatian terhadap isu-isu tertentu dalam struktur isi media. Dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, tampak terdapat perubahan dalam melihat efek media yaitu dari perubahan sikap dan perilaku kepada kontribusi media dalam membentuk kerangka pikiran khalayak.

Dalam prakteknya, pembentukan dan pemberian tekanan tertentu terhadap isi media dapat dilakukan dengan berbagai cara baik eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, misalnya dilakukan dengan pengaturan jenis topik, penempatan dan menyajikan struktur luar tertentu sehingga tampak menonjol. Penyajian yang implisit, dilakukan dengan memberikan makna-makna khusus dalam sajian isi media, antara lain melalui struktur bahasa (misal penempatan subyek kalimat), penggunaan ungkapan (*utterance*) tertentu, methapor (*analogy*), metonymy (asosiasi), kata atau kalimat kiasan (konotasi), struktur paradigmatic. Dalam kaitan ini media menjadi agen penandaan (*signifying agent*) dimana media menyajikan pesan dalam dimensi tersurat (*signifier*) atau dimensi fisik yang didalamnya memiliki dimensi gagasan atau konsep (*signified*).

Agenda yang tersusun dalam media baik yang tersurat maupun tersirat

diartikulasikan dalam suatu diskursus (*discourse*) dimana gagasan dan informasi didefinisikan dan direpresentasikan serta membentuk makna lebih di luar dari apa yang disajikannya (Waston, 1998: 115). Dalam kaitan ini media menjadi arena diskursus mengenai berbagai hal, dan dalam arena tersebut terjadi pertarungan untuk menguasai makna dari banyak partisipan, termasuk dari lingkungan media itu sendiri. Dalam diskursus, apa yang disampaikan oleh media tidak sepenuhnya merupakan realitas, sebab media menyampaikan fakta-fakta yang merupakan hasil konstruksi terhadap realitas. Media tidak sepenuhnya menyampaikan makna yang sudah ada, tetapi diseleksi terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan melakukan penajaman dan menstruktur realitas tersebut melalui bahasa. Artinya melalui bahasa, realitas tersebut diproduksi dan diteruskan kepada pihak lain (Hall, a, 1986: 64). Dengan demikian permasalahannya bukan terbatas pada agenda itu sendiri tetapi bagaimana makna yang ada dibalik agenda tersebut dan apa latar belakang agenda tersebut. Artinya yang menjadi permasalahan ialah mengenai apa yang tersembunyi di balik diskursus dan bagaimana pengaturan yang melandasi diskursus tersebut.

Studi-studi mengenai penonjolan isi media oleh peneliti *agenda setting*, dilakukan dengan mengukur agenda media berdasarkan pernyataan yang tersurat yang dihitung secara kuantitatif dari aspek-aspek penempatan suatu isu dalam media baik dilihat dari posisi maupun ukuran atau lamanya penyajian, dan frekuensi munculnya suatu isu. Sementara itu analisis isi media berdasarkan pernyataan yang laten, --- media menjadi bagian dari struktur dan strategi diskursus -- masih jarang dilakukan.

Studi-studi yang secara tidak langsung berkaitan dengan diskursus melalui media, dilakukan di Inggris sebagaimana terlihat dari karya kelompok studi media Universitas Glasgow, yang disebut "Bad News" tahun 1976 dan studi pertama yang menggunakan paradigma linguistik/diskursus kritis dilakukan oleh Roger Fowler tahun 1979 (van Dijk, 1998). Di Indonesia studi-studi yang berkaitan dengan diskursus pernah dilakukan dengan mendasarkan pada semiotika sosial atau pada studi wacana yang berbasis pada linguistik. Mulai pada tahun 1997 tampak beberapa mahasiswa S2 bahkan S1 jurusan Ilmu Komunikasi tertarik untuk mengadakan studi mengenai diskursus, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Lembaga-lembaga studi dan lembaga-lembaga pengawas media juga akhir-akhir ini aktif melakukan pengkajian dan penelitian terhadap media dengan menggunakan analisis wacana (diskursus).

Untuk melakukan analisis media berdasarkan konsep sebagai arena diskursus, maka kekuatan media tidaklah cukup hanya diketahui dengan menggambarkan isi media yang manifes atau hanya terbatas menggambarkan struktur dan isinya yang tersurat tetapi lebih jauh dari itu. Sebagai arena diskursus, media berperan dalam mereproduksi berbagai kekuasaan sebagaimana dikemukakan Foucault (Foucault, dalam Foss dkk, 1985: 205) bahwa kekuasaan merupakan bagian yang melekat atau inheren dengan seluruh susunan diskursif sebagai struktur diskursus. Artinya pada setiap diskursus didalamnya terdapat kekuasaan dan antara diskursus dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan.

Pada tahap media menyajikan suatu diskursus tidaklah semata-mata dipandang sebagai fenomena psikologis, yaitu proses persepsi reporter dalam menangkap realitas dan kemudian mengungkapkannya dalam tulisan tetapi juga merupakan fenomena bahasa, sosial budaya dan politik. Dalam kaitan ini media menyelenggarakan produksi, reproduksi dan distribusi berbagai simbol yang bermakna bagi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bernegara posisi media dikategorikan oleh Althusser (dalam Mc Quail, 1987:83, Waston, 1998: 15) sebagai Aparat Ideologi Negara (*Ideological State Apparatus-ISA*) yang utama seperti halnya sekolah, orang tua dan agama. Dalam kehidupan masyarakat media massa merupakan sebuah lembaga selain sebagai saluran hubungan sosial yang menghubungkan antar golongan dalam masyarakat tetapi juga menjadi penghubung antar pikiran antar generasi. Dalam prakteknya media massa melakukan peran mediasi yaitu menghubungkan realitas obyektif dengan realitas yang ada dalam pengalaman khalayaknya (Mc Quail, 1987). Dalam peran mediasi tersebut media mungkin akan menjadi cermin atau jendela bagi masyarakat dalam melihat realitas, atau sebagai petunjuk atau sebagai tirai yang membuka dan menutup realitas.

Sebagai *ISA* yang melakukan peran mediasi, media massa merepresentasikan hubungan tangkapan inderawi dengan tangkapan manusiawi. Representasi obyek material ke dalam gagasan (*ide*) atau mengimajinerkan realitas kehidupan nyata merupakan ideologi (Althusser dalam Hawkes, 1996: 126). Dengan demikian media memiliki peranan dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan kepada masyarakat,

dan melakukan manipulasi terhadap informasi dan citra publik untuk memproduksi dan mereproduksi ideologi dominan bagi masyarakat. Para pembuat ideologi dominan menjadi suatu kelompok elit informasi, dimana dominasi yang terbentuk bersumber dari kemampuan mereka dalam mengartikulasikan sistem ide yang lebih disukai kepada masyarakat (lihat Lull, 1998 : 2). Dengan demikian media massa secara sadar atau tidak juga menyebarkan ideologi-ideologi tertentu kepada masyarakat melalui beraneka ragam artikulasi berbagai isu. Ideologi apakah yang diproduksi dan direproduksi oleh media massa kepada masyarakat merupakan permasalahan yang perlu dikaji. Bisa jadi media secara tidak sadar mengartikulasikan berbagai peristiwa dan dengan frekuensi yang tinggi terus menerus mengembangkan suatu ideologi dominan.

Dalam melakukan peran mediasi, media massa memiliki kemampuan sebagai alat kekuasaan karena mampu menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status dan mendefinisikan legitimasi serta mendefinisikan realitas (McQuail, 1987). Dalam konteks ini media dapat merepresentasikan berbagai kuasa yang tersebar dalam masyarakat sehingga ia menjadi saluran dari banyak komunikator. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan wahana berbagai golongan dalam masyarakat untuk menyalurkan dan mewujudkan kekuatan politik, ekonomi, sosial atau budaya baik yang berada di luar maupun dari dalam lingkungan media. Artinya media tidak menjalankan fungsi sebagai saluran pasif atau sebagai transmitter semata tetapi juga

menjadi saluran aktif yang melakukan intervensi (*active intervener*) terhadap pesan yang disajikannya. (Curran dkk, 1982:21).

Studi ini akan memusatkan perhatian pada permasalahan ideologi dan hubungan kekuasaan dalam diskursus media massa. Di Indonesia studi-studi ini belum banyak berkembang, dan studi-studi yang paling banyak dilakukan berkaitan dengan khalayak, dan sebagian kecil mengenai isi media. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi, tesis dan hasil kajian lembaga-lembaga penelitian lebih banyak meneliti permasalahan yang berkaitan dengan khalayak media massa. Penelitian isi media lebih banyak ditujukan untuk memberikan gambaran kecenderungan muatan media massa. Sementara itu penelitian mengenai isi media massa yang dilakukan para mahasiswa S2 Indonesia di Amerika Serikat (antara lain Indrawadi Tamin, Sumita Tobing, Ishadi Soetopo KS, Kamil Ridwan, Akhmadsyah Naina, Abdul Rajak, Mony S Manangka, Muhamad Faizin dalam Flourmoy (ed), 1989) dengan menggunakan metoda analisis yang hampir mirip, sebagaimana dikemukakan oleh Benard Berelson (1952), yaitu meneliti isi komunikasi yang tersurat, secara obyektif sistematis dan kuantitatif.

Dalam penelitian mereka dikemukakan gambaran kecenderungan isi media dan membandingkannya antar media secara kuantitatif. Analisis yang digunakan masih dalam tataran analisis mikro dan kurang memberikan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana dan mengapa isinya sebagaimana tersaji, dilihat dari aspek yang lebih luas yaitu ideologi dan kekuasaan yang berada di balik isinya. Penelitian

mengenai isi media dengan perspektif bahwa kekuatan media terletak pada kemampuannya membentuk isinya dengan memberikan penekanan atau penonjolan isi media serta proses bagaimana media memproduksi isinya, di Indonesia masih jarang dilakukan.

Dengan pemahaman konsep media sebagai arena diskursus, maka di antara media yang berbeda dalam meliput suatu obyek liputan yang sama dimungkinkan laporannya berbeda. Hal ini dimungkinkan karena para pemilik dan praktisi media yang berbeda latar belakang dan lingkungan sosial politiknya menjadi salah satu partisipan diskursus, bahkan posisinya bisa mewarnai atau mempengaruhi partisipasi lain. Kekuatan media dalam membentuk pesan dan atau mengembangkan diskursus dipengaruhi oleh karakteristik organisasi media dan kerja kaum profesional yang terlibat di dalamnya. Dalam hubungan ini Gallagher (1986: 154) mengemukakan dua sumber keterbatasan organisasi media dalam memproduksi isinya yaitu dari sumber ekstern dan intern. Pembatasan ekstern berupa batasan yang bersumber dari kecenderungan kadar kemandirian kekuasaan (otonomi) organisasi media, atau adanya pengendalian dari kepentingan komersial, atau bersumber pada batasan yang berdimensi politik. Sedangkan hambatan internal meliputi kondisi profesionalisme yang mendukung media, kreativitas keorganisasian, pengendalian organisasi dan kemandirian kekuasaan (otonomi) komunikator media. Akar atau landasan struktural yang melekat pada kegiatan rutin para praktisi media dalam proses produksi media yang mewarnai diskursus melalui media tersebut adalah ideologi (Blumer, Gurevitch,

1986: 262).

Di Indonesia, pembatasan dari luar organisasi media bersumber dari penguasa dan berbagai kekuatan lain dalam masyarakat. Pembatasan dari penguasa mengalami pasang surut sesuai dengan tatanan dan praktek politik yang berlaku. Instrumen utama pengendalian penguasa ialah pengaturan izin penyelenggaraan media yang telah ada baik pada pemerintahan orde lama maupun orde baru. Dikeluarkan atau tidaknya izin, dicabut tidaknya izin ditentukan oleh dan untuk kepentingan penguasa. Instrumen ini tidak saja mempengaruhi keberadaan suatu media tetapi juga arah redaksional media, orientasi media dalam merepresentasikan realitas yang cenderung hegemonik. Setelah terjadinya reformasi tahun 1998 iklim politik berubah menuju suatu kehidupan berbangsa yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hukum, instrumen izin penyelenggaraan media pada awalnya masih ada namun tidak lebih berperan sebagai instrumen administratif. Instrumen izin kemudian dihilangkan setelah ditetapkannya UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU tersebut dapat dikatakan merupakan satu tonggak sejarah lahirnya kebebasan pers dalam arti sebenarnya. Iklim kebebasan sebelumnya pernah beberapa kali dialami namun tidak langgeng, karena landasan hukumnya tidak memungkinkan pers melaksanakan misi kebebasan.

Pada era dimana penguasa memegang posisi dominan dalam pengendalian politik termasuk media massa, isu-isu yang muncul dalam media sering dilihat sebagai liputan yang mempunyai dampak negatif bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kesalahan itu diletakan kepada media atau wartawan dimana media kurang akurat dalam melaporkan suatu peristiwa atau satu sinyalemen bahwa media telah melakukan kegiatan jurnalisme yang hanya mementingkan sisi komersial atau kepentingan politik tertentu. Tanggapan terhadap media di atas baik berupa imbauan, teguran atau pembatalan izin usaha penerbitan dilandasi oleh interpretasi terhadap isi media dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan media. Sebenarnya dalam suatu diskursus, isi media bisa memiliki makna lain jika dilihatnya dari konteks lain. Bisa jadi makna yang ditangkap penguasa berbeda dengan makna yang diciptakan oleh media atau mungkin juga berbeda dengan yang diberikan oleh komunikator dan diterima komunikannya. Ketika tekanan penguasa sedang surut, media lebih leluasa menyalurkan beraneka ragam kekuasaan yang ada dalam masyarakat, yang menurut Foucault (dalam Ritzer, 1996), tersebar dalam masyarakat. Berbagai kekuasaan baik di dalam maupun diluar media memberikan pengaruh kepada media dengan memberikan arah tertentu pada diskursus mengenai berbagai isu.

Dari sisi intern media, gejala menunjukkan pertumbuhan media di Indonesia sekarang ini tampak sudah mulai berkembang dalam bentuk konglomerasi. Beberapa media tampak terkonsentrasi dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dua kelompok pemilik yang memiliki penerbitan yang cukup banyak ialah Kompas/Gramedia dan Jawa Post. Konglomerasi terjadi tidak saja berupa pemilikan media dalam satu jenis media, tetapi juga dalam pemilikan silang media. Gejala ini menunjukkan bahwa Media di Indonesia telah memasuki satu fase pertumbuhan

dimana media telah menjadi suatu industri. Struktur industri media kemungkinan akan memiliki pengaruh terhadap produksi isi media. Dalam fase ini maka media dalam memproduksi informasi akan mempertimbangkannya sebagai suatu komoditas yang tidak sama dengan komoditas di dunia perdagangan. Komoditas informasi menawarkan gaya hidup dan imaji-imaji lainnya (lihat Murdock, 1986:118). Dalam kaitan itu karakteristik industri media di atas kemungkinan akan mempengaruhi karakteristik produk isinya.

Praktek media massa baik pada periode sebelum reformasi maupun setelah reformasi menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan hegemonik. Jika pada era sebelum reformasi tampak media menjadi alat kekuasaan negara, dimana masyarakat secara tidak sadar mengakui dominasi kekuasaan negara. Sedangkan pada era setelah reformasi media menjadi ajang pertarungan berbagai kekuasaan, tidak saja kekuasaan negara tetapi kekuasaan-kekuasaan lainnya yang ada dalam masyarakat.

Uraian di atas mengungkapkan media mempunyai kemampuan merepresentasikan berbagai kekuasaan yang ada dalam masyarakat tidak saja melalui isi yang tersurat, tetapi juga disajikan dalam struktur diskursif yang mengandung makna-makna simbolik. Setiap representasi kenyataan sosial dan politik dalam media tersebut dilandasi oleh ideologi yang dianut media. Dalam praktek media masih dihadapkan pada beberapa aturan yang bisa mengarahkan suatu permasalahan menjadi tidak seimbang atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan kekuasaan.

Dari lingkungan media tuntutan atau kepentingan media sebagai industri mendorong orientasi media pada kepentingan pasar. Dari lingkungan ekstern tampak masih terdapat aturan-aturan dan juga praktek-praktek yang memberikan represi pada media. Represi politik terhadap media di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan tatanan dan praktek politik yang berlaku.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.

Diskursus dalam media massa berperan dalam proses reproduksi ideologi yang ada dalam masyarakat, dan hasil reproduksi ideologi akan melahirkan pola hubungan antar kekuasaan di dalam dan di luar lingkungan media massa. Sebaliknya, melalui diskursus tersebut pola kekuasaan yang sudah ada juga akan mempengaruhi proses reproduksi ideologi.

Media massa di Indonesia sudah menjadi suatu industri yang berada pada tatanan yang dilandasi ideologi kapitalisme, sehingga media massa dalam mengartikulasikan setiap peristiwa akan merepresentasikan ideologi kapitalisme. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui hubungan kekuasaan dalam diskursus melalui media massa dalam situasi historis transisi dari tatanan pemerintahan yang otoriter menuju tatanan demokratis dan perkembangan aplikasi kapitalisme di Indonesia.

Untuk mengungkapkan hubungan kekuasaan dalam diskursus, akan diteliti media cetak, yaitu surat kabar yang terbit di Jakarta, yaitu sebanyak tiga surat kabar dengan kriteria dari aspek sasaran khalayak, kelompok usaha, serta latar belakang

pendirian yang berbeda, yaitu Kompas, Media Indonesia dan Republika. Kompas merupakan surat kabar dengan segmen kelas sosial ekonomi menengah ke atas dengan latar belakang pendirian surat kabar tersebut berada dalam lingkungan Katolik. Media Indonesia, merupakan surat kabar yang didirikan oleh golongan muda usia, lahir setelah deregulasi di bidang media dilakukan. Republika, disebut kelompok surat kabar, dengan sasaran yang dijangkau semua kelas segmen dan berada dengan warna Islam yang menonjol. (Hill, 1994:83, 91-92,128).

Diskursus yang diteliti ialah diskursus peristiwa-peristiwa kerusuhan atau kekerasan yang bersifat massal yang terjadi. Peristiwa kerusuhan menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, karena memiliki dimensi yang kompleks, terjadi pada setiap era kepemimpinan pemerintahan di Indonesia dengan lingkup ruang dan waktu yang beraneka ragam. Kerusuhan sosial yang terjadi tampaknya memiliki dimensi latar belakang yang beranekaragam. Interpretasi yang berkembang antara lain karena kesenjangan sosial, faktor dominasi kekuasaan, karena faktor anomie, faktor psikologis yang temporer, atau karena skenario “dalang”, atau karena faktor teologis dan etnologis.

Peristiwa kerusuhan sosial tersebut diartikulasikan dalam media sebagai suatu diskursus yang memiliki prosedur dan aturan tertentu dan merepresentasikan berbagai kekuasaan dan ideologi.

Dengan demikian permasalahan penelitian ini ialah *hubungan kekuasaan dibalik diskursus kerusuhan sosial dalam surat kabar di Indonesia.*

Pertanyaan penelitian yang terkait pada permasalahan tersebut ialah:

- Bagaimana artikulasi kapitalisme dalam diskursus media (suratkabar) tentang peristiwa kerusuhan sosial ?
- Hubungan kekuasaan apa saja yang diproduksi dan direproduksi dalam diskursus kerusuhan sosial melalui surat kabar ?

Artikulasi kapitalisme¹ yang dimaksud di sini ialah bentuk-bentuk penyajian

¹ Istilah artikulasi digunakan dalam beberapa konteks antara lain dalam teori pembangunan, semiotika dan teori presentasi. Dalam teori pembangunan, teori artikulasi merupakan salah satu teori yang menjelaskan proses pembangunan menjadi penyebab kegagalan pembangunan. Teori ini mula-mulanya dikembangkan oleh para antropolog Perancis seperti Claude Meillassoux dan Pierre Philippe Rey. Artikulasi dalam konteks ini memiliki pengertian sebagai cara-cara produksi atau *mode of production* dimana dijelaskan bahwa setiap format sosial memiliki cara produksinya masing-masing. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kegagalan kapitalisme di negara-negara pinggiran disebabkan oleh artikulasinya kurang sesuai atau tidak murni dilaksanakan atau kombinasi unsur-unsur yang digunakan tidak efisien (Budiman, 1995:103-107). Modal produksi kapitalis antara lain ialah adanya faktor produksi, akumulasi dan eksploitasi. Dalam tataran teks artikulasi kapitalisme akan dilihat karakteristik produksi, akumulasi dan sirkulasi dalam dimensi imaji.

Dalam semiotika istilah artikulasi menghubungkan struktur kode, yang berasal dari linguistik struktural Martinet. Kode semiotik memiliki artikulasi ganda 'double articulation' yang dapat dianalisa dalam dua tingkatan struktural abstrak: tingkat tinggi yang disebut artikulasi tingkat pertama dan tingkatan rendah sebagai artikulasi tingkatan kedua. Dicontohkan, pada artikulasi tingkat rendah ialah huruf dan artikulasi tingkat tinggi ialah kata-kata. Huruf-huruf P/B/K merupakan artikulasi pembeda artikulasi tingkat tinggi pada kata-kata Pin, Bin dan Kin (North 1990, dalam Delinger, www). Dalam teori presentasi, artikulasi merupakan kapasitas pembangkit sumberdaya yang bekerja secara simultan sehingga memiliki konteksnya sendiri. Hal tersebut terjadi pada tingkatan substantif dan operasional. Sumberdaya material yang baru melapisi sumberdaya yang ada dan artikulasinya membedakan dan mendefinisikan ulang pola dan protokol sehingga semua presentasi terjadi (www,).

Dari tiga pengertian tersebut pada tingkatan teoritik dan konseptual akan digunakan konsep pertama. Sedangkan pada tingkatan teks akan merujuk pada konsep ke dua dan ketiga yang diaplikasikan dalam analisis *framing*. Dua konsep terakhir menunjukkan satu pemahaman bahwa artikulasi merupakan satu bentuk penyajian yang menggunakan satu sumberdaya dan sumberdaya lainnya sehingga memiliki pengertian tersendiri. Presentasi media massa artikulasinya menggunakan bahasa dan gambar sehingga pada tingkat dasar mengartikulasikan huruf dan coretan gambar, dan pada tingkat tinggi huruf menjadi kata-kata, coretan gambar menjadi sebuah gambar yang memiliki arti yang lain. Artikulasi tersebut telah mengembangkan dan mengubah sumberdaya yang ada. Dalam konteks studi ini artikulasi tidak terbatas pada tingkat huruf dan kata-kata tetapi artikulasi yang berkembang pada tingkatan konseptual yaitu berupa perangkat framing dari suatu isu. Lebih lanjut hal ini dikemukakan dalam uraian kerangka pemikiran teoritis dan metodologi. Secara konseptual pengertian artikulasi

dari gagasan atau realitas yang direpresentasikan dalam teks kerusuhan sosial yang menunjukkan adanya produksi, akumulasi, sentralisasi imaji. Hubungan kekuasaan yang dimaksud ialah suatu relasi antara satu posisi dengan posisi lain, dimana posisi yang memiliki makna lebih dari posisi lainnya merupakan posisi yang memiliki kekuasaan.²

C. Tujuan dan Signifikansi penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan, pertama mengemukakan gambaran artikulasi kapitalisme dalam penyajian peristiwa kerusuhan sosial sebagai suatu diskursus. Kedua, menggali hubungan kekuasaan yang diproduksi dalam diskursus kerusuhan sosial melalui surat kabar.

2. Signifikansi

Kajian ini bertolak dari anggapan bahwa kekuatan media terletak pada bagaimana media menyusun isinya³ sehingga secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan suatu kontribusi pemahaman kontekstual mengenai kekuatan media, baik konteks peristiwa yaitu kerusuhan sosial maupun konteks situasi praktek ekonomi politik di Indonesia. Hal ini memberikan kontribusi dalam melihat

dalam semiotika dan teori presentasi merupakan instrumen dalam menunjukkan artikulasi kapitalisme dalam teks kerusuhan sosial yang dalam implementasinya menggunakan perangkat analisis framing.

² Lebih lanjut secara konseptual dan teoritis akan dijelaskan dalam bab Kerangka Pemikiran Teoritis.

³ James Currant dkk, (1982:21, 28) mengindikasikan terdapat perubahan dalam fokus studi dari yang mempunyai perhatian utama kepada efek komunikasi kepada perhatian terhadap konsekuensi operasi media dalam menyusun isinya. Mereka melihat bahwa kekuatan media merupakan kekuatan

kekuatan media dari tiga tataran yaitu mikro, meso dan makro. Pada tataran mikro, akan diteliti artikulasi diskursus media, dan pada tataran meso yaitu dari sisi proses produksi dan konsumsi isi media, sedangkan pada tataran makro akan digali hubungan kekuasaan yang berada di balik diskursus kerusuhan sosial dalam surat kabar. Dengan demikian penelitian akan memberikan suatu kajian multi level dari perspektif ekonomi politik kritikal.

Secara methodologis, penelitian ini melihat isi media tidak semata-mata berdasarkan analisis isi yang konvensional berdasarkan pernyataan yang manifest dan melihat dari agregasi kata atau kalimat, tetapi melihat dari keseluruhan penyajian dan konteks yang terkait. Demikian juga dalam menjelaskan susunan diskursus yang terjadi akan menggunakan metode yang tidak semata-mata bertumpu pada penjelasan empiris sensual tetapi juga pada empirisme logik dan etik. Studi diskursus mengenai media di Indonesia masih relatif baru dan masih jarang dilakukan paling tidak untuk penyusunan karya ilmiah tingkat doktoral. Disamping itu teori diskursus memiliki perspektif beraneka ragam yang implikasi methodologisnya juga beranekaragam. Oleh karena itu dari aspek methodologi, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan khasanah aplikasi methodologi penelitian teks secara kualitatif.

Signifikansi dari dimensi sosial, penelitian ini diharapkan mengungkap karakteristik praktek kapitalisme media di Indonesia, dominasi kekuasaan yang ideologis, yang dalam konseptualisasinya terdapat tiga perbedaan, yaitu fokus pada aspek struktural,

berlangsung. Dengan terungkapnya karakteristik kapitalisme tersebut, diharapkan secara kritis bisa dirumuskan pemikiran konseptual dalam rangka mempromosikan keseimbangan dan independensi media yang diabdikan kepada kepentingan masyarakat.

D. Organisasi Penulisan.

Pada bagian awal (Bab I) akan dikemukakan landasan mengapa studi ini dilakukan baik latar teoritik maupun empirik, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian baik teoritis, metodologis maupun sosial.

Bab berikut (Bab II) dikemukakan kerangka pikiran teoritis yang memberikan acuan awal sebagai kerangka kerja penelitian. Pada bagian ini dijelaskan konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan diskursus. Secara keseluruhan studi ini menggunakan perspektif kritis, sehingga pada awal bagian ini dijelaskan keterkaitan permasalahan penelitian ini dengan perspektif teori yang dipilih, yaitu kritis. Subyek yang berkaitan dengan teori kritis yang dijelaskan ialah teori diskursus kritis dan elemen diskursus. Karena yang akan digali dalam diskursus ini ialah bagaimana praktek kapitalisme dipresentasikan dalam liputan kerusuhan sosial dan hubungan kekuasaan yang berada di balik sajian media. Secara teoritik prosedur diskursus dipengaruhi oleh medianya, maka dalam bagian ini dijelaskan pula konsep dan teori terkait pada Surat kabar sebagai wahana diskursus, baik pada lingkup mikro

ekonomi politik dan studi budaya. Tulisan ini akan memfokuskan pada perspektif ekonomi politik.

yaitu teks, meso pada produksi dan konsumsi maupun pada lingkup non diskursus yaitu praktek sosial budaya.

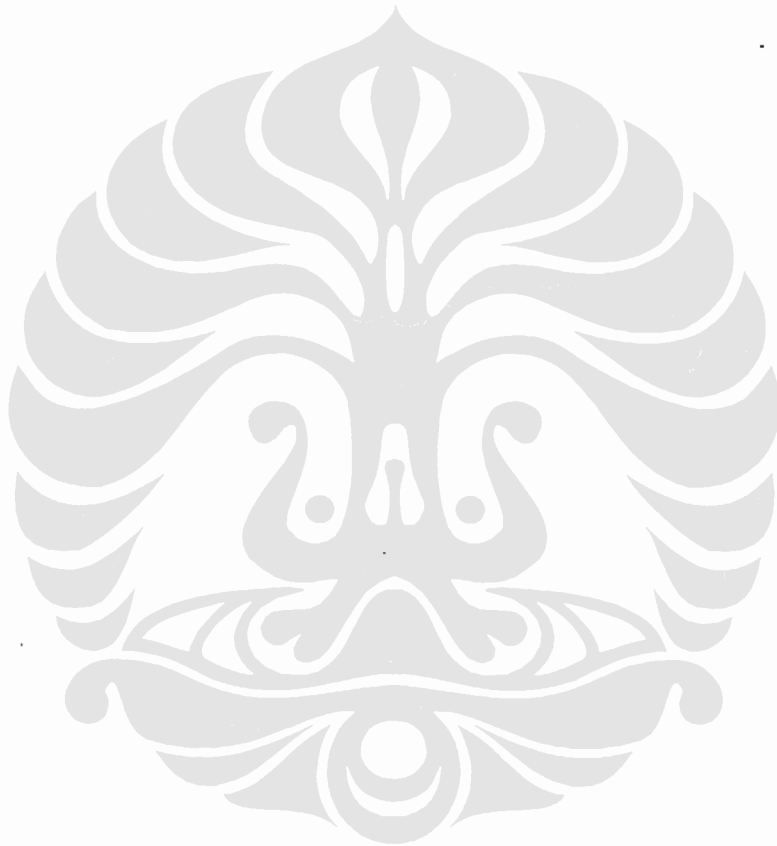
Untuk menjawab permasalahan studi, dalam bab berikut (Bab III) dikemukakan strategi analisis yang akan digunakan. Pada bagian ini dijelaskan implikasi perspektif teoritik yang digunakan terhadap methodologi yang dipilih, kerangka analisis dan prosedur analisis.

Bab IV diberi judul Media: Konteks Historis dan Praktek Media Massa, merupakan uraian gambaran situasi historis mengenai kasus yang diteliti. Dalam bagian ini, pertama dikemukakan gambaran praktek ekonomi politik di era transisi dan kedua proses produksi dan konsumsi media.

Bab V, merupakan hasil penelitian diberi judul Media Massa sebagai Jaringan Pertarungan Imaji Kerusuhan Sosial. Seluruh bagian ini menjelaskan hasil analisis teks surat kabar tentang kasus-kasus kerusuhan sosial meliputi Kasus Kerusuhan Tasikmalaya, Kasus Semanggi II (Penolakan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya), Kasus Mal Cibadak dan Razia VCD Bajakan di Glodok, Kasus Tawuran Warga Dan Pelajar.

Bab VI merupakan bab yang mencoba menghubungkan hasil analisis yang ditulis pada Bab IV dan V, untuk menggambarkan artikulasi kapitalisme dalam diskursus kerusuhan sosial dan hubungan kekuasaan yang diproduksi media dengan judul Bab Ideologi dan Pertarungan Sumberdaya Kekuasaan. Bab ini ditulis dalam tiga bagian meliputi berdasarkan dimensi ontology, tekstual, genealogis dan epistemologis dari liputan kerusuhan sosial. Bagian akhir sebagai penutup laporan

dalam Bab VII akan dikemukakan suatu kesimpulan berisi gambaran hasil analisis mencakup tiga dimensi yaitu mikro, meso makro untuk semua kasus dengan perspektif ekonomi politik. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut dikemukakan refleksi teoritis dan implikasi sosial dari temuan-temuan tersebut.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

A. Perspektif

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana ideologi kapitalisme diartikulasikan dan menggali kekuasaan apa yang berada di dibalik diskursus kerusuhan sosial yang disajikan surat kabar. Asumsi-asumsi yang mendasari permasalahan tersebut adalah: (1). Pengaruh media terhadap masyarakat ditentukan oleh kemampuan media dalam menyusun dan mengemas isinya, jadi yang penting dilakukan penelitian ialah bagaimana kandungan dan kekuatan isi media tersebut (2). Ketika media memproduksi dan mengkomunikasikan isinya terdapat peranan ideologi (dalam studi ini ideologi kapitalisme) dan sumber-sumber kekuasaan yang memberikan warna pada isi media. (3). Media mengartikulasikan ideologi dan kekuasaan melalui bahasa yang maknanya tergantung pada konteks historis tertentu.

Asumsi-asumsi tersebut mengarahkan penelitian ini untuk menggunakan perspektif teori kritis. Teori itu sendiri mulai muncul pada tahun 1937, -- walau pun pengkajiannya telah dimulai tahun 1930 -- setelah mayoritas dari anggota Institut Frankfurt bermigrasi ke Amerika Serikat karena Hitler mengalami kemenangan di Jerman. Untuk beberapa tahun teori kritis eksis sebagai ciri dari Institut Marxisme dan berusaha untuk menemukan pendekatan menyeluruh semua disiplin ilmu atau *supradisiplinary teori* yang dilakukan secara radikal. Menurut para ilmuwan teori

kritikal, teori sosial tradisional mereproduksi masyarakat yang ada tidak secara kritis, sedangkan teori kritikal mengartikulasikan aktivitas usaha untuk melakukan perubahan masyarakat. Jadi teori kritikal dilandasi oleh aktivitas kritikal yang melakukan oposisi dan terlibat dalam perjuangan untuk melakukan perubahan sosial dan memandang teori dengan praktek merupakan suatu kesatuan. Kritik dalam konteks ini ialah melakukan koreksi terhadap praktek-praktek penekanan dan eksploitasi serta memperjuangkan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Dalam perkembangannya ilmu sosial kritikal memiliki beberapa variasi ilmu, namun dari variasi yang ada menunjukkan adanya tiga ciri esensial (1). Para ilmuwan sosial kritikal percaya tentang pentingnya memahami pengalaman hidup dalam konteks masyarakat yang nyata. (2). Pendekatan kritikal menguji kondisi sosial untuk mengungkap tatanan yang rusak yang biasanya tersembunyi dibalik peristiwa sehari-hari. (3). Ilmu sosial kritikal berusaha memadukan teori dengan praktek (Littlejohn, 1996:226-7).

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan karakteristik studi dalam ilmu sosial kritikal. Dalam penelitian ini, sesuai dengan konteks historis yang berkembang, bahwa kapitalisme menjadi ideologi dominant sehingga dalam penelitian ini bagaimana artikulasi kapitalisme tersebut akan diungkapkan dalam penelitian ini. Selain itu dalam memproduksi dan reproduksi ideologi kapitalisme, akan dilihat kekuasaan apa saja yang terlibat dalam diskursus media tersebut.

Studi-studi kritikal dibagi dalam dua kelompok utama yaitu studi strukturalis dan pasca strukturalis (*post structuralist*). Aliran strukturalis memandang bahwa struktur sosial yang menindas adalah nyata, walau pun mungkin tersembunyi dibalik kesadaran sebagian besar masyarakat. Aliran struktural berusaha mencari identitas dan mengungkapkan aturan-aturan yang menindas. Aliran pasca strukturalis melihat bahwa tidak ada realitas atau makna sentral dan yang menindas struktur tidak permanent. Ada pertarungan tetapi tidak ada pertarungan antara ideologi monolitik, pertarungan yang ada merupakan pertarungan antara ide atau kepentingan yang berubah-ubah. (Littlejohn, 1996:226-7).

Penelitian ini berada pada posisi studi kritikal pasca strukturalis melihat realitas yang ditampilkan oleh media sebagai realitas semu, dan melihat apa yang disajikan media merupakan pertarungan kepentingan untuk memperoleh kapital. Pilihan perspektif ini juga sejalan dengan tinjauan mengenai krisis teori sosial akhir-akhir ini. Teori-teori *postmodernism* dan *postindustrial*¹ dianggap kurang memiliki komitmen pada riset sosial, kritik sosial, praktek politik. Sebaliknya, teori kritikal setelah Perang Dunia ke II mengalami krisis, tidak lagi mengartikulasikan dan mengembangkan kondisi sosial yang baru. Dalam posisi ini teori kritikal diharapkan

¹ Tinjauan relevansi dan signifikansi pasca strukturalis sama dengan posisi postmodernis, dengan pertimbangan kedua aliran tersebut sering digunakan dalam satu posisi sebagaimana diulas oleh Agger (www), bahwa kedua aliran tersebut tidak bisa dipisahkan secara tegas. Menurutnya, pemisahan secara jelas pasca strukturalisme dari postmodernisme tidak bisa dilakukan. Misalnya, meskipun sebagian besar setuju bahwa Derrida adalah seorang pemikir pasca strukturalis tetapi ia sendiri tidak mengidentifikasi seperti itu. Foucault, Barts, dan Lyotard diklaim sebagai suatu kelompok pasca strukturalis tetapi sering juga diklaim sebagai kelompok postmodernisme. Ciri yang paling penting ialah bahwa semua karya tersebut merupakan versi yang berbeda dari kategori atau aliran positivis.

memberikan kontribusi pada krisis teori sosial dengan membuat perspektif dan orientasi baru, yaitu harus memfokuskan pada permasalahan kontradiksi, konflik, dan kecenderungan krisis dalam masyarakat kapitalis yang kontemporer (Kellner, www.). Tinjauan terhadap teori kritikal dan kaitan dengan krisis teori sosial, memberikan gambaran signifikasi secara teoritis terhadap kajian ini yang mencoba menjawab permasalahan ini, yaitu keterkaitan antara fenomena kapitalisme dan konflik dalam masyarakat.

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk memahami penyusunan atau pembentukan isi media ialah teori diskursus kritikal, sebagai mana dikemukakan oleh Fairclough, 1995; Mills, 1997, Van Dijk, 1998a; Van Dijk, 1998b.

Perspektif ini merupakan integrasi dari teori diskursus yang lebih menekankan pada aspek bahasa (sistem bahasa) dan diskursus yang menekankan pada aspek-aspek filosofis sebagaimana dikemukakan oleh Foucault. Dalam memahami kecenderungan hubungan kekuasaan dalam diskursus media, analisis akan didasarkan pada perspektif ekonomi politik kultural, yaitu teori ekonomi politik yang tidak memisahkan antara peranan agen dan struktur (Golding dan Murdock, 1992; Mosco, 1996), serta ekonomi politik kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu (Swartz, 1997, Bourdieu, 1977).

B. Diskursus Kritikal

Diskursus (*discourse*) yang dalam bahasa Indonesia sering disebut wacana dan sudah banyak digunakan sebagai istilah untuk menggantikan kata perbincangan

atau pembahasan mengenai suatu obyek. Bahkan sering digunakan sebagai kata yang mengandung arti wawasan. Dalam khasanah ilmu pengetahuan, konsep diskursus memiliki pengertian lebih jauh dari pengertian-pengertian populer, dan setiap disiplin ilmu memberikan pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing disiplin ilmu. Mills (1997:2-7) mengupas istilah diskursus baik dalam pengertian kamus maupun teoritikal. *Collins Concise English Dictionary* dan *Logman Dictionary of English Language*, *Collins Concise French Dictionary* ketiganya memberikan pengertian diskursus yang hampir sama, yaitu komunikasi verbal, atau percakapan dan pidato atau pembicaraan baik secara lisan maupun tertulis. Namun dalam kamus Perancis/Inggris (*Collins Concise French Dictionary*) diskursus dihubungkan dengan pikiran filosofis Perancis, *discours* selain memiliki pengertian sebagai discourse dalam kamus bahasa Inggris yaitu pembicaraan (*speech*), pembicaraan langsung dan tidak langsung (*direct/indirect speech*), juga *discourse* dalam pengertian filosofis (*philosophical treatise*).

Dari aspek filosofis dan teoritikal terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai fokus perhatiannya yaitu antara pembicaraan lisan dan tertulis, atau antara diskursus yang diartikan sebagai ungkapan lisan dan teks. Sepihak diskursus hanya ditujukan kepada pembicaraan lisan dan lainnya meliputi juga tertulis (teks). David Crystal (dalam Mills, 1997: 3) berusaha mendefinisikan diskursus dalam pengertian linguistik memfokuskan analisis diskursus pada struktur alami dari bahasa lisan dan dibedakan dengan fokus bahasan teks. Geoffrey dan

Michael Short (dalam Mills, 1998: 4) mengungkapkan diskursus sebagai komunikasi linguistik dan melihatnya sebagai transaksi antara pembicara dan pendengar, sebagai suatu aktifitas interpersonal yang bentuknya ditentukan untuk tujuan sosial. Teks adalah komunikasi baik tertulis maupun lisan yang sepenuhnya dilihat sebagai kode pesan baik dalam media audio maupun visual.

Michael Stubbs (dalam Mills, 1997: 4) mengungkapkan bahwa teks dan *discourse* lebih kurang merupakan sinonim. Keduanya berbeda dalam cakupan dan luasnya obyek yang dianalisis. Teks mungkin tertulis, tidak interaktif, bisa pendek dan panjang, memiliki kohesi luar (*surface cohesion*). Sedangkan diskursus mungkin lisan, interaktif, panjang, memiliki koherensi mendalam. Sementara itu Emile Benveniste (dalam Mills, 1997: 4) membedakan diskursus dengan sistem bahasa, bahwa kalimat yang digunakan merupakan domain bahasa sebagai sistem tanda dan kemudian masuk dalam univers lain. Bahasa merupakan instrumen komunikasi yang ekspresikanya disebut diskursus.

Mills (1997:6), menyimpulkan bahwa definisi diskursus tidak ada yang sederhana dengan makna yang jelas dan pengertian-pengertiannya sering tidak konsisten. Oleh karena itu diskursus memiliki sejarah yang kompleks dan digunakan dengan cara berbeda-beda oleh para teoritis, dan dalam suatu analisis diskursus biasanya tidak diarahkan untuk menggunakan satu pengertian. Foucault (dalam Mills, 1997:6) dalam kaitan ini menjelaskan walaupun kemungkinan terdapat pengurangan terhadap pengertian diskursus, tampaknya terdapat fluktuasi makna dari kata

diskursus dan ia meyakini ada penambahan makna. Diskursus kadang-kadang diartikan sebagai domain seluruh pernyataan (*statement*), kadang-kadang sebagai kelompok pernyataan secara individual, kadang-kadang sebagai praktek pengaturan yang mengarahkan sejumlah pernyataan. Pengertian Foucault tersebut, dipengaruhi oleh teori kultural secara umum. Menurut pandangan strukturalis dan pasca strukturalis, aspek bahasa dalam konsep diskursus, dilihat sebagai sistem yang memiliki aturan dan batasan, dan bahasa itu sendiri yang menentukan pengaruhnya terhadap cara seseorang berfikir dan menyatakan dirinya sendiri.

Littlejohn (1996:84, 96), mengemukakan ada empat aliran diskursus, yaitu pertama aliran yang memberikan perhatian pada cara-cara diskursus diorganisasi, prinsip-prinsip yang digunakan komunikator dalam mengembangkan dan memahami pembicaraan dan tipe pesan lainnya. Kedua, diskursus sebagai suatu tindakan dan merupakan cara mengerjakan sesuatu melalui kata-kata. Ketiga, analisis diskursus merupakan pencarian prinsip-prinsip yang digunakan komunikator menurut perspektifnya. Keempat, diskursus dalam sudut pandang pasca strukturalis yang umumnya menolak paham bahwa diskursus merupakan produk dan alat komunikasi yang utama. Dalam sudut pandang pasca strukturalis juga terdapat variasi. Derrida menolak pandangan adanya pembatasan arti suatu bahasa. Dalam teks selalu terdapat makna-makna alternatif. Lainnya yang termasuk dalam kelompok ini ialah Foucault yang menitik beratkan pada aspek pengetahuan dan kekuasaan. Dalam kategori Littlejohn tersebut, studi ini merupakan merupakan sintesa antara konsep diskursus

dalam aliran tiga dan empat, yaitu melihat teks suratkabar dari prinsip-prinsip proses produksi dan konsumsi teks serta menggali hubungan kekuasaan yang ada di balik teks. Menurut Foucault diskursus (*discourse*) merupakan formasi diskursif (*discursive formation*) yaitu sekelompok pernyataan yang memiliki sistem pembentukan yang tunggal (Foucault, 1969, 1997/1976:107 dalam Ritzer, 1997: 40). Sedangkan Dant (1991:7), diskursus diartikan sebagai suatu material dari suatu isi ungkapan yang dipertukarkan dalam suatu konteks sosial. Material ungkapan tersebut diberi makna yang sesuai dengan tujuan pihak yang mengungkapkan dan disusun agar mempunyai makna yang berarti bagi peserta lain. Material isi yang dimaksud ialah apa yang tersurat pada suatu isi pesan dan makna yang dimaksud ialah arti atau konsep yang diberikan pada isi yang tersurat tersebut. Apa yang dikemukakan oleh Dant bahwa diskursus sebagai ungkapan yang dipertukarkan yang diberikan makna tertentu sejalan apa yang dikemukakan Foucault. Artinya keduanya merumuskan diskursus dengan maksud yang sama bahwa intinya merupakan satu kelompok pengungkapan gagasan yang saling berkaitan secara sosial dan juga keduanya bermuara pada pembentukan pengetahuan.

Dant memandang bahwa pengetahuan sosial yang disebarkan oleh orang-orang dalam bentuk diskursus, dan pengetahuan yang dipertukarkan tersebut memiliki ideologi tertentu. Sedangkan Foucault melihat dalam pengetahuan terdapat kekuasaan dimana antara pengetahuan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan dapat terbentuk hanya apabila hubungan kekuasaan terpelihara. Melalui

pengembangan kekuasaan tercipta dan terakumulasi pengetahuan baru dan bangun informasi atau *body of information* (Foucault, dalam Foss dkk, 1985: 204). Dari kedua kerangka pemikiran Dant dan Foucault dapat dikemukakan bahwa setiap diskursus dilandasi oleh ideologi dan melahirkan pengetahuan dan pengetahuan tersebut merupakan kekuasaan sehingga diskursus terjadi karena ada kekuasaan.

C. Ideologi, Kekuasaan dan Diskursus Kerusuhan Sosial

1. Ideologi

Dalam teori Marxist Ideologi dilihatnya dari sudut pandang materialist dimana kehidupan sosial menentukan kesadaran. Menurut pandangan ini bahwa posisi ideologis merupakan fungsi dari posisi kelas yang berkuasa. Dan ideologi dominan dalam masyarakat merupakan ideologi dominan kelas tersebut. Didalam Marxis Fundamentalis ideologi merupakan kesadaran palsu (*false consciousness*) dari kelas pekerja atau sebagai strategi hegemoni para elit yang berkuasa.

Althusser menolak pemikiran mengenai kesadaran palsu (*false consciousness*) dan ia menekankan bahwa ideologi merupakan medium dimana kita memasuki dunia dalam pengalaman (Candler, 1995: 3-4). Jadi ideologi yang dimaksud Althusser merupakan gambaran imajiner dari suatu realitas yang dialami oleh panca indera. Ia melihat bahwa ideologi tersebut merupakan konsep material yang diproses dan disampaikan menjadi gagasan.

Marx membatasi ideologi dalam pengertian ideologi kelas dan dalam

perspektif ekonomi, sebagai kesadaran palsu yang ditanamkan kepada kaum pekerja agar mereka memiliki produktifitas kerja yang tinggi. Sedangkan Althusser tidak dibatasi dalam konteks kesadaran palsu, tetapi menekankan pada aspek pengembangan gagasan yang bersumber dari pengalaman sebagai material. Ideologi merupakan proses representasi pengalaman dalam gagasan.

Kedua pemahaman terhadap konsep tersebut dalam kajian ini tidak dipandang sebagai konsep yang bertentangan, tetapi saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan pandangan Raymond William sebagaimana dikutip oleh Fiske (1992:165-6), bahwa konsep ideologi biasa digunakan dalam tiga pengertian yang satu sama lain saling melengkapi. Pertama, ideologi dirumuskan menurut pandangan psikologi, yaitu sebagai suatu sistem kepercayaan dari suatu kelas kelompok. Penggunaan yang kedua, yaitu sebagai sistem kepercayaan khayali atau gagasan ilusi atau kesadaran palsu. Ketiga, ideologi merupakan proses umum dari produksi makna atau gagasan. Pengertian ideologi yang pertama menjadi bagian dari pengertian kedua dan kedua pengertian tersebut tercakup dalam pengertian yang ketiga.

Ketiga pengertian William tersebut, merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga proses produksi makna atau gagasan tersebut terjadi dalam rangka representasi sosial, dan yang direpresentasikan tersebut merupakan kepercayaan suatu kelompok. Kelompok yang dimaksud tidak dibatasi oleh kelompok atau kelas yang berkuasa, atau oleh kelompok pekerja atau suatu hegemoni.

Hal ini sejalan pula dengan konsep yang dikemukakan oleh Van Dijk (1998) dimana ia merumuskan ideologi dari perspektif multi disiplin. Dikemukakan bahwa ideologi merupakan basis dari representasi sosial yang disebarkan oleh anggota suatu kelompok. Artinya bahwa ideologi bisa dikembangkan oleh orang-orang sebagai anggota suatu kelompok untuk mengorganisasi suatu kepercayaan sosial (*social belief*) tentang satu hal yang dinilai baik dan buruk, salah atau benar bagi mereka dan bertindak menurut kepercayaan mereka.

Dalam pengertian multi disiplin, kelompok yang dimaksud ialah kelompok sosial, dan tidak harus mengandung penilaian yang negatif misalnya ditujukan kepada kelompok yang mendominasi atau yang mengendalikan kelompok lainnya. Dengan demikian sistem kepercayaan suatu kelompok yang secara sadar atau tidak mempengaruhi proses produksi makna atau gagasan kemudian mempengaruhi pengetahuan yang dipertukarkan sebagai diskursus. Sistem kepercayaan tersebut dianut oleh suatu komunitas yang mempunyai struktur sosial masing-masing.

Keterkaitan antara ideologi, masyarakat dan diskursus dijelaskan oleh van Dijk (Dellinger, 1995; van Dijk, 1997, van Dijk, 1998) dalam suatu kerangka teoritikal yang disebut dengan tiga kerangka pandang (*triangle*), yaitu kognisi--masyarakat--diskursus. Dalam pengertian pertama, ideologi dipelajari dalam pengertian kognisi sosial, dan kedua menunjukkan tidak saja dalam pengertian kognisi sosial tetapi juga dalam pengertian sosial politik, budaya dan historis. Ketiga, bahwa ideologi tersebut dibentuk, diubah dan direproduksi melalui diskursus dan

komunikasi. Keterkaitan antara ketiga sudut pandang (*angle*) itu yaitu bahwa diskursus harus dihubungkan secara eksplisit dengan struktur dan strategi personal dan pikiran masyarakat (*social mind*) sesuai dengan situasi sosial, interaksi sosial dan struktur masyarakat. Dengan cara yang sama kognisi harus dihubungkan dengan diskursus dan kondisi masyarakat. Demikian juga struktur sosial akan mudah dinyatakan secara eksplisit melalui struktur diskursus (van Dijk, 1998: 1).

Dellinger (1995:10) menjelaskan keterkaitan antara ideologi, kognisi, masyarakat dan diskursus sebagaimana dikemukakan oleh van Dijk, bahwa dalam masyarakat, interaksi sosial berlangsung dalam suatu struktur sosial dan interaksi tersebut disajikan dalam bentuk diskursus yang kemudian disusun menurut sistem kognitif atau memori baik jangka panjang maupun pendek. Sistem memori jangka pendek merupakan proses strategis dimana terjadi proses dekoding atau interpretasi. Sedangkan untuk jangka panjang berfungsi sebagai wadah pengetahuan sosial budaya. Sikap kelompok sosial juga termasuk dalam memori jangka panjang dan sikap kelompok sosial tersebut menunjukkan suatu ideologi.

Proses penyusunan isi media merupakan proses produksi dimana isi media merupakan suatu diskursus yang terbentuk melalui proses *encoding* sebagai kegiatan perumusan struktur makna. Struktur makna tersebut dibentuk berdasarkan kerangka kerja pengetahuan yang dihasilkan oleh berbagai hubungan antar unsur produksi dan infra struktur teknik. Dengan demikian dalam sirkulasi produksi, posisi atau moment awal pembentukan pengetahuan melalui media massa dalam satu siklus sosial budaya

merupakan tahapan *encoding* (bandingkan Hall b, 1986:129).

Dalam proses *encoding* tersebut, media massa merupakan saluran representasi pengalaman-pengalaman sehingga secara sosial membentuk pengetahuan tertentu. Pengalaman yang dimaksud ialah tidak saja dalam pengertian perilaku tetapi juga dalam bentuk data, kognisi, perasaan dan harapan. Pengalaman hadir dalam diri kita tidak saja dalam bentuk verbal tetapi juga dalam bentuk imaji dan impresi (Brunner, 1986:4-5). Dalam kaitan penelitian ini, pengalaman-pengalaman yang dimaksud ialah data, kognisi, perasaan dan harapan yang tercermin dalam media massa sebagai sebagai hasil konstruksi para wartawan dan redaktur media. Representasi pengalaman dalam media tersebut tersusun sebagai pengetahuan yang terakumulasi dalam suatu struktur diskursus yang dilandasi oleh ideologi yang berkembang dalam media.

Melalui suatu diskursus ideologi direproduksi, artinya ideologi tersebut di langgengkan, diusahakan agar diingat terus dan dipertahankan oleh anggota kelompoknya. Dalam pengertian aktif, ideologi tidak sekedar diterapkan, diimplementasikan atau digunakan secara pasif, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan oleh aktor-aktor sosial ideologi dilembagakan atau dilembagakan ulang dengan melakukan berbagai perubahan nyata sesuai dengan konteksnya. Pengembangan gradual dari suatu ideologi suatu kelompok dilandasi oleh praktek-praktek sosial yang terjadi. Artinya ideologi dikonstruksi dan diproduksi atau direproduksi oleh praktek-praktek sosial.

Diskursus atau reproduksi suatu ideologi, bisa terjadi dalam beberapa dimensi

(Van Dijk, 1998) yaitu pertama, dimensi sistem--kegiatan atau tindakan (*system-action*). Reproduksi dalam dimensi ini terjadi secara *top-down* berupa penggunaan dan penerapan dari hal-hal yang umum yaitu kepercayaan ideologi yang abstrak kepada praktek sosial sehari-hari. Kedua, dimensi tindakan--sistem (*action-system*), dalam dimensi ini reproduksi terjadi dari bawah, yaitu dari praktek-praktek sosial sehari-hari kemudian dipelihara, diteruskan, diubah secara sosial dalam suatu sistem sosial. Ketiga, dimensi kelompok--anggota, artinya dalam dimensi ini ideologi dikomunikasikan, dipertimbangkan, diajarkan, disosialisasikan dan ditiru oleh anggota kelompok. Keempat, dimensi anggota--kelompok, yaitu reproduksi berupa penerimaan, keikutsertaan atau penolakan, perlawanan, pelarian seseorang atau beberapa anggota kelompok, melawan ideologi kelompok. Lima, dimensi lokal--global, yaitu suatu generalisasi, pengembangan, menyusun konteks kembali dari suatu pengalaman dan pendapat untuk konteks yang abstrak dan sama. Media massa sebagai saluran reproduksi ideologi dapat memainkan peranan reproduksi untuk seluruh dimensi.

Reproduksi ideologi terjadi melalui proses pengungkapan yang disebut sebagai produksi diskursus dan dari pandangan psikologis terdapat tiga modul, yaitu pragmatik, semantik dan formulasi. Modul pragmatik, ialah terjadi pada saat penyeleksian informasi yang relevan untuk situasi sosial, sesuai dengan konteksnya. Modul pragmatik ini kemudian menjadi bahan bagi modul semantik dan formulasi. Modul semantik, menyediakan informasi yang diperlukan dalam pembentukan makna

diskursus, yang mungkin saja digambarkan secara virtual. Hasil dari modul pragmatik dan semantik tersebut kemudian diungkapkan secara nyata dalam bahasa yang digunakan dengan aturan-aturan diskursus, tata bahasa (*grammar*) dan kosa kata tertentu.

Ideologi kemungkinan mengemuka dengan beberapa cara, antara lain melalui ekspresi langsung, ekspresi langsung yang segera dan mudah (*instans*), ekspresi langsung melalui sikap yang bernilai ideologis, pernyataan yang sesuai dengan model peristiwa, dan ekspresi yang sesuai dengan model konteks .

2. Kekuasaan

Konsep kekuasaan sering diartikan dalam pandangan negatif ditujukan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan suatu obyek atau pihak yang memiliki kewenangan mutlak (absolut) dalam suatu jaringan pengambilan keputusan. Dalam konteks penyelenggaraan negara, kekuasaan sering ditujukan kepada rejim yang menyelenggarakan pemerintahan dengan sebutan penguasa. Dari pengertian umum ini yang tercemin bahwa dalam konsep kekuasaan terkandung adanya dua posisi yang berkaitan (relasional) dimana satu posisi memiliki kemampuan lebih dari yang lain, namun sebenarnya kemampuan lebih tersebut tidak selalu diartikan negatif.

Giddens (1986: 88-92), mengartikan kekuasaan sebagai konsep relasional, dan menempatkannya sebagai bagian dalam proses strukturasi. Kekuasaan merupakan kemampuan suatu agen untuk melakukan perubahan (*transformatif capacity*), atau

menunjukkan suatu kapasitas aktor untuk mencapai suatu tujuan atau memperoleh hasil yang ditetapkan. Peranan agen tersebut berada pada suatu struktur, sehingga kekuasaan selain dipahami sebagai kapasitas suatu agen juga sebagai pemusatan kekuasaan dalam struktur. Konsep kekuasaan baik sebagai kapasitas agen maupun sebagai dominasi tergantung pada penggunaan sumberdaya yaitu media dimana kapasitas agen dalam melakukan perubahan dan digunakan sebagai kekuasaan dalam kegiatan rutin interaksi sosial. Dengan demikian kekuasaan sebagai konsep relasional hanya beroperasi melalui penggunaan kapasitas untuk melakukan perubahan (*trasformatif capacity*) yang dikembangkan oleh struktur dominasi.

Ukuran Giddens tentang kekuasaan ialah apabila memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan, dan kekuasaan dimiliki oleh agen yang berada dalam struktur. Artinya Giddens tidak memposisikan agen yang berlawanan dengan struktur. Berbeda dengan Giddens, Foucault merumuskan kekuasaan bukanlah merupakan suatu lembaga atau struktur atau semacam daya yang terdapat pada beberapa orang. Kekuasaan merupakan sebuah praktek (*a practice*), sehingga suatu kekuasaan merupakan hubungan tertentu yang mapan dan terorganisasi di antara sejumlah elemen, termasuk lembaga, pengaturan dan hubungan sosial (Foucault dalam Foss dkk, 1985: 204). Namun demikian baik Foucault dan Giddens melihat kekuasaan sebagai konsep hubungan antar posisi, dan kapasitas untuk melakukan perubahan dalam konteks proses strukturasi sebagai nilai lebih yang dimiliki oleh satu posisi.

Konsep netral tentang kekuasaan dikemukakan oleh Foucault, dengan

memposisikan kekuasaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pengetahuan, sebagai dua sisi dari satu proses. Seseorang yang memperoleh kekuasaan ia mendapatkan pengetahuan. Selain itu kekuasaan dipahami dalam tiga pengertian, pertama sebagai hubungan kekuatan yang imanen dalam bidang di mana hubungan kekuatan itu berlaku. Kekuasaan yang dimaksud ialah unsur-unsur pembentuknya dan juga merupakan organisasinya itu sendiri. Kedua, merupakan permainan dengan jalan pertarungan dan perjuangan tanpa henti mengubah, memperkuat, memutarbalikannya. Ketiga, berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian sistem atau sebaliknya, kesenjangan, dan kontradiksi yang saling mengucilkan. Keempat, strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan berdampak dan kristalisasinya terwujud dalam perangkat negara, perumusan hukum dan hegemoni sosial (Foucault: 1997: 114).

Dengan demikian kekuasaan merupakan perangkat hubungan yang diproduksi dalam semua keterkaitan, artinya dalam setiap kehadiran kekuasaan, terdapat tipe hubungan, misal antara pria dan wanita dalam satu keluarga, antara guru dan murid, antara yang memiliki pengetahuan dengan yang tidak memiliki. Artinya kekuasaan dipahami sebagai hubungan diantara dua posisi dimana salah satunya memiliki makna lebih.

Hubungan-hubungan kekuasaan (*power relations*) tersebut berada dalam proses pembentukan pengetahuan dan pengetahuan tersebut terakumulasi melalui diskursus. Artinya antara kekuasaan dengan pengetahuan, antara pengetahuan dengan

diskursus, dan antara kekuasaan dengan diskursus berkaitan erat

3. Diskursus Kerusuhan Sosial

Peristiwa kerusuhan sosial disadari atau tidak oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa kerusuhan merupakan ekspresi dari adanya konflik diantara pihak-pihak yang terlibat. Kerusuhan sosial yang dilandasi konflik yang secara sadar atau tidak merupakan ekspresi dari perbedaan kepentingan yang melampaui batas kesadaran dan muncul dalam tindakan kekerasan. Kerusuhan sosial juga bisa terjadi karena adanya konflik, dimana timbulnya merupakan ekspresi dari individu yang secara psikologis tidak disadarinya. Teori konflik sosial menjelaskan bahwa, terjadinya konflik sosial karena ada perbedaan yang terjadi secara sistematis diantara kelompok yang berbeda kekuasaan yang dinikmatinya dari pada yang lain (Wallace, 1980: 122). Kerusuhan sosial juga mungkin terjadi dengan sadar sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik menurut perspektif pihak-pihak yang berkepentingan sehingga kerusuhan sosial menjadi arena pertarungan kekuasaan, melalui imaji yang dicerminkan dalam diskursus kerusuhan sosial yang terjadi.

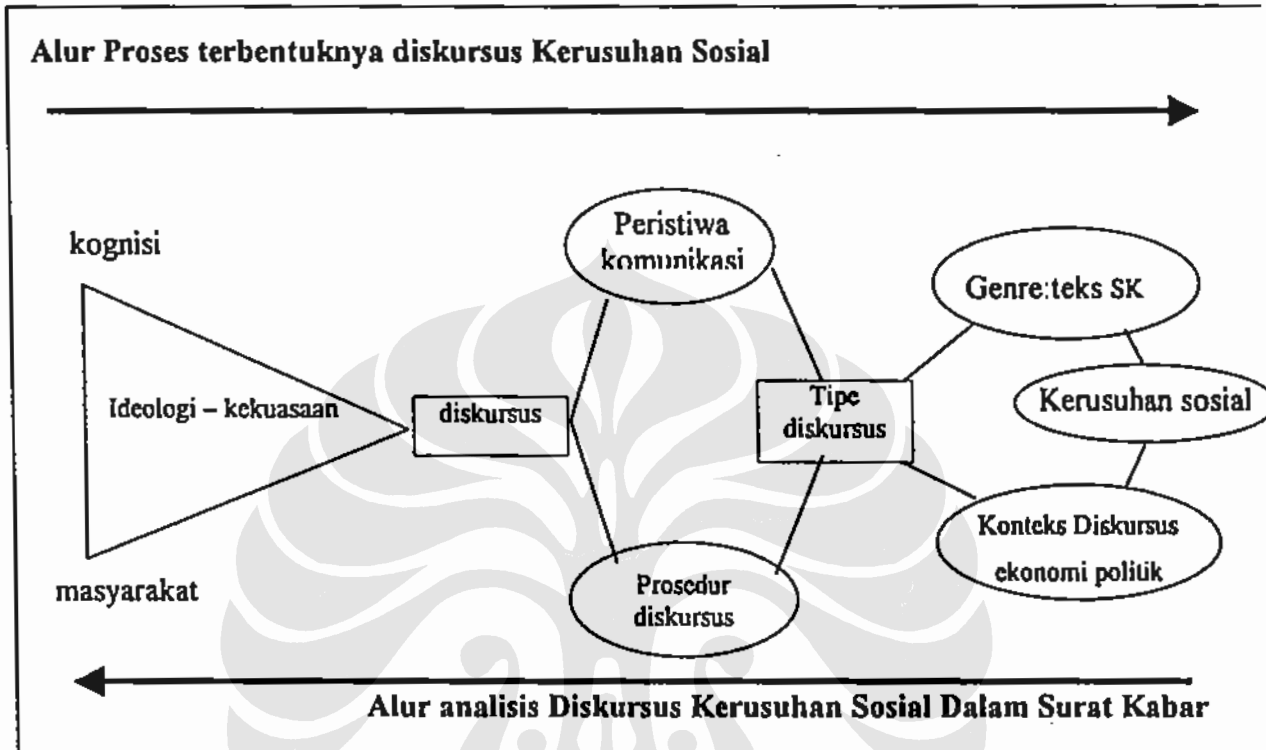
Giddens (1986: 145), merumuskan konflik sebagai perwujudan perebutan kepentingan untuk tujuan memperoleh satu kekuatan yang dominan. Konflik berbeda dengan kontradiksi yang merupakan perbedaan prinsip-prinsip sosial atau kepentingan dari suatu organisasi. Sedangkan konflik merupakan pertarungan antara aktor atau kelompok yang diungkapkan dalam praktek sosial. Dalam proses strukturasi, struktur dominan dibentuk dengan mengembangkan kontradiksi menjadi

konflik, sehingga tumbuhnya dominasi merupakan konsekwensi dari hubungan antara kontradiksi dan konflik dimana keterkaitan antara keduanya dimediasi melalui hubungan kekuasaan (Giddens, 1986: 145). Dengan demikian selama terbatas pada perbedaan kepentingan tidak dapat dikatakan terjadi konflik, tetapi kalau sudah terjadi perebutan kepentingan maka terjadi konflik. Dalam hubungan kekuasaan, berkembang kelompok yang mendominasi dan kelompok yang didominasi, dan hal ini dilakukan dengan mengembangkan perbedaan kepentingan (kontradiksi) menjadi konflik (Giddens, 1986: 131).

Kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa tempat diliput media massa dan kemudian menjadi diskursus media. Konflik nyata dalam masyarakat dalam diskursus media kemungkinan diperluas atau mungkin dipersempit dalam pertarungan kepentingan antar partisipan.

Gambaran proses diskursus kerusuhan sosial dengan menggunakan konsep dan kerangka berfikir tentang kritikal diskursus sebagaimana dikemukakan oleh Fairclough dan dihubungkan dengan konsep dan kerangka teoritis mengenai kekuasaan menurut Foucault dan ideologi menurut van Dijk dan Dant dirangkum dalam bagan 1 di halaman berikut:

Gambar 1
Proses Diskursus Isu Kerusuhan Sosial Melalui Berita Surat Kabar



Dalam bagan di atas ideologi dilihat dari tiga sudut pandang yang saling berkaitan yaitu dari sebagai hasil proses kognitif, yaitu bahwa ideologi merupakan proses pengalaman dan pemikiran dari perorangan yang melahirkan kepercayaan. Sudut pandang kedua ialah dalam konteks kemasyarakatan, dimana ideologi merupakan bagian dari fenomena kemasyarakatan yang didalamnya terjadi pergulatan kelompok dengan berbagai kepentingan, konflik dan pertarungan. Mungkin ideologi digunakan dalam rangka melegitimasi atau menentang suatu kekuasaan atau kekuatan dominan. Sudut pandang ketiga, ideologi berkembang dalam kelompok sosial dan relasi sosial dan institusi sosial. Bagaimana ideologi tersebut berkembang dalam arti

diproduksi, direproduksi dan diseminasi dilakukan melalui diskursus. Ideologi tersebut merupakan basis dari pengetahuan dan pengetahuan yang terbentuk merupakan wujud kekuasaan. Dengan keterkaitan konsep tersebut maka ideologi yang diproduksi dan direproduksi melalui diskursus merupakan kerangka acuan (frame work) pembentukan pengetahuan yang sekaligus mengembangkan hubungan kekuasaan.²

Diskursus dalam konteks studi ini yaitu diskursus dalam media massa dimana menurut type diskursif³ dibedakan dalam *genre* dan konteks diskursus (*discourses*). Setiap analisis tipe diskursus diarahkan pada salah satu diantara dua pilihan yaitu peristiwa komunikatif (*communicative event*) dan prosedur diskursus (*discourse order*) atau memfokuskan kepada keduanya yang saling melengkapi (Fairclough, 1995: 56). Tipe diskursus yang digunakan meliputi *genre* utama adalah berita dalam surat kabar dan konteks diskursus (*discourses*) yang dipilih adalah ekonomi politik.

Mengenai prosedur diskursus, Foucault mengemukakan bahwa dalam keseluruhan kehidupan ini berisi pengaturan-pengaturan diskursus. Struktur dan

² Dant (1991:194) berpendapat bahwa nuara diskursus ialah pengetahuan dan pengetahuan tersebut dilandasi oleh ideology, sedangkan Foucault (dalam Fost dkk, 1985: 195) pengetahuan dilembagakan melalui praktek diskursif dan pengetahuan adalah kekuasaan.

³ Merupakan aplikasi dari konsep Fairclough (1995: 56), yang membedakan dua kategori utama tipe diskursus yang menjadi unsur pokok dari order diskursus meliputi *genre* dan konteks diskursus (*discourses*). Diskursus merupakan penggunaan bahasa yang merefleksikan praktek sosial yang berlaku dari sudut pandang tertentu sehingga konteks diskursus secara umum berkaitan dengan pengetahuan dan konstruksi pengetahuan. Misalnya praktek sosial politik dibedakan dalam penyajiannya dalam diskursus politik liberal, sosialis dan Marxis. *Genre*, merupakan penggunaan bahasa yang berkaitan dengan dan melembaga dalam praktek sosial, misalnya wawancara, iklan. Dalam kasus ini kontek diskursus dalam "pengetahuan" ekonomi politik yang merupakan bagian dari kajian Marxist tentang media (lainnya ialah strukturalisme, dan studi kultural) sebagaimana dikemukakan oleh Curran dkk dalam Gurevitch dkk (1982:23-27).

aturan-aturan diskursif tersebut tidak tumbuh dari faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya walaupun diakui bahwa faktor-faktor tersebut mungkin mempengaruhi diskursus tersebut, namun agaknya gambaran diskursus tersebut terbentuk dari mekanisme pembentukan sendiri. Analisis diskursus yang dilakukan tidak sepenuhnya mengemukakan struktur ungkapan atau pernyataan tetapi juga mengemukakan aturan-aturan yang mengarahkan struktur yang terjadi.

Dalam suatu diskursus bagi Foucault, apa yang diungkapkan mungkin merupakan hal nyata atau mungkin tidak, tetapi melalui struktur diskursif semuanya tampak sebagai suatu yang nyata. Lebih lanjut Frow (dalam Mills, 1997) mengemukakan bahwa struktur diskursif merupakan konstruksi realitas sosial yang membentuk suatu realitas sebagai kenyataan atau suatu simbol atau diantara keduanya. Menurut Berger (dalam Wuthnow dkk, 1985) bahwa gambaran tentang dunia bagi manusia merupakan makna yang dikonstruksi secara sosial, dikatakan demikian karena dunia tersebut berada dalam format sosial budaya dan sosial psikologis. Gambaran dunia yang dibentuk merupakan makna yang dikonstruksi dimana manusia memasukan makna yang diperlukan ke dalam realitas. Individu menambahkan makna subyektif ke dalam realitas. Dalam kaitan ini maka bagi Berger, setiap tindakan seseorang itu bertujuan, yaitu sadar tentang adanya sesuatu hal, dan diarahkan kepada sesuatu hal tertentu. Dengan pandangan tersebut, maka ungkapan yang ada dalam suatu diskursus akan tergantung pada proses pembentukan diskursus itu sendiri. Selanjutnya setiap partisipan dalam diskursus akan menerima

ungkapan partisipan lainnya melalui interpretasi menurut kerangka pengalaman dan pengetahuannya sebagai konstruksi sosial.

Boorstin (1971) dalam kaitan ini mengemukakan konsep *pseudo event*, yaitu suatu bentuk pembaruan sintetik yang dipenuhi oleh pengalaman. Apa yang diungkapkan Boorstin tersebut prinsipnya sama dengan prinsip konstruksi sosial, bahwa ketika realitas direpresentasikan, terdapat faktor lain yang menyebabkan realitas atau gambaran realitas tersebut tidak sama. Dalam kaitan ini Eldrige (1993:240) melihat bahwa suatu fiksi bisa berubah menjadi fakta, ilusi akan membentuk pengalaman dan kemudian pengalaman akan dibentuk menjadi realitas. Artinya suatu representasi realitas belum tentu merupakan realitas yang sebenarnya. Hubungan antara keduanya menurut Baudrillard (dalam Eldridge 1993: 344) kemungkinan terjadi dalam tiga kerangka hubungan, pertama penampilan merupakan representasi dari realitas dasarnya; kedua merupakan topeng dari suatu realitas dasar yang representasinya berbeda atau merupakan pembalikan dari apa yang dimaksud, dan ketiga merupakan topeng yang menutupi realitas yang memang benar tidak ada, atau merupakan manipulasi.

Dengan demikian apa yang diungkapkan dalam diskursus, bisa merupakan kenyataan atau bisa juga merupakan fikiran, atau merupakan ilusi yang keseluruhannya merupakan pengetahuan yang dipertukarkan yang kemudian dikembangkan menjadi pengetahuan dimana didalamnya terdapat kekuasaan dan ideologi.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian pengertian di muka, diskursus mengenai suatu hal bisa terjadi dalam suatu percakapan dan bisa terjadi dalam tulisan atau rekaman. Media massa merupakan salah satu wadah diskursus yang dianggap memiliki kekuatan sehingga menjadi perhatian studi-studi kritikal dalam berbagai disiplin termasuk studi diskursus. Pandangan bahwa media mempunyai kekuatan yang menentukan dikemukakan oleh Innis dan McLuhan (dalam Littlejohn, 1996: 326) dimana Innis mengemukakan bahwa media merupakan kepanjangan pikiran manusia dan percaya bahwa kepentingan utama yang terjadi pada setiap periode sejarah merupakan bentuk bias yang dihasilkan penggunaan media yang dominan. Sedangkan McLuhan, lebih jauh lagi melihatnya dari struktur media, dan ia mengemukakan bahwa setiap medium merupakan kepanjangan dari pembawaan atau kecakapan manusia.

Dengan perspektif diskursus kritikal analisis media dilakukan berdasarkan asumsi bahwa media menyajikan isinya dengan suatu struktur tertentu, diarahkan oleh aturan-aturan tertentu yang bersifat khusus sebagai praktek-praktek diskursif sehingga melahirkan suatu pengetahuan tertentu. Pengetahuan akan mungkin tampak dalam dunia kita, karena adanya struktur, sistem yang mengatur suatu kondisi atau suatu peristiwa. Pengetahuan sebagai suatu konstruk dari hubungan antara entitas abstrak yang dibuat untuk menyajikan kembali pengalaman manusia sehingga dapat disebarkan oleh manusia melalui komunikasi, dan yang dapat digunakan untuk memahami pengalaman tersebut kemudian membimbing kegiatan mereka (Dant,

1991: 5).

Pengetahuan merupakan suatu kontrak terbentuk pada setiap orang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tataran bawah seperti pengetahuan sehari-hari sampai pada pengetahuan yang khusus atau spesialis sebagai pengetahuan dalam tataran tinggi. Kategori pengetahuan dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh struktur kehidupan mereka dan kualitasnya akan tergantung pada konteks waktu dan sosial. Dengan demikian kebenaran suatu pengetahuan ditentukan oleh konteks tadi dan kebenaran menurut perspektif ini bukanlah kebenaran secara umum atau menyeluruh, dan faktor yang menentukan suatu kualitas pengetahuan dalam suatu struktur sosial disebut ideologi.

Dalam diskursus kerusuhan sosial, setiap partisipan berusaha membangun struktur dominasi dengan mengembangkan kontradiksi yang terjadi agar bisa berubah menjadi konflik. Unsur pokok dari diskursus kerusuhan sosial adalah adanya pihak-pihak (paling sedikit dua pihak) yang tidak saja berbeda kepentingan tetapi sedang bertarung memperoleh kekuasaan. Surat kabar sebagai media diskursus akan melakukan peran apakah mengembangkan kontradiksi untuk menjadi konflik atau tetap sebagai kontradiksi. Kerusuhan sosial sebagai wujud konflik fisik direpresentasikan dalam media sebagai suatu diskursus.

Dalam diskursus media terjadi konstruksi imaji untuk memenangkan pertarungan kekuasaan. Permasalahannya ialah bagaimana proses dan prosedur kerusuhan sosial tersebut direpresentasikan melalui surat kabar. Hal ini akan terkait

pada fenomena media sebagai wahana diskursus dan diskursus mengenai kerusuhan sosial dalam berita-berita media massa mempunyai dimensi yang kompleks, karena media memiliki bermacam aturan, baik yang bersumber dari dalam media maupun luar media.

Aturan-aturan yang mengarahkan diskursus menurut Foucault (dalam Foss dkk, 1985: 204) terdiri dari tiga kategori. Pertama, aturan yang mengendalikan tentang apa yang dapat dikatakan atau tidak. Termasuk dalam kategori ini ialah aturan tentang larangan untuk membicarakan suatu hal, fungsi lembaga-lembaga yang menciptakan objek suatu diskursus dimana antar satu lembaga dengan lembaga lainnya akan memberikan perbedaan dalam memberikan nama suatu obyek diskursus. Aturan kategori kedua, ialah aturan mengenai siapa yang mengadakan pembicaraan. Aturan ini mengarahkan agar pembicaraan memberikan kepuasan terhadap orang lain. Beberapa kondisi yang dikemukakan ialah mengenai legalitas pembicara, kompetensi serta diskursus yang ditampilkan apakah merupakan hal yang original atau asli. Aturan kategori ketiga, ialah berkaitan dengan bentuk dalam menggunakan konsep dan teori yang diasumsikan diterima sebagai pengetahuan dalam bentuk diskursus. Beberapa aturan dalam kelompok ini ialah, mengenai urutan pernyataan, aturan yang membuat pernyataan menjadi valid. Termasuk dalam aturan ini ialah aturan yang mengarahkan proses dalam menghasilkan pengetahuan yang melibatkan individu-individu dalam penyusunan konsep dan teori tersebut.

Dalam media massa ketiga kategori aturan tersebut, tercermin dalam aturan-

aturan formal dan informal yang berkaitan dengan media. Keseluruhannya merupakan *regime of truth*⁴ media diskursus. Aturan diskursus media dalam kaitannya ini bisa bersumber dari negara dan pasar media massa selama ini. Di Indonesia aturan dari unsur negara, yaitu setiap peraturan penting seperti Undang-undang tentang Pers, Peraturan Menteri, Kode Etik dan berbagai pedoman serta petunjuk lainnya. Aturan informal berupa keharusan dan pelarangan melalui berbagai bentuk kontak antara pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan. Kategori aturan kedua, berkaitan dengan pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam lembaga media massa. Kompetisi antar komunikator dan juga ideologi komunikator dalam mempertimbangkan dan menyampaikan isu tersebut. Komunikator dalam hal ini ialah para redaktur dan wartawan serta para aktor yang mengungkapkan berbagai gagasan yang terkait baik dalam berita maupun dalam artikel, pojok, karikatur, surat pembaca dan lain-lain. Ketiga berkaitan dengan keahlian dalam menyusun atau memberikan kemasan dalam media massa, secara menyeluruh berkaitan dengan susunan atau agenda media dan proses yang dilakukan dalam penyusunan agenda dan berbagai aturan yang mempengaruhi proses produksi untuk merepresentasikan sesuatu hal dari suatu sumber. Dalam terminologi Laswell (1951), ketiga kategori pengaturan tersebut berkaitan dengan sumber, isi dan saluran (*who-says what- in which channel*).

Melihat ketiga kategori aturan yang dikemukakan oleh Foucault, di antara

⁴ Menurut Foucault (1977:133) truth diartikan sebagai system tingkatan prosedur dalam produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi dan bekerjanya suatu pernyataan. *Regime of truth* merupakan sistem kekuasaan yang memproduksi dan mereproduksi kebenaran dan untuk mempengaruhi kekuasaan yang membujuk dan yang memperluasnya.

media massa, kemungkinan suatu peristiwa yang sama disajikan dengan struktur dan isi berbeda satu sama lain. Apa yang disajikan oleh media merupakan representasi suatu realitas yang ditangkap oleh jurnalis melalui suatu proses, atau rekaman pengalaman-pengalaman yang dikirimkan oleh para penulis kolom atau artikel atau pembaca umumnya, yang kemudian berinteraksi dengan pengalaman para redaktur dalam proses representasi yaitu seleksi dan editing serta produksi. Apa yang ditangkap oleh jurnalis atau diolah oleh redaktur tersebut merupakan suatu kompleks berbagai entitas pengalaman yang saling berinteraksi, dan kemudian dinyatakan atau diungkapkan dalam berbagai bentuk tulisan sebagai suatu diskursus.

Diskursus melalui media merupakan hasil dari praktek diskursif yang terjadi baik secara sadar maupun tidak selama proses pengungkapan atau proses produksi media. Sebagai suatu industri eksistensi media massa dipengaruhi oleh keterkaitan antara masalah pendanaan dan pengorganisasian media tersebut dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diskursus yang ada pada publik. Dengan berlandaskan teori *agenda setting* maka diskursus media mengenai suatu isu akan berkorelasi dengan diskursus yang terjadi di lingkungan publik (*public discourses*). Arah diskursus yang ada di dalam media dan diskursus publik saling menentukan. Namun demikian karena kekuatan media terletak pada kemampuannya dalam membentuk isi media, maka yang penting ialah bagaimana arah dan artikulasi diskursus yang ada pada media.

Struktur diskursus meliputi struktur yang dapat diamati dan struktur abstrak

(van Dijk, 1998). Struktur yang teramati-- dalam *generative grammar* disebut *surface structure* dan dalam studi kritikal disebut struktur material -- pada media cetak akan terlihat dari aspek grafika, morfologi, sintaksis. Sedangkan struktur abstrak yaitu aspek semantik dari ekspresi suatu diskursus. Namun demikian dalam kenyataannya pernyataan atau ungkapan dalam struktur luar tersebut oleh *reader* dipandang mempunyai struktur abstrak dilihat dari sisi bahasa si pengguna, artinya ada makna di balik makna struktur yang teramati tadi. Struktur isi media atau diskursus yang terjadi akan merepresentasikan ideologi yang ada dalam struktur sosial, dan sesuai dengan ideologi yang hidup, mereka membuat aturan-aturan yang mengarahkan pada suatu struktur diskursus tertentu.

Makna suatu diskursus yang terdapat pada struktur permukaan yang teramati atau *surface structure* yang paling banyak bukanlah karena sifat abstrak dari suatu kata atau suatu ekspresi tetapi lebih merupakan penafsiran menurut bahasa si pengguna. Artinya bahwa makna dari suatu diskursus tergantung pada konteks dan situasinya dari partisipan diskursus dan hal ini berarti pula dalam suatu diskursus terdapat beraneka ragam kosa kata atau leksikal yang digunakan.

Di luar aspek semantik kosa kata, studi diskursus memiliki aspek lainnya yang relevan dalam membuat pemetaan ideologi dalam suatu teks atau pembicaraan. Pertama dilihat dari proposisi, dimana proposisi yang menyajikan makna kalimat atau anak kalimat. Proposisi tersebut memiliki struktur internal yang mempunyai pola semantik yang beranekaragam yang mungkin menunjukkan cara-cara partisipan

dihubungkan atau diasosiasikan dengan suatu peristiwa secara aktif atau pasif, responsif atau yang bertindak untuk mencoba suatu peristiwa atau aktivitas. Dengan kata lain struktur semantik menghasilkan bentuk model struktur yang menunjukkan arah bagaimana suatu peristiwa dievaluasi dan dikendalikan yang mungkin saja dikendalikan secara ideologis dan ini tergantung pada anggota kelompok atau perspektif atau posisi pembicaraan dari partisipan.

Makna yang terdapat dalam suatu diskursus tidaklah terbatas dalam batas-batas bahasa atau ditinjau dari tradisi realisme tatabahasa. Analisis diskursus telah dikembangkan untuk menggambarkan struktur dan strategi diluar batas-batas kalimat. Analisis aspek semantik khususnya sangat baik untuk menggambarkan makna tekstual yang kompleks. Sekuen kalimat menunjukkan suatu diskursus manakala didalamnya terdapat sejumlah kondisi yang koheren, yang meliputi hubungan antar fakta yang dikemukakan dalam kalimat dan hubungan fungsional antar proposisi. Koherensi tersebut dilandasi oleh interpretasi terhadap peristiwa menurut model mental bahasa pengguna. Hal ini berarti juga dipengaruhi secara ideologis. Koherensi juga dilihat dari tataran global, artinya dalam pengungkapan topik tertentu juga menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara dan apa yang dipikirkan oleh penerima. Bentuk diskursus global diorganisasi oleh sejumlah kategori konvensional, seperti introduksi, kesimpulan, pembukaan dan penutup, masalah dan solusi. Setiap bentuk diskursus apakah dalam cerita, berita, konferensi, rapat dan *genres* lainnya diorganisasi oleh skema yang memiliki batasan-batasan

dalam pengaturan dan hirarki posisi setiap kategori

Terkait pada model mental tadi sebagai cirinya ialah adanya hubungan yang proporsional dengan aspek lain, suatu ungkapan mempunyai implikasi, kedalaman dan maksud yang tersembunyi. Informasi yang disampaikan secara eksplisit mungkin menekankan sifat negatif bagi sasaran diluar kelompoknya tetapi menunjukkan sifat positif bagi kelompoknya sendiri. Artinya dalam suatu diskursus apa yang secara eksplisit dinyatakan mempunyai makna lain secara implisit.

Diskursus dalam surat kabar disajikan dalam beberapa jenis, yaitu berita, tajuk rencana, pojok, artikel atau feature yang keseluruhannya untuk bisa tersaji dalam surat kabar melalui proses seleksi. Keseluruhan jenis tulisan tersebut merupakan teks yang merepresentasikan keadaan dunia dalam bentuk bahasa dari sudut ideologi tertentu. Bahasa bukanlah jendela yang jernih tetapi merupakan medium yang terefraksi dan terstruktur (Fowler, 1997:11)

Berita merupakan laporan mengenai peristiwa dan pendapat. Tajuk rencana, pojok, atau karikatur merupakan wahana penyampaian pendapat dari redaksi yang berkaitan dengan peristiwa dan pendapat yang dilaporkan dalam berita. Demikian juga artikel merupakan wahana menyalurkan pendapat baik dari lingkungan media maupun di luar. Dalam isi keseluruhan surat kabar tersebut, siapapun dan darimana pun pendapat atau peristiwa yang dimuat, merupakan hasil seleksi sebagai representasi pendapat atau peristiwa yang terjadi atau berkembang. Realitas yang disajikan dalam surat kabar, merupakan hasil konstruksi sosial tersebut dilandasi oleh

ideologi tertentu.

Dalam penelitian ini sebagai *genre* utama yang akan diteliti ialah berita, atau berita sebagai *genre* diskursus yang mereproduksi ideologi. Ketiga modul proses diskursus sebagaimana dikemukakan di atas yaitu pragmatik, semantik dan formulasi prosesnya tercermin dalam pembuatan berita dimana menurut Grabber (1989: 76-77), kemungkinan terjadi dalam empat model, yaitu model cermin, profesional, keorganisasian dan politik. Model cermin, menggambarkan bahwa orang-orang pemberitaan mengamati dunia di sekitarnya dan melaporkan apa yang dilihat dan didengarnya secara akurat dan seobyektif mungkin. Model profesional, memandang pembuat berita sebagai kelompok yang memiliki kemampuan profesional tinggi yang secara bersama-sama menempatkan peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian mereka dipilih untuk memenuhi kepentingan dan daya tarik khalayak media. Model keorganisaian merupakan model pembuatan berita yang didasarkan pada teori keorganisasian, dimana seleksi berita dilandasi oleh desakan yang melekat pada proses dan tujuan organisasi, antara lain hubungan antar pribadi, norma organisasi, proses dan prosedur teknis, kemudian pertimbangan biaya dan keuntungan. Model politik, berangkat dari asumsi bahwa berita dimanapun merupakan produk dari kemencengan ideologi dari pribadi-pribadi orang pemberitaan sejalan dengan tekanan lingkungan politik dimana organisasi media itu beroperasi.

Model cermin, dalam prakteknya tidak mungkin ada sebab banyak kejadian penting terjadi tidak mungkin dicerminkan oleh para jurnalis melalui pemberitannya.

Selain itu dalam menangkap dan menyajikan realitas yang ada di lingkungan jurnalis, mereka tidak mungkin melepaskan sama sekali sudut pandang yang dimiliki oleh jurnalis tersebut. Dari keseluruhan model, Grabber mengemukakan bahwa tidak satu pun model yang berdiri sendiri dalam membuat berita. Keseluruhan model tersebut kemungkinan digunakan secara simultan hanya kadarnya saja yang berbeda. Selain ke empat model tadi kemungkinan ada model lain, yaitu model persekongkolan (*conspiracy model*), dimana orang pemberitaan bersama-sama dengan sumber berita menentukan bahan berita mana yang dipilih untuk menjadi berita dengan maksud-maksud tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam menangkap dan menyajikan realitas, jurnalis secara sadar atau tidak mempertimbangkan nilai berita bagi khalayak dan nilai berita tersebut bagi jurnalis sangat bervariasi tergantung pada kesepakatan yang ada diantara jurnaslis, antara lain apakah berita yang ditulis merupakan sesuatu yang berlaku umum bagi masyarakat, sesuai dengan kesepakatan diantara jurnalis, karakteristik penerbitan antara lain frekuensi dan jadwal penerbitan. Nilai berita yang diterima secara luas menurut Galtung dan Ruge (dalam Flower, 1996: 13) meliputi, kecocokan dengan frekuensi penerbitan, tempat yang tersedia, memberikan kepastian, memiliki makna yang berarti, ada konsonansi, sesuatu yang tidak diharapkan, berkesinambungan, komposisi, rujukan untuk elit nasional, rujukan untuk elit masyarakat, rujukan perorangan, rujukan sesuatu yang negatif. Nilai-nilai tersebut bagi setiap media massa merupakan salah satu aturan diskursus, sebagai bahan dalam perolehan,

menempatkan bahan berita dari berbagai sumber. Nilai mana yang akan diterapkan tergantung pada kecenderungan ideologi jurnalis. Sebagaimana dikemukakan oleh Berger, maka jurnalis tersebut memasukan pengalamannya kedalam sajian realitas dalam berita tersebut atau juga Boorstin, realitas yang disajikan dalam berita merupakan peristiwa-peristiwa semu. Apapun yang tampak dalam media massa, apakah merupakan representasi suatu realitas dasar, atau merupakan topeng yang menyajikan realitas semu, atau sama sekali yang merupakan ilusi, kepada khalayak akan tampak sebagai realitas sebagaimana dikemukakan oleh Eldrige bahwa fiksi akan menjadi fakta dan ilusi akan membentuk pengalaman dan memprosesnya untuk didefinisikan sebagai realitas. Dengan demikian representasi media mengenai suatu peristiwa akan diterima sebagai realitas dan khalayak akan menghubungkan dengan harapan atau ilusinya kemudian ia menempatkan realitas yang ditangkap tersebut pada kerangka harapan atau ilusinya. Jadi realitas yang ditangkap sangat tergantung pada perspektif atau konteks atau dengan zona relevansi bagi khalayaknya.

Struktur diskursus yang meliputi struktur permukaan yang dapat diamati dan struktur abstrak atau yang tidak teramati, baik yang tampak maupun abstrak akan terbentuk berdasarkan praktek-praktek diskursus (Fairclough, 1995:58). Pengertian praktek diskursus dalam media ialah proses produksi dan konsumsi teks atau isi media. Proses produksi yang dimaksud ialah keseluruhan tindakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku baik yang ditetapkan secara formal maupun tindakan-tindakan yang terbiasa dan berlangsung terus menerus dalam proses penyusunan isi

media. Secara singkat dapat dikatakan bahwa praktek diskursus media, merupakan kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam pengendalian isi media. Praktek diskursus dan aturan diskursus dilandasi oleh praktek sosial budaya

Praktek sosial budaya⁵ yang melandasi praktek diskursus dalam studi ini akan dilihat dalam konteks pertumbuhan industri dan lingkungan politik media. Kedua konteks tersebut berkaitan dengan ekonomi politik media yang melihat bahwa dalam praktek diskursus media terdapat saling keterkaitan antara dimensi ekonomi dan dimensi simbolik (Golding dan Murdock, 1992:15-18).

D. Praktek Ekonomi Politik dan Praktek Diskursus.

Isi surat kabar merupakan teks hasil suatu proses produksi yang tidak hanya ditentukan unsur pembentuk atau komponen isi surat kabar sendiri yang steril, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang ada disekitarnya. Teks dalam surat kabar memiliki kekuatan yang tidak terpisahkan atau tidak berada diluar hubungan-hubungan sosial yang dilaporkan tetapi merupakan bagian dari kekuatan sosial itu sendiri. Proses produksi dan konsumsi teks mengenai kerusuhan sosial menjadi penghubung antara praktek ekonomi politik di dalam dan di sekitar kerusuhan sosial itu terjadi dengan teks kerusuhan sosial. Artinya diskursus kerusuhan sosial dalam teks surat kabar merupakan pencerminan praktek ekonomi

⁵ Menurut Fairclough (1995: 62), banyak aspek sosial budaya yang bisa digunakan dalam analisis diskursus kritis, dan dalam garis besar terdiri dari ekonomi, politik dan budaya. Dalam konteks diskursus kerusuhan sosial di Indonesia, tinjauan dilakukan dari aspek ekonomi politik, dengan pertimbangan fenomena yang berkembang dalam media Indonesia yang menunjukkan banyak terkait pada permasalahan ekonomi politik.

politik yang berlaku pada saat produksi dan konsumsi teks berlangsung. Jika kerusuhan sosial merupakan wujud konflik nyata, maka diskursus kerusuhan sosial merupakan arena perebutan kekuasaan baik antar mereka yang terlibat dalam konflik nyata (kerusuhan sosial) maupun partisipan lain yang memiliki kepentingan untuk menggunakan diskursus kerusuhan sosial sebagai arena untuk memperjuangkan kekuasaan. Diskursus merupakan suatu arena pertarungan (*field of struggle*) untuk memperoleh kekuasaan, yaitu usaha-usaha untuk menempatkan satu posisi memiliki makna lebih dari lainnya.

Dalam praktek kehidupan masyarakat terdapat banyak arena atau *field* tempat manusia berusaha untuk merebut ruang (*space*) sehingga memiliki posisi yang dominan. Arena tersebut merupakan jaringan, atau konfigurasi mengenai hubungan obyektif antar posisi yang berbeda dan berupaya untuk memperoleh ruang sehingga memiliki nilai lebih dari lainnya. Posisi yang dimaksud ialah merupakan suatu eksistensi yang menentukan dalam okupasi, agensi atau institusi, melalui penampilan situasi potensial (*situs*) dalam struktur distribusi ruang kekuasaan (*kapital*) yang memiliki akses komando untuk mendapatkan keuntungan yang spesifik (Boudieu dalam Swartz, 1997 : 117). Oleh Swartz, *field* diartikan sebagai arena produksi, sirkulasi, penerimaan baik barang, jasa maupun pengetahuan atau status dalam komposisi kompetitif yang diselenggarakan oleh aktor guna memperoleh akumulasi dan monopoli berbagai jenis kapital. *Field* merupakan ruang yang terstruktur dan terorganisasi dari seluruh jenis kapital tertentu atau

kombinasi beberapa kapital (Swartz, 1997: 117-118).

Kapital menurut Bourdieu dimaksudkan sebagai semua jenis kekuasaan baik material, kultural, sosial, atau simbolik dari individu atau kelompok sebagai sumber daya untuk memelihara dan meningkatkan posisinya di dalam jenjang sosial. Sumberdaya tersebut akan menjadi kapital manakala berfungsi sebagai hubungan kekuasaan yang menjadi obyek pertarungan, sebagai sumberdaya yang bernilai (Bourdieu dalam Swartz, 1997: 73-74). Dengan demikian ada beberapa jenis kapital menurut Bourdieu, yaitu kapital material, kultural, sosial dan simbolik. Kapital material atau kapital ekonomi yaitu uang atau barang, kapital kultural yaitu barang-barang budaya dan jasa termasuk penghargaan akademis, kapital sosial yaitu berupa pengakuan dan jaringan, kapital simbolik yaitu legitimasi.

Bourdieu tampaknya mengkomoditisasi semua nilai apakah sosial, kultural dan politik, nilai itu menjadi kapital apabila diperebutkan. Sejalan dengan itu, Baudirillard (1981: 113) mentransmutasi semua nilai (buruh, pengetahuan, hubungan sosial, budaya dan alam) ke dalam nilai pertukaran ekonomi (*economic exchange value*). Segala hal diabstraksikan dan diresap kembali dalam "dunia pasar" dan dalam peranan penting tentang uang sebagai suatu nilai yang disepakati oleh umum. Proses yang terjadi baik berupa pembalikan atau pengurangan atau mengulangi produksi merupakan proses yang mendalam dari transmutasi nilai pertukaran ekonomi kepada nilai pertukaran tanda (*sign exchange value*). Sampai tahap ini bidang ekonomi politik diartikulasikan hanya melalui nilai pertukaran (*exchange value*) dan nilai guna (*use value*).

Dengan demikian dalam *field* terjadi pertukaran nilai untuk memperoleh nilai guna melalui pertukaran tanda. *Field* itu sendiri mempunyai ciri-ciri struktural, pertama sebagai arena untuk mengendalikan sumberdaya yang bernilai, dimana sumberdaya tersebut akan menjadi kapital manakala menjadi obyek pertarungan dan berfungsi sebagai hubungan sosial kekuasaan. Aktor juga bertarung dalam arena untuk memperoleh sumber daya, dimana dalam arena tersebut terjadi pertarungan memperoleh legitimasi. Kedua, *Field* merupakan ruang yang terstruktur yang terbagi antara pihak dalam posisi yang memegang dominasi dengan pihak dalam posisi subordinasi berdasarkan tipe dan jenis kapital yang dimiliki. Dalam kaitan ini masalah waktu dan posisi dalam *field* ditentukan oleh ketidak samaan distribusi kapital yang relevan. Ketiga, memberdayakan aktor dalam bentuk pertarungan yang spesifik.

Dalam kaitan ini baik pihak yang ada dalam posisi yang mendominasi maupun yang didominasi, antara *orthodoxy* dengan *heterodoxy* bersedia menerimanya bahwa *field* merupakan arena pencarian posisi yang dinilai baik. Struktur dalam (*deep structure*) pada *field* merupakan *doxa* untuk merepresentasikan hal yang tidak terungkap dan atau persetujuan yang mendasar diantara mereka yang menyarankan *heterodoxy* terhadap *orthodoxy*. Keempat, *field* terstruktur untuk tumbuh secara signifikan melalui mekanisme pengembangan internal sendiri sehingga memiliki derajat otonomi dari lingkungan eksternal (Swatz, 1997: 122-126).

Dalam masyarakat maju, menurut Bourdieu (dalam Swatz, 1997: 82),

kecenderungan perilaku dalam mendominasi beralih dari dengan cara-cara ancaman, tekanan fisik dan kekerasan beralih melalui bentuk manipulasi simbolik. Kekuasaan simbolik itu berkaitan dengan bagaimana semua sistem simbolik dikonseptualisasi. Sistem simbolik itu berubah secara simultan melalui tiga fungsi yang saling berkaitan yaitu fungsi : kognisi, komunikasi dan deferensiasi sosial. Dalam fungsi sebagai kognisi, sistem simbolik merupakan alat untuk memahami dunia sosial atau sebagai pengstrukturannya suatu struktur (*structuring structure*). Sebagai fungsi komunikasi, digunakan menjadi instrumen komunikasi dan instrumen pengetahuan yang merupakan integrasi strategik yang berguna untuk mengkondisikan logika moral. Fungsi ketiga, merupakan instrumen dominasi dimana sistem simbolik yang dominan menyediakan wahana integrasi untuk kelompok dominan, pembedaan dan hirarki kelompok. Legitimasi adanya jenjang sosial dilakukan dengan mendorong pihak yang didominasi untuk menerima hirarki dan perbedaan sosial.

Sistem simbolik yang dimaksud, ialah logika proses dan dimulai dengan bahasa dengan menekankan adanya perbedaan dan membedakan dalam bentuk oposisi biner. Semua sistem simbolik mengikuti logika pembedaan simbolik secara mendasar dengan pembagian dan pengelompokan item dalam kelas oposisi dan pembentukan makna melalui logika biner inklusi dan eksklusi. Dengan pengertian sistem simbolik tersebut maka, artikulasi kapital dalam teks kerusuhan sosial akan tercermin dalam oposisi biner hubungan kekuasaan yang direpresentasikan dalam

teks kerusuhan sosial.

Untuk memperoleh dominasi kekuasaan menurut Bourdieu, dilakukan melalui proses legitimasi, dan melalui proses ini kekuasaan menjadi berkembang dan langgeng. Menurut Marx, dalam memperoleh kekuasaan dan melakukan dominasi yang berperan ialah ideologi, yang menurut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yaitu sebagai kapasitas untuk memaksakan cara-cara tertentu untuk memahami dan mengadaptasi dunia sosial melalui penampilan kekuasaan ekonomi dan kultural dalam bentuk terselubung dan *taken from granted*. Bourdieu menggunakan konsep kekerasan simbolik agar pihak yang didominasi menerima dominasi secara legitimate. Ideologi atau kekerasan simbolik yang terjadi dilakukan melalui artikulasi yang menunjukkan bingkai legitimasi atau delegitimasi.

Pengembangan dominasi menurut pikiran Bourdieu dilakukan melalui manipulasi simbolik, dominasi juga bisa dilakukan melalui kesepakatan atau melalui persetujuan pihak yang didominasi sebagaimana konsep Antonio Gramsci disebut hegemoni. Pengertian Hegemoni yang dimaksud Gramsci ialah kelompok dominan dalam masyarakat, termasuk kelas yang berkuasa yang fundamental tetapi tidak eksklusif, memelihara dominasinya melalui jaminan persetujuan yang spontan dari kelompok sub ordinat termasuk kelas pekerja, melalui negoisasi konstruksi politik dan konsensus ideologi yang sama-sama disepakati baik oleh kelompok yang mendominasi maupun yang didominasi (Strinati, dalam stillo, 1999).

Didalam *field* (arena) habitus beroperasi, yaitu aspek mental atau struktur

kognitif aktor yang digunakan sebagai wahana berhubungan dengan dunia sosial. Manusia diberkati dengan skema dimana mereka penerima, memahami, mengapresiasi serta mengevaluasi dunia sosial. Secara dialektika habitus merupakan internalisasi struktur dunia luar atau internalisasi eksternal dan juga mengembangkan pengalaman internal ke struktur dunia luar atau eksternalisasi internal. Habitus merupakan skema kognitif agen yang terbentuk hasil internalisasi struktur, dan sebaliknya apa yang menjadi skema agen dikembangkan dalam struktur yang lebih luas.

Peranan timbal balik ini sejalan dengan teori strukturasi Giddens (1986:53-56) bahwa struktur ialah sifat-sifat struktural meliputi aturan dan sumberdaya dari sistem sosial. Agency merupakan arus perilaku seseorang yang berkesinambungan, dan bukan sebagai suatu tindakan nyata yang dilakukan bersama-sama. Struktur tidak tumbuh dalam ruang dan waktu, dan struktur hanya hadir melalui aktifitas agen. Konsep strukturasi melibatkan dualitas struktur (*duality of structure*) dalam mempertahankan kehidupan sosial secara mendasar melalui ketergantungan peran timbal balik antara struktur dan agensi. *Duality of structure* yang dimaksud ialah ciri-ciri sistem sosial baik medium maupun hasilnya dalam praktek-praktek yang melembagakan suatu sistem. Hubungan struktur dengan agensi (*agency*), tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Struktur melibatkan agensi dan aktivitas agensi melibatkan struktur (Giddens, 1986:70).

Integrasi antar konsep struktur dan agency juga dikemukakan oleh Habermas

(dalam Ritzer, 1996: 412-413,415) dengan mengemukakan konsep *life-world*. Ia mengembangkan konsep hubungan agency dan struktur dengan mengintegrasikan ide sebagaimana digambarkan dalam *action theory* and *system theory*. Agensi menurut pemikiran Habermas merupakan *life-world* sedangkan struktur merupakan sistem sosial, dan sistem sosial ini merupakan tekanan dalam kolonisasi *life-world*. Jika *life world* merepresentasikan pandangan tindakan subyek dalam masyarakat, sistem terlibat dalam pandangan eksternal tentang masyarakat. Sistem merupakan akar (*roots*) dari *life-world*, tetapi akhirnya berkembang menurut karakteristik struktural sendiri. Terkait pada konsep ini Habermas mengemukakan konsep integrasi sosial dengan integrasi sistem. Perspektif integrasi sosial memfokuskan kepada cara-cara dimana sistem tindakan (*action system*) diintegrasikan baik melalui jaminan normatif maupun melalui penerimaan konsensus secara komunikatif. Dalam konteks pandangan Habermas kerusuhan sosial dalam tataran praktek bisa merupakan representasi sistem tindakan dari agency dan kerusuhan sosial sebagai wujud konflik bisa diintegrasikan melalui upaya mengintegrasikan sistem manakala ada jaminan normatif atau tercipta suatu komunikasi untuk menuju pada suatu konsensus.

Dalam pandangan Bourdieu, tindakan atau agen merupakan strategi yang menekankan pada orientasi kepentingan perilaku manusia (*human conduct*), dimana strategi ini dilakukan dengan memaksimalkan keuntungan material dan simbolik. Menurut konsep ini bahwa kepentingan ekonomi menyerupai kepentingan non ekonomi. Semua barang, material secara simbolik tanpa bisa dibedakan. Dalam

pandangan Giddens antara struktur dan agensi merupakan dua sisi dari satu mata uang, yang keduanya memiliki kepentingan timbal balik. Diantara kedua kepentingan tersebut terdapat kebudayaan yang akan menjadi faktor pelumas sehingga kedua kepentingan tersebut menjadi saling bias memperlancar hubungan peranan masing-masing.

Hubungan antara agen dan struktur oleh Archer (dalam Ritzer, 1996 : 398) dipandang sebagai proses tiada akhir, tanpa arah. Oleh karena itu Archer mengemukakan premis bahwa permasalahan struktur dan agen dibawah bayangan isu kultur dan agensi. Walau pun keduanya berbeda tetapi mempunyai kesatuan konseptual, sejak struktur dan kultur saling berkaitan dalam dunia nyata. Jika struktur merupakan fenomena realisme material dan kepentingan, kultur melibatkan penomena non material dan gagasan -gagasan. Fokus dalam realisme struktur terletak pada bagaimana kondisi sosiokultural mempengaruhi interaksi sosial dan bagaimana interaksi mengarahkan elaborasi struktural. Perhatian paralel dalam domain kultural adalah bagaimana pengkondisian kultural mempengaruhi interaksi. Pengkondisian kultural merujuk pada bagian atau komponen sistem kultural. Interaksi Sosiokultural berkaitan dengan agen kultural.

Dari pandangan Archer tersebut, keterkaitan antara agen dan struktur dalam suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai yang berlaku. Artinya aturan-aturan atau sumber daya yang mengarahkan agency terkait pada kebudayaan yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu sehingga memberi warna atau

melancarkan proses tarik menarik hubungan antara struktur dan agency tadi. Hall (1977:106-116) melihat penerapan aturan dalam suatu masyarakat ada yang sangat terikat kepada konteks budaya masyarakatnya (*high contexts culture*) dan ada yang kurang memperhatikan konteks budaya masyarakat (*low contexts culture*).

Termasuk dalam hal ini ialah aktifitas produksi dan konsumsi setiap pesan sehingga makna mengenai suatu pesan akan beraneka ragam tergantung tidak saja pada konteks fisik tetapi juga kontek internal pribadi pada saat pesan tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Untuk pesan yang *high contexts culture* sangat sedikit penggunaan kode dan pesan eksplisit. Sedangkan untuk *low contexts culture*, sebaliknya (Hall: 1977: 91). Masyarakat Indonesia secara umum termasuk memiliki budaya konteks tinggi walau pun mungkin pada kelompok budaya tertentu ada yang memiliki kebudayaan konteks rendah. Dengan demikian dalam setiap penerapan aturan dan merepresentasikan pesan akan mempertimbangkan berbagai konteks

Dalam praktek kehidupan masyarakat, terjadi pertarungan dalam rangka memperoleh makna lebih dan apapun yang menjadi obyek yang diperebutkan merupakan kapital, sehingga kapital tidak terbatas dalam pengertian material atau ekonomi tetapi juga kapital sosial, kultural dan politik. Dalam pertarungan tersebut posisi agen dengan struktur, habitus dengan field, *life-word* dengan *system*, atau agen dengan kultur, tidak dalam posisi yang berlawanan namun sebagai dua sisi dari satu proses yang saling melengkapi.

Praktek-praktek sosial budaya tersebut akan menjadi landasan proses produksi dan konsumsi teks suratkabar. Sejalan dengan perspektif peranan timbal balik antara agen dan struktur, maka perspektif dalam melihat praktek produksi dan konsumsi teks suratkabar pun akan menggunakan ekonomi politik kritikal yang menempatkan peranan timbal balik antara agen dan struktur. Perspektif tersebut dikemukakan oleh Golding dan Murdock (1992:18-19)⁶, dimana ia menolak sebagian pandangan instrumentalis bahwa intervensi dari pemilik media, pengiklan, pribadi-pribadi pemegang peranan kunci dalam produksi media. Pribadi-pribadi tersebut, sebenarnya berada dalam suatu struktur yang menyediakan berbagai fasilitas dan keuntungan-keuntungan lain. Dengan adanya fasilitas dan bantuan lain tersebut akan menjadi hambatan dan pembatasan dalam aktivitasnya termasuk dalam memproduksi isi media. Artinya bahwa segala bentuk yang telah diterima oleh pribadi-pribadi dari lingkungan organisasi atau struktur dimana ia berada memberikan pengaruh terhadap pribadi-pribadi tadi dalam pengambilan keputusan di lingkungan media. Namun demikian ia juga menolak kekakuan strukturalisme yang dilukiskannya sebagai gedung besar, solid, permanen dan tidak bisa bergerak. Golding melihat struktur tadi sebagai suatu bentuk dinamik yang bereproduksi dan berubah-ubah secara konstan melalui tindakan praktis. Dalam kaitan ini Murdock (1982: 124-125) menilai bahwa keputusan alokatif media pada tataran struktural tadi kemudian dilaksanakan atau dijalankan dalam tindakan atau agensi (*agency*),

⁶ Mosco (1996 : 213), menyebut sebagai salah satu langkah awal dalam melakukan studi ekonomi politik komunikasi ialah strukturasi --lainnya komoditisasi dan spasialisasi-- yang menerapkan teori Giddens tentang teori stukturasi.

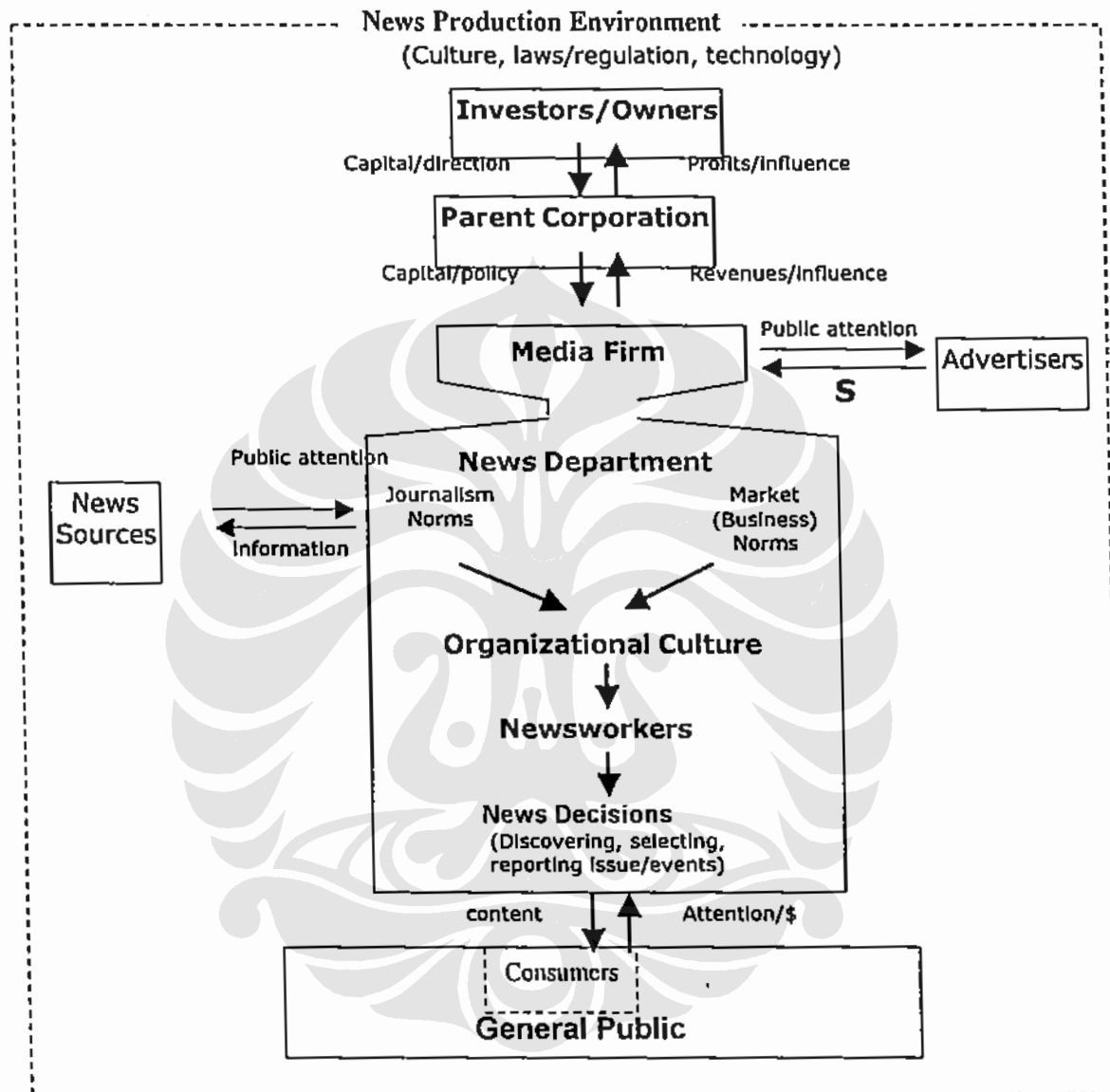
sehingga untuk melihat pengendalian dalam media akan memadai apabila menggunakan pendekatan baik pada struktur dan agensi (*agency*) secara bersamaan.

Surat kabar yang diteliti dalam studi ini ialah surat kabar komersial, dengan demikian model proses produksi teks surat kabar yang digunakan ialah model produksi teks surat kabar komersial. Menurut Mc Manus (1994: 20-32), terdapat beberapa komponen yang memegang peranan yang bisa mempengaruhi berita, yaitu lingkungan media, investor, perusahaan induk (*parent corporation*), perusahaan media, Departemen Pemberitaan. Komponen Departemen Pemberitaan berkaitan dengan sumber berita, pengiklan, konsumen berita dan publik umum. Semua komponen tersebut mempunyai hubungan saling terkait, sebagaimana dalam gambar 2 di halaman berikut.

Dalam gambar tersebut komponen yang saling berkaitan terutama ialah antara investor dengan perusahaan inti, antara perusahaan inti dengan perusahaan media, antara perusahaan media dengan Departemen Pemberitaan, antara sumber berita dengan Departemen Pemberitaan, antara pengiklan dengan perusahaan media, antara konsumen berita dengan Departemen Pemberitaan. Mana yang paling kuat diantaranya, para pakar masih berbeda pendapat. Robert Etman dan Philip Meyer berpendapat bahwa konsumenlah yang memegang peranan kunci. Menurut Herbert Gans yang memegang peranan ialah antara sumber berita dengan mereka yang memegang kekuasaan penuh dengan konsumen. Sedangkan Yoseph Turow dan Herbert Altschull berpendapat yang memegang peranan ialah advertiser.

Gambar 2

Model Produksi Berita Komersial



Sumber : Mc Manus, John H dalam Market Driven Journalism- Let The Citizen Beware, London: Sage Pub. hal 23.

Ben Bagdikian dan Robert Squiers berpendapat bahwa yang memegang peranan kunci ialah pengiklan (*advertiser*) dan pemegang perusahaan besar. Diskursus melalui teks surat kabar sebagian ditentukan oleh cara-cara pembuat teks surat kabar

bertindak dalam situasi dimana mereka mengalami hambatan, tekanan, serta berbagai aturan yang sesuai dengan struktur dan norma yang berlaku. Teks surat kabar bukan hanya menjadi sebuah agen (sumberdaya) sosial dari banyak organisasi media yang ditentukan oleh mereka sendiri, tetapi juga dengan agen lainnya. Dalam masyarakat ada dua agen yang penting yaitu kapital dan negara atau lembaga komersial dan pemerintah (Hartley, 1994: 47). Selain pemerintah dan lembaga komersial, media massa sebenarnya juga menjadi agen-agen lain, yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki struktur yang beragam pula serta individu-individu yang memiliki kepentingan.

Dengan mendasarkan pada kenyataan bahwa media massa sudah merupakan suatu industri budaya maka struktur dan agensi yang mengarahkan diskursus akan mencakup kompleksitas suatu industri budaya. Tuntutan-tuntutan yang ada dan menjadi permasalahan yang berkaitan dengan aspek industri media, meliputi antara lain aspek produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi informasi. Selain itu yang juga menjadi masalah ialah sumberdaya industri tersebut, yaitu antara lain dana, sumberdaya manusia (SDM) dan manajemen. Secara konseptual, Murdock dan Golding (1991:15), mengemukakan dua aspek yang mempengaruhi media massa dalam mewadahi diskursus akan dipengaruhi oleh masalah-masalah pendanaan dan pengorganisasian media tersebut.

Kapital (material) suatu industri media kemungkinan dikelola dalam tiga bentuk. Pertama melalui media yang dimiliki oleh perusahaan swasta tetapi tidak

melakukan kegiatan yang mencari keuntungan. Kedua, media baik dimiliki swasta atau bukan tetapi melaksanakan kegiatan dalam iklim komersial. Ketiga, media dalam kegiatan sehari-harinya dilandasi norma-norma kehidupan komersial. Dalam iklim persaingan antara media, kemungkinan terjadi perkembangan struktur pemilikan kapital yang lebih lanjut akan mengendalikan diskursus dalam media. Perkembangan struktur pemilikan kapital tersebut yaitu kearah pemilikan media dalam bentuk konsentrasi, diversifikasi dan multi nasional (Hartley, 1994: 49).

Jika suatu media dijalankan oleh perusahaan yang bersifat komersial maka media tersebut melaksanakan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang dalam kegiatannya menggunakan konsep ekonomi. Dengan konsep tersebut media berusaha menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memproduksi komoditi yang bernilai dan mendistribusikannya kepada kelompok-kelompok yang dalam masyarakat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka yang beranekaragam (Albaran, 1996:5).

Dengan demikian faktor karakteristik konsumsi media juga akan menentukan karakteristik diskursus. Sebagai suatu industri, media massa memproduksi isinya tidak saja agar menarik bagi konsumen tetapi agar menarik para pemasang iklan yang ingin menjangkau konsumernya. Dengan demikian isi media dipengaruhi juga oleh karakteristik konsumen dan pemasang iklan (Albaran:1996:4). Kebutuhan untuk meningkatkan akses khalayak terhadap media juga merupakan kebutuhan pengiklan (advertiser) dan keterkaitan kedua kebutuhan tersebut merupakan sumberdaya media

dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam kaitannya dengan isi media yang menjadi perhatian utama studi ini, maka diskursus yang terjadi arahnya akan sejalan dengan hasil interaksi upaya media dalam mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan konsumen (produk isi media) dan kebutuhan serta keinginan para pengiklan.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pengiklan, media memperhitungkan struktur pasar yang ada, yaitu monopoli, oligopoli, kompetisi monopoli dan kompetisi sempurna. Pada struktur monopoli, penjual produknya tunggal dan kemudian mendominasi pasar, sedang oligopoli penjual produk lebih dari satu dan produknya kemungkinan homogen atau beranekaragam. Pasar kompetisi monopoli, penjual produk yang mempunyai ciri yang sama atau hampir sama memasuki pasar masing-masing produk satu sama lain. Kompetisi sempurna, terjadi manakala banyak penjual produk yang homogen dan tidak ada satu perusahaan tunggal atau kelompok yang mendominasi pasar sehingga tidak ada halangan bagi satu produk untuk memasuki pasar yang lain. Beberapa kriteria untuk menentukan struktur pasar antara lain, jumlah penjual dan pembeli, perbedaan antar produk, faktor tingkat kesulitan untuk memasuki pasar, struktur biaya dan integrasi vertikal (Albaran, 1996:26-32)

Struktur pasar media di Indonesia setelah reformasi mengarah pada kompetisi sempurna, dimana jenis media yang sama atau yang berbeda berusaha memasuki pasar yang sama. Hambatan memasuki pasar dari aspek regulasi pada aspek produk dan peredaran hampir tidak ada lagi. Dalam kondisi seperti itu, setiap media berusaha

menciptakan keunggulannya masing-masing dengan menciptakan posisioning produk media untuk segmen pasar tertentu. Dengan segmen pilihannya tersebut kemudian berusaha memenuhi kebutuhan atau menciptakan kebutuhan dari segmen yang dituju media. Karakteristik pola konsumsi segmen pasar media tersebut menjadi pertimbangan pengelola media untuk menyusun isinya. Dalam konteks inilah arah diskursus media akan terkait pada pola konsumsi media. Pola konsumsi berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan, apa yang biasa dibaca, dan sejauhmana keterlibatan mereka terhadap isinya. Kebiasaan mereka membaca dan keterlibatan dalam isinya akan terkait pada lingkungan sosial budaya mereka. Para pembaca media akan menerima isi media berdasarkan konteks sosial budaya masyarakatnya, sebab mereka akan menggunakan sistem tanda berdasarkan budayanya. Dalam kaitan ini maka disamping ciri-ciri individu pembaca, juga ciri-ciri sosial budaya mereka.

Terkait pada masalah kompetisi, suatu media tidak saja bersaing diantara sesama media dalam satu jenis tetapi juga diantara jenis media. Dalam menyajikan suatu teks, suatu surat kabar tidak saja bersaing dengan sesama suratkabar lainnya, tetapi juga dengan media radio dan televisi. Sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan teknologi, jenis media pun bertambah dengan keunggulan yang bisa mengatasi media yang sudah ada, yaitu multi media dimana didalamnya terdapat beberapa media cetak, visual dan audiovisual yang saling berinteraksi dengan dihubungkan oleh telekomunikasi. Dengan multi media tersebut informasi diterima khalayak secara demassa, dan interaktif dan *asynchronity* (Rogers, 1986,

William,1988). Di Indonesia saat ini telah berkembang media dalam kategori ini. Surat kabar seperti Kompas, Media Indonesia dan Republika disamping layanan yang diberikan dalam bentuk informasi tercetak (surat kabar) juga menyediakan layanan *online*. Disamping itu telah berkembang pula situs-situs berita lainnya dan bahkan tidak terbatas pada situs berita tetapi lebih luas lagi dengan menyediakan sumberdaya yang lain sebagai suatu portal, seperti detik.com, astaga.com dan lainnya.

Setiap media tertentu mempunyai ciri masing-masing dalam menyajikan diskursus, demikian juga masing-masing *genre* dalam media tersebut mempunyai karakteristik dalam struktur dan prosedur diskursus yang diwadahnya. Setiap media untuk memenangkan persaingan tersebut, akan melihat posisi pesaingnya dan berusaha menempatkan posisi masing-masing media agar berbeda satu dengan yang lain.

Dalam konteks industri media maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal dan pasar dari suatu media akan mengarahkan setiap diskursus. Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang uraian ini, perkembangan media massa di Indonesia telah memasuki pada fase sebagai industri, menurut analisis Hill (1994), secara keseluruhan sampai tahun 1994, terdapat empat imperium besar atau konglomerat di dunia pers Indonesia, yaitu Kelompok Kompas-Gramedia, Sinar Kasih, Tempo-Grafiti/Jawa Pos, Media Indonesia-Surya Pesindo. Di luar itu terdapat kelompok lain yang disebut kelompok Marginal, antara lain meliputi penerbitan khusus, surat kabar berbahasa daerah, surat kabar Islam (Republika), surat kabar

berbahasa Cina dan Inggris. Tiga media yang akan diteliti, Kompas, Media Indonesia dan Republika ada pada kelompok yang berbeda, Kompas dan Media Indonesia, masing-masing berada dalam kelompok imperium yang berbeda latar belakangnya. Kompas merupakan surat kabar yang tumbuh sebagai kelompok yang menyuarakan agama katolik. Media Indonesia, merupakan media yang didirikan oleh golongan muda usia, lahir setelah deregulasi di bidang media dilakukan dan mempunyai keinginan yang besar untuk memasuki sektor bisnis sebagai kelas menengah. Republika yang tumbuh belakangan, Hill masih mengkategorikannya sebagai surat kabar Islam dengan mencoba membawakan postur surat kabar modern.

Surat kabar Kompas dan Republika, dilihat dari latar belakang pendiriannya merupakan surat kabar yang terkait pada kepentingan primordial, Kompas untuk menyuarakan agama Katolik sehingga isinya akan merefleksikan atau merupakan representasi kelompok atau komunitas agama Katolik. Sedangkan Republika akan merepresentasikan komunitas agama Islam. Media Indonesia tampaknya tidak memiliki latar belakang primordial, tetapi lahir sebagai surat kabar bisnis. Dengan demikian Kompas dan Republika tidak bisa dikatakan sebagai surat kabar komersial semata namun membawa ideologi yang bersumber dari kedua agama tersebut. Sedangkan Media Indonesia, akan lebih terbuka dan akan mementingkan unsur komersial. Ketiga surat kabar tersebut diterbitkan oleh lembaga bisnis berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga ketiganya berada dalam satu lingkungan atau iklim komersial, dan terlihat mengarah pada konglomerasi.

Analisis Hill (1994: 144) menggambarkan bahwa perubahan pengaturan terhadap struktur permodalan industri pers dalam bentuk konglomerasi dan semakin menguatnya penanaman modal, menurunkan keterikatan pada struktur primordial. Perubahan itu terjadi, kemungkinan disebabkan kurang dekatnya hubungan antara pemilik modal dengan para pembuat teks surat kabar sebagai agen atau antara pemilik dan pelaksana. Representasi pemilik media akan dipengaruhi peran agen yang melakukan proses produksi isi media. Artinya pada kasus teks kerusuhan, struktur diskursus menunjukkan lebih didominasi oleh kepentingan pelaksana media ketimbang pemilik media, dan orientasi, norma dan kebiasaan-kebiasaan pelaksana yang telah berlangsung merupakan agensi dari struktur lainnya.

Selain kekuasaan ekonomi, diskursus juga kemungkinan diarahkan oleh kekuasaan lain. Pada lingkup praktek diskursus, media massa merepresentasikan seluruh kekuasaan yang ada di dalam dan di luar lingkungan media. Di lingkungan media, Murdock lebih menekankan pada aspek pemilik modal sebagai pemegang kekuasaan. Artinya pertimbangan-pertimbangan keuntungan atau perolehan nilai tambah material menjadi ukuran dalam membentuk isi media. Pertimbangan keuntungan material akan menentukan diskursus ke arah ideologi kapitalisme sebagai ideologi dominan. Namun jika dilihat dari konteks lainnya maka ideologi suatu diskursus akan lain pula.

Pemilik kapital berada dalam struktur kehidupan masyarakat dimana ia berada. Demikian juga para pelaksana media seperti jurnalis dan para pekerja media

lainnya yang ikut serta dalam proses menyusun isi media kemungkinan memiliki kekuasaan tersendiri sebagai agen dari struktur kekuasaan yang ada di lingkungannya. Menurut Shoemaker dan Stephen (1991) ada lima tataran yang bisa mempengaruhi isi media yaitu pada tataran individu, kegiatan rutin media, organisasi, faktor di luar media dan ideologi dan studi ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi isi media dari posisi tataran ideologi.

Dari segi ideologis para jurnalis dan pekerja media lainnya mempunyai latar belakang atau berada pada suatu struktur sosial tertentu, yang tentunya memiliki pola kekuasaan tertentu untuk mereproduksi ideologi yang dianut. Demikian juga kegiatan rutin mereka, struktur organisasi di suatu media dilandasi oleh kebiasaan-kebiasaan tertentu yang secara berkesinambungan dipelihara untuk memproduksi isi media, dengan demikian pola kekuasaan yang terpelihara dalam media tersebut akan mereproduksi ideologi dominan melalui diskursus dalam media. Dari luar media elit-elit politik kemungkinan melakukan intervensi terhadap kegiatan rutin media termasuk terhadap kegiatan jurnalis, dan para elit politik tersebut berada pada suatu struktur yang beraneka ragam, berusaha mereproduksi ideologi mereka. Termasuk dalam elit politik tersebut ialah mereka yang memiliki akses dalam mempengaruhi isi media massa.

Ada dua kemungkinan cara elit politik melakukan intervensi pada media. Pertama, kemungkinan melalui produksi isi media secara terbuka dimana elit politik bersangkutan berada pada suatu lingkungan strukturnya tertentu. Kedua ialah melalui

pengendalian langsung dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau melalui berbagai bentuk pengendalian lainnya.

Dalam kaitan ini McQuail (1994: 138-140) mengemukakan konsep komunikator massa sebagai orang-orang di dalam media yang melakukan produksi isi media dimana mereka menentukan atau mempengaruhi produksi isi media itu. Menurut Gebner (dalam McQuail, *ibid*), komunikator massa dalam kondisi tertekan dari berbagai sumber yang berasal dari luar yaitu klien (para pemasang iklan), penguasa (terutama penguasa hukum dan politik), pakar, institusi dan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam kenyataannya semua kekuatan itu tidak terisolasi dan berbaaur satu sama lain.

Dalam aktivitasnya kemungkinan pelaksana media dan agensinya akan menentukan arah diskursus melalui media atau akan merefleksikan struktur dimana agen itu berada, walau pun jenis peristiwa kerusuhannya berbeda. Misalnya, kerusuhan yang berlatar belakang agama mungkin akan memiliki arah yang sama dengan peristiwa berlatar belakang politik atau berlatar belakang kriminal. Artinya hubungan kekuasaan dibalik diskursus dalam suatu media tidak ditentukan oleh peristiwanya tetapi oleh kepentingan agen-struktur yang ada di balik itu.

Sesuai dengan praktek-praktek sosial budaya, maka yang menjadi obyek pertarungan atau kapital akan beraneka ragam, meliputi kapital ekonomi, sosial, kultural dan simbolik. Dalam kasus teks surat kabar kerusuhan sosial, kapital ekonomi, akan tercermin pada representasi kerusuhan sosial yang menunjukkan

adanya perbedaan diantara mereka yang memiliki material baik uang maupun barang yang kuat dengan pemilikan material yang lemah. Perebutan kapital kultural dalam kerusuhan sosial manakala artikulasi kerusuhan sosial menunjukkan pembedaan dalam pemilikan barang budaya dan jasa serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kapital sosial, manakala representasi kerusuhan sosial membedakan aspek-aspek pengakuan terhadap golongan masyarakat serta menunjukkan perbedaan jaringan hubungan antar golongan masyarakat. Kapital simbolik atau politik menunjukkan pembedaan adanya kelompok atau individu atau gagasan yang memiliki legitimasi dan tidak memiliki legitimasi.

Dalam diskursus kerusuhan sosial, dilihat dari praktek produksi dan konsumsi teks surat kabar, kemungkinan antara latar belakang peristiwa kerusuhan sosial dengan kapital yang direpresentasikan tidak selalu sesuai. Dalam konteks ini kerusuhan sosial menjadi *field* industri imaji dimana didalamnya kemungkinan terdapat bermacam jenis dan jumlah kapital. Satu peristiwa yang berlatar belakang ekonomi bisa memiliki kapital kultural, sosial dan simbolik. Peristiwa kerusuhan yang berlatarbelakang kultural dan sosial bisa menunjukkan representasi kapital ekonomi atau sosial atau simbolik. Demikian halnya peristiwa yang berlatarbelakang sosial dan politik bisa menunjukkan representasi seluruh kapital lainnya. Hal ini berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi media yang memiliki banyak faktor yang tidak semata-mata berbasis model jurnalisme tetapi juga berbasis model produksi komersial. Pada proses ini beberapa partisipan diskursus ikut mempengaruhi

dalam merepresentasikan kerusuhan sosial. Pada tataran media terdapat beberapa partisipan yang terlibat dalam transaksi ialah para wartawan, pimpinan media, pemilik media. Di luar media terdapat para elit, konsumen umum, pengiklan. Peran pemain tidak semata-mata merepresentasikan kekuatan individu tetapi juga merepresentasikan kekuasaan struktur dimana mereka berada. Secara sadar atau tidak mereka mengartikulasikan peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial dalam aneka imaji.

Pada era sebelum reformasi, pengendalian media di Indonesia menurut Surbakti (1997:43), dilakukan dengan enam bentuk, pertama melalui Persatuan Wartawan Indonesia sebagai asosiasi korporatisme negara, konsultasi, telpon, peringatan sebagai pembinaan politik, pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), penguasaan saham perusahaan penerbitan pers, wartawan korpri dan kekuasaan koersif terhadap wartawan. Apa yang dikemukakan oleh Surbakti, dalam konteks industri media ialah dalam bentuk dua terakhir yakni pengendalian melalui penguasaan saham dan pembentukan kelompok-kelompok wartawan di instansi-instansi pemerintah. Dalam era reformasi pengendalian oleh pemerintah melalui berbagai instrumen baik yang terbuka maupun yang tertutup atau samar-samar mungkin sudah tidak ada lagi. Namun demikian pengendalian berada pada pemodal dan pasar media, serta tekanan-tekanan politik dari elit politik atau massa masih terjadi.

Dari aspek permodalan, tampak beberapa pengusaha yang memiliki afiliasi dalam kekuatan sosial politik pendukung kekuasaan pemerintah menanamkan

investasi di bidang perusahaan media massa, tidak saja media cetak tetapi elektronik. Namun demikian dalam pelaksanaannya pada saat pemerintah menerapkan politik represi yang kuat sering mengeluarkan teguran-teguran atau himbauan atau peringatan media termasuk yang dimiliki oleh pemilik kapital (material) tadi. Dalam kaitan ini Hill (1994:144) mengemukakan fenomena masuknya investasi keluarga presiden dalam bisnis media (cetak dan elektronik), menunjukan suatu kontradiksi. Ia melihat adanya upaya perubahan dari ketergantungan pada bantuan kepresidenan dan kekuasaan pemerintah kearah upaya untuk mencapai kemandirian modal, manajemen keuangan dan kekuatan pasar. Keadaan itu ditunjukkan oleh nyaringnya kelompok penerbitan tadi menyuarakan opini yang menentang kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah.

Hal ini berarti pengendalian media melalui penguasaan saham tidak berarti secara otomatis terjadi, atau represi politik tidak selalu dilakukan melalui penguasaan kapital. Sulistyo (1993:190) dalam hal ini mengatakan bahwa menurunnya represi politik sejak tahun 1980 sejalan dengan meningkatnya kepentingan ekonomi dari aspek perusahaan dan penerbitan pers, dan pada gilirannya perpaduan situasi ini akan menentukan konsep penerbitan pers, yaitu berkurangnya *straight news* dan meningkatnya tulisan-tulisan olahan (*newsmaking*), dari aspek-aspek tulisan politik ke tulisan-tulisan bisnis.

Tidak tampaknya hubungan antara afiliasi pemilik media dengan isi media, sebagaimana fenomena yang dikemukakan di atas kemungkinan disebabkan oleh dua

hal. Pertama, ada perbedaan orientasi antara pemilik kapital dengan kaum profesional yang menjalankan operasional media dan dalam hal ini yang memegang peranan kunci ialah kaum profesional. Kedua, ada kesamaan orientasi antara pemilik kapital dengan pelaksana tentang strategi untuk mengembangkan media, yaitu sebaiknya pada isi media yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar.

Diskursus yang terjadi pada media dilihat dari hubungan kekuasaan yang ada dalam media akan berkaitan dengan masalah pengendalian isi media massa tersebut. Ada dua hal yang penting mengenai pengendalian media, yaitu siapa yang melakukan dan dimana pengendalian dilakukan. Murdock melihat media sebagai suatu badan usaha yang besar, suatu industri komunikasi yang tidak sekedar menghasilkan produk berupa barang dan jasa tetapi lebih dari itu. Industri komunikasi menggambarkan dunia yang kontemporer, imaji tentang kehidupan yang indah yang semuanya berperan penting dalam mengarahkan kesadaran manusia. Kesemuanya menyebabkan isu pengendalian (kontrol) media mengarah pada hubungan antara faktor ekonomi dan budaya. Kondisi media ini disebabkan semakin besarnya keterkaitan antara struktur industri komunikasi dan konglomerasi.

Pengendalian media menurut Pahl dan Winkler (1974) dibedakan dalam dua tataran yaitu alokatif dan operasional. Pengendalian alokatif ialah berkaitan dengan kekuasaan untuk menentukan seluruh tujuan dan lingkup perusahaan dan cara menyebarkan sumberdaya yang produktif. Pengendalian itu akan meliputi seluruh aktivitas perusahaan. Pengendalian operasional yaitu pengendalian yang dilakukan

oleh para pekerja tingkat bawah yang mengambil keputusan penggunaan sumberdaya yang telah dialokasikan dan kemudian menerapkan kebijaksanaan yang sudah diputuskan dalam tataran alokatif.

Dengan dua kategori pengendalian tadi, Murdock menafikan kedua kategori pengendalian tersebut dan mengarahkan bahwa pengendalian berada pada pemilik modal yang sah, kemudian ia membedakan pemilik sah yaitu para pemilik modal dan kepentingan mereka dalam menentukan keseluruhan tujuan dan arah aktivitas perusahaan. Murdock mengemukakan pemilikan media dalam dua kategori, yaitu pemilikan sah dan pemilikan ekonomi (Poulantzas, 1975). Pemilik sah (*legal owner*), yaitu orang yang dalam struktur organisasi perusahaan tersebut sebagai pimpinan yang biasanya dipilih dalam satu forum pengambilan keputusan diantara pemegang saham. Sedangkan pemilikan ekonomi, artinya seluruh yang memegang saham perusahaan.

Mengenai pengendalian media dari perspektif kritis, Schulman (1990:115-123), mengemukakan beberapa isu, yaitu swasensor (*self censorship*), masalah ideologi, profesionalisme pengendali, teknologi dan tujuan pekerja. Aspek sensor yang dilakukan oleh media atau oleh para pekerja profesional media karena mereka dipandang melakukan peran sebagai ideolog, sehingga dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang mereka miliki akan mampu melihat apa yang perlu dimuat dan tidak dimuat dalam media.

Artinya, dalam melihat aturan-aturan diskursus mengenai teks suratkabar

kerusuhan, tidak mendasarkan pada hubungan antara faktor ekonomi dan non ekonomi sebagai hubungan antara basis (ekonomi) dan superstruktur meliputi ideologi, politik, sosial, budaya sebagaimana dikemukakan oleh Marx dengan sebutan determinasi ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek diskursus dan aturan diskursus yang berlaku dari perspektif ini menunjukkan bahwa keseluruhan nilai baik dari aspek basis dan suprastruktur terdapat dialektika (lihat Thompson, dalam Hall. 1986:26-28).

Dengan demikian apa yang sudah dimuat dalam media sudah merupakan keputusan yang sesuai dengan ideologi yang dimilikinya, sehingga yang penting penjelasan aspek ideologi dari liputan media tersebut, bukan dilihat dari proses *gatekeeping*. Para jurnalis tidak dilihat sebagai individu semata tetapi juga sebagai bagian dalam suatu perusahaan yang menyusun laporan dan menyajikan berbagai peristiwa dan pendapat secara obyektif dan berimbang serta menghindarkan terjadinya bias. Jurnalis dipandang sebagai kolega yang bekerja, satu untuk semua dan semuanya satu, dalam satu struktur organisasi media. Sehingga dengan pandangan ini yang menjadi ikatan profesi bukanlah kesepakatan antar anggota yang tercermin dalam kode etik, tetapi lebih terikat pada struktur kekuasaan yang ada dalam media. Namun demikian individu-individu yang berada dalam struktur termasuk para jurnalis dan pemilik modal juga memiliki peran dalam mengartikulasikan diskursus. Mereka adalah bagian dari manusia lainnya yang memiliki latarbelakang dan kondisi dan tuntutan-tuntutan pribadinya.

Dengan demikian arah diskursus isi media akan tergantung pada hubungan yang terjadi antara kelompok pemegang kekuasaan, yaitu pemilik kapital dan buruh atau pekerja. Kelompok pemilik modal mempunyai kepentingan bisnis yang tinggi, sedangkan kelompok pekerja memiliki konflik antara tuntutan profesi dengan tuntutan untuk memelihara kesinambungan kehidupannya dari aspek ekonomi. Dalam konteks lingkungan politik maka, dominannya kekuasaan yang mementingkan kapital (material) atau menonjolnya simbol-simbol kapital (material) dalam diskursus kerusuhan sosial dalam berita surat kabar tergantung pada kuat lemahnya kontrol tidak saja dari penguasa tetapi juga dari publik.

Di Indonesia kekuasaan penguasa (pemerintah) mengalami pasang surut, namun dalam fase sejarah perkembangannya lebih banyak fase atau durasi yang menunjukkan pengendalian pemerintah lebih dominan. Hal itu disebabkan sistem politik masih mengarahkan iklim komunikasi yang terjadi masih dalam bentuk pengaturan yang membatasi media dalam menyampaikan informasi. Pengaturan penguasa terhadap pers tersebut merupakan refleksi dari sistem politik yang berlaku. Teori yang berkaitan dengan hubungan pers dengan masyarakat dan dengan penguasa oleh Mc Quail (1994:110-121) disebut dengan teori komunikasi normatif, meliputi enam teori yaitu teori otoriter, teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial, teori media Soviet, teori media pembangunan, teori demokratik-partisipan. Teori tersebut merupakan pengembangan dari teori mengenai pers yang dirumuskan oleh Siebert, Paterson dan Schramm (1976) yang hanya mengemukakan empat teori yaitu otoriter,

liberal, tanggungjawab sosial dan soviet komunis.

Dari enam teori normatif tersebut (empat menurut Siebert dkk), studi ini memusatkan perhatian pada letak kekuasaan pada media. Teori pers paham otoriter dan komunis kekuasaan berada dalam posisi tersurat dimana pada teori otoriter terletak pada penguasa pemerintahan sedangkan pada pers komunis ada pada elit partai (komunis). Pada teori pers bebas dan tanggungjawab sosial, berasumsi kekuasaan itu didistribusikan kepada unsur-unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pers sering disebut ada pada kekuatan yang keempat. Pada teori media pembangunan letak kekuasaan sangat tergantung pada teori pembangunan yang dianut, kemungkinan kekuasaan berada terpusat dan kemungkinan terdistribusikan dalam komponen-komponen pembangunan, demikian juga teori demokratik-partisipan tergantung konsep demokratik yang dianutnya. Dalam studi media diskursus ini, tidak memihak pada kedua kecenderungan tadi, tetapi melihat kekuasaan dalam posisi netral yang tersebar pada seluruh komponen. Artinya kemungkinan media mempresentasikan beraneka ragam kekuasaan dan media itu sendiri mempunyai kekuasaan.

Dengan landasan bahwa media massa merupakan saluran komunikator massa, maka diskursus yang terjadi dalam media akan lebih menonjolkan pada kekuatan yang menjadi dominan dalam konteks waktu dan masalahnya. Dengan demikian yang lebih penting ialah kekuatan atau kekuasaan dominan apa yang mengarahkan diskursus media, Merujuk pada konsep Foucault bahwa dalam pengetahuan terdapat

kekuasaan, maka pengertian kekuasaan yang direpresentasikan dalam media akan tercermin dalam hirarki atau jenjang pengetahuan yang diproduksi. Foucault, mengartikan kekuasaan sebagai seperangkat hubungan, banyaknya kekuasaan sama dengan banyaknya jenis hubungan yang terjadi, misal antara pria dan wanita dalam satu keluarga, guru dengan murid, antara yang memiliki banyak pengetahuan dengan yang kurang. Apa yang dimaksud Foucault, kekuasaan akan tampak apabila antara pihak-pihak yang berhubungan tersebut satu sama lain terdapat makna lebih. Mereka yang memiliki makna lebih menguasai mereka yang memiliki makna kurang, baik dari kedudukan atau status maupun dari pemilikan pengetahuan. Dalam diskursus media, kemungkinan hubungan kekuasaan yang muncul tentang peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial, ialah hubungan-hubungan antara minoritas dengan mayoritas, antara elit dengan massa, antara penjaga dan penjaja, antara pembina dengan pelaksana.

Dalam melaporkan peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi diantara pihak-pihak hubungan kekuasaan tadi, media melakukan proses seleksi kemungkinan menerapkan beberapa model pembuatan berita sebagai mana dikemukakan di atas. Representasi peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial tadi memiliki landasan yang disebut ideologi. Dengan dimungkinkan penggunaan beberapa model proses pembuatan berita dan beraneka ragamnya hubungan kekuasaan dalam media maka ideologi yang tercermin dalam berita kerusuhan sosial pun akan beranekaragam. Keaneka ragaman tersebut juga tergantung pada konteks hubungan kekuasaan dalam

peristiwa kerusuhan tersebut, dan hubungan kekuasaan dalam media sebagai cerminan praktek-praktek sosial budaya.

Represi yang dilakukan dalam produksi media tidak saja datang dari pemerintah, tetapi juga dari konsumen media. Khalayak media dalam kaitan ini juga merupakan subyek politik. Artinya setiap individu atau kelompok memiliki kecenderungan untuk mengembangkan dan memperoleh kuasa-kuasa dalam mewujudkan kepentingan individu atau kelompoknya. Realitas inilah yang menjadi salah satu pertimbangan para awak media dalam mengembangkan diskursus, dan terlebih lagi bagi khalayak yang aktif mereka menjadi partisipan diskursus.

Dari Keterkaitan antara agen dan struktur dalam konteks lingkungan politik media yaitu antara para elit dengan struktur lingkungan politik elit akan tergantung pada budaya yang dianut oleh mereka. Menurut Pye dan Vebra (1965:7), bagi individu kebudayaan politik menyediakan arahan pengendalian mengefektifkan perilaku politik. Sedangkan bagi kelompok memberikan struktur nilai yang sistematis dan penjelasan rasional yang menjamin kesesuaian dalam kinerja institusi dan organisasi. Kebudayaan politik disebutkan oleh Vebra berisi sistem kepercayaan empiris, simbol-simbol pernyataan, nilai yang didefinisikan oleh situasi dimana tindakan politik berada.

Dengan demikian ketika elit politik berusaha melakukan intervensi pada produksi media akan juga merefleksikan budaya elit dan struktur politik lingkungannya. Dari sisi lain ketika elit politik dan juga massa terlibat dalam praktek

diskursus peristiwa kerusuhan sosial akan dilandasi oleh kebudayaan politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Verba. Paling tidak ada dua jalan merefleksikan budaya dalam diskursus dari aspek lingkungan politik, pertama melalui aspek bahasa yaitu kosa kata dan modalitas. Kedua melalui simbol-simbol yang digunakan para elit politik dan massa agar diskursus merefleksikan nilai-nilai budaya mereka.

Dalam diskursus tersebut mereka berusaha menguasai makna-makna terhadap kosa kata dan modalitas tersebut dan pihak lain kurang diberi kesempatan untuk memberikan makna yang mereka terima. Dalam kaitan hubungan antara agen dengan struktur dalam menjalankan media termasuk dalam merepresentasi kasus kerusuhan sosial, sebagai industri budaya di dalamnya terdapat kerja kolektif yang menghasilkan produk budaya massa. Para pengelola media merupakan bagian dari struktur sosial tertentu tentunya akan mempengaruhi struktur yang berperan dalam media, dan struktur tersebut diarahkan oleh nilai-nilai yang dianut oleh mereka sebagai kebudayaan. Dalam kaitan dengan kebudayaan, Parsudi Suparlan (1986) mengartikan sebagai *blue-print* atau pedoman menyeluruh bagi masyarakat dalam menghadapi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pedoman hidup mereka mungkin telah diperoleh secara turun temurun dan sudah menjadi tradisi mereka dan terwujud dalam kelakuan-kelakuan atau benda-benda yang meliputi unsur-unsur bahasa dan komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, organisasi sosial, agama, kesenian. Selanjutnya disebutkan bahwa di dalam kebudayaan suatu

masyarakat terdapat acuan-acuan yang sudah terseleksi untuk pemenuhan kebutuhan bagi kehidupan yang diakui penting dan dibakukan oleh masyarakat tersebut sebagai pranata, antara lain berupa pranata politik, keluarga, agama, pasar (Parsudi Suparlan: 1995:5).

Hasil produksi media massa merupakan produk budaya berupa teks yang tidak terlepas dari unsur-unsur komponen pembentuknya. Teks surat kabar yang dimuat dalam media disampaikan dengan bahasa yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam memiliki bahasa yang seharusnya menurut lingkungan budaya mereka (*langue*). Dalam konteks ini maka lingkungan budaya para pekerja media akan menjadi faktor dalam susunan diskursus dalam teks mengenai kerusuhan. Demikian juga pada saat khalayak mengkonsumsi teks yang diterimanya, mereka berada pada lingkungan budaya masing-masing yang tentunya mempunyai sistem koding masing-masing. Dengan demikian untuk tiga media yang berbeda latar belakang historisnya akan mempunyai perbedaan kebudayaan yang bisa mengarahkan tingkat pertautan kepentingan struktur dan agen dalam memproduksi dan merepresentasi kerusuhan sosial tersebut.

Jika lebih mementingkan tuntutan pasar untuk menjual konflik dalam isu kerusuhan sosial sebagai komoditi, maka agensi yang berlaku merupakan refleksi dari struktur kapitalisme. Dalam konteks Industri media maka media massa dalam menyajikan diskursus kerusuhan sosial akan didominasi oleh simbol-simbol material

dan perusahaan media akan mendominasi pandangan mengenai kebudayaan. Menurut Murdock (1991: 20), ada dua cara perusahaan mendominasi kehidupan budaya. Pertama peningkatan proporsi produksi budaya yang diarahkan langsung oleh kepentingan konglomerat. Kedua, perusahaan yang tidak mempunyai keterlibatan langsung dalam produksi budaya, mereka mempengaruhinya melalui aktivitas budaya, seperti melalui iklan dan sponsor. Kemungkinan terjadinya upaya mengkomoditikan kerusuhan sosial terbuka bagi perusahaan konglomerasi penerbit. Jika kerusuhan yang terjadi tidak ada kaitannya dengan perusahaan media dan perusahaan yang mempunyai kontribusi dalam pemasukan iklan maka, pilihan mengkomoditikan kerusuhan sosial dilakukan berdasarkan pertimbangan pasar media. Namun jika kerusuhan sosial berkait langsung dengan perusahaan penerbit atau pelanggan iklan maka dominasi dilakukan dalam rangka kepentingan yang lebih besar ialah menjaga citra publik terhadap perusahaan. Hubungan antara agen dan struktur dalam kaitan itu akan diarahkan oleh nilai budaya masyarakatnya. Dengan demikian karakteristik diskursus kerusuhan sosial melalui media akan terkait pada konteks tempat, jenis peristiwa kerusuhan dan karakteristik budaya media.

Berbagai kemungkinan hubungan kekuasaan atau terbentuknya dominasi menurut Marx merupakan desakan ideologi yang oleh Bourdieu disebut kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Dalam kasus ini, representasi hubungan kekuasaan dalam kerusuhan sosial kemungkinan dilandasi oleh bermacam ideologi, baik ideologi media maupun ideologi partisipan diskursus lainnya. Ideologi dalam

pengertian Van Dijk merupakan representasi sosial yang tersebar dan diyakini oleh suatu kelompok. Dalam praktek media para pekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya dengan mematuhi norma-norma profesional dihadapkan pada situasi konflik dengan motif organisasi bisnis dalam memperoleh keuntungan. Para pakar mengasumsikan bahwa ideologi profesionalisme dengan ideologi kapitalisme tidak bersesuaian. Secara umum ideologi profesionalisme anti untuk mengejar keuntungan dan anti persaingan pasar dan memanifestasikan gagasan pelayanan terhadap masyarakat. Pembiayaan tidak diperhitungkan sebagai faktor yang menentukan penyebaran pelayanan kepada masyarakat (Soloski, 1997 : 14). Namun demikian Larson (dalam Soloski: 1997 : 14) berpendapat walau pun kaum profesional dibayar mahal, untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memperoleh imbalan non profit bukanlah hambatan untuk menjadi seorang profesional. Kedua ideologi tersebut berkaitan erat, media massa dengan ideologi kapitalisme dalam arti media tersebut lebih menonjol untuk memperjuangkan keuntungan material, dalam melakukan kompetisi mereka juga membutuhkan profesionalisme.

Representasi peristiwa kerusuhan sosial kemungkinan dilakukan dengan mengembangkan ideologi kapitalisme, dengan menyajikan isinya hanya dari pertimbangan pasar agar media tersebut memperoleh keuntungan. Dalam hubungan ini Altschull (dalam Resse, 1995: 191) menjelaskan mengenai asumsi bahwa media merefleksikan ideologi yang membayarnya atau *pay the paper*. Kerangka dukungan sumberdaya tersebut yaitu : (1). Melalui pola resmi dimana media dikontrol oleh

negara seperti halnya di negara komunis. (2). Pola komersial, dimana media merefleksikan ideologi pengiklan dan kelompok pemilik media (3). Pola kepentingan, dimana media merefleksikan kelompok yang membiayai seperti partai politik dan agama. (4). Pola informal, yaitu isi media merefleksikan tujuan penyumbang individu yang ingin mempromosikan pandangannya.

Keseluruhan pola ideologi tersebut kemungkinan terjadi dalam diskursus kerusuhan sosial, kecuali pola resmi karena dalam era sekarang ini praktek penyelenggaraan media tidak tergantung lagi pada pengendalian negara, yang menonjol mungkin akan muncul dalam ideologi-ideologi dominan. Dalam kajian ini ideologi dominan ialah kapitalisme.

BAB III

STRATEGI ANALISIS DISKURSUS

A. Implikasi Methodologi

Perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kritikal pasca strukturalis. Perspektif ini mempunyai implikasi terhadap aspek-aspek ontologi, epistemologi dan metodologi serta axiology yang berbeda dengan perspektif lainnya baik positivistik maupun konstruktivisme (Guba, 1994: 109).

Secara umum teori-teori kritikal memiliki anggapan tentang realitas (*ontology*) yang diamati ialah sebagai realitas virtual yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di lingkungannya baik sosial, politik, kultural, ekonomi, etnik dan gender. Semuanya nilai tersebut terkristalisasi dalam perjalanan waktu. Artinya realitas dalam paradigma kritikal ialah realisme historis. Sedangkan dalam positivisme atau paradigma klaksik, adalah realitas yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal, walaupun diperolehnya secara probabilistik. Dalam konstruktivisme, realitas merupakan konstruksi sosial dimana kebenaran suatu realitas bersifat relatif berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan.

Secara epistemologi atau pandangan pengetahuan perspektif kritikal beranggapan bahwa pengetahuan yang terbentuk merupakan *transactional/subyektivist* dan tidak bebas nilai. Dalam paradigma kritikal nilai digunakan menjadi media dalam menggali dan mengemukakan temuan-temuan. Pandangan ini berbeda dengan perspektif positivistik dan konstruktivisme, dimana

dalam perspektif positivistik realitas merupakan realitas obyektif di luar diri si peneliti yang harus sejauh mungkin berada di luar obyek yang diteliti. Dalam konstruktivisme prinsipnya sama dengan perspektif kritikal yang tidak bebas nilai, namun realitas diperoleh merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.

Methodologi dalam perspektif kritikal menggunakan prinsip dialogik/dialektikal artinya metode yang mengembangkan terjadinya dialog dan dialektika antara peneliti dan sumber data. Analisis dilakukan secara komprehensif, kontekstual dan multi level menempatkan peneliti sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial. Sedangkan dalam positivistik, dilakukan pengujian hipotesis dalam struktur *hypothetico deductive method*. Dalam konstruktivisme, ditekankan pada empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas yang diteliti. Dengan demikian kriteria kualitas penelitian pun berbeda. Dalam perspektif kritikal, kualitas penelitian dilihat dari kaitan dengan *historical situatedness*, yaitu sejauhmana penelitian memperhatikan konteks histories, sosial, budaya, ekonomi dan politik, sejauhmana mampu mengurangi kebodohan dan apresiasi yang keliru serta memberikan stimulan untuk melakukan transformasi. Dengan demikian berbeda dengan kriteria dalam paradigma positivistik yang melihatnya dari aspek-aspek validitas baik internal maupun eksternal serta reliability instrumen dan obyektivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Sedangkan dalam perspektif konstruktivis, ukuran kualitas hasil penelitian

dilihat dari kepercayaan terhadap penelitian apakah kredibel, transferabel, dan confirmable. Selain itu juga dilihat dari tingkat autenticitynya, apakah data yang digunakan autentik atau tidak.

Dari aspek axiologis, penelitian dalam perspektif kritikal sama dengan konstruktivisme yaitu nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian. Sedangkan pada perpektif positivistik, nilai, etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian.

Dalam penelitian ini konteks situasi historis yang dimaksud ialah peralihan dari era pemerintahan yang otoriter menuju era yang mengembangkan tatanan demokrasi dan penerapan kapitalisme dalam era transisi tersebut. Temuan penelitian merupakan pengetahuan subyektif, yaitu merepresentasikan kondisi subyek penelitian yang tidak didasarkan pada kriteria dan indikator-indikator standar. Untuk mengetahui artikulasi kapitalisme dan hubungan kekuasaan yang ada, peneliti menghubungkan satu teks dengan teks lainnya sehingga menemukan makna apa yang tersembunyi dalam teks tersebut. Upaya menghubungkan antar teks didasarkan landasan pemikiran bahwa suatu teks hadir ke permukaan tidaklah begitu saja hadir dengan sendirinya tetapi memiliki asal muasalnya dan keterkaitan dengan yang lainnya (*Genealogi*).

Secara spesifik methode yang digunakan sesuai dengan perspektif teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan studi ini adalah analisis diskursus kritikal, yang merupakan integrasi antara analisis diskursus yang bertolak dari aspek bahasa

dengan analisa diskursus filosofis yang lebih mengarahkan pada susunan diskursus (*discourse formation*).

Melihat studi-studi dikursus yang pernah dilakukan yang menggunakan analisis diskursus terdapat dua kelompok, pertama yang lebih menitik beratkan pada analisis dalam studi bahasa dan kelompok lainnya lebih mengarahkan pada aspek-aspek praktek diskursif yang lebih banyak menekankan pada aspek filosofisnya. Fairclough mengemukakan satu integrasi atas kedua pemikiran ini dan disebut dengan studi diskursus atau analisa diskursus kritikal. Studi ini merupakan integrasi konsep yang dikemukakan Foucault dengan konsep analisis diskursus yang mengkaji dari segi linguistik. Jika analisis diskursus dilakukan dalam lingkup linguistik memusatkan perhatian terhadap elemen-elemen bahasa, sedangkan pada analisis kritikal linguistik/diskursus tidak saja menggambarkan struktur diskursif tetapi juga menunjukkan bagaimana diskursus dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan ideologi dan efek yang terjadi dari diskursus menjadi identitas sosial, hubungan sosial dan, sistem kepercayaan dan sistem pengetahuan (Mills, 1997: 149-150).

Analisis ini dikembangkan oleh para ahli bahasa (*linguist*) yang mempunyai perhatian besar dalam mengembangkan analisis-analisis politik seperti Norman Fairclough (Mills, 1997:149). Menurut Fairclough, analisis diskursus kritikal merupakan pendekatan yang mendasarkan pada praktek diskursif dari suatu komunitas dalam suatu jaringan yang disebut prosedur (*order*) diskursus. Artinya dalam analisis dilihat cara-cara yang digunakan dalam proses diskursus. Van Dijk (1998) dalam

kaitan ini mengemukakan bahwa ciri analisis diskursus kritikal ialah memberikan perhatian untuk menemukan dan menggambarkan cara-cara penyimpangan kekuasaan sosial yang terjadi (*social power abuse*), dominasi dan ketidak sejajaran yang tercipta kemudian direproduksi dan direkonstruksi melalui teks atau pembicaraan (*texts and talk*) dalam konteks sosial politik. Dengan demikian melalui analisis diskursus kritikal, dalam penelitian ini akan digali bentuk-bentuk dominasi, kesewenang wenangan, penyimpangan kekuasaan sosial yang tampak atau terbenam dalam diskursus kerusuhan sosial dan bagaimana cara-cara reproduksi dan konstruksi serta rekonstruksinya dalam berita-berita surat kabar sebagai praktek diskursif.

Dalam linguistik, analisis diskursus digunakan untuk menggambarkan struktur yang berada di balik kalimat, dimana struktur kalimat dan komponen internalnya seperti subyek, kata kerja, obyek atau kata benda, kata pelengkap digunakan sebagai analogi. Jadi dalam penelitian ini ungkapan-ungkapan atau pernyataan yang dirumuskan dalam kalimat pada teks kerusuhan sosial yang saling berkaitan membentuk suatu diskursus. Analisis pada tataran ini memberikan gambaran lingkup mikro suatu diskursus. Sumbangan pemikiran Foucault, pada analisis linguistik ialah berupa penambahan analisis pemahaman terhadap unsur pokok yang berada di balik representasi bahasa tadi yaitu praktek diskursif (*discursive practice*) atau *episteme* yang membentuk pengetahuan serta kuasa-kuasa yang melekat melalui diskursus.

Mills (1997:150) dalam kaitan integrasi kedua konsep tersebut mengemukakan argumentasi Fairclough tentang kontribusi kerangka kerja Foucault

dalam analisis diskursus yang berbasis pada linguistik yaitu meliputi dua pandangan. Pertama, hakekat diskursus yang menggambarkan obyek dan subyek sosial. Artinya analisis diskursus dilakukan bertolak dari pandangan bahwa gambaran fenomena sosial sebagian besar dibentuk melalui proses diskursus. Kedua, diskursus mempunyai keunggulan untuk menghubungkan antar diskursif (*interdiscursivity*) dan antar teks (*intertextuality*). Diskursif didefinisikan sebagai keterkaitan teks satu dengan teks lainnya dengan cara yang kompleks. Artinya, analisis diarahkan untuk melihat keterkaitan di dalam dan antara struktur diskursus. Sebaliknya bertolak dari kerangka kerja Foucault, Fairclough menambahkan pandangan linguistik dengan aspek referensi suatu realitas teks dalam konteks tertentu dan juga suatu pemikiran bahwa keterkaitan antar teks tersebut dilembagakan dalam proses referensi (*reference*). Menurut Brown dan Yule (1996:203-4), referensi menunjukkan hubungan antara ungkapan dengan wujud-wujud di dunia, yang di dalamnya terdapat unsur kosa kata (leksikal) yang mengandung makna (ciri komponen arti) dan denotasi (perangkat benda yang dapat diterapi dengan betul).

Selanjutnya Fairclough (dalam Mills, 1997:151) mengemukakan dua kerangka kerja dalam analisis diskursus kritis, yaitu: *pertama* analisis diarahkan pada proses pembentukan diskursif dari suatu hubungan sosial untuk menggambarkan konstituen interaksi yang terjadi dan juga menggambarkan kuasa-kuasa yang melekat dalam susunan diskursif tersebut. Dalam analisis ini lebih banyak memperhatikan cara-cara interaksi dan menunjukkan kompleksitas kerangka hubungan kuasa dalam

masyarakat secara keseluruhan. Kedua, Fairclough memusatkan perhatian pada keterkaitan hakekat diskursus, yaitu *intertextuality* dimana konsep awalnya dikemukakan oleh Julia Kristeva, sebagai kecenderungan suatu teks mempunyai kaitan dengan teks lain dan dibentuk oleh rujukan (*reference*) teks tersebut. Fairclough kemudian menambahkan konsep Foucault pada konsep Kristeva tersebut, dengan menempatkan *intertextuality* dalam suatu referensi pada konteks sosial dan menekankan sebagai suatu mekanisme diskursif yang membawa perubahan dalam diskursus.

Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka pikiran teoritis, perspektif yang digunakan dalam analisis diskursus dalam studi ini ialah perspektif kritikal. Artinya referensi hubungan sosial dalam proses diskursif yang dimaksud adalah dikaji dengan perspektif teori kritikal yaitu ekonomi politik kritikal. Realitas dalam studi ini dipandang sebagai konstruksi semu (*virtual*), dipahami sebagai hasil bentukan sejarah, dan kekuasaan-kekuasaan yang melingkupinya, termasuk juga dalam teks-teks kerusuhan sosial. Sejarah dalam pengertian disini bukan sejarah menurut dimensi waktu tetapi menurut dimensi konteks yang berkembang, yaitu konteks transisi tatanan otoriter menuju tatanan demokrasi dan implementasi kapitalisme dalam era transisi tersebut.

Dengan demikian dalam penelitian ini teks kerusuhan sosial tidak dipandang sebagai fakta-fakta yang terisolasi yang membentuk pengetahuan tersendiri, tetapi sebagai objek yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan fakta sosial lainnya dan

dalam studi ini interpretasi peneliti dibatasi dalam domain pengetahuan tertentu yaitu ekonomi politik kritikal.

B. Kerangka Analisis

Setiap analisis tipe diskursus sebagaimana dikemukakan dalam kerangka pemikiran teoritis, diarahkan pada salah satu diantara dua pilihan yaitu peristiwa komunikatif (*communicative event*) dan prosedur diskursus (*the order of discourse*) atau memfokuskan kepada keduanya yang saling melengkapi (Fairclough, 1995: 56). Dalam studi ini diskursus yang diteliti ialah mengenai isu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial, yaitu peristiwa komunikasi berupa liputan media tentang kerusuhan sosial dan prosedur diskursus yang digunakan berupa proses dan aturan-aturan melandasi peristiwa komunikasi tersebut. Studi ini akan menggunakan methodology yang memfokuskan peristiwa komunikatif dengan *the order of discourse* yang saling melengkapi. Artinya dengan perspektif yang saling melengkapi ini dapat dilakukan pergantian analisis pada data yang sama (lihat Fairclough, 1995: 57).

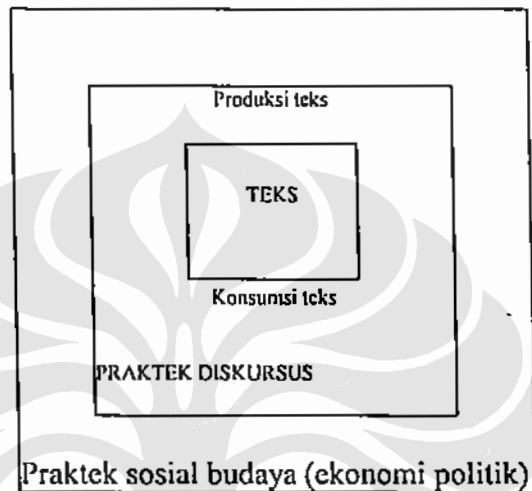
Kerangka analisis penelitian mengacu pada kerangka teoritis yang melihat ada keterkaitan secara holistik antara tiga dimensi diskursus yaitu praktek sosial budaya, praktek produksi dan konsumsi teks dan teks itu sendiri. Menurut Fairclough, kerangka kerja analisis diskursus kritikal peristiwa komunikatif merupakan analisis keterkaitan antara teks dengan praktek diskursus dan antara praktek diskursus dengan praktek sosial budaya. Secara keseluruhan ada tiga dimensi

penelitian peristiwa komunikatif yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Pada lingkup mikro yaitu analisis teks, lingkup meso adalah analisis praktek diskursif dan analisis lingkup makro ialah analisis praktek sosial budaya.

Analisa mikro akan melihat diskursus pada tataran artikulasi, yaitu dalam hal ini menganalisis pernyataan-pernyataan mengenai kerusuhan sosial pada teks surat kabar. Analisis lingkup meso dilakukan terhadap proses produksi dan konsumsi teks dengan mengkaji proses produksi teks-teks kerusuhan sosial di masing-masing media dan aturan-aturan yang mengarahkan diskursus kerusuhan sosial, serta karakteristik konsumen ketiga media yang menjadi pertimbangan media memproduksi teks. Dimensi ketiga atau analisis makro merupakan analisis praktek sosial budaya yang dalam hal ini diarahkan pada satu perspektif ekonomi politik kritikal. Ketiga tataran analisis di atas merupakan satu kesatuan dalam kerangka sebagaimana dikemukakan oleh Fairclough tampak dalam gambar 3.

Gambar 3

**Kerangka Kerja Analisis Diskursus Kritisal
Peristiwa Komunikatif**
(Fairclough, 1996:59)



Menurut Fairclough (1998:97-98), ketiga tataran analisis tersebut tergabung dalam tiga dimensi analisis yang saling terkait yaitu analisis deskripsi (*description*), interpretasi (*interpretation*) dan eksplanasi (*exsplanation*). Analisis teks merupakan tahap analisis deskripsi kemudian hasil analisis teks tersebut dihubungkan dengan hasil analisis praktek diskursus yang merupakan tahapan interpretasi mengenai keterkaitan antara teks yang ada dengan proses produksi dan konsumsi. Tahap ketiga merupakan analisis sosial budaya yang menghubungkan antara hasil analisis praktek diskursus dengan praktek sosial budaya. Pada tahap ini analisis yang dilakukan ialah analisis menerangkan atau eksplanasi (*explanation*) dari konteks lingkungan sosial budaya dari teks yang dianalisis dan praktek diskursus yang terjadi.

Apa yang dikemukakan oleh Fairclough tersebut dalam prakteknya tidak secara tajam membedakan tiga jenis analisis untuk masing-masing lokus tetapi ketiganya terpusat pada teks yang dalam analisis digunakan perspektif praktek diskursus dengan praktek sosial budaya. Artinya ketiga tataran analisis tadi terpusat pada analisis antar diskursif atau *interdiscursivity* dan analisis antar teks atau *intertextuality*. *Interdiscursivity*, berupa analisis untuk menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lainnya serta dengan non diskursus, sedangkan *intertextuality* merupakan cara dalam melihat keterkaitan antar teks dalam masing-masing diskursus. Bahan-bahan analisis yang utama adalah teks-teks kerusuhan sosial dan teks-teks yang lain yang menyiratkan praktek diskursif. Oleh karena itu teks lainnya yang akan diteliti baik dalam media yang diteliti yaitu *genre* berita dan lainnya maupun dokumen-dokumen yang memberikan arahan atau pengaturan dalam diskursus berita kerusuhan sosial, serta hasil wawancara dengan pimpinan media dan pelaksana yang terkait pada proses produksi teks.

Lokus analisis penelitian ini secara keseluruhan ialah media massa yaitu media cetak surat kabar, dimana kesimpulan penelitian ini merupakan pemahaman terhadap surat kabar sebagai media diskursus. Sesuai dengan kerangka teoritis yang dikemukakan di muka, maka lokus yang dianalisis berada pada multi level sebagai berikut:

Tabel 1
Subyek dan Lokus Analisis

Subyek analisis	Lokus Analisis
Teks	Teks kerusuhan sosial
Praktek Diskursus	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Media/Industri media • Khalayak Media
Praktek Sosial Budaya	Praktek ekonomi politik media

Informasi yang diperoleh dari masing-masing unit diperlakukan sebagai teks, yaitu teks berita kerusuhan sosial, teks hasil analisis praktek diskursus, teks hasil analisis praktek sosial budaya (ekonomi politik). Ketiganya dianalisis dalam satu kesatuan sebagai analisis antar teks (*intertextuality*) dan analisis antar diskursus (*interdiscursivity*).

D. Prosedur Analisis

Sesuai dengan kerangka analisis terdapat tiga tingkatan analisis, pada tingkatan makro dilakukan analisis terhadap praktek ekonomi politik sebagai gambaran situasi histories, setelah itu analisis meso dilakukan untuk meneliti diskursus pada lokus media dan khalayak untuk menggambarkan produksi dan konsumsi media.

Pada tingkat mikro atau pada teks akan digunakan teknik analisis *framing*, analisis ini antara lain dilakukan oleh Gamson dan Modigliani (1995:3) yang bertolak dari kerangka konseptual bahwa media diskursus diterima sebagai seperangkat

kemasan interpretive yang memberikan makna terhadap suatu isu. Kemasan memiliki struktur internal dimana yang menjadi inti atau core dari kemasan tersebut merupakan ide utama yang diorganisasi sebagai sebuah *frame*¹. Sebuah kemasan menunjukkan sejumlah simbol yang diringkaskan secara berbeda yang mengungkapkan *frame* utama dan posisi. Dengan konsep tersebut, maka sebuah *frame* menunjukkan sebuah gagasan sebagai makna dari suatu pernyataan. Didalam *frame* kemungkinan terdapat posisi yang kemungkinan saling bertentangan. Dalam kajian ini *frame* yang dimaksud merupakan sebuah makna dari suatu pernyataan sebagai *frame* media. Dalam *frame* media tersebut kemungkinan menunjukkan posisi lain yang memberikan makna mendukung atau menentang terhadap suatu obyek.

Analisis *framing* diawali oleh penggalian bingkai pada teks, kemudian mengemukakan bingkai kapitalisme dan hubungan kekuasaan berdasarkan perangkat tertentu. Setelah itu dilakukan analisis interpretasi dari perspektif praktek diskursus dan analisis eksplanasi berdasarkan konteks praktek sosial budaya.

a. Pemahaman Praktek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya yang menjadi domain analisis ialah aspek ekonomi politik sebagaimana diuraikan dalam kerangka pikiran teoritis. Dalam konteks ini dikemukakan analisis praktek kapitalisme di Indonesia pada masa akhir pemerintahan

¹ Frame oleh Gamson (1992:384) diartikan sebagai rangka bangunan dari suatu struktur bangunan yang laten daripada sebagai bingkai yang merupakan pembatas gambar dari lingkungannya. Dalam bahasa Indonesia *frame* diterjemahkan sebagai bingkai, merupakan rangka membatasi suatu gambar atau lukisan atau foto sebagai ide, gagasan. Dengan demikian kata bingkai dalam pengertian ini bukan sekedar rangka pembatasnya tetapi tertuju pada isi didalam batas tadi.

Soeharto dan awal pemerintahan pasca Orde Baru. Berdasarkan pemahaman terhadap praktek kapitalisme tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap praktek media massa untuk menjelaskan kecenderungan dan arah kapitalisme dalam industri media di Indonesia dalam konteks era transisi dari tatanan pemerintahan yang otoriter ke tatanan yang mengembangkan demokrasi.

b. Pemahaman Praktek Diskursus Kerusuhan Sosial.

Dalam rangka memahami produksi teks kerusuhan sosial akan dilakukan wawancara dan studi dokumenter, terhadap aspek-aspek produksi dan konsumsi teks di tiga surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika. Aspek produksi yang diteliti ialah proses produksi teks kerusuhan sosial yang dialami dalam setiap komponen produksi, serta faktor-faktor yang dominan menguasai produksi. Sedangkan aspek konsumsi diteliti terbatas pada karakteristik konsumen atau pembaca media yang diteliti, yaitu segmentasi pembaca dari aspek demografis, status sosial dan ekonomi dan gambaran posisi pembaca dalam konteks perubahan tatanan politik. Dokumen dan hasil wawancara akan dikategorikan sebagai teks sebagai salah satu sumber dalam analisis antar teks (*intertextuality*). Aspek yang akan digali dan teknik yang digunakan dalam memahami proses produksi dan konsumsi teks ialah sebagai dikemukakan dalam tabel 2.

Tabel 2

Aspek Yang Digali, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data

Unit Praktek Diskursus	Aspek Yang Digali	Sumber data (Subjek Penelitian)	Teknik pengumpulan data
Produksi Teks	Bentuk perusahaan	Dokumen	Analisis Dokumen
	Struktur Pemilikan Modal	Dokumen	Analisis Dokumen
	Struktur Pasar	Dokumen	Analisis Dokumen
	Bentuk dan struktur Organisasi Media	Dokumen	Analisis Dokumen
	Mekanisme Kerja media - Khusus produksi Teks	Dokumen/Pimpinan Redaksi.	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Peranan Pemimpin Umum/Perusahaan	Pemimpin Umum/Perusahaan	Wawancara
	Peranan Wartawan	Wartawan peliput peristiwa kerusuhan sosial	Wawancara
	Peranan iklan	Bagian Periklanan media	Wawancara
	Peranan Sumber informasi	Pemimpin redaksi/wartawan	Wawancara
	Peraturan formal dalam operasional Media. ▪ UU Tentang Pers ▪ Kode etik ▪ Visi dan Misi Penerbitan	Dokumen	Analisis Dokumen

Unsur Praktek Diskursus	Aspek Yang Digali	Sumber data (Subyek Penelitian)	Teknik pengumpulan data
Konsumsi Teks	Karakteristik Pembaca 1. Kategori pembaca berdasarkan demografi 2. Penerimaan isi media dalam konteks ekonomi, politik dan budaya.	Data karakteristik pembaca Hasil penelitian Nara sumber.	Studi dokumenter dan wawancara mendalam.

c. Analisis teks.

Dalam tahap ini akan dilakukan analisis terhadap teks kerusakan sosial dengan perspektif ekonomi politik untuk menggambarkan artikulasi kapitalisme dan menemukan hubungan kekuasaan yang direpresentasikan (*represented*) dalam diskursus kerusakan sosial. Untuk itu akan diungkapkan gambaran cara-cara diskursus melalui teks itu terjadi dengan menggali bentuk-bentuk atau cara-cara yang digunakan dalam merepresentasikan (*representing*) suatu peristiwa atau pendapat. Kerangka analisis dalam melihat teks untuk mengungkap bingkai kapitalisme dan hubungan kekuasaan ialah berupa pemahaman yang terjadi dalam proses produksi dan konsumsi teks.

Artikulasi kapitalisme diungkap dengan menunjukkan cara-cara produksi kapitalisme yang utama sebagaimana dalam proses produksi material, yaitu adanya

produksi yang terus menerus untuk menciptakan keuntungan, akumulasi kapital (modal) yang sebesar-besarnya, dan adanya konsentrasi serta sentralisasi perusahaan sehingga keuntungan akan tersentralisasi kepada kelas atau kelompok tertentu. Dalam tingkatan imaji, akan diungkap bagaimana media memproduksi imaji dan bagaimana imaji yang diproduksi diakumulasinya sebagai suatu kapital, dan sejauhmana konsentrasi dan sentralisasi terjadi.

Hubungan kekuasaan akan diungkap dengan menggunakan model oposisi biner yang menggambarkan posisi-posisi yang berbeda. Model ini merupakan metode yang digunakan analisis strukturalis (lihat Fiske 1982: 62) untuk mengungkapkan apa yang tenggelam atau ditenggelamkan dalam teks. Walaupun model ini merupakan metode yang dikembangkan analisis strukturalis yang bertolak dari struktur (bahasa) yang dianggap stabil, dalam perkembangan berikutnya, berdasarkan kritik-kritik terhadap strukturalisme, model ini berkembang tidak dalam pengertian struktur (bahasa) yang stabil. Jaques Derrida, menggunakan analisis oposisi biner dalam arti penyelidikan yang rinci tentang hubungan antara dua aspek struktur yang diduga memiliki makna bertentangan. Ia menunjukkan ketidakstabilan struktur dengan menunjukkan oposisi biner yang sederhana dengan memberikan analisis dari elemen lain (Payne, 1997 : 64-65). Analisis model oposisi biner dalam penelitian ini tidak saja bertolak dari bahasa yang digunakan termasuk aspek leksikal, tetapi juga ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan hubungan kekuasaan atau konflik yang direpresentasikan dalam berita peristiwa kerusuhan sosial.

Instrumen yang digunakan sebagai landasan logika dalam menjelaskan artikulasi kapitalisme dan hubungan kekuasaan ialah beberapa instrumen yang dikemukakan Gamson yang dikembangkan berdasarkan perbandingan dengan instrumen Van Dijk dan Fairclough. Instrumen yang dikemukakan di bawah ini bersifat terbuka dan hanya digunakan sebagai titik awal dalam menganalisis teks pada media tersebut.

Tabel 3
Pearangkat Analisis *Frame* Teks Kerusuhan Sosial

<i>Fairclough (1995,57-58)</i>	<i>Van Dijk(1989)</i>	<i>Gamson dan Modigliani (1989:3-4)</i>	<i>Instrumen yang akan digunakan</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Vocabulary dan semantics • Grammar of sentences • Sound system dan writing system • Textual organisation • Cohesion • Coherence • Clause • Multy Semiotic 	<ul style="list-style-type: none"> • Topik • Discourse Scheme • Local Meaning <ul style="list-style-type: none"> • Style • Rhetorical Devices: Methapor, Euphemism • Speech acts • Interactional dimentions 	Framing devices: <ul style="list-style-type: none"> • Methapor • Catchphrases • Exemplaar • Depiction • Visual image Reasioning devices <ul style="list-style-type: none"> • Roots • consequence • Appeal to principle 	Framing devices: <ul style="list-style-type: none"> • Methapor • Catchphrases • Exemplaar • Depiction • Visual image • Euphemism • Vocabulary dan simantics • Modalitas Reasioning devices <ul style="list-style-type: none"> • Roots • Consequencey • Appeal to principle

Instrumen yang digunakan oleh Fairclough tampak lebih menekankan kejelasan narasi teks. Narasi keseluruhan teks dilihat berdasarkan pemahaman koherensi baik lokal maupun global sebab di sini dilihat hubungan isi pada tingkat

lokal kalimat atau paragraf, dan koherensi global pada hubungan struktur yang berkaitan dengan tema. Hal ini secara rinci ditunjang oleh instrumen analisis pada level tata bahasa (*grammar*) suatu kalimat, organisasi teks, kalimat. Fairclough, juga memberi peluang untuk menarasikan teks kata-kata, dengan mengemukakan instrumen multi semiotik.

Instrumen yang digunakan oleh Van Dijk, tampak menonjol dalam menjelaskan bentuk makna teks dengan instrumen yang mengungkap makna makro. Hal ini terlihat dari penggunaan instrumen topik, skema diskursus, aturan pembicaraan serta dimensi interaksional. Dalam mengungkapkan makna rethorik, Van Dijk menggunakan *metaphor* dan *euphemism*.

Gamson, disamping menunjukkan analisis yang rinci namun memberikan gambaran makro suatu teks. Instrumen untuk menunjukkan *frame* media pada tataran makro dan didukung oleh penjelasan alasan-alasan atau argumentasi baik yang mendasar maupun yang kausalitas dan prinsip-prinsip yang mendasari satu frame.

Dalam penelitian ini tidak akan menggunakan keseluruhan instrumen yang dikemukakan oleh Fairclough dan Van Dijk. Instrumen Fairclough dalam penelitian ini terlalu mikro dan hanya bermanfaat untuk memberikan gambaran naratif suatu teks. Instrumen yang digunakan Van Dijk tampak hampir sama dengan Gamson dan bahkan lebih lengkap Gamson dan keduanya memberikan arahan untuk mengungkapkan makna dari teks yang bersumber dari subyek yang tidak terlalu rinci. Penelitian ini akan menggunakan instrumen Gamson dengan penambahan dari

instrumen yang digunakan oleh Fairclough dan Van Dijk. Instrumen yang bersumber dari Fairclough yang akan digunakan ialah, Vocabulary dan semantik dan salah satu aspek dari kalimat yaitu modalitas. Sedangkan dari Van Dijk akan digunakan euphemism. Pengertian dari masing-masing instrumen tersebut ialah sebagai berikut:

1. Metafora (*Metaphora*):

Artinya menggantikan atau mentranfer suatu eksistensi benda atau pengertian tertentu. *Metaphora* bisa merupakan kata atau sekelompok kata yang bukan mencerminkan kata atau kelompok kata secara harfiah, tapi hanya merupakan analogi. Misalnya, dalam peristiwa kerusuhan penolakan UU PKB, para pemimpin diibaratkan sebagai *klub sepakbola*, dan RRU UU PKB sebagai *gol bunuh diri*. Isu keamanan telah menjadi “kapital” karena telah dijadikan komoditas yang diperebutkan antara pemerintah (*klub sepakbola*) dan rakyat.

2. Penonjolan ungkapan (*Catchprase*) :

Berasal dari frase, yaitu gabungan dua kata yang mengandung satu pengertian. *Catchprase* mengandung arti penonjolan satu kesatuan kata yang mengandung makna khusus atau arti konotatif, antara lain berupa slogan. Misal phrase yang menggambarkan imaji kerusakan material yang tinggi, digunakan *frase*: “sekiar 300 jongko hancur lebur”. Penggunaan kata hancur lebur menunjukkan adanya penonjolan makna tingkat kerusakan atau kerusuhan sosial yang luar biasa. Frase ini menyiratkan makna terperdayanya kelompok atau kelas masyarakat bawah.

3. Contoh (*Exempler*):

Pemberian contoh-contoh baik yang berlaku pada masa lalu maupun dalam konteks atau tempat lain yang digunakan sebagai peringatan atau pelajaran. Misal dalam artikulasi kerusuhan sosial yang berlatar belakang masalah sosial, yaitu teks tawuran antar pelajar, surat kabar merujuk pada peristiwa sebelumnya untuk memberikan gambaran bahwa kejadian-kejadian serupa merupakan suatu penyakit sosial yang sulit diatasi: "Catatan Media dalam satu pekan ini tiga nyawa melayang akibat tawuran pelajar"

4. Penggambaran (*Depiction*).

Merupakan penggambaran suatu obyek bisa suatu isu, peristiwa, pendapat, fakta atau orang yang bersifat konotatif dan cenderung memberikan gambaran, imaji, efek tertentu yang berkaitan dengan obyek tersebut. Depiction bisa diungkapkan dalam bentuk frase, proposisi, kalimat maupun kelompok kalimat. Misal, dalam kasus teks kerusuhan Cibadak Mall untuk memberikan gambaran bahwa para pedagang kaki lima ada pada posisi yang memiliki ciri-ciri kuasa terhadap masyarakat disekitarnya, "pedagang kaki lima (PKL) yang selalu bikin ulah, tidak sopan, tidak hormat dengan masyarakat setempat"

5. Imaji Visual (*visual image*)

Gambaran citra (imaji) secara visual, misal berbentuk icon yaitu tanda yang memberikan gambaran suatu obyek yang menyerupai yang sebenarnya. Dalam kaitan

ini bisa berupa photo atau karikatur yang merepresentasikan suatu obyek. Foto kerusuhan sosial yang menggambarkan pasukan anti huru hara yang sedang mengejar para demonstran, merupakan icon dari aparat dan demonstran, dari pemegang kekuasaan terhadap rakyat.

6. Penghalusan(*Euphemism*)

Penyederhanaan atau penghalusan suatu pernyataan sehingga arti yang sebenarnya tampak terselubung. Misal, penggunaan kata “diamankan” merupakan penghalusan dari kata ditangkap kemudian dimasukan ke ruang tertutup (sel). Kata diamankan tersebut, bisa menyiratkan kondisi sebaliknya yaitu rasa tidak aman.

7. Penggunaan kata atau simantik (*Vocabulary and semantic*)

Merupakan pilihan kata dalam konteks kalimat dan konteks tema global yang memberikan makna simantik tertentu. Contoh pilihan kata “dikepung” dan “menyerbu” dalam teks demonstrasi yang disertai bentrok phisik, menunjukkan satu pertarungan untuk memperoleh kebebasan.

8. Modalitas

Bentuk bahasa yang menggambarkan penilaian berdasarkan nalar, rasa atau keiinginan pembicara sesuai dengan ekspresi pengungkapan jiwanya. Misal dalam kalimat: “Mungkin” pertolongan terlambat. Kata mungkin merupakan modalitas, yang menunjukkan dugaan ada fungsi Institusi yang seharusnya memberikan pertolongan, dan sekaligus memberikan gambaran (imaji) tentang lembaga ini.

9. Ungkapan landasan (*Root*)

Merupakan ungkapan landasan atau sebab-sebab dari suatu peristiwa tertentu. Uraian sebab-sebab dalam teks mungkin merupakan laporan atau kutipan pernyataan sumber.

10. Akibat (*Consequency*)

Merupakan ungkapan penjelasan rasional berdasarkan logika akibat yang terjadi dari suatu tindakan atau gagasan yang diungkapkan.

11. Imbauan mendasar (*Appeals to principle*)

Yaitu pernyataan-pernyataan yang mengemukakan imbauan atau pengakuan terhadap suatu keyakinan atau pendirian, misal pernyataan yang mengungkapkan tuntutan moral.

d. Analisis order diskursus.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian di muka di antara dua tipe diskursus penelitian ini akan dilakukan dengan analisis peristiwa komunikatif dengan *order of dicourse* akan diteliti secara komplementer, artinya analisis order diskursus dilakukan bersamaan pada analisis peristiwa komunikasi.

Analisis *order of dicourse* ditujukan untuk menginterpretasi berbagai perubahan dalam proses diskursus. Dalam analisis ini akan dilihat hubungan antar teks dalam satu *genre* dan antar *genre*. Satu peristiwa kerusuhan biasanya direpresentasikan dalam beberapa berita meliputi berita langsung yang melaporkan suatu peristiwa maupun tentang pendapat-pendapat yang berkaitan dengan laporan

tersebut dari berbagai sumber.

Untuk tujuan memahami proses dan aturan-aturan diskursus atau praktek diskursif akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi teks kerusuhan sosial pada media yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan analisis teks lainnya yang memuat dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi kerusuhan sosial melalui teks surat kabar. Selain itu juga akan dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan komponen penyelenggara media sebagai mana dikemukakan dalam tabel 2 di atas. Dengan demikian pemahaman mengenai praktek diskursus dan praktek sosial dalam perspektif kritis merupakan landasan dalam menafsirkan (menginterpretasi) teks sebagai media diskursus kerusuhan sosial.

e. Kasus dan cakupan waktu penelitian.

Cakupan waktu penelitian dalam lokus diskursus sesuai dengan perspektif penelitian ini yaitu teori kritis ialah waktu histories dalam arti bukan dalam konsep urutan atau rentang waktu (hari atau jam), tetapi cakupan waktu konseptual dan teoritis. Dalam penelitian ini ialah situasi transisi dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang otoriter menuju tatanan yang demokratis serta praktek kapitalisme dalam situasi transisi tersebut. Peristiwa-peristiwa kerusuhan yang berada dalam konteks histories tersebut, dalam studi ini ialah peristiwa sekitar yaitu sebelum dan sesudah peristiwa reformasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Peristiwa sebelum reformasi dan mendekati peristiwa

reformasi ialah peristiwa kerusuhan Tasikmalaya yang terjadi bulan Desember 1996 dan isunya berkembang sampai awal tahun 1997. Peristiwa ini dipilih sebagai kasus karena merupakan bagian dari konteks histories transisi, dimana pada waktu itu gerakan untuk melakukan perubahan semakin eksplisit. Peristiwa lain dipilih sebagai bahan penelitian ialah peristiwa-peristiwa setelah Reformasi, yaitu Semanggi II, Cibadak Mall dan Glodok Plaza serta beberapa kerusuhan antar pelajar dan antar warga. Selain pertimbangan situasi histories, peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial yang dipilih juga mempertimbangkan kerangka teoritis mengenai tipe kapital (material, kultural, sosial, simbolik) yang kemungkinan menjadi ajang perebutan.

Teks surat kabar yang dianalisis ialah setiap laporan mengenai suatu peristiwa atau pendapat, sehingga dalam analisis ini disamping berita lempang juga diteliti tajuk, pojok, artikel, surat pembaca yang berkaitan dengan kerusuhan sosial. Surat kabar yang akan dijadikan kasus dalam penelitian ini ialah Kompas, Republika dan Media Indonesia,

Dokumen atau teks yang diteliti dimulai dengan tanggal awal surat kabar tersebut memuat peristiwa kerusuhan, dan kemudian seluruh berita, artikel, pojok dan gambar yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dianalisis sesuai dengan kerangka analitis yang telah disusun. Penulis kemudian memilih dokumen atau teks yang memiliki informasi yang mengandung instrument bingkai yang dicari. Secara keseluruhan teks yang diteliti ada dalam jangka waktu sebagai berikut:

Tabel 4 berikut merupakan kategori kasus dan cakupan waktu dari teks yang

diteliti sebagai berikut.

Tabel 4

Kasus Peristiwa Kerusuhan Sosial dan Lingkup Waktu Penelitian

Kategori	Peristiwa Kerusuhan	Lingkup Waktu
Kapital material	Kerusuhan " Cibadak Mall"	10 Oktober 2000
	Kerusuhan Plaza Glodok	14 – 19 Mei 2000
Kapital kultural	Kerusuhan di Tasikmalaya	27 Desember 1996 – 14 Pebruari 1997
Kapital sosial	Tawuran Pelajar	3 Desember 1999, 29 Maret – 21 Maret 1999
	Tawuran antar warga	
Kapital politik	Semanggi II -RUU PKB	24 September 1999 – 29 September 1999

Dalam satu peristiwa kerusuhan sosial dimungkinkan memiliki lebih dari satu sumberdaya yaitu baik kapital ekonomi, sosial, kultural dan politik. Jadi mungkin saja dalam teks kerusuhan sosial berdimensi politik di dalamnya diartikulasikan kapital sosial dan kultural dan malah politik.

BAB IV

KONTEKS SITUASI HISTORIS DAN PRAKTEK MEDIA MASSA

Secara teoritis apa yang tergambar dalam sajian media merupakan refleksi dari suatu latar belakang makro situasi kemasyarakatan di dalam dan di luar lingkungan media. Dalam konteks ini maka untuk mengungkap fenomena yang terjadi dalam teks media perlu dilakukan tinjauan mengenai situasi kemasyarakatan dalam lingkup media yang dianalisis. Media massa sebagai suatu institusi sosial berada pada suatu ruang dimana media tidak saja memainkan peranan dalam tataran simbolik dengan mengembangkan imaji tetapi juga melakukan transaksi dalam rangka mengakumulasi nilai material pihak-pihak yang terlibat dalam industri media. Kecenderungan arah dan situasi tarik menarik antara dimensi simbolik dan ekonomi inilah menjadi latar praktek media massa. Oleh karena itu dalam tinjauan situasi kemasyarakatan praktek media massa di bawah ini akan dilihat dari perspektif ekonomi politik, yaitu perkembangan kapitalisme.

A. Ekonomi Politik Media dalam Era Transisi di Indonesia.

Era transisi dalam konteks ini memiliki dua pengertian, pertama merupakan era perubahan dari struktur ekonomi dimana peran negara sebagai pengendali berubah menuju pada tatanan ekonomi didasarkan mekanisme pasar (market). Kedua, transisi memiliki pengertian sebagai proses perubahan dari tatanan politik pemerintahan yang didominasi oleh satu kekuatan menjadi tatanan yang mendorong terjadinya

pemberdayaan masyarakat dan menghargai adanya pluralisme. Kedua aspek perubahan tersebut saling berinteraksi melahirkan berbagai variasi praktek ekonomi politik.

1. Praktek Kapitalisme di Era Orde Baru.

Dalam evolusi perkembangan masyarakat menurut Habermas, masyarakat dewasa ini sejak akhir abad lalu merupakan masyarakat kapitalis lanjut (*late capitalism*) sebagai kelanjutan dari masyarakat tradisional dan masyarakat kapitalis liberal. Setelah masyarakat tradisional mengalami krisis legitimasi sekuleritas yaitu ikatan-ikatan agama, mitos, dan metafisika hilang pada tingkah laku sosial maka munculah masyarakat kapitalis liberal dengan ideologi borjuis yang mengumandangkan kebebasan.

Dalam kapitalisme¹, kapital merupakan porsi kekayaan suatu bangsa yang dibuat manusia, oleh karena itu merupakan suatu yang bisa direproduksi. Alat-alat produksi (kapital) dimiliki oleh minoritas individu yang menguasai hak legal untuk menggunakannya sebagai pendapatan pribadi. Kapitalisme berkaitan dengan sistem pasar yang menentukan distribusi, alokasi sumberdaya, menetapkan tingkat pendapatan, gaji, sewa, keuntungan dari kelas sosial yang berbeda (Lekachman: 1981,3). Pihak yang memegang peran dominan dalam masyarakat kapitalis ialah para

¹ Merupakan ciri esensial, dan dalam prakteknya terdapat beberapa perbedaan terutama dalam kaitannya dengan peranan negara. Namun demikian apapun bentuknya, ciri kapitalisme yang tetap muncul walaupun dengan cara terang-terangan atau tersembunyi ialah adanya akumulasi kapital, konsentrasi, segmentasi dan hirarki kekuasaan ekonomi dalam masyarakat serta adanya pembagian tataruang bagi kelompok atau kelas dalam masyarakat. Kapital dalam konteks ini sebagaimana yang diinaksud oleh Marx ialah *use value* dan *exchange value*. *Use value* merupakan komoditas yang

pemain yang telah berhasil menguasai produksi, pemasaran dan konsumen, yaitu kaum pemilik modal atau Borjuasi. Pada tahap ini ekonomi dipandang sebagai basis yang menentukan superstruktur politik.

Depolitisasi kerangka kerja kapitalis liberal ini kemudian berakhir ketika masyarakat memasuki tahapan kapitalisme lanjut setelah kapitalisme liberal mengalami krisis sistem yang menciptakan kesenjangan akibat sistem pertukaran bebas. Dalam masyarakat kapitalis lanjut terjadilah repolitisasi massa yang memberikan peranan kepada negara untuk memberikan jalan pemecahan masalah-masalah teknis. Dalam masyarakat kapitalisme lanjut tidak semua sektor mengikuti mekanisme pasar bebas. Bidang-bidang yang tidak memberikan keuntungan pada pelaku bisnis dilakukan oleh negara. Sistem ekonomi dibagi dalam dua bagian yaitu sektor swasta dan sektor publik. Sektor swasta berorientasi pada pasar sedangkan sektor publik tidak berorientasi pada pasar dan ditangani negara dengan padat karya. Ciri masyarakat kapitalis lanjut ialah: Pertama, proses pemusatan modal menghasilkan perusahaan nasional dan multinasional dalam bentuk oligopoli-oligopoli. Kedua, adalah repolitisasi massa sebagai ganti depolitisasi pada masyarakat kapitalis liberal. (Hardiman, 1993: 79,156).

Penerapan kapitalisme sedemikian meluas ke berbagai negara seakan menjadi ideologi dunia dengan sebutan kapitalisme global². Berbagai negara maju berusaha

memberikan nilai apabila digunakan, sedangkan *exchange value*, ialah produk yang memberikan nilai surplus apabila dipertukarkan dengan produk lain.

² Budiman (1993: XIII) menyebut sebagai sistem dunia dalam menjalankan praktek neo imperialisme - menguasai suatu daerah tidak secara fisik dan dilakukan tidak dengan kekuatan fisik - dimana

menanamkan sistem ekonomi kapitalis dalam perekonomian negara-negara berkembang. Oleh karena itu reformasi kemudian terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam prakteknya berbagai negara menerapkan kapitalisme secara berbeda-beda baik disebabkan kemampuan mereka dalam dalam mengadopsi kapitalisme, maupun karena berbagai situasi ekonomis, politis dan budaya.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, praktek perekonomian ditempatkan dalam format pemisahan secara dikotomis antara politik dengan ekonomi. Orientasi pemerintahan Orde Baru pada waktu itu terpusat pada bidang perekonomian dalam rangka merehabilitasi kondisi perekonomian yang ambruk pada pemerintahan orde lama, dan kemudian dilakukan pembatasan kegiatan-kegiatan politik yang dipandang akan mengganggu stabilitas. Kata stabilitas menjadi ideologi yang dipandang menentukan keberhasilan ekonomi masyarakat. Dengan demikian untuk memberikan kepastian kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah berusaha menekan setiap peristiwa atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan ketidakstabilan (*instabilitas*). Pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, menjadi kata keramat yang pada awalnya merupakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat namun dalam pelaksanaannya kata pembangunan juga diberikan terhadap

kekuatan utamanya ialah daya saing dengan menggunakan system pasar bebas. Dalam system ini semua orang baik yang lemah maupun yang kuat harus berkompetisi bebas dan semua dianggap sama, dianggap adil dan dapat perlindungan sama. Sistem ini menguntungkan negara maju. Wahid dkk (1999:40) mengupasnya bahwa kapitalisme global dinilai telah menelikung sejarah kebangsaan Indonesia, dimana bangsa Indonesia akan didikte oleh aktor-aktor kapitalisme yang bergerak di pasar modal, pasar financial, pasar komoditi dan pasar informasi/media.

kegiatan yang merugikan rakyat, misalnya pengalihan hak individu dengan tanpa diimbangi kompensasi yang memberikan rasa keadilan, upaya-upaya monopoli dengan dalih membantu masyarakat yang tidak mampu. Pembangunan dijadikan pembenaran terhadap praktek-praktek yang justru merugikan masyarakat yang bertentangan dengan ide dasar pembangunan itu sendiri.

Reformasi di bidang ekonomi dengan menerapkan konsensus Washington (Williamson, 1994 dalam Srimulyani 2001) dengan mengadopsi tatanan pasar bebas distorsi, persaingan yang adil, jaminan *property right* yang makin pasti. Konsensus tersebut menyebutkan ada sepuluh kebijaksanaan yang harus diadopsi oleh negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi disiplin fiskal, pengarah pengeluaran infrastruktur publik, reformasi pajak, liberalisasi sektor keuangan, kebijakan nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan dan penurunan tarif, mengundang dan membebaskan investasi asing, privatisasi perusahaan negara, melakukan deregulasi, mengurangi dan membatasi peranan pemerintah hanya masalah lingkungan, keselamatan dan kehati-hatian (aturan perbankan), menjamin dan menjaga *property right* individual/swasta.

Sebagai komitmen untuk ikut serta dalam liberalisasi, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan regional seperti AFTA dan APEC. Selain itu Indonesia juga meratifikasi perjanjian Uruguay dan dibentuknya *World Trade Organization (WTO)*. Dengan mengikuti tatanan baru tersebut berarti Indonesia menyetujui untuk melepas peranan negara dalam aspek-aspek keuangan, perdagangan dan industri yang lebih lanjut memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk

mengelolanya. Indonesia mengeluarkan kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan negara, menghapuskan monopoli dan bentuk-bentuk pembatasan di bidang industri dan perdagangan dalam rangka liberalisasi ekonomi.

Namun dalam prakteknya liberalisasi ekonomi tersebut tidaklah optimal dilaksanakan, bahkan mengalami distorsi. Hal ini berkait dengan struktur dan kekuatan kekuasaan yang ada dimana ketentuan-ketentuan pasar bebas dan liberalisasi diberlakukan sedemikian rupa dalam bingkai instrumen yang diarahkan bisa menjamin kepentingan kekuasaan.

Liberalisasi dijalankan Indonesia pada pertengahan 80-an, ketika harga minyak mengalami penurunan sampai tinggal sepertiganya, 10 \$AS per barel, akibatnya Indonesia mengalami defisit anggaran. Sementara itu pemerintah tidak mampu memanfaatkan utang luar negeri untuk pemberdayaan ekonomi di dalam negeri. Pemerintah pada waktu itu dipandang perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pada masa sebelum tahun 80-an mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai simbol kemajuan negara di antara negara-negara lain di Asia.

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan liberalisasi bidang perbankan dan pasar modal, tujuannya ialah untuk memobilisasi dana swasta. Dalam era ini maka terjadilah ekspansi besar-besaran perusahaan swasta, mereka memanfaatkan dana pinjaman dari luar negeri untuk meningkatkan usahanya. Liberalisasi pada sektor perbankan dan pasar modal lebih awal dari sektor ril seperti perdagangan dan investasi, menyebabkan terjadinya akumulasi modal baik diperoleh dari dana dalam maupun luar negeri digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti

pembangunan jalan, perumahan, gedung-gedung. Dengan demikian terjadilah akumulasi modal dan keuntungan pada kelompok-kelompok usaha tertentu yang hanya mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Dalam kasus ini, terjadilah bentuk-bentuk kolusi antara birokrasi dengan kelompok-kelompok usaha dimana dalam kelompok usaha ini keluarga presiden Soeharto banyak terlibat.

Sampai tahap ini liberalisasi terdistorsi tidak saja oleh masalah struktural yaitu lemahnya aturan yang mendahulukan liberalisasi di sektor pasar modal tetapi juga terdapat kekuasaan perorangan yaitu dengan memanfaatkan orang-orang yang memiliki akses kepada pengambil keputusan. Kelemahan aspek struktural juga terlihat pada persyaratan pendirian bank yang tidak ketat dan longgar, sehingga pengelolaan Bank banyak bermunculan dan tidak sehat. Faktor agensi terlihat dalam penyaluran kredit dimana terjadi intervensi pemilik Bank dan para politisi semakin memperburuk kinerja perbankan.

Akumulasi kapital dalam kapitalisme dilakukan tidak dengan cara yang adil bahkan cenderung menunjukkan adanya dominasi dari kelompok pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Ketidakadilan itu terjadi dengan memberikan pemberian izin, monopoli kepada kelompok pengusaha tertentu. Dalih regulasi dilakukan ialah untuk melindungi para pengusaha kecil dari semakin menguatnya posisi pengusaha besar.

Regulasi berupa pengaturan tataniaga cengkeh, yang bermaksud melindungi para petani cengkeh agar harga jual tidak didikte pembeli, maka penjualan cengkeh petani dilakukan melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Dalam

prakteknya Badan tersebut justru melakukan tindakan yang merugikan para petani, dimana cengkeh yang dibeli kepada petani dengan harga murah dan kemudian BPPC menekan pabrik rokok untuk membeli cengkeh dengan harga tinggi. Hal yang sama terjadi pada tataniaga jeruk dimana pengaturan tataniaga tersebut justru telah menimbulkan kerugian kepada para petani. Tata niaga tersebut menguntungkan Badan Penyangga dan Pemasaran, yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra dengan kelompoknya.

Regulasi yang melahirkan proyek Mobil Nasional (1996) dengan dalih mengembangkan kemandirian industri dalam negeri dengan cara memberikan pembebasan biaya masuk impor mobil, disamping melanggar kesepakatan WTO dalam aspek transparansi dan keadilan serta masalah biaya masuk, juga terkait dengan hubungan nepotisme dimana proyek mobil nasional tersebut dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra, anak Soeharto.

Pada bulan Nopember 1998, pemerintah melakukan deregulasi dengan mengakhiri monopoli atas impor plastik yang telah menguntungkan anak-anak Soeharto dan teman-temannya. Langkah ini dipandang penting sebab sebelumnya dianggap sulit dijangkau oleh reformasi. Namun pada saat yang sama terdapat langkah lain yang secara politis penting tetapi kurang mendapat perhatian. Sarpindo, perusahaan pemecah kedelai milik Tommy dan teman presiden mendapat monopoli dari pemerintah untuk mengimpor kedelai, dan Bulog membeli kedelai dari Sarpindo dengan harga lebih tinggi dari harga dunia. Para teknokrat menyarankan untuk mengakhiri monopoli itu, tetapi ditolak oleh Soeharto. Jawaban adalah “ Kalau

Saudara mau bunuh Sarpindo, silahkan." (Borshuk, 261-162). Ungkapan dalam frase tersebut menandakan, sangat protektifnya Soeharto terhadap perusahaan yang berkaitan dengan keluarganya. Kata silahkan dalam frase kondisional tersebut mempunyai makna jangan dilakukan deregulasi yang berkaitan dengan bisnis kacang kedelai.

Upaya Soeharto untuk menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan ekonomi kelas bawah dan sekaligus menciptakan keterkaitan antara pengusaha besar dan kecil pada tahun 1990, Soeharto mengumpulkan para pengusaha etnis Tionghoa-Indonesia dan meminta membagi harta mereka dengan masyarakat luas dengan cara menjual sampai seperempat jumlah saham mereka kepada Koperasi. Tujuan itu dengan mudah terlupakan setelah para eksekutif mengalihkan satu persen dari sebagian dari sekian perusahaan terdaftar yang dipunyainya. Usul Presiden tersebut tampak hanya merupakan kegiatan *Public Relations* belaka. (Booth, 286).

Upaya tersebut di satu pihak menunjukkan sistem perekonomian yang berlaku tidak saja didasarkan pada aturan-aturan pasar, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan kekuasaan dimana Soeharto sebagai pemegang kekuasaan melakukan persuasi agar membeli produk-produk tertentu. Upaya persuasi ini jelas bukan mekanisme pasar, sebab penjualan saham tidak dilakukan melalui transaksi pasar dan bukan juga merupakan regulasi yang mempunyai kekuatan hukum untuk diikuti. Tampaknya kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendapat respon sebagaimana yang dituntut oleh Presiden, dan ini juga sekaligus menunjukkan adanya dominasi kelas ekonomi kuat, para konglomerat.

Kebijakan deregulasi dilakukan juga terhadap perusahaan negara. Mengingat tidak semua usaha di sektor BUMN berkaitan dengan kebijakan publik, seperti perusahaan-perusahaan perkebunan karet. Proses privatisasi ini berjalan lambat karena bagi masyarakat kebijakan ini bisa menimbulkan kecurigaan. Perusahaan-perusahaan akan jatuh pada pengusaha-pengusaha yang telah kuat selama ini, yaitu pengusaha pribumi etnis Tionghoa. Usaha privatisasi hanya merupakan paket yang menggeser penguasaan ekonomi dari negara ke pengusaha pribumi etnis Tionghoa.

Kekhawatiran itu bisa dilihat dari perspektif ideologis, yaitu adanya tarik menarik antara dua kubu yang berbeda, yaitu kubu teknokrat (ekonomi) dengan nasionalis. Kubu teknokrat mengembangkan ekonomi pasar yang membatasi peranan perusahaan negara untuk mengelola sektor publik. Sedangkan kubu nasionalis mencoba untuk tetap meningkatkan atau memperkuat perusahaan negara.

Teknokrat ekonomi pada era Orde Baru membawa konsep ekonomi pasar yang dalam prakteknya terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan, keluarga dan kroni presiden, melahirkan ketidakadilan ekonomi bahkan penindasan ekonomi. Teknokrat dan kekuasaan bergabung begitu kuat berhadapan dengan masyarakat dan lembaga perwakilan yang lemah. Kebijakan ekonomi digulirkan dengan mesin institusi dan mekanisme pasar praktis tanpa kontrol yang efektif dari elemen masyarakat. Perkawinan antara pemikiran kolektif para teknokrat yang berwajah liberal dengan kekuasaan yang otoriter melahirkan sistem kapitalisme primitif, yang diberi stempel ekonomi Pancasila sebagai bungkus luarnya. Pasar bekerja efektif,

seperti terlihat dari pertumbuhan ekonomi tetapi perburuan rente, distorsi dan monopoli sangat marak untuk kepentingan segelintir orang.

Sistem dan praktek Kapitalisme Primitif muncul dari tiga institusi pasar yang distortif. Pertama, Institusi kebijakan ekonomi yang kental dengan nuansa pemikiran sangat liberal sehingga lupa bahwa diluar institusi pasar juga penting dibangun institusi sosial, budaya masyarakat yang kuat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Kedua, Institusi ini kawin-kawin dengan institusi kekuasaan yang otoriter dan korup sehingga memanfaatkan segala bentuk instrumen hukum dan peraturan untuk memperkaya sekelompok orang dan menutup akses yang luas. Ketiga, masyarakat dan parlemen, sangat lemah yang tidak lain cuma boneka kekuasaan tadi. (Rachbini, 2001 : 96, 106).

Peranan elit birokrasi demikian dominan dalam pengambilan keputusan. Hanya mereka yang berada di lingkaran birokrasi yang berperan dalam pengambilan keputusan. Suara masyarakat yang berada di luar sistem tidak mendapat tempat. Lembaga Perwakilan Rakyat terkooptasi oleh pemerintah dan hanya menjadi alat legitimasi keputusan-keputusan Birokrasi, sedangkan partai politik yang didominasi oleh partai yang berkuasa (*rulling party*), menjadi mesin kekuasaan yang mampu menjangkau (pengaruhnya) sampai birokrasi di tingkat lokal, sehingga keputusan-keputusan cenderung hanya melibatkan elit birokrasi di tingkat pusat dengan sistem sentralistik, dan elit pada tingkat lokal tanpa reserve mengikuti keputusan elit di tingkat pusat. Hubungan antara partai yang berkuasa dengan aparatus negara menempatkan partai sebagai instrumen aparatus negara. Menurut Robinson (1993:

45) hal ini berbeda dengan di negara lain seperti Spanyol, Irak, Italia, Syria yang menempatkan aparatus negara sebagai alat partai yang berkuasa.

Kondisi ini sesuai dengan tesis yang diungkapkan oleh Jackson, bahwa sejak demokrasi parlemen berakhir, bentuk dasar pemerintahan belum berubah secara mendasar. Meskipun sejak tahun 1970-an aktor dan kebijakan telah terbentuk dan memiliki kekuasaan, yang terkonsentrasi lebih dari sebelumnya ditangan presiden, Indonesia menjadi sebuah *bureaucratic polity* – yaitu sistem politik dimana kekuasaan dan partisipasi dalam keputusan nasional dibatasi hampir seluruhnya oleh pejabat negara, khususnya korps pejabat dan birokrasi pada tingkat tinggi, termasuk tenaga-tenaga spesialis terlatih sebagai teknokrat (Jackson, 1978: 3).

Robinson dalam analisisnya mengungkapkan Orde Baru merupakan sebuah rezim korporat otoriter (*Authoritarian corporate*), yang menyediakan struktur institusional dan hubungan konstitusional yang mengembangkan otoritas politik. Korporat yang dimaksud ialah sistem yang mereprestasikan kepentingan dimana unit konstituen diorganisasi dalam jumlah yang kecil, bisa dihitung, *compulsary*, tingkatan order yang non kompetitif, kategori pembedaan yang fungsional.

Disebut korporasi, didasarkan pada realitas bahwa korporat Indonesia kurang memperhatikan aspek representasi kepentingan dan lebih mengutamakan kontrol negara dan disiplin sosial. Organisasi politik tidak membuka peluang terjadinya kompetisi dan tidak dilembagakan dalam posisi tawar (*bargaining*) tripartit antara buruh, pemodal dan negara. Mekanisme yang berlaku ialah mekanisme dominasi

rezim otoriter dan hal ini berbeda dengan korporat sosial yang hanya merupakan bentuk bargaining sosial dalam peningkatan industri ekonomi (Robinson, 1993: 45).

Dalam sistem korporat otoriter, tumbuh banyak instrumen hubungan antara negara dan birokrasi. Para biokrat menciptakan berbagai kebijakan dan peraturan yang mampu memperkuat kekuasaan negara. Para pejabat mungkin tidak lagi menjadi bagian dari satu kekuatan eksternal baik partai politik maupun pengusaha atau lainnya. Melewati seperempat abad yang lalu para pejabat membangun kekuatan mereka sendiri sebagai sebuah dimensi kekuatan dan identitas sosial dalam lingkungan kelas menengah dan borjuasi. Dalam konteks itu, rezim tidak bisa dipahami hanya sebagai wahana elit birokrat, tetapi merupakan bagian dari sistem kekuasaan negara secara menyeluruh dan hubungan sosial yang melekat di dalamnya.

Melihat praktek kapitalisme selama Orde Baru, Didik Rachbini menilai bahwa praktek yang dijalankan adalah praktek kapitalisme primitif, dibawa oleh kelompok teknokrat ordo liberal yang menerapkan pasar bebas tanpa kontrol yang efektif dari masyarakat dan kemudian bergabung dengan sistem kekuasaan yang otoriter.

Menurut Hidayat (2000: 134 -142) terdapat empat kontradiksi dalam kapitalisme Orde Baru. Pertama, kontradiksi antara kepentingan seputar kebijakan proteksionis dengan tuntutan liberalisasi atau kontradiksi antara kekuasaan otoriter dengan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan pasar internasional. Kedua, kontradiksi mengenai peranan negara. Apakah negara berperan sebagai agen demokrasi yang tidak memiliki bias terhadap setiap kelompok/kelas dalam masyarakat, atau sebagai

penjaga dan pelindung kepentingan ekonomi yang dominan bagi mereka. Ketiga ialah kontradiksi yang melibatkan pertentangan antara modal secara umum dengan modal kelompok secara spesifik. Keempat, kontradiksi antara pembangunan kapitalis dengan kondisi idial

Fenomena kekuatan yang terjadi di dalam Orde Baru tidak dapat direperesentasikan dalam konteks persaingan antara negara dan masyarakat sipil, khususnya kelas borjuasi. Dalam persaingan itu terjadi tarik menarik antar peranan negara dan masyarakat guna menjalankan aktivitas perekonomian, dan yang menjadi salah satu kekuatan masyarakat ialah para pemilik modal atau kaum borjuasi. Dalam prakteknya ternyata, kelompok para pengusaha ini berkolusi dengan kekuasaan negara, mereka menjadi pendukung kekuasaan negara. (Robinson, 1993: 46).

Struktur politik, strategi ekonomi, aliansi sosial yang dilembagakan Orde Baru menjadi suatu kontradiksi internal pemeritahan Orde Baru sebagai tantangan. Pertama, rezim harus memperkirakan kapasitas institusi politik dan aturan konstitusional untuk mengelola perubahan dari satu pemeritahan ke pemerintahan berikutnya sehingga menjamin eksistensi negara dalam jangka panjang. Kedua, kapasitas Indonesia untuk menyiapkan kerangka kerja pertumbuhan ekonomi pasca era minyak menjadi pertanyaan yang serius. Ketiga, tumbuhnya kekuatan baru dan perkasa dalam bentuk aliansi keluarga birokrat dan konglomerat yang telah memberikan peningkatan ketegangan sosial dalam koalisi yang mendukung Orde Baru (Robinson, 1993: 47)

Ketiga tantangan yang dikemukakan Robinson tidak mampu dikelola oleh Rezim Orde Baru, karena kekuatan akan tuntutan perubahan melebihi kapasitas kekuatan rezim Orde Baru. Gerakan reformasi tahun 1997 yang dipicu oleh krisis ekonomi, mengawali perubahan di bidang politik, yang berujung jatuhnya rezim Soeharto. Peralihan pemerintahan sempat menimbulkan kekhawatiran terganggunya eksistensi negara sebagaimana dikemukakan oleh Robinson. Perubahan institusi politik dan aturan konstitusional terus dilakukan untuk menjamin tegaknya negara kesatuan. Kekuatan reformasi juga telah mengubah paradigma perekonomian dimana pertumbuhan ekonomi tidak menjadi indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian nasional. Sementara itu ketegangan memang terjadi yang bersumber dari aliansi kekuatan konglomerat dengan birokrasi, berupa tuntutan untuk mengusut kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ada era rezim Orde Baru.

Pasca Orde Baru tampak dalam praktek kekuatan ekonomi masih berada pada mereka yang memegang dominasi pada era Orde Baru, walau pun dalam penghitungan di atas kertas kekuatan mereka sebenarnya sudah tidak punya kredibilitas lagi. Mereka masuk dalam kerangkeng BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dimana mereka harus membayar utang kepada negara berupa pengembalian dari penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan pemerintah pada awal krisis terjadi pada era Soeharto. Bahkan diantaranya mereka sudah memasuki tuntutan hukum. Oleh karena akumulasi kapital sekarang ini berada pada BPPN, karena mereka menghimpun dan mengelola aset negara yang berasal dari berbagai perusahaan. Menurut Rachbini kolusi antara pengusaha dengan

penguasa tidak terlihat secara struktural. Artinya aturan-aturan kolusif tidak tampak karena kritik publik semakin terbuka.

2. Praktek Kapitalisme dalam Industri Media.

Kebijakan di bidang media massa pada awal pemerintahan Orde Baru ditandai dengan menghapus secara formal pers politik (partai politik) dimana pada era orde lama ada keharusan semua media berafiliasi kepada organisasi atau partai politik. Penghapusan tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri Penerangan RI No. 29/1965. Dengan keputusan itu maka secara formal pers yang ada merupakan lembaga independen dari aliran atau suara partai politik (Hidayat , 2000:143) Dalam era tersebut terdapat kampanye orientasi dalam kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dari politik. Maka jargon populer pada saat itu ialah *politik no, ekonomi yes*. Sejalan dengan itu dalam tatanan politik diterapkan kebijaksanaan massa mengambang, dimana basis organisasi politik hanya ada pada tingkat kabupaten, di pedesaan tidak diperkenankan berdiri organisai atau kantor perwakilan partai politik. Dengan demikian selain dilakukan depolitisasi pers juga depolitisasi massa. Iklim tersebut kemudian menciptakan perubahan posisi pers dari pers politik atau pers perjuangan ke pers sebagai institusi ekonomi, menjadi sebuah industri. Kecenderungan perubahan peranan pers seperti itu juga didorong oleh perkembangan ekonomi yang secara bertahap bangkit dari keterpurukan pasca tahun 1965.

Sebagai institusi industri, setiap media satu sama lain berupaya untuk berkompetisi mencari pasar dan orientasi media didasarkan pada ideologi pasar. Pengembangan idealisme media tidak bisa dipandang terpisah dengan bidang bisnis media. Perkembangan media tidak akan tumbuh hanya atas dasar hasil kerja bidang redaksional, tetapi juga tergantung pada dukungan bidang bisnis seperti promosi, sirkulasi dan distribusi sehingga mampu mengakumulasi pendapatan baik dari iklan maupun pelanggan.

Namun demikian depolitisasi politik baik pada pers maupun massa ternyata digunakan sebagai strategi untuk mengakumulasi kekuasaan politik yang mendukung pemerintah dengan mesin politik Golongan Karya, yang dengan strategi hegemonik diterima sebagai institusi bukan partai politik³. Kondisi inilah yang kemudian menempatkan pers pada posisi sebagai industri dalam bingkai dominasi suatu kekuatan politik penguasa.

Dengan demikian dalam era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto, format media massa berkembang diantara dua kutub kekuasaan yaitu kekuasaan ekonomi yang menuntut ada akumulasi kapital dari media dan kekuasaan politik rezim yang meletakkan media sebagai instrument aparatus negara untuk mengakumulasi kekuasaan yang dimilikinya sehingga masyarakat mengikuti dan patuh pada kepentingan politik rezim yang berkuasa. Rezim pada waktu itu memiliki

³ UU NO 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, membedakan Golkar dengan Partai Politik, padahal dalam prakteknya Golkar melakukan aktifitas lazimnya sebuah Partai Politik. UU tersebut kemudian diperbaharui oleh UU No 3 Tahun 1985, yang menetapkan azas tunggal dari partai dan ormas yaitu Pancasila.

ciri menempatkan negara dalam posisi dominan dalam tatanan serta proses-proses politik, atau kedudukan negara yang relatif otonom dari kekuatan-kekuatan politik di masyarakat. Kekuasaan relatif terpusat di tangan Presiden. (Hidayat, 2000:129).

Peranan dominan negara terhadap pers, terlihat dari aturan dan praktek-praktek negara dalam mengendalikan pers. Dalam posisi ini pers merupakan saluran dalam menerapkan strategi hegemonik pemerintah. Kerangka kerja (*framework*) pengendalian media seperti ini dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen struktural dan juga instrumen-instrumen agensi yang secara simultan bekerja. Instrumen struktural antara lain ialah dengan mengeluarkan aturan-aturan di bidang media khususnya pers. Pada tataran peraturan perundang-undangan, walau dalam UU no 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, disebutkan bahwa pers tidak dikenakan sensor dan pemberdelan (pasal 4), namun ketentuan itu dimentahkan oleh pasal 20, pasal peralihan yang mengemukakan bahwa dalam masa peralihan ketentuan mendapatkan surat izin terbit masih diperlukan sampai keputusan pencabutannya oleh pemerintah dan DPR. Pasal peralihan tersebut merupakan pasal elastis yang memberikan status negara dalam masa peralihan, dan kapan berakhir tergantung penafsiran negara pula. Artinya kebebasan pers sebagai kebebasan memproduksi isi media untuk berkompetisi secara sehat tidak bisa terlaksana karena pers diatur oleh rambu-rambu pemerintah dan diawasi oleh pemerintah secara ketat, sehingga media berkompetisi dalam ladang konteks yang terbatas yaitu dalam arena yang tidak mengganggu kebijakan penguasa.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan dimana pada awalnya pemerintahan Orde Baru memberikan kebebasan kepada pers dalam memproduksi informasi termasuk melakukan kritik terhadap penguasa. Pada tahun 1975, kebebasan tersebut berhenti setelah tujuh media dicabut izin terbitnya, yaitu Indonesia Raya, Pedoman, Kami, Jakarta Times, Abadi, Mingguan Mahasiswa, Majalah berita Ekspres. Pencabutan Surat Izin tersebut terkait pada pemberitaan kasus malapetaka Lima Belas Januari yang terkenal disebut Malari. Pencabutan Surat Izin Terbit oleh Departemen Penerangan tersebut diawali terlebih dahulu oleh pencabutan Surat Izin Cetak (SIC) oleh Militer yaitu Pelaksana Khusus Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Pangkopkamtibda). Alasan pencabutan SIC antara lain, bahwa surat kabar tersebut dinilai telah menyiarkan tulisan-tulisan yang tidak berdasarkan kebenaran yang dapat menghasut rakyat untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara.

UU No. 11 tahun 1966 kemudian diubah menjadi UU No. 21 Tahun 1982 dan dalam peraturan tersebut ketentuan untuk mendapatkan Surat Izin Terbit dan Cetak digantikan oleh Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dalam rangka pengaturan SIUPP tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No 01/Pers/Menpen/1984, dimana dalam pasal 33 dikemukakan bahwa SIUPP yang diberikan kepada perusahaan pers dapat dibatalkan setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers.

Dengan pengaturan tersebut, walau pun dalam tataran UU tidak ada ketentuan bahwa SIUPP dapat dicabut namun dalam ketentuan di tingkat bawahnya

yaitu Keputusan Menteri Penerangan terdapat ketentuan yang bisa mencabut atau membatalkan SIUPP. Ketentuan ini menyebabkan pers dalam melaksanakan fungsinya tergantung pada irama kekuasaan pemerintah dalam memainkan Instrumen SIUPP. Irama pemerintah dalam memainkan instrumen ini dipengaruhi oleh tuntutan globalisasi yang mengembangkan isu politik demokratisasi, transparansi dan isu ekonomi perdagangan bebas yang menghendaki deregulasi perdagangan dan industri termasuk industri media.

Pengaruh isu demokratisasi terhadap penggunaan instrumen pembatalan SIUPP, terlihat dari pernyataan-pernyataan Pejabat Pemerintah yang bersyarat : pers boleh melakukan kritik asal kritik membangun, pers memiliki kebebasan asal bertanggungjawab, bahkan janji-janji tidak akan lagi pencabutan SIUPP. Pernyataan didepan kata asal seakan merespon isu demokratisasi sedangkan frase kondisioal dibelakang kata asal yaitu pembangunan dan bertanggungjawab memiliki interpretasi elastis dimana kalau pemerintah kepentingannya terganggu bisa memberikan tafsir yang berakibat dibatalkannya SIUPP. Tafsiran tersebut dalam praktek bisa berkaitan dengan struktur kekuasaan secara menyeluruh dan bisa juga terkait pada personal penguasa, terutama Presiden.

Bagi pers, pernyataan pejabat dibelakang kata asal tadi dijadikan eksperimen untuk mengembangkan jurnalisme budaya konteks tinggi⁴ yang mengartikulasikan isu secara tersamar dan tersirat, demi kelangsungan hidup media tetapi tetap dapat mengembangkan naluri fungsi pers itu sendiri untuk melakukan kontrol sosial dan

memperjuangkan kebenaran dalam artikulasi yang dipandang aman. Bahkan pada bulan Agustus 1990, dalam pidato kenegaraannya menyerukan kepada masyarakat agar tidak perlu takut menyatakan pandangannya yang berbeda. Namun demikian dalam prakteknya media mengalami kecelakaan dan bahkan musibah, yaitu pencabutan SIUPP. Majalah berita mingguan Tempo, dan Editor seta tabloid Detik, 21 Juni 1994. Alasan pembredelan ke tiga media tersebut sebagaimana diumumkan oleh Direktur Jenderal Pers dan Garfika, Subrata ialah karena alasan substantif dan administratif dipandang tidak jelas dan menunjukkan kesewenang-wenangan penguasa (AJI Indonesia, 1998:103). Kasus ini juga menyiratkan refleksi adanya kontradiksi di antara elit kekuasaan, dimana Elit politik yang terpinggirkan oleh Soeharto, memberikan reaksi ketidak setujuannya secara implisit terhadap pembredelan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Brigjen Syarwan Hamid, Kapuspen Hankam dan mantan Kasospol Letjen Harsudiono Hartas (Hidayat, 2000: 151).

Dibredelnya tiga media ternyata juga merupakan peluang bagi penguasa untuk tidak terbatas pada menutup saluran aspirasi masyarakat tetapi juga kemudian dimanfaatkan untuk menyalurkan dan mengarahkan aspirasi yang sesuai dengan bingkai penguasa. Kenyataan ini, dapat dilihat dengan masuknya para pemodal yang berada di lingkaran penguasa untuk menjalankan penerbitan yang ditutup. Pemodal Bob Hasan mendanai karyawan eks Tempo untuk menerbitkan Gatra, dan A Latif Tiras mendanai karyawan eks Editor untuk menerbitkan Tiras. Pada awalnya

⁴ Lihat hal 64

penerbitan Gatra sempat mengundang protes dan anjuran boikot oleh beberapa kelompok masyarakat, tetapi hal ini tidak bergema dan berlanjut. Hubungannya media dengan pembaca kembali tunduk pada hukum pasar, selama produk yang dibuat oleh Gatra sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, maka Gatra terus bertahan. Apalagi pada waktu itu ada kekosongan bacaan dengan karakteristik tulisan gaya Tempo, sehingga pembaca yang dulunya membaca Tempo meneruskan untuk membaca Gatra.

Selain melalui instrumen SIUPP, penguasa juga mengembangkan hegemoninya melalui jalur kelembagaan media, yaitu Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Lembaga-lembaga ini dikooptasi oleh penguasa seakan merupakan kepanjangan tangan pemerintah, yaitu dengan menciptakan jaringan organisasi sehingga memiliki kewenangan dalam mengendalikan media dari dalam. Caranya ialah dengan menempatkan wakil pemerintah sebagai Ketua Dewan Pers, menempatkan personal yang mempunyai hubungan kekuasaan dalam jajaran PWI, dan menempatkan orang yang satu ideologi dengan penguasa dalam jalur struktur media massa. Dengan cara tersebut secara formal dan informal penguasa bisa menjalankan kewenangan dalam mengendalikan media.

Melalui UU No. 11 Tahun 1966, ditetapkan sebagai ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan. Dewan yang memiliki fungsi mendampingi pemerintah dalam pengembangan pers dijabat oleh wakil dari pemerintah, sehingga sulit melakukan fungsinya secara mandiri. Dalam hal pencabutan SIUPP oleh pemerintah,

mensyaratkan atas dasar rekomendasi Dewan Pers, sehingga pemerintah secara legal akan lebih mudah mengendalikan pers.

Kooptasi terhadap PWI, dilakukan dengan menempatkan organisasi ini bagian dari strategi Golongan Karya sebagai partai yang berkuasa dalam melaksanakan program Golkar dari jalur profesi. Konspirasi ini semakin nyata setelah Harmoko diangkat sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Penerangan. Bahkan PWI dianggap sebagai kepanjangan tangan Golkar sebagai mana dilihat dari mereka yang pernah menjabat atau menduduki jabatan-jabatan di PWI dan Dewan Pers. Para pejabat tersebut ternyata juga merupakan kader Golkar atau menduduki posisi tertentu di dalam struktur Golkar atau mewakili Fraksi Karya Pembangunan (FKP) di DPR/MPR-RI seperti Harmoko, Sofyan Lubis dan Zulharmans (AJI Indonesia, 1998: 100).

Bentuk lain kooptasi penguasa ialah membiarkan surat kabar Suara Karya sebagai organ Golkar dan menjadi alat melaksanakan doktrin Golkar. Kenyataan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan bahwa pers tidak boleh berafiliasi kepada Partai Politik. Bentuk kooptasi seperti itu terjadi pada surat kabar Pelita - disinyalir berperan sebagai organ Partai Persatuan dan Pembangunan – dimana setelah SIUPP Pelita dicabut dengan alasan memuat hasil Pemilu 1982 bukan bersumber dari Lembaga Pemilihan Umum, kemudian SIUPP dikembalikan setelah diminta melakukan restrukturisasi besar-besaran. Dalam restrukturisasi tersebut Abdul Gafur - - menduduki jabatan sebagai salah satu ketua Golkar -- masuk dalam jajaran Pelita. Dengan cara ini maka arah surat kabar Pelita berada dalam format penguasa.

Bentuk campur tangan negara dalam operasional media, selain dilakukan melalui penempatan orang-orang sebagai agensi penguasa ke dalam media, juga dilakukan upaya-upaya penekanan melalui saluran telepon dan pemanggilan-pemanggilan langsung terhadap pengelola media baik oleh pejabat Departemen Penerangan maupun pejabat di bidang keamanan, untuk meminta kepada media agar memuat atau tidak memuat suatu isu. Sementara itu hubungan segi tiga yaitu pemerintah, pers dan masyarakat dikembangkan sebagai cara dalam mendekatkan kepentingan ketiganya namun dalam prakteknya pola hubungan tersebut menjadi lebih dominan untuk membawa arah media dalam persepektif pemerintah, sehingga melalui pembinaan hubungan ini secara sadar dan tidak sadar membuat ketergantungan. Pola ini, merupakan kecenderungan apa yang terjadi di negara-negara berkembang bahwa media massa bukanlah dibuat untuk massa tetapi untuk elit (Makarim, 1978, 178:262).

Terkait pada isu liberalisasi perdagangan, yang salah satu isunya ialah menghapus hambatan usaha termasuk di bidang media. Pemerintah kemudian memberikan SIUPP baru, namun ditujukan kepada kelompok atau pengusaha-pengusaha yang memiliki hubungan dengan kekuasaan. Di tahun 1994, Menteri Penerangan mengungkapkan bahwa pasar di sektor media sudah terlalu jenuh sehingga tidak akan lagi dikeluarkan SIUPP baru. Walaupun kemudian sejumlah pemohon SIUPP ditolak tetapi Departemen Penerangan kemudian menerbitkan SIUPP baru untuk Republika sebagai surat kabar Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin oleh BJ Habibie sebagai orang kepercayaan

penguasa, Soeharto. Beberapa pengusaha yang mendapatkan SIUPP ialah Bob Hasan sebagai penyandang dana untuk majalah berita Gatra, Tutut Hardijanti Rukmana memperoleh SIUPP Wanita Indonesia, Abdulatif memperoleh SIUPP majalah Tiras, Agung Laksono majalah Target.

Intervensi politik kedalam liberalisasi media lebih mencolok pada pertelevisian. Peluang usaha di bidang televisi tidak diungkapkan secara terbuka, Peraturan Menteri Penerangan yang awalnya tidak membolehkan adanya lembaga penyiaran swasta berubah-ubah mulai dari dibolehkannya siaran terbatas melalui dekoder, lalu kemudian boleh tanpa dekoder namun areanya terbatas sampai boleh melakukan siaran nasional. Perubahan-perubahan ini tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan pengusaha yang dekat dengan penguasa, yaitu Peter Gontha dan Bambang Trihatmodjo yang menjadi pemilik saham Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Izin penyelenggaraan penyiaran Televisi yang terbit kemudian berkembang dengan bertambahnya beberapa lembaga penyiaran, yaitu TPI, SCTV, ANTV dan Indosiar. Semua stasiun tersebut dimiliki oleh pengusaha yang dekat dengan penguasa, yaitu Tutut Hardijanti Rukmana, Sudwikatmono, Agung Laksono dan Liem Sioe Liong. Dengan demikian disatu pihak memiliki imaji yang memberikan peluang pengembangan usaha di bidang media, tetapi juga memberikan imaji lain pengembangan usaha tersebut dalam rangka menjaga dan memperkuat kekuasaan.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, juga menimpa pers. Nilai dolar yang melambung tinggi menyebabkan harga kertas koran juga ikut naik. Kenaikan ini

juga disebabkan struktur industri yang monopolis sehingga tidak ada pesaing asing dalam mengimbangi harga kertas koran. Dengan harga kertas koran yang tinggi dan daya beli masyarakat yang berkurang, maka sejumlah penerbitan memvalidasi penerbitannya antar lain dengan berhenti terbit, mengganti kualitas kertas, mengurangi jumlah halaman, jumlah karyawan.

Hanya group penerbitan yang kuat saja yang bisa bertahan hidup. Dalam situasi krisis sumberdaya media, tekanan penguasa ternyata juga tidak berhenti, penguasa berusaha untuk mendudukan citra krisis ekonomi pada semata-mata ekonomi dan tidak terkait pada politik. Dalam kaitan ini pemerintah menilai pers tidak melaporkan peristiwa seperti yang sebenarnya terjadi, pers lebih bersifat interpretatif dan cenderung membesar-besarkan peristiwa yang terjadi.

Namun demikian tekanan pemerintah terhadap pers tersebut tidak lebih kuat dari tekanan masyarakat untuk melakukan reformasi, termasuk terhadap kebebasan pers. Sehingga akhirnya pers lebih berani dan secara terus menerus mengungkapkan setiap peristiwa dan pendapat yang berkembang secara bebas. Kondisi ini kemudian telah memberikan kontribusi terhadap kejatuhan Soeharto. Dalam era itu kemudian kebebasan pers mendapat legalisasi dengan digantinya Peraturan Menteri Penerangan No 1 Th1984 dengan Peraturan Menteri Penerangan No. 2 tahun 1998 yang intinya menyederhanakan permohonan mengajukan SIUPP dan mencabut ketentuan pembatalan SIUPP, dan kemudian UU No 11 tahun 1996 pun diganti dengan UU No 40 tentang Pers tahun 1999, yang menghilangkan ketentuan memperoleh izin untuk menerbitkan pers, serta ketentuan bahwa pers tidak dikenakan sensor dan

pembredelan. Mulai saat itulah secara legal terjadi liberalisasi di bidang Media, yang merupakan tonggak sejarah baru pers Indonesia. Dengan demikian *barrier to entry* di bidang politik sudah tidak ada lagi⁵, dan terjadi persaingan sempurna di bidang media. Jumlah media yang terbit setelah itu sudah tidak bisa diketahui lagi secara persis, industri media berlangsung dalam suasana euforia sehingga setiap orang bisa menerbitkan surat kabar. Dalam kondisi seperti itu usia media yang berlangsung lama dan ada yang hanya sekali dua kali terbit. Bahkan ada pengusaha yang hanya menyediakan sedikit dana untuk bisa menerbitkan sedangkan karyawan dan para awak media mencari uang sendiri dengan meminta uang atau amplop kepada sumber berita. Fenomena menarik, ialah ketika disuatu wilayah sedang terjadi proses penggantian pejabat, terdapat orang yang menerbitkan media dengan oplah seperlunya dan isinya memuat pemberitaan penggantian pejabat serta memasang iklan ucapan selamat kepada pejabat tadi. Setelah itu kemudian mereka meminta sejumlah uang kepada pejabat tersebut.

Dalam iklim persaingan tersebut, maka pasca liberalisasi di bidang media, terdapat beberapa fenomena. Pertama berkembangnya media waralaba (*franchise*) yang mengambil *brand* dari terbitan di luar negeri untuk diadaptasi dan kemudian diberi muatan lokal dan dijual di pasaran Indonesia. Sejumlah penerbit ada yang mengkhususkan diri pada penerbit yang sudah mapan untuk proyek pengakumulasi kapital. Kedua, masuknya perusahaan-perusahaan non media ke industri media,

⁵ Secara formal *barrier to entry* dari aspek politik memang tidak ada, namun dalam prakteknya di daerah-daerah masih terdapat penguasa daerah yang melakukan praktek-praktek sebagaimana pada

misalnya Group Lippo yang memiliki bisnis di bidang perbankan, properti dan lain-lain kemudian masuk ke bisnis media. Ketiga berkembang industri multi media baik bagi pemain lama maupun baru, termasuk juga beberapa penerbit yang ada mencoba menggarap bisnis multi media. Kelima, penerbitan menjadi lebih spesifik dengan ulasan dan target pembaca lebih terbatas. Arah ini ditempuh oleh penerbitan baik penerbit besar maupun kecil serta yang melakukan waralaba (AJI, 200:16).

B. Proses Produksi dan Konsumsi Media.

Media massa merupakan suatu industri sehingga perilaku media merupakan bagian dari perkembangan praktek ekonomi politik yang berlaku. Ekonomi politik dalam era Orde Baru ditandai dengan berjalannya praktek kapitalisme yang terdistorsi oleh kekuasaan dengan kontrol yang lemah dari masyarakat, sehingga media massa pun berada pada ruang kapitalisme dengan beberapa distorsi tadi.

Dalam bingkai seperti itu, ketiga media yaitu Kompas, Media Indonesia dan Republika melakukan praktek produksi dengan menjalankan strategi "aman tetapi fungsional". Aman ialah bagaimana media bisa bertahan hidup, fungsional ialah bagaimana media tetap menjalankan fungsi media secara minimal dalam bingkai hegemonik penguasa. Ketiga media memproduksi informasi mengacu pada kebijakan makro yang dikeluarkan jajaran struktur kekuasaan alokatif⁶ mengenai arah dan tujuan media.

Orde Baru, berupa pemanggilan, telepon dan lainnya.

⁶ Lihat hal 81

1. Orientasi Media.

a. Republika.

Republika walau pun tidak secara eksplisit menyebut sebagai surat kabar Islam, memiliki latar belakang yang berbasis “perjuangan” membangun dan mengembangkan ideologi Islam. Republika lahir dalam suasana berbagai pihak kesulitan memperoleh SIUPP, sehingga kelahirannya dipandang sebagai salah satu gejala adanya inkonsistensi lembaga pemerintah dalam kebijakan media - pembatasan penerbitan SIUPP - dan lebih jauh dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan penguasa terhadap media.

Republika diterbitkan oleh Yayasan Abdi Bangsa di bawah naungan Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI) yang ketuanya dijabat oleh BJ Habibie. Waktu itu Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) dan Ketua BPPT. Republika diterbitkan dalam kerangka melaksanakan salah satu program ICMI yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program peningkatan 5K, yaitu: Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir.

Terbitnya SIUPP Republika yang cepat Nomor 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 tertanggal 19 Desember 1992, karena ada kedekatan Soeharto dengan BJ Habibie dimana Yayasan Abdi Bangsa sendiri memiliki susunan organisasi yang hampir seluruhnya terdiri dari birokrat atau orang-

orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Dari susunan pengurusnya terlihat namanama Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, Haji Harmoko, Ibnu Sutowo, Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto, Probosutedjo, Ir. Aburizal Bakrie, dan lain-lainnya. Sedangkan Haji Muhammad Soeharto, Presiden RI, berperan sebagai pelindung Yayasan. Nama Republika pun merupakan usulan dari Soeharto, dimana sebelumnya yang diusulkan ialah surat kabar Republik.

Dukungan Pemerintah terhadap surat kabar ICMI tersebut dianggap merupakan suatu cara Pemerintah untuk memberikan perhatian kepada umat Islam, yang pada masa sebelumnya penguasa dinilai lebih sekuler dan cenderung kurang merepresentasikan umat Islam. Proporsi pejabat yang beragama Islam di kabinet dan parlemen dipandang kurang mencerminkan proporsi umat Islam. Perubahan pandangan Pemerinatah (Soeharto) itu sendiri sudah sejak tahun 1985, dimana umat Islam menerima asas tunggal Pancasila. Dengan penerimaan asas tunggal tersebut tidak ada kekhawatiran akan gerakan fundamentalis Islam. Surat kabar Republika dengan demikian juga dinilai sebagai tanggapan terhadap Kompas sebagai surat kabar Katolik.

Yayasan Abdi Bangsa dalam menjalankan program penerbitan membentuk PT Abdi Bangsa, yang pengelolaanya dilakukan oleh Direksi di bawah Dewan Komisaris. Dimana angotanya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi yang mengelola Perseroan, dibantu oleh Pembina Manajemen.

Republika menyadari bahwa kelahirannya ada dalam situasi masyarakat di tengah Indonesia yang berubah secara cepat di hampir semua aspek kehidupan ini - politik, ekonomi, iptek, sosial, budaya . Dalam era perubahan itu Republika berposisi untuk turut mempersiapkan masyarakat memasuki era baru itu, yaitu dengan mengembangkan keterbukaan. Keterbukaan dan perubahan telah dimulai dan tak ada langkah kembali, bila kita memang bersepakat mencapai kemajuan, dengan tanpa perlu kehilangan segenap kualitas yang telah dimilikinya. Motto Republika "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" menunjukkan semangat mempersiapkan masyarakat menuju masa depan dengan paya mencerdaskan bangsa.

Dengan latar belakang tersebut, misi Republika di berbagai bidang kehidupan adalah sebagai berikut.

Politik

Dalam bidang Politik, Republika mendorong demokratisasi, dan optimalisasi lembaga-lembaga negara, partisipasi politik semua lapisan masyarakat, dan pengutamaan kejujuran dan moralitas dalam politik.

Ekonomi

Keterbukaan dan demokratisasi ekonomi menjadi kepedulian Republika, mempromosikan profesionalisasi yang mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam manajemen, menekankan perlunya pemerataan sumber-sumber daya ekonomi, dan mempromosikan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam bisnis.

Budaya

Republika mendukung sikap yang terbuka dan apresiatif terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dari mana pun datangnya, mempromosikan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan, mempertajam kepekaan nurani; serta bersikap kritis terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang cenderung mereduksi manusia dan mendangkalkan nilai-nilai kemanusiaan.

Agama

Dalam bidang ini, Republika mendorong sikap beragama yang terbuka sekaligus kritis terhadap realitas sosial-ekonomi kontemporer, mempromosikan semangat toleransi yang tulus, mengembangkan penafsiran ajaran-ajaran ideal agama dalam rangka mendapatkan pemahaman yang segar dan tajam, serta mendorong pencarian titik temu di antara agama-agama.

b. Media Indonesia.

Sosok Media Indonesia adalah sosok aktor “Surya Paloh”. Orang Aceh yang memiliki kedekatan dengan “orang-orang” penguasa tetapi bersifat kritis pada penguasa. Ia pada tahun 1966 adalah seorang pendiri dan aktivis KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) cabang Medan, dalam Pemilu 1997 menjadi koordinator kampanye Golkar di Sumatra Utara dan Aceh. Setelah pemilu 1977 ditunjuk sebagai anggota MPR dan pindah ke Jakarta, menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Setelah beberapa bulan kehadirannya dalam

komunitas kapital, sukses awal ialah di bidang penyediaan makanan (*catering*), PT Indocater yang kini berada di bawah satu atap dengan PT Citra Media Nusa Purnama. Surya Paloh jadi lebih sering bersama perusahaan anak Presiden, Bambang Trihatmodjo, bos konglomerat Bimantara. Sebagai pendiri kelompok lobi militer lewat Forum Komunikasi Putra Purnawirawan Indonesia (FKPPI), dia menjadi dekat dengan sejumlah keluarga negara yang paling berpengaruh.

Pada 1985, pengusaha Aceh ini mengembangkan usahanya dengan mendirikan PT Surya Persindo, *holding company* di bidang penerbitan. Hadirnya Surya Persindo Grup adalah contoh bagaimana kewirausahaan besar yang tanpa pengalaman jurnalis tertarik pada industri pers, dengan strategi divesifikasi regional yang jelas. Ini berbeda dengan Kompas Gramedia Grup, Tempo Grup dan Sinar Kasih Grup - yang dijalankan oleh para jurnalis dan dikenal publik lewat kepribadian individual editornya yang telah berstempel pada bendera kelompoknya.

Lewat PT Surya Persindo, hadirilah Prioritas sebagai harian ekonomi yang pernah mengundang kontroversi, lewat kolom Selamat Pagi Indonesia. Gebrakan lainnya pada industri pers Indonesia waktu itu adalah hadirnya Prioritas sebagai harian Indonesia pertama yang menggunakan foto warna pada halaman depan dan belakang. Ketika itu, Prioritas dipimpin Panda Nababan (Pemimpin Redaksi) dan Derek Manangka (Redaktur Pelaksana), dua jurnalis senior Sinar Harapan yang dibajak Surya Paloh.

Persahabatan yang erat antara Surya Paloh dengan elit politik tidak menghentikan Prioritas menjadi koran kedua yang dibredel SIUPP-nya (yang pertama adalah Sinar Harapan pada 29 juni 1987). Keputusan pembatalan itu menyatakan bahwa Prioritas telah menyebarkan berita yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, yang bersifat sinis, insinuatif dan tendensius dan berdasarkan SIUPP-nya harus menyiarkan berita-berita ekonomi 75% dan berita-berita umum 25% . Akan tetapi, sebagian besar meyakini bahwa koran itu dihilangkan karena membicarakan berbagai kasus korupsi (*Tempo*, 1987: 63).

Kesempatan untuk menerbitkan kembali Prioritas tertutup karena pemerintah tidak bermaksud mengeluarkan SIUPP baru lagi. Dalam kondisi kehilangan suratkabarnya ini, Surya Paloh menawarkan kerja sama di bidang permodalan dan manajemen kepada Teuku Yousli Syah selaku pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan pemimpin perusahaan *Media Indonesia* yang sedang kondisi terseok. Media Indonesia di bawah Yousli Syah, pada awalnya terbit dengan 5.000 eksemplar, SIT pertama diterima tahun 1969. Sekali-sekali tidak terbit, bahkan sempat dibatalkan SIT-nya, karena tidak teratur terbit. SIT baru untuk *Media Indonesia* dikeluarkan kemudian tahun 1982 dan diubah menjadi SIUPP tahun 1986. Beberapa tahun kemudian, perusahaan tidak mampu menggaji secara layak. Bahkan, seperti diakui Yousli, ada wartawannya yang tidak digaji.

Dengan manajemen baru, Harian Umum *Media Indonesia* meningkatkan status badan penerbit dari Yayasan Warta Indonesia menjadi PT Citra Media Nusa

Purnama, dengan posisi H. Teuku Yousli Syah, sebagai komisaris dan Surya Paloh sebagai Direktur Utama. Di bawah penerbit PT Citra Media Nusa Purnama, tiras *Media Indonesia* yang awalnya 5.000 eksemplar kini telah berpuluh-puluh kali lipat. Koran yang semula dikerjakan tiga orang, kini dikerjakan ratusan orang. Media Indonesia sudah menjadi salah satu bagian dari kerajaan bisnis media yang cukup kuat yang tidak terbatas di media cetak tetapi juga elektronik, yaitu Harian Mimbar Umum (Medan), Lampung Post (Lampung), Dinamika Berita (Pontianak) dan Metro TV.

Dengan latar belakang “Surya Paloh” tersebut maka citra paduan idealisme dan bisnis melekat pada Media Indonesia. Moto penerbitan ini, masih sama dengan moto Media Indonesia ketika pertama lahir di era Yousli Syah, yaitu Pembawa Suara Rakyat.

c. Kompas.

Kompas secara ideologis sejak kelahirannya memiliki kaitan dengan komunitas agama Katolik. Sekitar tahun 1964, hampir setiap partai politik menerbitkan koran sendiri untuk menyuarakan garis perjuangan dan program partai. Oleh karena itu Bung Karno mendesak Partai Katolik untuk menerbitkan sebuah surat kabar dan untuk itu Partai Katolik menugaskan PK Oyong dan Yacob Utama untuk mempersiapkan penerbitannya. Setelah persiapan dilakukan antara lain dengan memperoleh izin dan juga calon pelanggan, Frans Seda menghadap presiden Soekarno dan dalam kesempatan itu Bung Karno mengusulkan nama yang

direncanakan yaitu Bentara Rakyat diubah menjadi “Kompas”. Nama Bentara Rakyat kemudian dijadikan nama Yayasan, sebagai lembaga penerbit Kompas.

Kelahiran Kompas ada pada situasi persaingan kekuatan politik yang ketat. PKI pada waktu itu memiliki jaringan kekuasaan di lingkungan aparat pemerintahan dan di daerah-daerah yang kuat, menganggap kelahiran Kompas sebagai pesaing berat. Reaksi keras pers PKI dilakukan antara lain dengan menghasut masyarakat dengan mengartikan “Kompas” sebagai “Komando Pastor”. Dalam konstelasi pertarungan politik pada waktu itu, Frans Seda, staf Redaksi dan Yayasan mengadakan pertemuan dan menentukan sifat penerbitan Kompas, yaitu independen. Kebijakan harian senantiasa berusaha menggali sumber berita sendiri sebab sumber berita yang sudah ada diperpolitisir, mengimbangi secara aktif pengaruh Komunis dan kawan-kawannya dengan tetap berpegang pada kebenaran, kecermatan sesuai profesi dan moral pemberitaan sendiri.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kompas disebut oleh Frans Seda sebagai salah satu kekuatan terpercaya dari Orde Baru dalam melawan kekuatan Komunis, dengan mengemban moto “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Moto ini timbul berdasarkan keprihatinan dan penghayatan dari nasib hati nurani rakyat yang pada saat itu tersumbat akibat dimanipulasi oleh PKI dan kawan-kawannya. Walau pun pada awalnya dikatakan sebagai kekuatan Orde Baru, Kompas pernah dilarang terbit oleh pemerintah Orde Baru dalam suatu larangan massal yaitu bersama penerbitan lainnya, yaitu antara 21 Januari 1978 dan dibolehkan kembali terbit tanggal 5

Pebruari 1998. Larangan terbit tersebut berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa yang berakhir dengan peristiwa yang disebut malapetaka lima belas Januari (Malari).

Kompas berkembang terus dari jumlah halaman hanya empat menjadi 16 hal dan kemudian menjadi 20 halaman pada tahun 1986. Sampai pada tahun 1992 Kompas menerbitkan edisi khusus Bola pada setiap hari Jumat, yang mengkhususkan pada masalah olah raga. Mulai tahun 1990-an Kompas menjadi induk dari kerajaan bisnis dari Kelompok Kompas-Gramedia. Kelompok usaha ini disamping memiliki usaha-usaha di bidang media juga usaha di bidang lain, seperti penerbit, toko Buku, supermaket, Hotel, Banking, Advertising. Jumlah media yang terbit di bawah naungan Kelompok Kompas Gramedia tercatat sebanyak 67 media baik media cetak harian, tabloid mingguan dan majalah dan radio siaran.

2. Produksi isi media.

Ketiga media secara teknis memiliki proses produksi yang sama yaitu berita yang dimuat telah mengalami tahapan mulai dari liputan reporter atas peristiwa yang terjadi baik atas dasar inisiatif wartawan atau atas dasar penugasan redaktur sesuai dengan perencanaan yang disusun. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada masing-masing Kepala Desk. Selanjutnya para Redaktur mengadakan rapat, membahas laporan yang masuk guna mempertimbangkan laporan mana yang layak dan tidak dan jika layak ditempatkan di halaman berapa. Setelah diputuskan berita mana yang akan dimuat, maka naskah laporan dari reporter tersebut diserahkan kepada Redaktur Pelaksana atau Redaktur Eksekutif untuk disunting oleh para

Redaktur penyunting. Setelah dilakukan penyuntingan maka dilakukan proses teknis menuju percetakan.

Pedoman-pedoman para wartawan dalam meliput umumnya, sudah menjadi bagian yang melekat dalam kegiatan mereka, karena mereka sudah cukup lama bekerja. Ketika era Orde Baru, semua wartawan menggunakan kode etik PWI, karena organisasi wartawan tersebut merupakan satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Setelah reformasi terjadi dimana berkembang beberapa organisasi wartawan dan wartawan secara bebas memilih organisasi profesi yang diinginkan, sehingga wartawan di satu media dimungkinkan tergabung dalam beberapa organisasi wartawan. Dalam kaitan ini, maka ketiga media membebaskan wartawannya untuk menjadi anggota organisasi manapun. Penerapan kode etik adalah urusan wartawan, sejauhmana kode etik ini dilaksanakan tergantung pada kesadaran pribadi wartawan masing-masing. Pimpinan redaksi, wartawan yang diteliti mengungkapkan bahwa, dalam meliput peristiwa kerusuhan sosial diperlukan persyaratan agar hasil liputan tersebut memenuhi *cover bothside*, akurasi, kejelasan otoritas pemberi informasi baik dari nara sumber maupun sumber di lapangan serta kelengkapan informasi.

Dalam menyajikan berita kerusuhan ketiga media menyadari adanya faktor subyektifitas, ada kesengajaan memberikan perspektif tertentu⁷. Kompas menampilkan suatu berita tidak sekedar menyampaikan peristiwa tetapi memberikan latar belakang dan aspek-aspek yang terkait untuk memberikan perspektif dan

⁷ Hasil wawancara dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Mustofa K Ridwan, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas T Soelarto, dan Redaktur Eksekutif Media Indonesia, 2000.

orientasi kepada pembaca, yaitu memberikan manfaat kepada pembaca sesuai dengan visi dan misi Kompas. Misi Kompas ialah bagaimana keseluruhan permasalahan yang dimuat bisa mengangkat derajat manusia, tidak terlibat dalam polarisasi golongan dan politik. Walau pun demikian, kadang-kadang wartawan terbawa arus. Misal dalam kasus demonstrasi terhadap Pemerintah pada era Orba, karena mendukung gerakan mahasiswa maka dukungan itu terbawa ketika menyusun pemberitaan. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Kongres PDI di Medan, karena mereka tahu Megawati banyak ditindas, maka beritanya memberikan dukungan kepada Megawati. Memang ada informasi dari bagian sirkulasi bahwa berita Megawati laris dijual, namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor akurasi dan lain-lainnya syarat sebagai sebuah berita. Dalam liputan kerusuhan sosial, biasanya pimpinan redaksi dalam rapat pagi, memberikan arahan mengenai permasalahan yang mendasar, konteks kerusuhan tersebut secara makro sosial dan politik. Pembaca Kompas tidak menyukai judul yang bombastis, walau pun ada pembaca yang membeli Kompas dengan cara mengecer sebanyak 45 %. Namun demikian Kompas tidak mau ditinggalkan pembaca, sehingga berusaha untuk tidak bombastis tetapi harus menarik, tidak sekedar memberi informasi, tetapi juga memberi makna atas berita sehingga orang diajak melakukan refleksi.

Media Indonesia, juga menyadari ada faktor subyektifitas dalam meliput kerusuhan sosial, yaitu membela orang tertindas, dan berusaha menonjolkan berita yang menyejukan. Rekapitulasi angka korban, misalnya jumlah yang meninggal, yang luka, rumah atau kendaraan yang dibakar, dalam suatu kerusuhan konflik antar

kelompok dalam masyarakat dikurangi. Indikator kerusuhan lebih mendapat perhatian jika melibatkan lebih 500 anggota masyarakat, memakan korban, permasalahan atau isunya menyangkut kepentingan publik. Banyak kerusuhan termasuk demonstrasi mulai bersifat komersial. Kerusuhan yang dilakukan oleh organisasi tertentu tidak dimuat, karena berdasarkan pengalaman demo tersebut ada yang mendanai, dan motivasinya sudah untuk mencari keuntungan. Media Indonesia lebih memberikan perhatian pada demonstrasi atau kerusuhan yang berlatar belakang untuk menuntut hak pekerja, perjuangan rakyat kecil di beri tempat. Namun apabila demonstrasi yang diulang berkali-kali, karena terlalu lama menyebabkan pasar sudah jenuh terhadap peristiwa tersebut. Biasanya batas peristiwa hanya bertahan di media dalam satu minggu. Walau pun secara substantif peristiwa dan isu terus berjalan tetapi perhitungan komersial bagi pembaca sudah jenuh maka biasanya tetap diberitakan tetapi memuatnya dalam proporsi lebih kecil baik volume maupun penempatannya. Dalam realitasnya menurut penglihatan reporter dan para redaktur peristiwa kekerasan yang terjadi lebih keras dari apa yang dimuat dalam media baik tindakan fisik maupun kata-kata. Namun kami memuatnya dalam batas-batas kesopanan, dan kekerasan yang terjadi tidak menimbulkan efek negatif kepada pembaca seperti membakar emosional pembaca, mensosialisasikan konflik dan lainnya.

Republika, menyadari bahwa dalam meliput kerusuhan sosial berlatar belakang konflik antar golongan, dalam melaporkan peristiwa berusaha agar masyarakat tidak terpacung oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dan kemudian kerusuhan menjadi melebar tidak terkendali. Mengenai peristiwa kerusuhan berkaitan

konflik antar agama, walau pun Republika memiliki latar belakang sebagai surat kabar Islam, dalam melaporkan peristiwa dimana pihak Islam terlibat baik sebagai pelaku baik karena balas dendam atau karena inisiatif sendiri, maka berusaha untuk mencari nara sumber lain sebagai penyeimbang dari sumber lain non Islam. Apabila terjadi sebaliknya, dibuat kebijakan hal yang sama. Pemuatan-pemuatan berita kerusuhan sebagai suatu fakta selalu dimuat, walau pun mungkin memberikan efek pencitraan negatif kepada penguasa, sebagai akumulasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Selain mempertimbangkan agar kerusuhan tidak melebar, juga mempertimbangkan reaksi massa dari pihak-pihak yang sedang konflik kepada Media, sebagai mana dialami oleh Jawa Post ketika kantornya diduduki oleh anggota Banser di Jawa Timur sehingga Jawa Post meliburkan dirinya sehari. Media Indonesia bahkan pernah didatangi oleh suatu kekuatan massa, karena Media memuat berita tentang kelompok tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pemuatan peristiwa kerusuhan juga mempertimbangkan kondisi market, bagi Republika walau pun tidak secara eksplisit menyebut sebagai surat kabar Islam, sebagai surat kabar yang diterbitkan oleh ICMI maka Republika diposisikan oleh pembacanya sebagai surat kabar yang mewakili umat Islam. Namun demikian karena market Republika, tidak saja pengiklan produk yang berkaitan dengan prosesi ritual Islam – misalnya Umroh, Haji – maka isinya tidak secara ekstrim memuat informasi yang berkaitan dengan keislaman. Artinya memandang keislaman secara universal yaitu berusaha mengedepankan nilai-nilai dimana di dalam agama lain pun berlaku.

Ada segmen pembaca yang menghendaki berita-berita kekerasan muncul terus. Dari sisi market, dengan tampilan gaya “Sabili” yang menampilkan fakta-fakta secara naratif dan visual dan memberikan makna realitas yang keras mungkin dalam waktu tertentu bisa meraih sukses pasar. Namun demikian disadari oleh Republika, untuk tidak terjebak menjadi surat kabar eksklusif dan bahkan digolongkan sebagai kelompok sektarian, Republika juga mempertimbangkan realitas market. Pembaca Republika yang biasa juga membaca Kompas, atau pembaca non Muslim yang ingin tahu pemberitaan di Republika mengenai suatu peristiwa juga menjadi perhatian sehingga tidak mungkin menyajikan peristiwa dengan fakta-fakta “telanjang” yang keras. Pangsa iklan Republika juga berkaitan dengan produk-produk umum, paling tidak pemiliknya tidak semuanya muslim. Menurut pengalamannya, ketika memimpin sebuah majalah Islam, dalam rapat dengan biro-biro iklan, ada yang mengungkapkan bahwa pimpinannya berpendapat bahwa jika memasang iklan di Media Islam, dinilai ikut mendanai gerakan Islam Fundamentalis. Sebelumnya, pimpinan Biro Iklan tersebut membaca tulisan di Media asing tentang perkembangan Islam Fundamentalis. Hal tersebut menjadi pertimbangan juga bagi Republika. Dalam rapat manajemen gabungan pertimbangan-pertimbangan tersebut biasa dibahas, dimana pada saat peningkatan sirkulasi melaporkan ada peningkatan oplah akibat pemuatan suatu peristiwa, sementara bagian iklan mengingatkan bahwa klien mereka juga bukan orang muslim. Pertimbangan redaksi dalam melaporkan kekerasan, pertama seimbang, informasi terpaparkan walau pun bertentangan. Menyajikan peristiwa kekerasan, tidak bisa disajikan secara telanjang dan itu pun

hanya melalui gambaran naratif tidak dalam bentuk foto. Redaksi memiliki foto-foto berbagai kekerasan, secara pribadi tidak tega memuatnya, dan juga secara redaksional kalau dimuat akan berdampak negatif kepada masyarakat.

Bagi Media Indonesia disadari juga bahwa disamping sukses secara komersial, juga harus menjadi surakabar berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai wahana publik opini. Hubungan dengan bidang usaha sebagai saling memahami, yaitu memahami posisi dan fungsinya masing-masing. Dalam rapat harian biasanya walau pun tidak tiap hari dihadiri oleh bagian sirkulasi dan iklan, namun pada rapat mingguan pada setiap Rabu hadir semua pimpinan hadir untuk membahas hal-hal yang lebih spesifik, misalnya jika di bagian sirkulasi memiliki program akan memasuki ke daerah tertentu, lalu untuk mendukung bagian sirkulasi dan promosi, bidang Redaksi menyajikan berita di halaman tertentu mengenai daerah tersebut. Selain itu, jika bagian Periklanan sedang menggarap perusahaan tertentu, maka kami lebih hati-hati jika ada kasus yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, yaitu dengan berusaha menyajikan kasus tersebut secara seimbang.

Di lingkungan Kompas juga antara bidang redaksi dan periklanan berusaha untuk tidak saling intervensi. Diantara keduanya ada koordinasi seperti halnya di Media Indonesia jika sedang menggarap market baru. Kalau ada perusahaan meminta memuat berita mengenai aktivitas mereka dan nilainya lebih menonjol aspek promosinya atau tidak memiliki nilai berita, maka disediakan suatu rubrik seremonial sebagai bentuk adventorial. Hubungan antara bidang Redaksi dan Periklanan

dilakukan juga secara informal setiap hari misalnya mengenai berapa persen halaman akan digunakan oleh iklan dan berapa persen untuk redaksi. Sinergi antara bidang Redaksi dengan Perusahaan dalam arti menetapkan porsi tertentu antara iklan dengan bidang Redaksi. Jika pada era Orde Baru koordinasi ini sangat mudah karena sudah ada aturan tertentu yang dibuat pemerintah mengenai porsi muatan iklan dan dengan muatan bidang redaksi yang seharusnya, dalam era sekarang bisa berubah-ubah tiap hari. Kedua bidang itu memiliki nilai dan kriteria masing-masing dan tidak bisa saling mempengaruhi untuk tidak memuat atau memuat berita atau iklan tertentu. Adanya kemandirian bidang redaksi, terlihat pada pengalaman dimana pernah suatu waktu perusahaan membatalkan kontrak iklan karena Kompas memuat citra negatif dari suatu perusahaan tersebut. Untuk membiayai produksi sumber pendapatan dari iklan mencapai 70 %, sedangkan bersumber dari uang langganan atau pembeli eceran sebanyak 30 %. Artinya pembaca disubsidi oleh hasil pembelian ruang untuk iklan.

Gambaran produksi ketiga media di atas, menunjukkan bahwa adanya faktor subyektifitas dalam meliput peristiwa kerusuhan tidak bisa dihindari baik secara sadar maupun tidak. Pertimbangan etik dalam mengartikulasikan suatu isu melekat pada diri wartawan, sementara latar belakang media membedakan orientasi yang berbeda pada artikulasi peristiwa kerusuhan sosial. Peranan pemilik dalam proses produksi media tidak berpengaruh langsung, namun para pengelola media sadar betul akan dua kepentingan yaitu idealisme dan kepentingan bisnis dimana media tidak cukup hanya mengedepankan aspek idealisme tetapi pengembangan profit, terutama karena adanya kompetisi media dalam merebut dan menjaga pasar mereka masing-masing.

3. Konsumsi Isi Media.

Dalam perspektif ekonomi politik, khalayak mengkonsumsi isi media untuk dirinya sendiri dan sebagai upaya mengakumulasi kapital material. Apabila khalayak mengikuti program media di luar iklan, artinya ia mengkonsumsi untuk memperoleh nilai untuk diri sendiri, namun apabila mengikuti program iklan maka ia merupakan ia mengkonsumsi media untuk memperoleh kapital baik untuk kepentingan membeli produk atau menjual produk. Antara keduanya yaitu program non iklan dan iklan saling terkait sebagai *dual market*⁸. Perhatian khalayak terhadap program media merupakan potensi khalayak yang dijual kepada pengiklan. Oleh karena itu, khalayak menjadi obyek para produsen untuk mengakumulasi kapital (material) para pemilik media dan pengiklan. Dalam teori buruh tentang nilai, khalayak dikonsepsikan sebagai bentuk komoditas pengiklan untuk mendukung media. Realitas material di bawah monopoli kapitalisme adalah seluruh waktu sebagian besar anggota masyarakat diluar waktu tidur, sebagai waktu kerja. Dari seluruh waktu kerja tersebut umumnya digunakan untuk memproduksi dan mereproduksi kekuatan buruh dan pada sebagian terbesar diantaranya adalah waktu khalayak yang dijual kepada pengiklan. (Smyte, 1977,p3 dalam Martin Alor, 1995).

Dalam perspektif tersebut secara sadar dan tidak sadar di satu sisi khalayak mengikuti isi media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam memperoleh nilai tambah, di sisi lain potensi khalayak ini dijual kepada pengiklan.

Dalam kasus berita-berita kerusuhan sosial apakah kemungkinan oplah meningkat pada massa peristiwa kerusuhan berlangsung, dan apakah dengan demikian porsi iklan juga meningkat ? Pada ketiga media yang diteliti, karena pola konsumsi media berbasis pada langganan, maka peningkatan oplah yang sifatnya temporer sehingga peliputan peristiwa tertentu tidak berbanding lurus dengan peningkatan iklan. Setiap media menjaga kedekatan hubungan dengan segmen khalayaknya dalam jangka waktu panjang.

Misalnya, Republika walau pun ada pembaca yang menghendaki penampilan kekerasan dalam hal konflik antar kelompok agama, tetapi tidak dilakukannya. Karena diantara Pembaca Republika ada juga yang menjadi pembaca surat kabar lain, sehingga ada kekhawatiran ditinggalkan pembacanya jika terjebak pada isi media yang menampilkan kekerasan, sebab dikhawatirkan ketika konflik berhenti maka mereka akan kehilangan pelanggan. Kompas, pernah mengalami penurunan iklan pada saat di wilayah Glodok sebagai pusat perbelanjaan elektronik terjadi kerusuhan. Artinya kerusuhan itu sendiri yang menimbulkan distorsi pada kemampuan pasar (iklan) dalam media. Kerusuhan mengakibatkan kelesuan di bidang ekonomi dan kerusakan beberapa sentra ekonomi yang menjadi lokasi market iklan mereka, menyebabkan mereka membatalkan kesepakatan-kesepakatan pemuatan iklan yang sudah dibuat. Pola perolehan media dengan cara berlangganan, tampaknya mempunyai kebiasaan membaca secara individual, yang tidak berpengaruh pada cara mengkonsumsi media.

⁸ Lihat hal 70

Dilihat dari konteks komunitas pembaca baik agama maupun politik, konsumsi media terkait pada tatanan dan praktek demokrasi yang diterapkan. Dalam hal ini berarti apakah iklim ruang publik (*public sphere*) membuka ruang bagi khalayak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi, melakukan diskusi. Sebelum reformasi atau pada era Orde Baru, ruang publik tersebut berlangsung dalam dominasi kekuasaan, suara-suara yang berbeda dengan penguasa dianggap menentang penguasa. Akibatnya disatu sisi media massa memuat produk yang seragam dan disisi lain khalayak tertekan karena tidak memperoleh informasi sebagai mana adanya dan juga kesulitan dalam menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan isu yang berkembang.

Menghadapi informasi yang seragam, khalayak akhirnya mencari informasi lain sebagai media alternatif. Dalam era tersebut, berkembang media-media alternatif berupa media bawah tanah yang tidak menggunakan SIUPP seperti antara lain *Kabar dari Pijar* dan *X-post* dan penerbitan-penerbitan berupa selebaran. Pada era itu berita-berita mengenai penyimpangan penguasa, kritik kepada penguasa menjadi produk yang langka sehingga banyak ditunggu atau dicari konsumen. Selain media bawah tanah, konsumen juga dihadapkan kepada pilihan surat kabar sensual dan cenderung pornografi sebagai alternatif karena diisi yang dicari dari penerbitan tidak ditemukan.

Karakteristik komunitas agama sebagai konsumen media, menunjukkan adanya daya kritis yang tinggi terutama yang berkaitan dengan isi media yang dirasakan tidak sesuai dengan aqidah agamanya. Jika terdapat isi media yang

menyinggung akidah agama, maka mereka akan melakukan reaksi yang keras, sebagaimana halnya terjadi pada Tabloid Monitor, pada tahun 1990. Masyarakat yang tergolong komunitas Islam mengajukan protes terhadap isi media yang tidak cocok dengan nilai komunitasnya, dimana media tersebut memuat hasil angket kepada pembaca mengenai tokoh yang dikagumi yang hasinya menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan ke 11.

Konsumsi media dalam era sebelum reformasi, sejalan dengan iklim demokrasi yang tidak berkembang, masyarakat cenderung teralienansi secara individual, lebih banyak mengonsumsi informasi-informasi meninabobokan khalayak dalam ketentrangan semu. Sementara itu informasi yang memberikan kritik kepada penguasa sangat terbatas, dan sebagai barang langka maka banyak dicari.

Kosumen setelah reformasi bergulir mengalami politisasi, walau pun tidak secara langsung. Paradok ketika awal kepemimpinan Soeharto, yang tidak membolehkan media berafiliasi pada partai politik dan kebebasan berpolitik selain di partai penguasa (Golkar) selalu mendapat tekanan, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menjadi anggota partai atau berpihak pada partai tertentu. Dalam konteks inilah kemudian khalayak tersegmentasi atas dasar kecenderungan iklim politik yang berkembang. Antara pangsa pasar dengan sikap politik yang diambil media ada *overlapping*. Sikap politik yang diambil media berkait timbal balik dengan sikap politik masyarakatnya (Eep Syaefulah Patah dalam Bimo dkk, 1999: 242). Sikap politik dari suatu komunitas, dalam mengonsumsi media menjadi dominan, ketika reformasi dalam fase *euforia* dengan munculnya reaksi komunitas politik terhadap isi

media. Menurut catatan AJI Indonesia selama tahun 1999-2000 terdapat 11 kali kekerasan terhadap jurnalis dan media oleh kelompok atau laskar-laskar Islam. Penyebabnya adalah, antara lain terkait pada pemberitaan sebelumnya yang mereka pandang tidak berimbang, provokatif dan ketidak setujuannya kegiatan mereka diliput (AJI Indonesia, 2001). Sementara itu, kelompok lain yang melakukan kekerasan ialah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menurut catatan AJI terdapat 10 kali melakukan kekerasan terhadap wartawan dan media. Penyebabnya selain ada yang berkaitan dengan isi pemberitaan sebelumnya yang dianggap menyudutkan mereka, juga karena arogansi. Setelah PDIP memenangkan Pemilu 2000, di beberapa Daerah terjadi pergeseran kekuasaan dari Golkar ke PDIP. Kekuasaan baru menimbulkan arogansi dari para pendukungnya yang antara lain dengan memberikan perlakuan terhadap wartawan dengan membatasi kegiatan wartawan dan bahkan melakukan intimidasi, dan kekerasan fisik. Fenomena lain, setelah Gus Dur menjadi presiden, pendukungnya sensitive. Gus Dur yang sangat dijunjung tinggi oleh anggota Nahdhatul Ulama sebagai seorang kiyai, sehingga mereka tidak rela pimpinannya sebagai kiyai jabatan presidennya digoyang. Akibat pemberitaan dan karikatur Gus Dur, maka anggota Banser NU melakukan penyerbuan dan mengintimidasi media. Menurut catatan AJI terdapat 7 kali aksi kekerasan yang dilakukan kelompok pendukung Gus Dur dan empat diantaranya akibat karikatur yang dianggap melecehkan Gus Dur. Peristiwa yang paling heboh adalah pendudukan kantor harian Jawa Pos oleh orang-orang NU/Banser-NU, 6-7 Mei 2000, sebagai reaksi terhadap pemberitaan sebelumnya, 6 Mei 2000, dengan

judul PKB Gerah, PB-NU bentuk Tim klarifikasi. Dalam berita tersebut dimuat infografis Ketua PB NU Hasyim Muzadi yang ternyata merupakan kesalahan. Infografis tersebut sebenarnya sudah dimuat di Majalah Tempo dan juga sudah melakukan ralat. Peristiwa ini menjadi heboh karena mereka meminta menghentikan kegiatan jurnalistik Jawa Post. Akhirnya Jawa Post tidak terbit dalam sehari. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan fenomena, proses konsumsi media mengalami distorsi dari tekanan kelompok politik massa. Khalayak tidak bisa dipandang sebagai individu-individu yang terisolasi, tetapi merupakan bagian dari terkait pada berbagai kekuasaan yang ada di lingkungan mereka.

Secara statistik, ketiga media memiliki karakteristik hampir sama, dari aspek umur, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial ekonomi mereka dan persebarannya. Dari kelompok umur pembaca ketiga media tampak didominasi oleh kelompok umur produktif yaitu 15 tahun sampai 39 tahun, masing-masing lebih dari 70 %.⁹ Pembaca pada rentang umur demikian mencerminkan pembaca yang kreatif, dinamis dalam etos pencarian identitas diri yang kuat. Komposisi ini menjadi potensi market pengiklan yang besar jika dilihat karakteristiknya dari kelas sosial ekonomi yang ketiganya ada pada posisi menengah ke atas lebih dari 50 %. Kelas sosial ekonomi

⁹ Pembaca Republika terbanyak berumur muda berumur 20-39 tahun yaitu 66,8 %. Lainnya berumur 15 – 19 tahun (10,5%) dan lebih 40 tahun (22,8 %). Sedangkan segmen Kompas juga paling banyak berumur 15 sampai 34 tahun sebanyak 70,2 %. Dengan rentang umur 15 – 39 tahun bagi Republika sebanyak 77,3 % dan 15 – 34 tahun sebanyak 70,2 bagi Kompas, maka komposisi usia pembaca Kompas dengan Republika tampak sama. Dibandingkan dengan pembaca Media Indonesia tampak komposisinya juga hampir sama. Pembaca Media Indonesia kebanyakan berusia 25 - 39 tahun (36 %), sementara kategori usia 15 - 24 tahun mencapai 32 %. Selebihnya berusia 40 tahun ke atas. Dengan demikian pembaca yang berusia 15 tahun sampai 39 tahun mencapai 78 %.

menengah ke atas akan memberikan pengaruh pada seleksi isi media pada isi media yang cenderung pada gaya hidup kelas menengah ke atas pula, serta tuntutan pada isi media dengan menerapkan profesionalisme. Dalam komposisi ini tampak prosentasi kelompok sosial ekonomi menengah ke atas pembaca Media Indonesia dan Republika lebih tinggi dari Kompas.¹⁰ Hal ini berarti Kompas memiliki konsumen lebih tersebar, orang yang berada di lapisan masyarakat sosial ekonomi bawah juga mengkonsumsi produk Kompas. Terkait pada status sosial ekonomi mereka ialah pekerjaan mereka, ketiganya memiliki pembaca sebagai eksekutif atau pimpinan di lembaga usaha atau pemerintahan yang memegang peranan sebagai pengambil keputusan, sebagai mana dari data % yang menjabat sebagai *White dan Blue Collar* yang cukup tinggi.¹¹ Pangsa pasar ketiga media terkonsentrasi di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang (Jabotabek) seperti tampak dari distribusi yang terbesar adalah di Jabotabek¹².

¹⁰ Berdasarkan kelas sosial ekonomi ketiga media dibaca oleh kelas menengah ke atas, yaitu kelas B dan A serta A+. Kompas secara keseluruhan dibaca oleh kelas B, A1 dan A2 52,7 %, walaupun di antaranya yang terbanyak adalah kelas B sebanyak 22,8 %. Sedangkan kelas ekonomi bawah meliputi C1 23,8 %, C2 12,3 %. Republika dibaca oleh pembaca kelas atas sebanyak 66,7 % meliputi kelas SES A+ (22,7%), B+ (19,7%) dan B (22,3%). Sisanya merupakan pembaca kelas bawah (33,3%). Media Indonesia dibaca oleh kelas menengah ke atas oleh 67 % yang terdiri dari kelas A1 21 %, A2 20 %, B 24 %. Lainnya pembaca kelas C1 18 %, D 3 %, E, 5%.

¹¹ Dilihat dari kategori pekerjaan, pembaca Republika terdiri dari kalangan muda pekerjaan *White collar* 17 %, *Blue collar* 28,1 %; Wirawasta 8,8 % ; Ibu Rumah Tangga 12,0%; Pelajar/mahasiswa 20,4 %. Lainnya 13,3%. Media Indonesia, dibaca oleh paling banyak kalangan *White Collar* (37 %). Menyusul kemudian kelompok *Blue Collar* (19 %), Ibu rumah tangga (14 %), Pelajar/Mahasiswa (12 %), Lain-lain (12 %). Sisanya (6 %) pengusaha. Kompas, dibaca oleh paling banyak kalangan *white collar* 44,3 %, *Blue Collar* 14 %, Wiraswasta (*entrepreneurs*) 4,7 %, Ibu rumah tangga 11,2 % dan lainnya 11,1 %.

¹² Distribusi Kompas sebagian besar ada di Pulau Jawa yaitu mencapai 80 %. Republika, Distribusi di Jakarta 53,4 %, Botabek 24,3 %, Sisanya di Bandung, Medan, Ujung Pandang, Palembang, Surabaya, Semarang, Gerbang Kertasila. Media Indonesia, Jabotabek 64 % dan lainnya di Jawa Barat, Sumatra, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

Artinya pola konsumsi mereka akan terkait dengan karakteristik sosial satu pemukiman di perkotaan, lebih tertarik pada permasalahan kehidupan masyarakat perkotaan atau yang mempunyai implikasi pada kehidupan masyarakat perkotaan.

Dari segi pendidikan ketiga media memiliki karakter yang sama, yaitu yang terbanyak pertama dan kedua ialah SLTA dan Universitas dengan jumlah yang hampir sama.¹³ Kesamaan pendidikan menunjukkan adanya kesamaan dalam kemampuan membaca, daya kritis pembaca yang akhirnya mencerminkan kemampuan mereka melakukan seleksi dalam mengikuti berbagai informasi dalam media.

Dari aspek demografis tidak terlihat ada indikasi yang membedakan pola konsumsi para pembacanya. Pola konsumsi mereka terkait pada aspek ideologis, Kompas sebagai surat kabar Katolik dibaca oleh pembaca yang heterogen menjadi rujukan atas nilai-nilai jurnalistik dari suatu liputan dan rujukan kedalaman suatu isu dari perspektif komprehensif. Pembaca Kompas lebih menyukai liputan peristiwa yang memberikan elaborasi (pendalaman) terhadap berbagai peristiwa, sehingga bisa mengetahui latar belakang peristiwa dan juga memperoleh informasi analitis sebagaimana disajikan dalam kolom-kolom yang disajikan. Pembaca golongan

¹³ Ketiga media dibaca paling banyak oleh mereka yang berpendidikan SLTA dan hampir sama dengan pendidikan Perguruan Tinggi (Universitas dan Akademi). Kompas memiliki pembaca yang berpendidikan SLTA 47,1 %, sedangkan Perguruan Tinggi sebanyak 38,3 % meliputi pendidikan Akademi 11,9 Universitas 16,1, Pasca Sarjana 0,3. Republika, dibaca oleh yang berpendidikan SLTA sebanyak 44,2%, Perguruan Tinggi 34,7 % meliputi Akademi 14,3 % dan Universitas 20,4 %, Pasca Sarjana 2,0%. Media Indonesia, pembacanya berpendidikan SLTA 38 %, Perguruan Tinggi yang meliputi Akademi – Universitas S1 s/d S3 mencapai 31 %. Jumlah yang berpendidikan tinggi ini sebanding dengan yang berpendidikan SD-SLTP (31 %).

muslim, menyadari Kompas sebagai Koran Katolik, sehingga disadarinya ada perspektif untuk tidak menonjolkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan atau menyuarakan kepentingan umat Islam. Oleh karena itu pembaca Kompas yang beragama Islam yang kritis akan mengecek media lainnya antara lain Republika.

Sedangkan Republika sebagai surat kabar Islam lebih menonjol sajian nilai Islamnya, dikonsumsi oleh pembaca terbesar beragama Islam. Pembaca ingin membaca Republika karena kedekatan akan nilai keislaman. Segmen Republika ialah Islam modernis, Islam yang tinggal di perkotaan. Pembacanya mengharapkan seluruh isinya mencerminkan nilai-nilai Islam. Adanya rubrik Hikmah yang berisi pengalaman, pemikiran dan tuntunan-tuntunan berbasis nilai Islam merupakan tuntutan pembaca.

Media Indonesia, tidak memiliki basis orientasi pada agama, dan memposisikan sebagai koran bisnis memberikan bobot pada upaya memperjuangkan kaum lemah, dibaca oleh berbagai kalangan karena memiliki kelugasan dalam sajian kritik sosial. Media Indonesia, dikonsumsi publik yang memiliki selera muda yang mengharapkan informasi kritis terhadap kekuasaan secara konsisten, dengan gaya yang variatif.

BAB V

MEDIA MASSA SEBAGAI JARINGAN PERTARUNGAN IMAJI KERUSUHAN SOSIAL

Berita merupakan salah satu produk industri media yang berbeda dengan produk industri lainnya. Dalam berita diproduksi bermacam imaji, yang maknanya dibuat oleh produser bersama awaknya baik secara sadar maupun tidak. Secara sadar, produser sengaja membuat bingkai tertentu untuk kepentingan tertentu. Secara tidak sadar, terjadi dalam proses penandaan yang merepresentasikan berbagai kepentingan proses produksi berita dan pertimbangan obyektivitas proses konsumsi oleh khalayak. Dalam proses konsumsi, imaji yang diproduksi media ditangkap oleh kapasitas kognitif dan afektif khalayak sesuai dengan sistem tanda dan pemaknaan yang mereka miliki.

Dalam konteks hubungan antara media dengan masyarakat, media selain sebagai institusi ideologis juga institusi ekonomi yang tidak saja berusaha agar mampu bertahan hidup tetapi berupaya menghasilkan keuntungan material dan mengakumulasinya sampai sebesar-besarnya. Oleh karena itu, media kemudian berusaha bersaing mengartikulasikan berbagai peristiwa dan pendapat dalam bingkai yang bisa dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tuntutan ideologis dan tuntutan ekonomi dalam praktek menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan karena keduanya

memiliki tuntutan yang secara bersamaan berusaha untuk dipenuhinya¹ Dalam konteks inilah, maka isi media massa termasuk berita merupakan wahana perebutan kekuasaan dan karena menjadi obyek pertarungan maka menjadi kapital². Pertarungan kekuasaan dilakukan secara sadar dan tidak sadar oleh berbagai kekuatan secara simbolik dan non simbolik. Berita-berita kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia tampak juga merupakan wahana pertarungan kekuasaan simbolik, karena kerusuhan sosial itu sendiri merupakan penampilan konflik secara nyata diantara mereka yang sedang bertarung memperoleh ruang hidup dan menguasainya. Awak media berupaya mengkonstruksi peristiwa dan pendapat mengenai kerusuhan sosial, yang menurut pandangannya perlu diproduksi dan direproduksi. Artikulasi kerusuhan sosial tersebut merupakan konstruksi awak media baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang ada dalam media yang mengklaim berhak merepresentasikan berbagai kepentingan dan hubungan kekuasaan.

Melihat peranan awak media yang tidak sekedar menyampaikan atau mentransfer pesan komunikasi, tetapi juga melakukan konstruksi dan didalam Institusi media terdapat struktur dan agen-agen yang lainnya seperti pemilik media

¹Bourdieu menyebut kepentingan ekonomi menyerupai (*osntensibly*) non ekonomi sebagai upaya membedakan dengan pandangan Marx tentang determinasi ekonomi bahwa ekonomi menentukan ideologi dan faktor non ekonomi lainnya.

² Untuk semua bentuk kekuasaan, Bourdieu menyebutnya sebagai kapital apakah sumberdaya material, kultural, sosial maupun simbolik. Sumberdaya tersebut menjadi kapital manakala berfungsi sebagai hubungan sosial kekuasaan, yaitu jika menjadi obyek pertarungan (Swartz: 1995: 73,74).

yang juga bisa melakukan peranan dalam mengkonstruksi bahkan menciptakan pesan sesuai dengan ideologi yang dimilikinya maka media massa disini melakukan peranan sebagai salah satu jaringan industri informasi, industri imaji.

Dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan pertarungan kekuasaan yang terungkap di dalam teks media berdasarkan analisis terhadap teks yang melaporkan peristiwa dan pendapat-pendapat yang mengemuka yang berkaitan dengan kerusuhan sosial yaitu kerusuhan Tasikmalaya, Semanggi II, Kerusuhan Cibadak Mall dan Glodok, serta kerusuhan berupa tawuran antar warga dan antar pelajar.

A. KASUS KERUSUHAN TASIKMALAYA.

Media Massa tanggal 27 Desember 1996 memberitakan peristiwa kerusuhan sosial di Tasikmalaya yang terjadi tanggal 26 Desember 1996. Gambaran yang tampak dalam media menunjukkan sejumlah relasi simbolik yang tersaji melalui proses produksi dan reproduksi sistem industri kapitalisme yang tidak saja mengungkap peristiwanya tetapi juga merepresentasikan "ruh media" dan "selera" khalayak. "Ruh" media ialah bermacam kekuasaan yang ada didalam dan di luar media yang mengendalikan media. Sedangkan "selera"³ khalayak merupakan

³ Konsep selera atau *taste*, merupakan konsep Bourdieu (1999:175) sebagai suatu pilihan untuk memperoleh keuntungan namun merupakan pilihan yang *imperatif* diproduksi karena kondisi yang ada. Selera tersebut baik selera akan kebutuhan (*taste of necessity*) maupun selera akan kemewahaan (*taste of luxury*), bersumber dari harapan yang mendasar dari pengalaman tentang apa-apa yang diterimanya baik yang berlebih maupun yang terbatas, kemudian diinternalisasi. Dalam konteks ini, bagaimana media melihat perilaku konsumen media, tentunya akan dilandasi oleh pertimbangan kondisi yang ada sehingga mendorong

kesukaan, minat dan keinginan khalayak yang diciptakan untuk mengikuti media yang melandasi karakteristik perilaku konsumen. Dialektika “ruh” dan “selera” inilah melahirkan berbagai ungkapan teks, yang merepresentasikan kerusuhan sosial di Tasikmalaya sebagai berikut.

Kiayi menghukum santri di Pesantren.
Santri anak polisi.
Polisi memukul kiayi.
" Massa" merusak dan membakar kantor polisi,
" Massa" merusak dan membakar pertokoan.
" Massa" merusak dan membakar pabrik.
"Massa" merusak Gereja.
" Massa " merusak dan membakar kendaraan.
" Massa" merusak dan membakar rumah warga Tionghoa.

Dimata khalayak, pesantren merupakan lokus kegiatan atau praktek diskursif komunitas agama (Islam), memiliki aturan-aturan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Didalamnya terjalin hubungan kekuasaan antara guru dan murid. Kiyai dan ustad adalah guru-guru dan santri adalah para murid yang sedang menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Polisi merupakan aparat represi negara, seharusnya mensimbolkan figur penjaga dan pelindung masyarakat. Namun dalam realitasnya peran polisi pada waktu itu dan juga dalam beberapa kasus sekarang polisi lebih dipandang sebagai simbol kekuasaan negara dengan atribut kekuatan fisik yang biasa melakukan praktek-praktek kekerasan. "Massa" merupakan lokus kumpulan orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan kolektif. Kekuatan dan kekuasaan yang direpresentasikan bisa suara rakyat, kegelisahan rakyat, kekecewaan rakyat,

tumbuhnya kebutuhan mereka akan informasi tertentu mengenai kerusuhan sosial. Kondisi yang ada dalam kaitan ini bisa ketidak pastian, kecemasan atau harapan.

rasa ketidakadilan rakyat, bisa juga suara elit politik yang berada langsung di dalam massa atau bersembunyi dibelakangnya, atau juga suara dan tangan-tangan preman, pencuri, pemulung, residivis atau bahkan pelacur.

Pertokoan dan pabrik merupakan simbol lokus aktivitas atau praktek diskursif ekonomi. Didalamnya terdapat majikan dan buruh, yang terjalin dalam hubungan asimetris dan hegemonik. Karena lapangan pekerjaan yang terbatas, mereka menerima apa saja yang dilakukan majikan dan menerima saja setiap peraturan dan perlakuan majikan. Gereja, merupakan rumah ibadah penduduk yang beragama Kristen, pusat kegiatan dan lokus ritual bahkan secara simbolik disebut rumah Tuhan. Kendaraan merupakan properti ekonomi yaitu alat produksi dan simbol status sosial. Ia adalah alat transportasi barang dan orang untuk aktivitas manusia sehari-hari dalam rangka proses produksi, distribusi dan konsumsi barang ekonomi. Warga Tionghoa, ialah salah satu kelompok etnis yang umumnya berhasil di dunia usaha di Indonesia. Mereka mempunyai jaringan bisnis yang luas tidak saja di Tasikmalaya tetapi juga luar Tasikmalaya.

Realitas konflik yang terjadi disajikan dalam media massa melalui proses produksi yang kemudian dikonsumsi oleh khalayak dengan imaji yang mungkin sama atau berbeda dengan realitas obyektif konflik yang terjadi sebagai sebuah diskursus. Apapun yang disajikan oleh media bagi khalayak adalah sebuah realitas yang mungkin telah mengalami distorsi, atau mungkin semu atau mungkin juga palsu. Imaji itu muncul merupakan suatu hasil proses diskursif.

Beberapa imaji yang terbentuk dari bingkai yang dibuat media menunjukkan ungkapan adanya hubungan kekuasaan, yaitu antara mayoritas dengan minoritas pemeluk agama yaitu Islam dan Kristen, antara elit kekuasaan dengan massa, dan antara ekonomi kuat dan lemah yaitu pengusaha modern dan tradisional serta antar kelompok elit kekuasaan. Imaji-imaji tersebut menjadi alat tukar (*currency*) media dengan khalayak, yang dikelola dan dikemas sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi dengan merepresentasikan *common sense* khalayak yang terbiasa dengan sikap diskriminatif memilah milah antara baik dan buruk, tinggi dan rendah, bersih dan kotor.

1. Mayoritas Versus Minoritas

Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia dan agama lainnya minoritas. Perkembangan salah satu agama minoritas menimbulkan kekhawatiran bagi agama mayoritas, sementara itu dominasi agama mayoritas menimbulkan kekhawatiran akan melenyapkan agama minoritas. Pemicu kerusuhan di Tasikmalaya melibatkan anggota suatu lembaga pendidikan pesantren dengan pihak aparat keamanan, yaitu berupa pemukulan beberapa guru di pesantren (ustad atau kiyai) oleh aparat kepolisian, yang kemudian menimbulkan protes sehingga membesar menjadi kerusuhan massa.

Republika sebagai surat kabar yang ditujukan kepada komunitas Islam⁴ memiliki keterkaitan primordial terhadap peristiwa Tasikmalaya karena lokus

⁴ Dalam visi dan misi Republika tidak menyebut sebagai surat kabar Islam atau ditujukan kepada komunitas Islam, pada awal berdirinya memposisikan diri sebagai koran universal

peristiwanya ada di daerah basis Islam berusaha merepresentasikan aspirasi umat Islam. Pada kesempatan pertama Republika mengungkap peristiwa yang terjadi tanggal 26 Desember 1996 dalam edisi 27 Desember dengan struktur retorika⁵, yaitu dengan pernyataan kesimpulan dari nara sumber pejabat kemananan dalam Judul Berita : “ Pangdam III Siliwangi : Ini bukan Spontanitas Massa”.

Penonjolan ungkapan (*Catchprase*) ini memberikan imaji bahwa kerusuhan di Tasikmalaya digerakan secara sengaja dan direncanakan, namun tidak diungkapkan siapa penggerakanya. Bingkai ada gerakan yang direncanakan dalam kerusuhan Tasikmalaya jika dikaitkan dengan teks lain yang memberikan gambaran bahwa kerusuhan dilakukan oleh bukan kalangan pesantren mengandung makna bahwa penggerak atau perencananya bukan kalangan pesantren, walau pun peristiwa pemicunya berkaitan dengan kegiatan di lingkungan pesantren.

Republika mengutip pernyataan bahwa pelaku kerusuhan bukan kalangan pesantren dalam struktur tematik⁶ pada posisi setelah *lead* berita yang memuat

yang mengedepankan upaya meningkatkan kecerdasan (kecendikiaan) dan spiritualitas. Makna spiritualitas bisa terkait pada semua agama di Indonesia. Namun karena yang mendirikan ialah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), maka dikenal sebagai surat kabar ICMI. Dalam perkembangan berikutnya terjadi dialektik antara pembaca dengan pengelola. Pembaca merasa isi Republika mencerminkan aspirasi umat Islam, sedangkan pengelola juga merasa tidak ingin meninggalkan mereka. Jadi dalam prakteknya Republika berusaha memposisikan sebagai koran Islam (Mustopa K Ridwan, hasil wawancara, Juli 2000).

⁵ Merupakan salah satu struktur diskursus, yang dalam berita antara lain dengan cara memberi penekanan kepada hakekat faktual suatu peristiwa dengan menggunakan bukti-bukti berdasarkan sumber yang *reliable* seperti yang memiliki kekuasaan, orang yang dihormati atau seorang profesional (Van Dijk, 1988: 84).

⁶ Salah satu struktur diskursus berita menurut Van Dijk (1988: 44), ialah struktur tematik atau topik yang dalam realisasinya merupakan gambaran struktur tema hasil strategi produksi yang mempertimbangkan hambatan produksi dan kemungkinan strategi pembaca dalam

pernyataan sebelumnya bahwa kerusuhan bukan dilakukan secara spontan. Sehingga dalam konteks itulah, Republika ingin mengungkapkan bahwa kalangan pesantren bukan pelaku dan perencana kerusuhan di Tasikmalaya. Kompas juga mengungkapkan hal yang sama tetapi dalam posisi struktur dibagian penutup berita, artinya bahwa dugaan mengenai pelakunya yang bukan dari kalangan pesantren tidak mendapatkan bingkai yang penting. Penempatan dalam posisi struktur tematis ini merefleksikan latar belakang Kompas⁷ sebagai media yang tumbuh dan berkembang di lingkungan komunitas Kristen, berusaha memelihara jarak dengan khalayak pembacanya yang tidak terbatas pada komunitas Kristen sehingga dengan pertimbangan kepentingan pasar Kompas berusaha tetap menunjukkan informasi yang seimbang sehingga pembaca baik komunitas Islam maupun Kristen tetap tidak mengalihkan kebiasaannya ke surat kabar lainnya.

Penempatan tema pokok⁸ (elemen idea) pelaku kerusuhan yang dirujuk dari pejabat negara, pada Republika yang menunjukkan bahwa kalangan pesantren tidak

mengikuti isi berita. Apa yang diungkapkan oleh Van Dijk tersebut menunjukkan bahwa struktur diskursus merupakan hasil praktek diskursus yang menggambarkan struktur luar, bahwa suatu *event* menjadi topik pertama karena kasusnya datang pertama, juga melihat posisi pembaca lebih banyak dari aspek kesempatan (urutan waktu membaca). Selain urutan penting tidaknya tema berita, struktur yang dimaksud juga akan merepresentasikan makna simbolik dari urutan tersebut sebagai hasil proses penandaan (*signifying*).

⁷ Kompas menempatkan sebagai surat kabar yang universal berusaha untuk menjangkau khalayak yang beranekaragaman. Namun dilihat dari proses kehadirannya, Surat kabar ini merupakan surat kabar yang dibentuk untuk mewadahi suara umat Katolik dalam konteks perimbangan kekuatan politik pada masa kepemimpinan Soekarno. Latar belakang ini menempatkan Kompas dalam struktur yang mencerminkan "warna" aspirasi umat Katolik. (lihat hal 151-152)

⁸ Tema pokok dalam struktur diskursus berita menurut Van Dijk (1998:26), merupakan struktur makro suatu berita yang tercermin dalam proposisi makro berdasarkan aturan dan strategi pemberitaan. Tema pokok ini tentunya memiliki makna semantik makro, seperti

terlibat dalam kerusuhan merupakan strategi media -- yang mungkin dilakukannya tanpa sadar dan sudah menjadi ideologi -- untuk mendekatkan kepada segmen khalayak⁹ sehingga diharapkan isi media sesuai dengan pola konsumsi khalayaknya. Argumentasi mengapa kalangan pesantren tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut baik Republika maupun Kompas mengacu pada rujukan nara sumber pejabat keamanan yaitu Pangdam III sebagai berikut:

... "temuan di lapangan menunjukkan bahwa yang melakukan kerusuhan bukan kalangan pesantren," tambahnya. Secara logis menurutnya, sangat tak mungkin pesantren yang taat pada ajaran agama -- termasuk larangan merusak -- melakukan perusakan. (Republika, 27-12-1996).

Untuk menunjukkan bahwa kerusuhan tidak dilakukan oleh kalangan pesantren, ia mengartikulasikannya dalam struktur retorika, "temuan dilapangan menunjukkan" dengan tanpa menjelaskan siapa sebenarnya yang melakukan kerusuhan. Penggunaan unsur retorik¹⁰ oleh aparat represi negara menunjukkan legitimasi otoritas *top down* penguasa. Untuk memperkuat ungkapan ini, kalimat berikutnya disajikan dengan memberikan impresi landasan (*root*) logika dengan menggunakan sudut pandang struktural, yaitu norma-norma yang berlaku di lingkungan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang tidak mungkin

halnya inti dari suatu buku teks. Sedangkan dalam konsep analisis *framing* (Gamson, 1989:3) elemen ide merupakan bagian dari suatu paket (*package*) berita yang direpresentasikan dalam beberapa instrumen bingkai (*frame devices*).

⁹ Segmen Republika adalah orang Islam kota. Karena orang kota modern dan mempunyai daya beli. Juga mempunyai tradisi Islam yang kuat. Menurut Mustopa K Ridwan, wartawan yang meliput dan menulis berita sudah dengan sendirinya menempatkan diri pada posisi untuk membawakan aspirasi umat Islam. (lihat hal 145 dan 166)

mengajarkan tindakan-tindakan kekerasan. Dalam pandangan bahwa struktur tidak bisa dipisahkan dari peranan agen yaitu anggota pesantren dalam lembaga pendidikan maka ada kemungkinan tindakan agen itu merupakan refleksi tindakan menurut strukturnya. Masalahnya apakah ada norma yang menganggap pengrusakan dianggapnya sebagai suatu kebenaran. Hal ini dapat merujuk pandangan tentang kemungkinan agama membolehkan tindakan kekerasan, sebagaimana diungkapkan Cholid Bisri¹¹ (dalam Suaedy, 2000:138), bahwa berdasarkan pengalaman para nabi sangat boleh jadi kekerasan ada yang dilarang dan ada yang diizinkan. Dua sifat ini tergantung pada cara pandang dan penghampiran yang digunakannya. Perang itu kekerasan, tetapi memandang kekerasan tersebut dari sisi *ahdzunnafi'I wa rafudldlorri*, kemudian dihampiri dengan pendekatan analogik (*qiyaasy*) dan dilihat dari kacamata penghentian fitnah yang berwawasan ke depan, maka perang adalah *akharudlororain* yang mestinya ditempuh. Bahkan yang menghindari perang *fi sabilllah wal mustadl'afin* ditegur keras oleh Allah. Jadi kekerasan dapat diizinkan dengan *illah shohihah*. Dengan pandangan Cholid Bisri tadi dalam tataran struktur pun dimungkinkan ada tatanan yang membolehkan melakukan kekerasan. Artinya dalam kerusuhan Tasikmalaya dimungkinkan terjadi pendekatan struktur tadi terkait

¹⁰ Kriteria struktur retorika dalam diskursus berita menurut Van Dijk (1998:88) selain menggunakan sumber yang *reliable* juga menunjukkan laporan pandangan mata.

¹¹ Sudah banyak tulisan atau buku yang membahas aspek kekerasan menurut pandangan agama khususnya Islam, antara lain buku Agama dan Kekerasan – Dari Anarkisme Politik ke Teologi Kekerasan yang ditulis KH Abdurrahman Wahid dkk (1998). Namun analisis ini tidak secara khusus membahas tesis kerusuhan sosial berdasarkan sentimen teologis. Analisis ini menunjukkan bagaimana imaji konflik antara mayoritas dan minoritas terbentuk dalam media massa.

pula pada perilaku agen.¹² Dengan demikian diantara pelaku kerusuhan bisa saja ada yang bukan di luar pesantren.

Dengan demikian bisa jadi mereka yang mengatasnamakan agama dalam tindakan kerusuhan memiliki keyakinan sebagaimana Cholid Bisri, atau terprovokasi melihat permasalahan berdasarkan teologi kekerasan. Dari diskursus mengenai pesantren dan santri kemudian berkembang ke permasalahan agama, para pejabat keamanan dan tokoh agama memberikan pernyataan bahwa kerusuhan di Tasikmalaya bukan masalah agama. Pejabat keamanan (Pangdam Jaya) elit atau tokoh masyarakat (KH Ilyas Ruhiyat) yang memberikan penggambaran (*depiction*) bahwa kejadian itu sebagai akibat kesalah pahaman antara oknum polisi dengan pimpinan pesantren dan pajabat kemanan. Pangdam Jaya menyebut “ada sekelompok orang yang menunggangi kesalah pahaman tersebut”¹³. Dua ungkapan tersebut sama-sama menunjukkan bingkai sumber berita yaitu pejabat keamanan dan tokoh masyarakat bahwa kerusuhan yang terjadi bukan masalah hubungan antar agama, tetapi karena kesalah pahaman.

Sesuai ideologi Republika yang membawakan nilai-nilai Islam, tentu tidak ingin memberikan imaji bahwa kerusuhan yang terjadi berlatarbelakang masalah agama dan sekaligus ingin melokalisasi wilayah kerusuhan. Hal ini tampak dengan

¹² Apakah struktur atau agen yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Tasikmalaya, dengan merujuk pandangan Gidden bahwa antara struktur dan Agen seperti dua sisi dari mata uang (*double structure*) maka perilaku santri sebagai individu merupakan cerminan struktur yang ada di lingkungan pesantren. Apabila ada diantara mereka pemahaman norma yang melakukan kekerasan, artinya mereka melakukannya dalam konteks yang dianggap benar, misalnya kekerasan untuk melawan kejaliman.

mengungkapkan pernyataan nara sumber Tokoh-tokoh agama baik dari Kristen maupun Islam. Tokoh agama Kristen yang diungkap pendapatnya ialah tokoh dari Badan Musyawarah Antar Gereja se Jawa Barat dan dari tokoh Islam ialah Ketua Majelis Ulama.

Melalui pernyataan Mantan Badan Musyawarah Antar Gereja terungkap satu imaji sikap umat Islam menurut persepsi dari Golongan Kristen. Bingkai yang tercermin dari ungkapan nara sumber tokoh agama Kristen yang menyebutkan bahwa kerusuhan itu bukan masalah agama terlihat ada upaya dari orang Islam di sekitar gereja untuk menghentikan aksi orang Islam lainnya yang akan merusak gereja tetapi tidak berhasil¹⁴. Ungkapan ini memberikan imaji bahwa sebenarnya konflik yang terjadi bukanlah konflik agama dan ada kelompok lain yang mempunyai motivasi lain untuk melakukan pengrusakan terhadap gereja. Pemilihan nara sumber dari tokoh agama Kristen menunjukkan Republika menjaga keseimbangan dalam liputannya dan berusaha memberikan imaji bahwa kerusuhan Tasikmalaya tidak berkaitan dengan masalah agama.

Ketua Majelis Ulama membuat stigma bahwa yang menggerakkan kerusuhan Tasikmalaya ialah Organisasi Tanpa Bentuk

... peristiwa kerusuhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama. "Saya yakin dalam peristiwa tersebut, ada oknum tidak bertanggungjawab yang mengerakan massa untuk melakukan perusahan" ... "Kemungkinan mereka itu adalah organisasi tanpa bentuk (OTB)" (Republika, 28-12-1996).

¹³ Media Indonesia, 27-dan 28 Desember 1996.

OTB merupakan kosa kata politik yang diungkapkan oleh Presiden Soeharto¹⁵ dalam tahun 1995 ketika menghadapi situasi politik yang diwarnai berbagai bentuk kerusuhan. Setelah pernyataan Soeharto tersebut berkembang diskursus mengenai kosa kata tersebut yang arahnya sepihak memandang penggunaan istilah tersebut sebagai upaya dalam mematikan gerakan-gerakan yang menuntut ditegakkannya demokrasi, dipihak lain ada kelompok yang menganggap bahwa memang ada upaya-upaya untuk membuat ketidak stabilan politik dengan menggunakan strategi PKI setelah organisasinya dibubarkan. Pernyataan Majelis Ulama dalam konteks kerusuhan Tasikmalaya, merupakan stigma sebagai cara yang biasa ditempuh dalam pemerintahan Orde Baru untuk menutupi masalah mendasar tentang peristiwa yang terjadi dibalik kerusuhan tersebut. Artikulasi kosa kata OTB¹⁶ dalam diskursus kerusuhan sosial memperlebar area konflik, karena tercipta satu kecurigaan baru tentang pelaku kerusuhan sosial sebagai musuh lama dan bersama yaitu PKI.

Upaya Republika untuk memberikan imaji adanya konflik antar komunitas agama tampak dengan tidak menyebut langsung adanya gereja yang dirusak, tetapi

¹⁴ Republika, 30 Desember 1999.

¹⁵ Presiden Soeharto, ketika menerima Menteri Pemuda dan Olah Raga Hayono Isman waktu itu dalam rangka melaporkan rencana pertunjukan opera lintasan sejarah dimana akan ditampilkan fragmen jangan lupa G-30-S PKI. Presiden berkomentar, bukan itu saja. Wasapadai yang sekarang, yang tak berbentuk. Selanjutnya seminggu kemudian kepada Ketua Umum Organisasi Serba Guna Kosgoro, Soeprapto, yang menemui di Istana Merdeka, dan berpesan agar Kosgoro mewaspadai bahaya laten PKI yang menjelma dalam wujud OTB (lihat Gatra, edisi 28 Oktober 1995).

¹⁶ Pada era orde baru banyak kosa kata politik (termasuk OTB) sengaja digunakan untuk menciptakan musuh bersama karena tidak lagi mampu menangani permasalahannya (lihat Jalaludin Rachmat, dalam Yudi Latif dan Idi Subaidy Ibrahim, 1996).

rumah peribadatan. Penyebutan rumah peribadatan,¹⁷ sebagai pengganti gereja mengandung makna Republika menutup realitas yang sebenarnya dengan maksud tidak menimbulkan reaksi dari agama lain dan tidak menimbulkan efek lain yang lebih besar. Namun kemungkinan penggunaan kata rumah peribadatan menimbulkan imaji yang lebih luas tidak saja gereja tetapi juga bisa mesjid, atau vihara, dan lainnya. Dengan demikian imaji yang terbentuk bagi khalayak ialah pertarungan yang lebih besar dari realitas yang sebenarnya.

pada saat itu unjuk rasa sudah merebak dan menimbulkan kerusakan-kerusakan dan pembakaran terhadap toko-toko milik WNI keturunan Cina, tempat peribadatan serta rambu-rambu lalu lintas, serta beberapa buah kendaraan roda empat (4) dan kendaraan roda dua (2).

Walau pun secara deskriptif tidak mengungkapkan konflik yang berlatar agama, dari pernyataan pihak-pihak agama lain selain Islam, menunjukkan bukti ada permasalahan bukan diluar agama. Selain itu juga dengan tidak mengungkapkan bahwa sasaran pengrusakan tidak ada gereja, justru hal ini membuktikan masalahnya bukan diluar agama.

Dengan ungkapan-ungkapan bahwa kerusuhan bukan masalah agama, justru menunjukkan imaji yang tersembunyi, bahwa kerusuhan yang terjadi bukan di luar masalah agama.¹⁸ Dalam kaitan ini Media Indonesia melalui Editorialnya secara

¹⁷ Penyebutan kata gereja dengan rumah peribadatan merupakan bentuk abstraksi dalam penggunaan bahasa.

¹⁸ Fiske(1992:52) berpendapat bahwa makna yang dipilih ditentukan oleh makna yang tidak ada. Artinya makna yang ada dalam teks, bisa jadi merupakan makna yang sebaliknya. Dalam kasus ini, makna yang ada dalam teks ialah bahwa kerusuhan yang terjadi di Tasikmalaya tidak ada kaitannya dengan agama. Argumentasi Fiske, bertolak dari salah satu konsep semiotika menurut Umberto Eco, yaitu paradigmatic . dimana melalui analisis oposisi

jelas mengatakan kerusuhan itu berkaitan dengan agama, sebagai sumber rujukannya ialah peristiwa lain di Situbondo. Sikap Media Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Editorial merefleksikan visi surat kabar ini yang tidak dibebani oleh latar belakang primordial agama tertentu¹⁹. Media Indonesia tampaknya ingin menunjukkan bahwa konflik agama itu memang ada, dan menghimbau agar semua pimpinan agama, politisi, dan aparat pemerintah untuk bertanggungjawab. "Sama seperti kerusuhan di Situbondo bulan Oktober lalu, amuk massa yang tidak terkendali di Tasikmalaya, kemarin, bermula dari persoalan agama." (Editorial Media Indonesia, 27-12-1996)

Teks di bawah ini memperkuat bingkai adanya penghinaan agama, karena Media Indonesia menggambarkan bahwa pemukulan terjadi di pesantren. Ungkapan ini berbeda dengan ungkapan dalam media lainnya yang melaporkan bahwa pemukulan terjadi di kantor polisi.

Namun permasalahannya menjadi serius karena pemukulan itu terjadi di pesantren. Massa kemudian turun ke jalan melakukan aksi bumi hangus disulut oleh berita dari mulut kemulut bahwa telah terjadi penghinaan terhadap agama Islam (Editorial Media, 27-12-1996)

Indikasi lain terungkap dalam pernyataan elit politik Gus Dur tentang pelaku kerusuhan sebagaimana dikutip Kompas dan Media Indonesia edisi 27-12 1996. "

biner atau polar, akan terlihat struktur dalam atau tersembunyi dari suatu teks. Dengan kerangka fikiran tersebut maka apa yang tersurat bahwa kerusuhan bukan agama makna lain yang tersembunyi kerusuhan tersebut berkaitan dengan bukan di luar agama.

¹⁹ Editorial atau Tajuk Rencana merupakan suatu *genre* yang merepresentasikan pendapat media sehingga secara langsung bingkai yang dibuat media adalah bingkai media. Dalam kasus di atas tampak bingkai Media Indonesia sejalan dengan visi dan misi Media Indonesia

Tidak semestinya peristiwa itu terjadi apapun alasannya, dengan tegas mengutuk peristiwa tersebut meskipun mungkin ada saja diantara para pelaku terdapat warga Nahdlatul Ulama," kata Gus Dur (Media Indonesia, 27-12-1996)

Dalam pernyataan berikutnya, lebih lanjut Gus Dur secara eksplisit mengungkapkan yang bertanggungjawab dalam kerusuhan tersebut ialah mereka yang melakukan kerusuhan. NU sebagai suatu lembaga tidak terlibat. "NU secara organisasi menyatakan, sama sekali tidak terlibat dalam kerusuhan Tasikmalaya, Jawa Barat. Jika ada individu warga NU yang terlibat, tindakan itu menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan" (14-01-1997). Apakah Organisasi NU terlibat atau tidak adalah soal lain, tetapi satu sinyalemen bahwa kemungkinan ada anggota NU yang terlibat sebagai individu merupakan indikasi ada konflik yang terjadi. Sebagaimana penjelasan di muka mengenai kemungkinan anggota pesantren yang terlibat dikaitkan dengan struktur yang ada di pesantren.

Dalam teks berikut terungkap gambaran bahwa ada pihak agama lain yang dirugikan dalam kerusuhan sebagaimana tersaji secara implisit dalam ungkapan seruan dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja se Jawa Barat sebagai berikut:

Badan Kerjasama Gereja-Gereja se Jawa Barat (BKSGJ) mengemukakan 9 butir pernyataan yang antara lain menyerukan kepada segenap umat beragama --- khususnya umat Kristen dan Katolik ---- di Jawa Barat untuk bersikap sabar dan tenang dan menahan diri, tetapi mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengusut, menindak dan menyelesaikannya dengan hukum yang berlaku. (Republika, 28-12-1996)

yang tidak memiliki latar primordialisme agama (Lihat orientasi Media Indonesia pada hal 145-148).

Ungkapan persuasif berupa seruan agar bersikap sabar, tenang dan menahan diri menunjukkan umat Kristen sedang dalam posisi tertindas dan tertekan oleh pihak lain. Ungkapan ini menunjukkan satu penghalusan (*eufemism*) dalam kalimat persuasif, padahal maknanya terlihat ada hubungan antara posisi yang menguasai dengan pihak yang dikuasai. Sebaliknya di posisi lain tercermin dalam ungkapan Menteri Agama, bahwa umat Islam agar tidak mudah terhasut dan menggunakan tempat ibadah untuk kepentingan pribadi atau politik pribadinya. Ungkapan persuasif ini menunjukkan adanya umat Islam yang pernah terhasut dan menggunakan tempat ibadah untuk kepentingan pribadi.

Pernyataan Menteri Agama dengan mengutip laporan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Tasikmalaya dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Agama Jawa Barat mengungkapkan bahwa kerusuhan dimulai dari hasutan orang yang tidak bertanggungjawab dan bukan orang Tasikmalaya²⁰.

Ungkapan “orang yang tidak bertanggungjawab” merupakan label kepada pihak yang melakukan kerusuhan sebagai pengganti obyek yang belum mampu diungkap oleh penguasa. Satu ungkapan yang mendeligitimasi massa dalam kerusuhan sosial. Ungkapan bahwa orang yang bukan dari penduduk Tasikmalaya, mungkin maksudnya untuk menunjukkan bukti dari ungkapan sebelumnya bahwa kerusuhan tidak dilakukan oleh warga pesantren (Tasikmalaya). Dalam perspektif pembaca, ungkapan tersebut menunjukkan telah terjadi pengembangan imaji

terdapat konflik antar warga masyarakat yang berbeda wilayahnya. Pelaku kerusuhan yang bukan berasal dari daerahnya berdasarkan bahasa yang digunakan oleh orang yang melakukan kerusuhan.

Secara struktural tampaknya Republika berusaha menjaga imaji bahwa para santri khususnya dan umumnya pemeluk agama Islam tidak melakukan tindakan kerusuhan. Namun demikian dalam prakteknya, secara individual wartawannya, memberikan imaji adanya konflik mayoritas dan minoritas. Hal itu tampak tidak dalam *hard news*, tetapi dalam deskripsi ruang opini, yaitu Resonansi yang ditulis oleh salah seorang wartawannya. "Di banyak gedung, rumah dan toko-toko masih tertutup terlihat tulisan "muslim" di dinding muka. Atau Allahu Akbar". Begitu pun beberapa mobil yang lalu lalang, kacanya ditemplei tulisan " Muslim" (Resonansi, Nasir Tamara, 30 - 12 - 1996).

Sedangkan Media Indonesia mengungkapkan informasi mengenai pemasangan simbol-simbol Islam dalam *hard news*, sebagai berikut

Rumah-rumah warga Tasikmalaya yang berjumlah sekitar 250 ribu ditemplei stiker bertulisan "kami muslim". Demikian pula sejumlah toko kepunyaan warga keturunan, memasang stiker dengan bunyi, "Rumah ini jangan dibakar karena dibelakangnya ada muslim" atau "jangan dibakar, dibelakang ada masjid". Stiker-stiker seperti itu tidak hanya ditempel di rumah-rumah, tetapi juga pada kaca kendaraan bermotor (Media Indonesia, 28-12-1996)

Apa yang dilaporkan Media Indonesia juga dilaporkan Kompas, dengan menggunakan simbol-simbol tersebut anggota masyarakat yang mungkin saja bukan umat Islam semua, mengharapkan agar kendaraan dan bangunan mereka tidak

²⁰ Republika, 28 Desember 1996.

dirusak, atau dibakar. Dengan memberikan identitas bahwa pemiliknya adalah umat Islam, sehingga diharapkan mereka selamat dari tindakan kekerasan. Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran ialah mereka yang non muslim. Namun apakah hal ini berarti yang melakukan gerakan tersebut ialah gerakan yang dimotori oleh umat muslim atau gerakan yang berideologi Islam. Belum tentu.

Republika mengungkapkan ada gerakan lain yang sengaja memberikan imaji yang bisa menyudutkan umat Islam. Dalam Resonansi yang ditulis Nasir Tamara, diungkapkan :Berbeda dengan kerusuhan 27 Juli di Jakarta, peristiwa Situbondo dan Tasikmalaya dikaitkan dengan tuduhan terhadap umat Islam. Ini dijadikan peluru yang gampang dipakai untuk menyudutkan umat Islam (Resonansi, Nasir Tamara, 30 - 12 - 1996).

Pandangan Nasir Tamara tersebut diungkapkan berdasarkan rujukan dengan peristiwa Situbondo dimana daerah itu merupakan basis penduduknya kental dengan kehidupan Islami. Jadi dengan rujukan tersebut ada upaya yang sengaja untuk menyudutkan umat Islam sebagai umat yang memusuhi agama minoritas. Menghadapi tekanan ini, "Umat Islam dituntut untuk berlapang dada, berjiwa besar, dan toleran dalam kehidupan negara kita. Kalau pun ada rasa marah karena merasa diperlakukan tidak adil, mari kita tetap berkepala dingin dan secara rasional menyelesaikan persoalan seberat apapun." (Resonansi, Nasir Tamara, 30-12-1996).

Gambaran adanya ketidakadilan pada kelompok mayoritas dicerminkan oleh ungkapan Kacung Marijan. Menurutnya ketidakadilan pada umat Islam karena yang memegang kunci kekuasaan terutama ekonomi ialah orang non muslim.

Kalau ditelusuri, aksi pembakaran gereja-gereja itu bisa mudah dilakukan, tidak lepas dari benar atau tidak, yang jelas, dalam tiga dekade terakhir ini prosentase umat kristiani meningkat cukup berarti. Isu demikian ini terakumulasi karena, secara kebetulan yang mengendalikan perekonomian di negeri ini bukan orang-orang muslim dan merupakan penduduk keturunan (Kacung Marijan, *Republika* 20 - 1 - 1997).

Koheren dengan ungkapan Nasir Tamara, ungkapan Komisi Pemantau Komnas HAM membawa pada satu imaji bahwa ada upaya untuk menyudutkan umat Islam, dimana ia mempertanyakan mengapa kerusuhan tersebut terjadi di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai pusat-pusat Islam²¹.

Pilihan untuk mengungkap pernyataan nara sumber Komnas HAM sejalan dengan pemikiran yang berkembang dalam Tajuk *Republika* yang memberikan analisis keterkaitan kasus Tasikmalaya dengan Situbondo bahwa ada kesamaan penyebab kerusuhan di Tasikmalaya dan Situbondo yaitu kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan aparat pemerintah. Di Situbondo, keputusan hakim dinilai tidak adil dan di Tasikmalaya karena tindakan main hakim sendiri oleh aparat keamanan²².

Kesamaan peristiwa Situbondo dan Tasikmalaya diungkap dalam Pernyataan YLBHI, bahwa kerusuhan Tasikmalaya tak terpisahkan dari kasus-kasus lainnya.

Kasus Tasikmalaya memiliki kesamaan dengan kasus Situbondo. Ini berdasarkan pada tiga indikator: Pertama, pada saat massa mulai berkumpul dan marah hanya sedikit petugas keamanan di lokasi tersebut. Indikator kedua, kalau di Situbondo itu masalah persidangan, di Tasikmalaya masih tahap penyidikan. Selain itu juga ada pembelokan sasaran kemarahan dari kantor pengadilan di Situbondo dan kantor kepolisian di Tasikmalaya ke bangunan-bangunan lain. Indikator ketiga, penanganan kasus tersebut sama, ketika terjadi kerusuhan kemudian arus lalu lintas menuju lokasi dihentikan dan semua arus informasi terputus (*Republika*, 30 - 12- 1996)

²¹ *Republika* 13 Pebruasi 1997

²² *Republika* 28 Desember 1996.

Pernyataan YLBHI menumbuhkan imaji kesamaan kasus Situbondo dan Tasikmalaya dari aspek peranan pemerintah yang lemah atau ada kesengajaan dari pemerintah seperti dalam ungkapan “ pada saat massa berkumpul sedikit petugas keamanan yang berkumpul” dan “arus lalu lintas dan listrik dihentikan”.

Imaji adanya gerakan yang secara sengaja mengembangkan ketegangan agama juga diangkat Republika dengan menunjukkan nara sumber Ketua PP Muhamadiyah Amin Rais sebagai berikut:

Ketua Umum PP Muhamadiyah, Amien Rais mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap usaha beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab yang memunculkan ketegangan agama dalam segala bentuk manifestasinya (28 -12 -1996).

Siapakah pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut yang berusaha menciptakan ketegangan antar umat beragama. Republika menyajikan laporan yang memuat sinyalemen Dandim 0612 Tasikmalaya bahwa pihak yang melakukan gerakan adalah sisa-sisa Gerombolan Kartosuwiryo berdasarkan analogi bahwa merupakan daerah rawan gerakan politik garis keras.²³

Dandim menghubungkan kekerasan yang terjadi dengan gerakan Kartosuwiryo pada massa lalu. Ia telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap wilayah yang dulunya merupakan basis gerakan Kartosuwiryo. Pernyataan Kodim yang mengungkap belum terdapat bukti adanya gerakan radikal namun konteks rujukan

²³ Republika, 7 Januari 1997.

langsung kalimat sebelumnya menunjukkan bahwa kemungkinan dilakukan oleh kelompok itu terbuka seperti pihak Kodim terus melakukan pembinaan.

Republika mengungkap pernyataan Dandim sebagai tuduhan, dan masih perlu dianalisis siapa gerakan yang ada di balik Kerusuhan Tasikmalaya. Ada dua sinyalemen yang diajukan dalam bentuk pertanyaan, yaitu kelompok politik yang tidak puas terhadap kondisi saat ini atau semata-mata tekanan sosial. Ungkapan Dandim ini bertentangan dengan bingkai Republika sebelumnya yang memberikan gambaran adanya gerakan yang secara sengaja menyudutkan Islam, sehingga ungkapan yang menyatakan kemungkinan adanya kaitan dengan gerakan Kartosuwiryo, sebagai tuduhan.

Bingkai bahwa kasus kerusuhan Tasikmalaya merupakan kasus hubungan antar agama juga diungkapkan Kompas dengan memuat pernyataan Sarlito Wirawan Sarwono, faktor kesenjangan atau Pemilu hanya merupakan faktor pendukung saja. Namun demikian ungkapannya menunjukkan keadaan sebaliknya dari bingkai Republika. Sarlito melihatnya kerusuhan disebabkan adanya sikap anti Kristen dari kalangan Islam.

Kalau ciri ikatan tradisional Islam di kedua kota itu dikaitkan dengan pola kerusuhan dari non-agama menjadi kerusuhan antar agama, maka bisa diperkirakan bahwa masalah intinya adalah masalah hubungan antar agama, sedangkan faktor penunggang dan kesenjangan (dan mungkin juga faktor-faktor lain seperti pemilu dan sebagainya) hanya merupakan faktor pendukung saja. Sikap negatif antar agama ini (khususnya dari pihak Islam ke Kristen, bukan sebaliknya dan juga tidak pada agama-agama lain) nampaknya sudah seperti api dalam sekam. (Sarlito Wirawan Santoso, Kompas, 27-01-1997).

Konflik mayoritas dan minoritas diungkap oleh Kompas, sejalan dengan posisi Kompas sebagai surat kabar yang terkait pada primordial umat Kristen, dan polarisasi konflik karena hubungan antar umat beragama ini diperluas dengan dimensi penyelenggaraan pemerintahan dimana sikap anti Kristen dari agama mayoritas terjadi setelah Islam mengalami perkembangan positif di pemerintahan.

TUMBUHNYA sikap anti-Kristen ini sebenarnya berawal dari perkembangan positif agama Islam sejak awal masa Orde Baru. Setelah menjadi kambing hitam dan sangat ditekan semasa Orde Lama yang didominasi golongan komunis dan sekuler, Islam (dan juga agama-agama lainnya di Indonesia) dikembangkan dengan upaya yang sangat maksimal. Pemerintah bukan hanya memberi dukungan mental (misalnya dengan mencantumkannya dalam GBHN), melainkan juga mengerahkan sejumlah dana yang besar untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, pengembangan organisasi-organisasi keagamaan dan manajemen kehidupan beragama (ibadah haji, angkutan lebaran, angkutan Natal dan sebagainya)-- (Kompas, 27-01-1997).

Kompas lebih lanjut memuat artikel yang memberikan perspektif berbeda dengan Sarlito, yaitu seorang mantan Rektor IAIN, Prof Dr Simuh²⁴ menurutnya bukan karena sikap anti Kristen, tetapi lebih dalam dari itu. Bahwa peristiwa Situbondo dan Tasikmalaya itu akar masalahnya bukan terletak pada sikap anti-Kristen dari pihak Islam. Akan tetapi lebih dalam dari itu. (Kompas, 7-02-1997)

Artinya, sebenarnya ia sependapat dengan Sarlito, tetapi ia menunjukkan informasi penyebabnya yang lebih mendasar, ialah masalah kesenjangan sistem pendidikan, dimana pendidikan keagamaan di kalangan Islam, antara lain pesantren sudah lama teralienansi dari sistem pendidikan modern, kesenjangan ini menjadikan umat Islam lebih emosional, dan itulah yang menjadi penyebab kerusuhan.

Adanya konflik antar umat beragama yaitu Islam versus Kristen, diungkapkan oleh Republika dengan memuat artikel Ahmad Sumargono. Sarlito mengungkapkan Sikap anti Kristen muncul setelah umat Islam mengalami perkembangan positif di pemerintahan, sedangkan Sumargono, melihat yang menginginkan kerusuhan ialah mereka yang tersingkir dari pemerintahan. Secara implisit, Sumargono sebenarnya mengatakan bahwa umat Kristenlah yang menghendaki kerusuhan, sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan di bawah ini.

Mudah ditebak, kelompok yang menginginkan kerusuhan (chaos) adalah kelompok frustrasi yang tersingkirkan dari pemerintahan. Mereka semakin frustrasi karena kekuatan mereka semakin tersingkir dari posisi-posisi pemerintahan dan lembaga-lembaga strategis lainnya. Atau mereka semakin gerah karena melihat Islam mendapat posisi yang menuju ke arah semakin wajar dan proporsional. Mereka sakit hati karena Islam tidak lagi dianggap sebagai ancaman bangsa, sebagaimana halnya Komunis. Karena itulah mereka selalu berusaha memunculkan istilah-istilah yang menyudutkan Islam seperti ekstrim kanan, sektarian, dan sejenisnya (Ahmad Sumargono, Republika, 11-2-1997).

Republika mengangkat artikel ini sejalan dengan ungkapan yang memiliki makna sebaliknya²⁵ pada awal pengungkapan kasus Tasikmalaya, yang lebih banyak membingkai bahwa kasus tersebut bukan berkaitan dengan hubungan antar umat agama, yang memiliki makna sebaliknya.

Secara keseluruhan tiga media menyajikan kerusuhan sosial di Tasikmalaya berlatar belakang agama, yaitu adanya konflik antara mayoritas pemeluk agama Islam dengan minoritas yaitu Kristen. Ketiga media mengakumulasi imaji tentang

²⁴ Kompas, 7 Pebruari 1997.

²⁵ Lihat pendapat Fiske pada hal 183.

kerusuhan sosial dalam konflik mayoritas dengan minoritas dengan artikulasi yang berbeda sehingga menimbulkan imaji yang berbeda pula. Republika pada awal peristiwa kerusuhan, mengartikulasikan kerusuhan sosial secara implisit dan paradigmatik.²⁶ Artinya konflik antara minoritas dengan mayoritas dinyatakan sebagai konflik bukan antara mayoritas dengan minoritas, walau pun pada akhirnya melalui tulisan-tulisan para wartawannya secara eksplisit mengemukakan bahwa kerusuhan tersebut memiliki dimensi latar belakang konflik antar pemeluk agama mayoritas dengan minoritas.

Dalam konteks proses produksi teks, tampaknya Republika berusaha untuk menjaga agar kerusuhan tidak berkembang dan meluas dengan membingkai bahwa kerusuhan bukan masalah agama, namun secara ideologis melalui kekuatan agensinya Republika menunjukkan posisi struktural yang sebenarnya, yaitu berusaha untuk menunjukkan imaji positif tentang umat Islam. Dengan merujuk nara sumber yang memberikan alasan bahwa kerusuhan sosial merupakan akibat semakin tersingkirnya peran kelompok agama minoritas dalam jalur kekuasaan, sehingga mereka berusaha melakukan kerusuhan sosial dengan mendiskreditkan agama Islam sebagai pelaku kerusuhan sehingga citra Islam menjadi negatif.

²⁶ Artikulasi Republika tersebut sesuai dengan posisi Republika saat itu yang dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga berusaha sejalan dengan klaim-klaim penguasa dan iklim kebebasan pers tidak memungkinkan dilakukan secara eksplisit, namun secara Ideologis tetap mengembangkan perjuangannya untuk memberikan imaji legitimasi kepada mayoritas tidak secara langsung. Jika dibandingkan dengan kondisi pasca Orde Baru artikulasi Republika tampak berbeda sebagaimana terlihat dari hasil penelitian Agus Sudibyo (2001: 93-94) bahwa dalam meliput peristiwa di Ambon, Kompas tampak gamang dalam meliput pihak-

Sedangkan Kompas, menggunakan rujukan-rujukan pakar yang memberikan bingkai melegitimasi kerusuhan dilakukan mayoritas kepada minoritas. Media Indonesia secara eksplisit mengungkapkan bahwa kerusuhan berlatar belakang masalah agama, dan dengan artikulasi persuasi menyerukan pimpinan agama harus lebih bertanggungjawab.

Akumulasi imaji yang dibuat masing-masing media ditujukan kepada segmen khalayaknya sebagai cerminan latar belakang media masing-masing. Sesuai dengan segmennya, Republika mengakumulasi imaji kerusuhan sosial merupakan “gangguan” minoritas, sedangkan Kompas mengakumulasi minoritas dalam posisi terperdaya. Media Indonesia tampak mengakumulasi imaji yang menuntut tanggungjawab keduanya, yaitu umat beragama. Akumulasi ini sebenarnya ditujukan untuk memelihara hubungan baik dengan segmen khalayak media, sebagai upaya memperoleh keuntungan material.

Media tampak lebih banyak menunjukkan aspek retorika dengan lebih banyak memuat pernyataan lembaga represi negara yang memberikan legitimasi otoritas *top down* kepada penguasa. Strategi ini juga sebenarnya merupakan upaya melindungi media untuk bisa bertahan hidup. Peranan penguasa saat itu masih dominan, dimana dengan instrumen izin terbit, pers berada pada cengkraman dominasi penguasa. Ketentuan harus memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)²⁷ bagi

pihak yang terlibat kasus SARA, sedangkan Republika lebih eksplisit dan memberikan legitimasi kepada mayoritas (Agus Sudibyo, 2001: 93-94)

²⁷ SIUPP merupakan ketentuan di bidang perizinan pers, dimana pada era Orde Baru merupakan instrumen negara dalam melaksanakan kekuasaan dominannya (lihat hal 135)

penerbitan waktu itu masih berlaku, sehingga media berusaha menjaga jarak dengan penguasa, agar media bisa bertahan hidup.

2. Elit Penguasa versus Massa.

Konflik antara Elit pemerintahan (penguasa) dengan kelompok perlawanan dalam masyarakat (massa) pada kerusuhan sosial Tasikmalaya menjadi bagian dari sajian media massa. Kemasan berita-berita konflik ini merupakan komoditas yang menarik bagi media, karena pada saat situasi dominasi penguasa yang sangat kuat, informasi mengenai perlawanan terhadap penguasa merupakan komoditas yang langka dan kemungkinan banyak dicari khalayak²⁸

Penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya, dan berusaha mendapat dukungan atau legitimasi dari rakyat sebanyak-banyaknya. Legitimasi dalam praktek politik bisa berasal dari atas ke bawah (*top-down*) dimana sebuah lembaga atau elit melegitimasi dirinya sendiri misalnya dengan memberikan penghargaan kepada klaim, warga kota atau masyarakat umumnya. Sedangkan legitimasi dari bawah ke atas (*bottom-up*) yaitu legitimasi negara, elit, atau pimpinan oleh massa (Van Dijk, 1998).

²⁸ Berdasarkan fungsi *spiral silence* (Noele-Neumann, 1973) pada saat opini yang menentang penguasa tidak mengemuka atau tidak dominan dalam ruang publik, maka opini tersebut akan membesar dalam komunikasi interpersonal. Penentangan kepada penguasa akan terjadi secara diam-diam dalam komunikasi diantara masyarakat. Maka ketika ada informasi dalam ruang publik yang searah dengan informasi dalam ruang personal dalam komunikasi tatap muka maka media tersebut akan dicari.

Legitimasi dari bawah atau dari massa terhadap pemerintah akan tumbuh dan berkembang, apabila pemerintah menjamin dinamika kehidupan rakyat sehingga kesejahteraan rakyatnya terjamin. Pengendalian dan penciptaan kondisi masyarakat yang stabil dan harmonis merupakan tugas penguasa termasuk dalam hal ini untuk mengendalikan berbagai peristiwa kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi dalam masyarakat baik yang bersumber pada konflik vertikal maupun horizontal dari sudut pandang politik merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah yang memegang kendali kekuasaan. Jika kerusuhan terjadi terus menerus maka akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program lainnya, sehingga mempengaruhi kinerja pemerintahan.

Oleh karena itu diskursus media tentang kerusuhan yang terjadi merupakan ajang pertarungan dalam merebut imaji tentang legitimasi elit penguasa atau massa. Dari kelompok (elit) penguasa, berusaha menunjukkan bahwa kerusuhan sosial sengaja dilakukan oleh orang atau kelompok yang ingin menjatuhkan penguasa. Jadi kerusuhan sosial bukan karena ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan termasuk menciptakan ketentraman dan keamanan masyarakat. Sementara dari kelompok perlawanan ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki legitimasi karena belum mampu menyelesaikan permasalahan kerusuhan sosial. Media telah menjadi arena antara elit penguasa dan massa kelompok perlawanan melalui pertarungan imaji. Dalam pertarungan ini media massa ikut serta dalam posisi sebagai penjaja konflik dengan mengembangkan dan mengemas isinya sebagai alat tukar untuk memenuhi rasa ingin tahu sesuai "selera" masyarakat.

Sementara itu media juga memiliki kepentingan yang walaupun kepentingan politik, tetapi pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan kapital (material) baik untuk berusaha bertahan hidup (*survive*) maupun untuk kepentingan mengakumulasi material. Dengan pertimbangan ini, kerusuhan yang terjadi apakah yang sporadis dan situasional berskala kecil atau pada tingkat yang paling buruk berupa kerusuhan yang meluas tidak terkendali dan meluas (*chaos*), besar kecilnya dan dimensi konflik yang terlibat dalam kerusuhan akan terlihat dalam artikulasi media.

Dalam suatu konflik antar kelompok dalam masyarakat, cara media menunjukkan suatu kelompok memiliki legitimasi dan kelompok lainya tidak, merupakan proses diskursif, dengan merepresentasikan aspek positif untuk satu kelompok dan negatif bagi yang lain. Menurut Van Dijk (1998) untuk mencapai tujuan itu terdapat tiga strategi. Pertama, dalam konteks produksi, yaitu pada tahap akses dan penggunaan diskursus. Dalam hal ini kemungkinan media bisa menseleksi dalam pemberian akses terhadap partisipan tertentu dalam diskursus, misalnya memboikot partisipan yang tidak memberikan legitimasi atau sebaliknya memberikan akses untuk partisipan yang memberikan legitimasi. Kedua, ialah karena akses kepada diskursus publik tidak dapat dihindari, maka untuk memberikan gambaran legitimasi dan delegitimasi digunakan pengutipan elemen-elemen berdasarkan perspektif atau konteks yang memberikan legitimasi pada satu pihak dan delegitimasi untuk yang lainnya. Ketiga, dengan menggunakan kelompok atau organisasi dominan untuk memberikan pengaruh pada diskursus, misalnya dengan menggunakan

pembicara yang memiliki perspektif yang melegitimasi untuk satu kelompok dan sebaliknya untuk kelompok lainnya.

Imaji bahwa terdapat kekuasaan massa yang tidak memiliki legitimasi, dengan cara menunjukkan volume kekerasan yang terjadi seperti tampak dalam berita pertama baik di Media Indonesia maupun Kompas. Ungkapan hancurnya tatanan kehidupan yang tenang oleh kekuasaan massa memberikan delegitimasi kepada kekuasaan massa yang melakukan resistensi terhadap penguasa. Kekuatan massa sendiri merupakan gambaran figuratif, yang tidak jelas siapa komponennya. Diungkapkan dalam berita tersebut terdapat kerusakan sarana kapital dan hancurnya tatanan kehidupan yang tenang dan harmonis oleh kekuasaan massa yang emosional dan kriminal. Label bahwa kekuasaan massa emosional dan kriminal merupakan strategi dengan memfokuskan pada perspektif negatif kekuasaan massa sebagaimana terlihat dalam judul berita Media Indonesia. " Massa Mengamuk di Tasikmalaya"

Penekanan pada subyek yaitu Massa²⁹, menunjukkan massa memiliki kekuasaan terhadap sasarannya. Dalam *lead* berita, terlihat sasaran amuk massa ialah kantor Polres, toko, gereja, hotel, pabrik dan sejumlah kantor polisi, yang

²⁹ Judul berita tersebut merupakan menggunakan kalimat intransitif, dalam grammar tradisional menurut Fowler (1996:70), tidak sekedar posisi subyek yang tidak memiliki obyek, tapi juga menunjukkan bahwa predikat yang mempengaruhi status subyek. Dalam judul berita tersebut kata mengamuk akan merujuk pengaruh aktor yang dalam teks ini adalah massa. Artinya menunjukkan dalam judul tersebut menunjukkan makna bahwa massa memiliki kekuasaan.

menunjukkan sasaran-sasaran simbolik tidak saja dalam dimensi politik, tetapi juga ekonomi, sosial dan kultural ³⁰

Mengenai identitas massa sampai tanggal 27 Desember 1996, dilaporkan 34 ditahan dalam kerusuhan itu. Dari jumlah itu 12 diantaranya pelajar dan tiga orang diidentifikasi sebagai residivis. (Media Indonesia, 27-12-1996 hal 1), dan sampai tanggal 7 Januari 1997, Dari 173 pelaku yang ditangkap, 128 adalah pengangguran dan garong... "Sudah jelas bahwa kebanyakan para pelaku kerusuhan adalah para pengangguran dan garong" kata Tayo (Republika, 7 Januari 1997)

Identitas massa yang diungkapkan dalam media berdasarkan rujukan pejabat keamanan ialah tidak saja pelajar, pengangguran dan residivis atau mantan pejabat tetapi juga "garong" atau perampok. Identitas pengangguran, residivis dan perampok dari komponen massa menunjukkan massa disusupi oleh komponen yang bertujuan kriminal dan bukan gerakan atau tindakan protes atau unjuk rasa.

Akibat tindakan massa dilukiskan media dengan memberikan gambaran kondisi Tasikmalaya pada hari kerusuhan terjadi, dengan metafora, "kota santri itu bagai kota mati" dalam ungkapan : Koresponden Media Eriz M Rizal³¹ melaporkan sampai Kamis tengah malam kota santri itu bagai kota mati. Listrik di seluruh kota dipadamkan. Warga kota tidak berani keluar rumah. (Media Indonesia, 27-12-1996)

³⁰ Lihat hal 173, mengenai makna simbolik toko, gereja, pabrik dan polisi

³¹ Liputan langsung peristiwa kerusuhan Tasikmalaya dilaporkan oleh koresponden yang berkedudukan di Bandung. Hasil laporan mereka dikirim ke redaksi (Deks Nusantara) kemudian di bahas dalam rapat *budgeting* untuk diputuskan apakah dimuat atau tidak. Setelah itu kemudian difinalkan untuk dimuat oleh editor dan bidang penerbitan (publishing).

Kota mati merupakan metafora untuk menggambarkan sebuah kota yang tidak ada lagi aktivitas. Hal ini berarti menunjukkan bingkai bahwa akibat tindakan kekuasaan massa kota Tasikmalaya menjadi terhenti aktivitasnya sehingga akan menimbulkan gambaran bahwa tindakan massa tersebut merugikan dan tidak mencerminkan tuntutan realitas dalam masyarakat atau massa tidak lagi memiliki legitimasi.

Gambaran terjadinya kekacauan atau *chaos* di Tasikmalaya, tercermin dari ungkapan :

Entah siapa yang memulai, tiba-tiba massa merusak pagar gedung wakil rakyat itu. Kemudian menuju Mapolres dan melempari bangunan dengan batu dan benda-benda lain. Akibatnya terjadi bentrok fisik antara petugas anti huru hara dengan para pengunjuk rasa yang semakin beringas. (Media Indonesia, 27-12-1996)

Skala kerusuhan diungkapkan dengan gambaran langsung oleh media, yaitu merembet ke kantor polisi sampai dengan pinggiran kota, dan diungkapkan bahwa warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Perusakan merembet ke kantor-kantor Polsek di dalam kota, bahkan sampai pinggiran kota. Rambu-rambu lalu lintas, termasuk *traffic light* ikut dirusak. Puluhan rumah warga keturunan juga menjadi korban amuk (Media Indonesia, 27-12-1996).

Legitimasi elit ditunjukkan dengan lebih banyak mengutip nara sumber pejabat keamanan³². Republika dalam berita pertama menyajikan pernyataan nara

³² Tiga media (Kompas, Media Indonesia dan Republika) sama-sama menggunakan rujukan pejabat keamanan sebagai nara sumber utama, terutama keterangan dengan peristiwa yang terjadi. Mereka dinilai sumber tersebut merupakan sumber kompeten, sebab jika terjadi kesalahan dalam melaporkan peristiwa tersebut, media tidak dipandang sebagai agen yang ikut serta dalam mengatasi kerusuhan. Apabila ungkapan pejabat dinilai tidak sesuai dengan

sumber pejabat tidak saja dalam *headline* tetapi juga dalam *Lead* berita dan badan berita, dimana hampir dalam setiap bagian struktur tema dalam berita tersebut berisi pernyataan nara sumber pejabat keamanan.

Pengungkapan dominasi nara sumber pejabat keamanan, dalam proses produksi berita artinya mengedepankan nilai kompetensi sumber dalam masalah gangguan keamanan, di mana kerusuhan dianggap sebagai gangguan ketertiban dan keamanan yang menjadi kewenangan aparat keamanan. Bagi pembaca, pengungkapan nara sumber pejabat keamanan kemungkinan menunjukkan imaji perlindungan bagi masyarakat atau memberikan imaji adanya konflik antara kelompok dalam masyarakat dengan kelompok pemegang kekuasaan. Pernyataan berupa kesimpulan "bukan spontanitas massa" artinya sama dengan pernyataan "ada gerakan yang direncanakan". Kelompok yang melakukan gerakan perlawanan massa terhadap elit penguasa.

Namun demikian pilihan sajian ini dalam seluruh struktur berita merupakan sikap kehati-hatian dalam menggambarkan realitas yang terjadi sehingga terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak diungkapkan pada berita itu, yaitu mengenai apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya. Penggambaran seperti itu tampaknya merupakan kesengajaan untuk tidak memberikan kesan tingkat atau kadar kekerasan massa yang terjadi. Republika tidak menurunkan kronologis peristiwa yang terjadi dalam berita

kenyataan dalam kerusuhan maka tanggungjawab ada pada pejabat keamanan (ST Soelarto-Kompas, Mustopa K Ridwan - Republika., Laurens Tato - Media Indonesia, hasil wawancara, 2000)

pertama. Kronologis baru diturunkan pada berita hari berikutnya, yaitu tanggal 30 Desember 1996 atau tiga hari setelah peristiwa.

Harian Kompas dan Media Indonesia juga mengungkapkan nara sumber pejabat kewan (elit), tetapi bukan merupakan tema yang dominan, Kompas dan Media Indonesia lebih dominan menyajikan laporan langsung peristiwa berdasarkan peristiwa di lapangan. Penggambaran sikap tegas aparat dalam sajian Republika, Media Indonesia dan juga Kompas merepresentasikan elit kekuasaan aparat represi negara dalam menghadapi aksi kekerasan massa sekaligus memposisikan aparat keamanan sebagai posisi yang memiliki legitimasi kuat. Disamping memberi imaji melindungi masyarakat juga menunjukkan kepada pihak lawan yang sengaja melakukan tindakan kekacauan untuk tidak meneruskan perbuatannya. Kekuasaan ini disajikan Republika dengan menggunakan kata ultimatum pada pernyataan Pangdam Jawa Barat sebagai berikut: Semalam Pangdam mengeluarkan ultimatum: orang-orang yang masih melakukan pengrusakan sampai pukul 21.00 akan ditindak tegas.

Media Indonesia menggunakan kata ultimatum, tetapi digunakan dalam dua tanda petik, sedangkan Kompas tidak menggunakan ultimatum.

Pangdam Siliwangi Mayjen Tayo Tarmadai yang berada di pendopo Bupati Tasikmalaya sebelumnya mengeluarkan "ultimatum" jika pukul 21.00 WIB pembakaran dan perusakan tersebut berlangsung pihaknya akan mengambil tindakan tegas. (Media Indonesia, 27-12-1996)

Pangdam III Siliwangi Mayjen Tayo Tarmadi yang berada di Tasikmalaya sejak kemarin siang, menegaskan, "Jika sampai pukul 21.00 mereka masih mengacau akan ditindak tegas." (Kompas, 7-12-1996).

Penggunaan kata ultimatum sebagai ungkapan yang menunjukkan peringatan keras dan bersifat mengancam. Penggunaan kata ini mungkin secara sadar atau tidak sebagai artikulasi situasi dimana kerusuhan sedang berlangsung dan dihadapkan pada pilihan untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Kompas tidak menggunakan kata ultimatum, sehingga tidak menunjukkan makna kadar kerusuhan yang terjadi. Kata ultimatum lebih menonjol ditujukan kepada orang-orang yang melakukan tindak kekerasan, sedangkan pada Kompas dengan tanpa penggunaan kata ultimatum lebih dominan ditujukan kepada khalayak konsumen Kompas yang memberikan rasa aman.

Apakah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan masih memiliki legitimasi atau tidak. Republika mengungkapkan adanya keberhasilan aparat pemerintah dalam mengatasi kerusuhan. Hal ini memberikan imaji yang melegitimasi pemerintah. Dalam kaitan ini temuan Komnas HAM menunjukkan tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan dalam menangani kerusuhan. "Komnas HAM memuji aparat keamanan dalam menangani kerusuhan di Tasikmalaya. Aparat keamanan, kata Mayjen TNI (Purn) Sjamsuddin dari kantor Komnas HAM cukup bijaksana menangani kerusuhan"(Republika, hal 30-12 - 1996).

Namun demikian, walau pun berkali-kali menyebutkan bahwa kerusuhan itu ada yang mendalangi atau ada provokatornya, aparat keamanan belum menemukan siapa pelakunya. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki legitimasi dalam menangani masalah kerusuhan.

Dalang dari kerusuhan di Tasikmalaya masih terus dicari oleh aparat keamanan. "Hingga kini identitas dan eksistensi dari kelompok ini memang belum lengkap. Tapi beberapa indikator menunjukkan adanya rekayasa

terselubung." Ujar Tayo. Ia yakin bahwa kerusuhan tersebut memang didalangi pihak ketiga (30-12-1996).

Ungkapan yang memberikan legitimasi pada pihak yang melakukan perlawanan pada pemerintah, terlihat dari ungkapan yang menunjukkan ketidakpercayaan pada pemerintah, karena pemerintah memiliki kesombongan kekuasaan, dimana terdapat perasaan jumawa bagi sebagian aparat kepolisian. "Faktor penting yang tak boleh diabaikan adalah masih besarnya perasaan jumawa pada sebagian aparat keamanan. Mereka merasa dengan menjadi aparat keamanan menjadi kelompok yang 'lebih' dibanding masyarakat lain " (Republika, 30-12-1996).

Perasaan lebih dari yang lain menunjukkan ia lebih kuasa dari yang lain. Akibat perasaan jumawa tersebut maka secara kumulatif masyarakat mengekspresikan ketidak berdayaannya dengan melakukan perlawanan. Ungkapan aparat polisi memiliki perasaan jumawa, secara struktural menurunkan legitimasi aparat kepolisian.

Namun di bagian lain Republika juga menunjukkan bahwa antara polisi dengan masyarakat tidak memiliki masalah. Ungkapan itu disampaikan oleh pejabat kepolisian sebagai salah satu elit penguasa.

Kapolres Tasikmalaya, menjawab wawancara Republika, Setelah kerusuhan ini terlihat kebingungan polisi, karena kantor-kantor rusak. Bingung mau berbuat apa ? Tapi ternyata masyarakat ada yang membantu memperbaiki kantor atau penyediaan tempat untuk kantor. Ini sebetulnya menunjukkan ndak ada masalah antara masyarakat dan polisi. Republika, hal 30-12- 1996).

Artinya disini elit penguasa menunjukkan legitimasinya dimata publik. Sebaliknya yang menjadi obyek imaji pelaku kerusuhan ialah kemungkinan "provokator" atau

kekuatan massa yang tidak terkendali. Gambaran di atas menunjukkan adanya pengembangan imaji bahwa provokator atau agen provokator yang melakukan kerusuhan dalam rangka menciptakan situasi politik tidak terkendali sehingga bisa mengacaukan pelaksanaan Pemilu 1997. Artinya ada kekuatan politik yang bermain untuk memperoleh imaji partai yang memegang kekuasaan sekarang tidak memiliki legitimasi.

Sebab-sebab utama kerusuhan di Tasikmalaya yang terjadi hanya tiga bulan peristiwa Situbondo sedang dicari. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang bersalah dalam peristiwa kekerasan tersebut. Apakah itu memang ulah massa yang mengamuk tidak terkontrol atau hasil operasi para "agent provocateur" yang mencoba membuat situasi politik tidak terkendali menjelang pemilu yang tinggal enam bulan lagi (Resonansi, Nasir Tamara, 30-12-1996).

Di bagian lain, Republika juga merepresentasikan provokator tersebut "kekuatan yang ingin menghancurkan negara" atau "kekuatan yang tidak menghendaki stabilitas". Imaji ini tentunya ditujukan kepada elit yang berusaha untuk menunjukkan penguasa tidak legitimate. Jika penguasa tidak memiliki legitimasi maka partai yang berkuasa akan tidak legitimate lagi, dan pada Pemilu 1997, diharapkan kekuasaanya berakhir.

Imaji perlawanan dari elit partai yang berkuasa, dikemukakan oleh Ketua

Umum DPP Golkar H Harmoko,

Kerusuhan di Tasikmalaya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 1997, karena 94 persen rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah menyalurkan aspirasinya melalui pantarlilh. "Dengan data itu saja (94%) kita sudah mampu memprediksi bahwa rakyat akan menyukkseskan pesta demokrasi" ujar Harmoko menjawab pertanyaan wartawan di kota Gianjar, Bali. (Republika, 30-12-1996).

Harmoko seakan menepis bahwa kekuatan-kekuatan untuk menggagalkan pemilu atau medelegitimasi partai yang berkuasa tidak akan terjadi. Ia membuat argumentasi rasional, bahwa rakyat akan menyukseskan Pemilu 1997, dengan data kesadaran untuk mengikuti Pemilu sebanyak 94 %. Dengan demikian partai yang berkuasa melegitimasi dirinya sendiri secara retorik dengan mengungkapkan bukti berupa data yang dapat meyakinkan publik.

Kerusuhan sosial juga dijadikan ajang untuk menurunkan legitimasi masyarakat yang tidak puas terhadap kebijakan publik. Sebutan "orang-orang yang tidak puas" pada pernyataan penguasa militer Mayjen Tayo Tarmadi³³ dibawah ini menunjukan label pihak yang tidak setuju dengan kebijakan publik berada dipihak lawan.

Artinya kekuasaan rakyat yang tidak puas kepada kebijakan publik di-delegitimasi sebagai kelompok yang "memanfaatkan" kerusuhan, sehingga kerusuhan melebar dan semakin besar. Delegitimasi pada massa juga dilakukan oleh elit penguasa dengan memberikan gambaran (*depiction*) bahwa kerusuhan itu direkayasa dan bermaksud membangun ketidakpercayaan pada pemerintah yang pada akhirnya bertujuan melakukan kudeta.³⁴

Alasan ada kekuatan yang merekayasa kerusuhan disuarakan elit politik lain di luar penguasa dan menggambarkan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi seperti disengaja untuk menunjukkan bahwa ABRI tidak berdaya menghadapi massa.

³³ Republika, 7 Januari 1997.

³⁴ Republika, 11 Pebruari 1997.

Hal ini akan mengakibatkan rakyat tidak percaya sehingga bisa melumpuhkan perekonomian. "Mereka" kemungkinan akan melakukan kudeta.

Nara Sumber pejabat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengungkapkan bahwa kerusuhan tersebut hasil "kelompok yang terkoordinasi untuk menciptakan instabilitas"³⁵. Pernyataan ini menunjukkan bahwa massa yang tidak legitimate .

Lebih jauh lagi, pejabat keamanan lain yaitu Komandan Jenderal Kopasus mengindikasikan bahwa kelompok massa tersebut dikaitkan dengan peristiwa G-30S-PKI. Kelompok tersebut sedang mulai menyebarkan fitnah dan memutarbalikan tentang fakta sejarah G30-S-PKI. Stigma ini memberikan delegitimasi kepada kelompok massa dan juga memberikan imaji perlawanan dengan pernyataan bahwa "Ini perlu diwaspadai. Kita tidak boleh menyerah kepada mereka"³⁶

Delegitimasi terhadap kerusuhan sosial atau gerakan massa tersebut, juga tampak dari ungkapan nara sumber media Panglima Komando Operasi TNI AU I (Pangkoopsau I) Marsma Purnomo Sidhi, bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ingin berbuat makar.³⁷

Ungkapan Purnomo sejalan dengan ungkapan pejabat pemerintah lainnya yaitu Syarwan Hamid, dengan mengungkapkan kerusuhan itu merupakan upaya

³⁵ Republika 15 Januari 1997

³⁶ Republika, 1 Maret 1997

³⁷ Kompas, 15 Januari 1997.

untuk membangun ketidakpercayaan pada pemerintah sebagai awal untuk melakukan pemberontakan.³⁸

Berbagai peristiwa kerusuhan termasuk di Tasikmalaya, bagi kelas dominan merupakan kelompok-kelompok yang menciptakan instabilitas yang secara keseluruhan akhirnya akan mengepung pusat pemerintahan. Untuk memperkuat imaji yang mendelegitimasi gerakan massa dengan memberikan contoh yang sama dengan gerakan di RRC,

Kepala Negara menunjukkan, dalam mengalahkan Kuomintang dulu, Mao Ze-dong menggunakan teori kota-desa. Menurut Presiden, dalam teori itu, yang dilakukan adalah mengacau desa kemudian mengacau kota, atau menguasai desa kemudian baru menguasai kota, dan merebut kekuasaan. "Nah, para santri pondok pesantren harus waspada, kerusuhan itu akan selalu ada, juga surat selebaran. Di Tasikmalaya terjadi, lantas beberapa kilometer sudah terdapat surat selebaran," tutur Presiden. (KOMPAS, Sabtu, 18-01-1997)

Sejalan dengan ungkapan kepala negara, Ketua ICMI juga berpendapat bahwa kerusuhan sosial dirancang dalam rangka menggantikan Pancasila dan UUD 1945.³⁹

Ungkapan media dengan menampilkan nara sumber Presiden Soeharto dan BJ Habibie merupakan pengungkapan dominasi elit, dalam memperkuat kedudukan, dengan membuat generalisasi bahwa kerusuhan sengaja dibuat oleh elit politik lawannya melalui kekuatan massa. Delegitimasi dilakukan dengan pemberian label yang menuduh bahwa gerakan yang ada hendak menggantikan Ideologi negara yaitu Pancasila. Ungkapan Soeharto dan Habibie memiliki kesamaan arah, yang melihat

³⁸ Kompas, 17 Januari 1997

³⁹ Media Indonesia, 12 Februari 1997

kerusuhan dengan pasang kuda-kuda, untuk tidak disalahkan karena terkait kepada tanggungjawab mereka selaku pimpinan negara. Kosa kata politik orde baru, yaitu “stabilitas versus instabilitas”, “Pancasilais versus anti pancasila”, “ Penyimpang verus murni dan konsekwen” (dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945) merupakan kosa- kata yang memberikan *depiction* yang menunjukkan dominasi penguasa terhadap masyarakat. Kosa kata itu tidak memberikan kejelasan apa-apa dan penyelesaian terhadap kasus kerusuhan sosial, tetapi hanya merupakan ungkapan-ungkapan yang abstrak sebagai label kepada kelompok pendukung penguasa dan kelompok yang melakukan resistensi terhadap kekuasaan.

Kosa kata baru yang diungkapkan ialah “desa mengepung kota”, sebagai strategi merebut kekuasaan. Kosa kata ini diungkap oleh pemegang kekuasaan, Soeharto dalam menghadapi berbagai kerusuhan yang timbul. Kalau pada tahun 1995, Soeharto menyebut OTB, yang secara implisit mengatakan bahwa berbagai kerusuhan merupakan bentuk perlawanan Partai Komunis Indonesia yang telah dibubarkan. Dalam tahun 1996, juga menduga hal yang sama. Strategi desa mengepung kota merupakan strategi yang ditempuh oleh Tokoh Komunis Mao Zedong ketika melawan Kowmintang. Artinya elit penguasa menyebut massa yang bergerak dengan berbagai kerusuhan merupakan tindakan komunis, paling tidak menggunakan cara-cara komunis di Cina. Sikap Media Indonesia, dalam editorialnya secara implisit bahwa dalam fenomena kerusuhan yang terjadi terdapat konflik baik antar elit dan massa maupun antar elit. “Peristiwa Situbondo dan ricuhnya Tasikmalaya baru-baru ini seperti mengisyaratkan kekukuhan persatuan dan

kesatuan bangsa mulai termakan arus erosi. Erosi moral yang membuat pembatas antara kawan dan lawan.” (Editorial Media Indonesia, 28-12-1996).

“Persatuan dan kesatuan bangsa” menjadi ungkapan primadona dalam situasi negara yang dilanda kerusuhan massa. Ungkapan itu menjadi obyek akibat kerusuhan sosial. Media Indonesia tampak mengingatkan adanya bahaya terhadap keutuhan bangsa dan negara. Media menunjukkan bahaya ini dengan merujuk pada peristiwa dan pengalaman negara lain sebagai suatu contoh, yaitu Uni Sovyet. “Erosi yang menyebabkan Uni Soviet menjadi tercerai berai dan belasan negara lainnya yang saling bercuriga” (Editorial Media Indonesia, 28-12-1996).

Pertarungan imaji konflik antara elit dengan massa, untuk menempatkan pada kognisi pembaca mana yang lebih memiliki legitimasi, elit penguasa atau massa. Ketiga media telah mengakumulasi imaji yang melegitimasi elit penguasa dan mendelegitimasi massa. Ungkapan yang mendelegitimasi massa dengan pernyataan elit penguasa bahwa kerusuhan menciptakan ketidakstabilan, kekacauan dan penonjolan akibat kerusuhan pada masyarakat kecil yang akhirnya untuk menjatuhkan penguasa, merupakan tindakan makar dan pemberontakan, ingin mengganti Pancasila, pelaku kerusuhan adalah garong, residivis. Sedang yang memberikan legitimasi pada massa, bahwa kerusuhan sosial merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang menciptakan ketidakadilan atau melakukan kekerasan secara struktural dan simbolik. Selain itu tindakan-tindakan aparat selama ini atau dalam kasus pemukulan guru dan kiyai pesantren oleh aparat kepolisian merupakan

tindakan yang menunjukkan kesombongan elit penguasa. Ketiga media telah menjadi arena kaum elit penguasa yang lebih banyak memberikan legitimasi kepada pemerintah dengan mendelegitimasi kekuatan massa. Ungkapan elit yang menyatakan bahwa massa digerakan provokator, merupakan ungkapan adanya ancaman dari kelompok lain, atau elit lain yang merancang upaya makar dan hendak mengganti ideology negara Pancasila. Media Indonesia tampak lebih banyak mengartikulasikan keperkasaan massa untuk mengungkapkan adanya kekuatan massa yang tertindas dan Republika dan Kompas lebih banyak menunjukkan bahwa kekuatan massa adalah kekuatan lain yang memiliki kepentingan kriminal dan juga politik. Dalam artikulasi kepentingan politik ini maka terjadi pula pertarungan antar elit pemerintah dengan elit dari massa yang melakukan kerusuhan. Elit penguasa yaitu pimpinan pemerintahan nasional dan lokal melawan elit dari massa demonstran yang tidak muncul kepermukaan, dan mereka diberi label sebagai provokator yang tidak menyukai penguasa bahkan yang akan melakukan kudeta, pemberontakan serta mengganti Pancasila. Hal ini dikaitkan dengan akan dilaksanakannya Pemilu tahun 1997, dimana pihak elit yang tidak sejalan dengan penguasa melakukan gerakan agar tercipta situasi tidak kondusif yang bisa menggagalkan pelaksanaan Pemilu pada tahun 1997.

3. Elit versus Elit

Kasus kerusuhan Tasikmalaya merupakan kasus konflik nyata antara kelompok dalam masyarakat dan karena masyarakat itu sendiri memiliki struktur

yang terdiri elit dengan massanya masing-masing, maka dalam diskursus kerusuhan Tasikmalaya juga terjadi pertarungan antar elit untuk berkompetisi memperoleh ruang kekuasaan. Media massa dalam hal ini memproduksi, reproduksi dan mengakumulasi imaji pertarungan antara elit tersebut sebagai komoditas media.

Media massa memproduksi dan mereproduksi pertarungan imaji antara elit Nahdlatul Ulama, yaitu Abdurrahman Wahid dengan elit politik lainnya. Pertarungan dimulai dengan mengungkapkan pernyataan Abdurrahman Wahid tentang pelaku dan penggerak kerusuhan. Bagi elit Nahdlatul Ulama, lokasi kerusuhan di Tasikmalaya dan di beberapa daerah sebelumnya seperti di Situbondo dan Pekalongan merupakan daerah basis kekuatan Nahdlatul Ulama. Keadaan ini dijadikan alasan rasional pimpinan NU untuk menilai bahwa kerusuhan tersebut dibuat untuk mendiskreditkan NU⁴⁰. Artinya Elit NU membingkai bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sengaja di buat oleh pihak lain untuk membuat imaji buruk bagi NU. Media kemudian mengakumulasi imaji tersebut dengan mengembangkan imaji perlawanan dari elit lainnya.

Media mereproduksi ungkapan Gus Dur yang membingkai tuduhan bahwa kerusuhan sengaja diciptakan untuk menunjukkan bahwa NU merupakan kelompok yang tidak bisa rukun dengan pihak lain. Apa yang dilakukan oleh mereka, ialah dengan menggunakan wilayah NU untuk hal-hal yang tidak baik sehingga NU tukang rusuh. (Kompas, 5 Januari 1997)

⁴⁰ Kompas, 5 Januari 1997.

Sumargono, salah satu elit politik lain mengemukakan pernyataan yang ditujukan kepada Abdurrahman Wahid dalam Republika sebagai berikut.

Menarik, tindakan Abdurrahman Wahid yang berusaha keras membersihkan nama NU. Gus Dur kemudian melakukan manuver, membidikan peluru-peluru ke segenap penjuru, bahkan kerusuhan (di Situbondo dan Tasikmalaya) adalah rekayasa pihak lain untuk mendiskreditkan NU, atau untuk menjatuhkan dia) yang berusaha keras membersihkan nama NU (Ahmad Sumargono, 11-2-1997).

Ungkapan Elit Sumargono, bahwa Gus Dur berusaha keras untuk membersihkan nama NU, mengandung makna secara implisit bahwa NU itu tidak bersih, artinya suatu kontra bingkai terhadap ungkapan Gus Dur, bahwa kerusuhan di Tasikmalaya diduga dilakukan oleh warga NU.

Di bagian lain dalam pernyataan sebelumnya, Gus Dur juga tidak menafikan bahwa ada warga NU yang terlibat dalam kerusuhan di Tasikmalaya, sebagaimana diungkapkan Media Indonesia edisi 4 Januari 1997.

-----Gus Dur mengakui ada warga NU yang ikut yang terlibat sebagai pelaku kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum di kota itu. " Bahkan sangat jelas" kata Gus Dur, " Saudara Mimi Herman dari PMII Garut saat peristiwa itu telah membacakan ultimatum kepada alat negara ketika berada di Mesjid." Saat kejadian itu di mesjid ada pembacaan ultimatum. Padahal Pemda dan ulama sudah sepakat untuk mengambil tindakan terhadap oknum aparat keamanan yang melakukan pemukulan, kok mereka malah mengambil langkah sendiri dan main hakim sendiri (Media Indonesia 4-1-1997)

Dalam konteks keterlibatan warga NU, Gus Dur melihatnya sebagai tanggungjawab perorangan, sebab pengurus NU tidak terlibat. Kompas mengungkapkan pernyataan Gus Dur dalam judul berita edisi 14 Januari 1997 hal 14.

GUS DUR: NU TAK TERLIBAT KERUSUHAN TASIKMALAYA

Jakarta, Kompas

Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid menyatakan, NU secara organisasi menyatakan, sama sekali tidak terlibat dalam kerusuhan Tasikmalaya, Jawa Barat. Jika ada individu warga NU yang terlibat, tindakan itu menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan (14-01-1997)

Sebagai bukti bahwa NU tidak terlibat, disampaikan melalui ungkapan, "pengurus PMII Tasikmalaya tidak terlibat sama sekali dalam kerusuhan tersebut, karena memang sebelumnya telah menyatakan ikrar lisan kepada para pengasuh pesantren untuk menghargai kesepakatan Pemda" (Kompas, 14-1 1997).

Lebih jauh lagi Gus Dur menilai bahwa yang tidak senang dengan NU, tersebut ialah LSM tertentu dimana mereka menyusun kekuatan untuk membentuk massa dalam upaya menjatuhkan pimpinan NU. Menurut Gus Dur bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Yayasan Humanika terlibat dalam kerusuhan di Tasikmalaya. Tuduhan itu disampaikan Gus Dur dalam acara Forum Diskusi tentang Bhineka Tunggal Ika di Jakarta 28 Januari lalu (Media Indonesia, 14-02-1997)

Dalam kaitan dengan tuduhan GusDur, Adi Sasono membantah ikut terlibat,

Sekretaris Umum ICMI Adi Sasono hari Rabu (29/1) di Jakarta membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam kerusuhan di Tasikmalaya. Ia juga menyatakan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan Humanika, forum diskusi yang disinyalir Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid sebagai pihak di belakang aksi itu.

"Saya tidak mendirikan Humanika, yang saya dirikan bersama para tokoh lain, termasuk ibunya Gus Dur, adalah Humaika. Saya salah satu pendiri dan ketuanya. Mungkin Gus Dur lupa membedakan Humaika dengan Humanika. Maklum beliau urusannya banyak sekali," kata Adi Sasono dalam jumpa pers di Gedung BPPT kemarin . (Kompas, 30 Januari 1997).

Masih dalam berita yang sama Kompas menghubungkan dengan pernyataan Gus Dur sebelumnya untuk mengingatkan konteks tanggapan pernyataan Adi Sasono, dalam berita tersebut Kompas mengungkapkan tanggapan Gus Dur, "Humanika terlibat dalam kerusuhan Tasikmalaya. Silahkan bawa saya ke pengadilan. Saya dapat membuktikan," Selain itu juga menyebut Elit lain, "Silakan bila Egi Sujana membantah,"⁴¹

Selain pernyataan bahwa Humanika terlibat juga Gus Dur menyebut elit politik lain, yaitu Egi Sujana sebagai elit yang berusaha untuk menjatuhkan pimpinan NU, namun Kompas sekaligus memuat keterangan bahwa Egi Sujana mengeluarkan bantahan terhadap pernyataan Gus Dur dalam berbagai media.

Gus Dur mengungkapkan bahwa ia telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan elit pada lapis pertama dan kedua. Artinya pernyataan ini mengungkapkan telah terjadi persaingan elit pada lapisan pertama dan kedua. Sedangkan pada lapis ketiga belum dilakukan perdamaian, artinya bahwa konflik elit ada pada lapis ketiga. Pada lapis ketiga inilah berusaha menyebarkan isu bahwa NU bertindak brutal.

Selama ini, kata Gus Dur, melalui kalangan LSM, pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan NU, menyebarkan isu bahwa sebenarnya warga NU itu brutal. " Bahwa saya itu menganjurkan perdamaian, menganjurkan toleransi dan saling pengertian, itu baru lapisan satu dan kedua, sedangkan lapisan tiga masih belum. Ini yang mereka mau buktikan dengan ngomporin (memanas-manasi-Red) orang." Ujar Gus Dur. (Kompas, 14-01-1997).

⁴¹ Kompas, 30 Januari 1997

Dalam perspektif pejabat keamanan, dalam kerusuhan sosial di Tasikmalaya, tidak terjadi konflik diantara elit, hal ini dapat dilihat dari pernyataan KASAD sebagai berikut.

M Hartono, ketika ditanya apakah kerusuhan demi kerusuhan merupakan usaha untuk menggoyang Abdurrahman Wahid dengan Nahdlatul Ulama-nya, KSAD merasa sama sekali tidak melihat indikasinya ke arah itu. "Gimana, ya? Mungkin beliau (Abdurrahman Wahid) mendapat masukan entah dari siapa, tetapi sepengetahuan saya tidak menunjukkan tanda-tanda ke sana (penggoyangan NU)," katanya (Kompas. 15 -01- 1997)

Dari kutipan tersebut, wartawan berusaha menunjukkan atau memberikan konfirmasi telah terjadinya konflik antara elit politik. Dimana kemungkinannya wartawan mencium ada konflik antar elit. Pejabat keamanan lainnya (Syarwan Hamid), mengungkapkan tentang aktor intelektual. Ia menyebutnya dalam bentuk pertanyaan, apakah kelompok Gus Dur atau kelompok lainnya, ABRI belum bisa disimpulkan.⁴²

Dalam kesempatan lain Gus Dur mengungkapkan bahwa, ada gerakan Naga Hijau, sebagai operasi yang berusaha menjatuhkan pimpinan NU melalui upaya mendiskreditkan NU dalam berbagai kerusuhan. Pengertian naga hijau itu sendiri merupakan ungkapan yang bisa ditafsirkan banyak makna. Bisa ditujukan kepada kelompok Islam yang lain bisa juga tentara, dimana warna hijau merupakan symbol yang melambangkan Islam dan juga militer. Oleh karena itu setelah pernyataan Gus Dur itu, timbul berbagai reaksi yang membantah tidak ada operasi naga hijau. Pihak

⁴² Kompas 7 Januari 1997

keamanan, misalnya sebagaimana diungkapkan oleh Sarwan Hamid bahwa tidak ada operasi naga hijau.

Gus Dur kepada majalah Forum edisi 10 Pebruaari 1997 menjelaskan sebagai berikut:

Yo pokoknya saya mendengar, "Operasi Naga Hijau" apakah operasi itu, pihak militer, ya belum tentu. ---- "Operasi naga hijau" yang saya dengar. Awalnya untuk mendiskreditkan PBNU yang sekarang. Nah itu yang saya dengar. Kemudian Kapolda Jabar, Nana Permana, dan Pangab Faisal Tanjung mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang mendalangi peristiwa Tasikmalaya. Nah saya ngomong kepada wartawan, lo, kalau ada pihak ketiga yang bermain, kalau begitu benar, dong, ada "operasi naga hijau"

Republika melalui kolom Resonansi. memberikan bingkai adanya konflik antara struktur dengan agen, dimana ada perlawanan terhadap aturan dan jaringan di dunia pesantren. Operasi naga hijau inilah merupakan pihak yang mungkin menghancurkan jaringan pesantren

Konon kerusuhan di Situbondo dan Tasikmalaya ada kaitannya. Konon ada maksud menghancurkan citra suatu golongan. Konon pula operasi penghancuran itu diberi nama sandi operasi Naga Hijau.

Didalam melawan Belanda, kita sehari hari tidak boleh memakai celana panjang. Kita cukup besarung."

"Apakah itu tanda perlawanan?" tanya seorang santri. Ya itu adalah perlawanan yang luar biasa ketika itu. Kami patuh semua. Semua pesantren dan masyarakat mendukung semangat tersebut"

"Apakah sejak dulu ada jaringan antar pesantren?"

"Ya sampai sekarang jaringan itu kan masih ada. Para kiyainya berhubungan.

"Ada pihak-pihak luar yang ingin mengancurkan ikatan tersebut, PakKiyai. Mereka memakai nama operasi Naga Hijau" (Republika, Resonansi S Sinansari Ecip, 21-1-1997)

Alasan mengapa mereka menggunakan isu agama dalam mewujudkan kepentingan politik mereka, karena "Sadar bahwa agama sangat ampuh memainkan

emosi dan sentimen subyektif, tidak jarang isu agama diperalat oleh orang-orang yang memiliki ambisi politik untuk kepentingan politiknya “ (Editorial, Media Indonesia, 27-12-1996). Kepentingan politik yang diperjuangkan oleh para elit politik berkaitan dengan akan diselenggarakannya Pemilu 1997, sebagaimana diungkapkan oleh Amin Rais sebagai Ketua Umum Muhamadiyah, usai dialog dengan pengurus Wilayah Muhamadiyah Jawa Timur di Surabaya,” Menjelang pemilu ditengarai kelompok tertentu semakin keras untuk menggoyang stabilitas dengan melemparkan isu soal umat beragama,”

Beberapa teks di atas mengangkat isu konflik antar elit politik menjelang Pemilu 1997, dan sikap Kompas dalam hal ini,

Kita tidak ingin ada luap-luapan emosi dalam hidup bersama sebagai bangsa. Kesenjangan kita atasi dengan pemerataan dan praktek ekonomi yang fair, adanya pluralitas, dan keanekaragaman kita jadikan sebagai pemer kaya dan pemerkuat kehidupan, perbedaan kita selesaikan dengan musyawarah, dan persaingan kita praktekan dengan ksatria. (Tajuk Rencana, Kompas, 28-12-1996)

Koheren dengan tajuk edisi di atas, pada edisi 6 Januari 1997 yang menurunkan Tajuk Rencana, dengan judul “Insiden-insiden ingatkan lingkungan elit, harus mewaspadaai persatuan”. Dalam tajuk ini Kompas secara tersirat mengungkapkan bahwa dalam beberapa kerusuhan yang terjadi termasuk di Tasikmalaya mengungkapkan adanya konflik antar elit. Judul Tajuk di atas merupakan himbauan agar para elit ingat akan semangat persatuan dan kesatuan.

Kejadian-kejadian itu memiliki latar belakang yang kompleks merupakan kombinasi dari kondisi sosial ekonomi, kesenjangan dan rasa keadilan, ramuan unsur

SARA serta eskalasi persaingan pada tingkat elit. Pada akhir Tajuk, mengungkapkan – peringatan dan seruan persatuan, justru juga harus kepada lingkungan pemerintahan dan elit sendiri.

Amin Rais, mengungkapkan para elit itu sebagai orang-orang yang piawai dan licik sebagai mana dalam ungkapan sebagai berikut:

“Di Situbondo itu ada perkelahian antar santri. Yang satu santri gendeng, yang lain santri bener. Tapi yang dibakar gereja. Apa urusannya? Di Tasikmalaya juga demikian. Itu perkelahian antara polisi gendeng dengan pesantren. Tapi kok yang dibakar toko Cina dan gereja. Apa urusannya? Karena itu, pasti ada orang-orang yang memang cukup piawai dan licik untuk mengendalikan ini,” katanya. (Kompas, 8 Januari 1997)

Pengungkapan pertarungan antar elit, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen PB NU), berkaitan dengan kasus politik. Pada Edisi 10 Januari 1997 Kompas mengungkapkan berita dengan judul berita “Rentetan Kerusuhan Berkait Permainan Elite Politik” Ungkapan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Bagdja yang mensinyalir bahwa

...rentetan kerusuhan massa belakangan ini sebagai bias permainan politik di tingkat elite. Meskipun jabat tangan Presiden Soeharto dengan Ketua Umum PB NU KHI Abdurrahman Wahid awal November 1996 lalu telah mengharmoniskan hubungan antara pemerintah dengan warga NU, namun itu bukan jaminan bahwa permainan elite politik tidak berlanjut hingga Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 (10 Januari 1997)

Di sini diungkapkan adanya konflik yang terjadi yaitu antara NU dengan Pemerintah. Walau pun Gus Dur dan Presiden Soeharto telah berjabat tangan yang secara simbolik telah menunjukkan perdamaian. Kompetisi kekuasaan tersebut akan tetap terjadi pada tingkat massa, sampai Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.

Kompas, Republika dan Media Indonesia telah menjadi ajang perebutan imaji para elit yang sedang berkompetisi memperoleh posisi dalam ruang politik. Gus Dur di satu pihak sebagai elit politik yang memiliki basis organisasi masyarakat tradisional (Nahdlatul Ulama) dengan elit politik lainnya, yaitu Sumargono, Egi Sujana yang memiliki basis organisasi masyarakat modern (Masyumi). Media telah membingkai pertarungan elit tersebut dengan menyajikan bingkai penyerangan berupa dugaan dan tuduhan bahkan tantangan dan perlawanan terhadap penyerangan tersebut. Bagi media konflik antar elit tersebut disamping mengembangkan imaji tentang kerusuhan juga menciptakan peningkatan nilai komoditas yang mampu mengakumulasi kapital material lebih berkembang.

Dalam konteks kerusuhan itu sendiri media memberikan bingkai bahwa kerusuhan sosial merupakan refleksi dari pertarungan antar elit. Bingkai Media tersebut disajikan dalam Tajuk Rencana sebagai cerminan sikap media dalam kaitan hubungan konflik antar elit tersebut. Media mengartikulasikannya baik dalam struktur topik makro maupun mikro melalui ungkapan-ungkapan deskriptif dan gambaran rasional tentang sebab dan akibat kerusuhan. Dengan demikian dalam diskursus kerusuhan sosial juga terdapat pertarungan kekuasaan simbolik untuk memperoleh atau memperebutkan kapital simbolik berupa legitimasi elit politik dalam memperoleh posisi pada pemilihan umum dalam waktu dekat.

4. Ekonomi Lemah Versus Ekonomi Kuat

Konflik lain yang diproduksi media dari kerusuhan Tasikmalaya ialah konflik antara mereka yang menikmati kekuasaan ekonomi dan memiliki berbagai sumberdaya ekonomi (*The have*) dengan kelas miskin yang memiliki segala keterbatasan sumberdaya (*The have not*). Terkait pada konflik antara kaum *The have* dan *The have not* dalam artikulasi media terdapat konflik antar lapangan usaha yang dikelola secara tradisional dengan lapangan usaha dengan tatanan modern.

Dalam berita pertama Media Indonesia dan Kompas sama-sama melaporkan kerusuhan sosial mengenai jalannya peristiwa kerusuhan, namun terdapat perbedaan bingkai sehingga memberikan makna simbolik yang berbeda. Sebagaimana digambarkan di muka bahwa Media Indonesia lebih banyak menjual kekuasaan massa kepada publik, sedangkan Kompas lebih banyak menggambarkan kondisi kota Tasikmalaya sebagai akibat tindakan massa dan dalam Kompas imaji perilaku massa tidak mendapat tempat utama. Kompas lebih menonjol melaporkan kerusuhan sosial dari perspektif konflik antara mereka yang memiliki banyak sumberdaya (*The Have*) dan keterbatasan sumberdaya (*The have not*).

Berita pertama Kompas mengembangkan imaji kepada pembaca bahwa telah terjadi peristiwa kerusuhan di Tasikmalaya yang meluas dan besar namun tidak lagi mengkhawatirkan. Akumulasi imaji skala kerusuhan tercermin dari penggunaan kata landa atau melanda Tasikmalaya, kata landa menunjukkan makna peristiwa itu terjadi dalam skala yang luas dan tingkat kerusakan yang cukup berat.

KERUSUHAN LANDA TASIKMALAYA

Situasi Kota Sudah Dapat Dikendalikan.

Situasi di kota administratif Tasikmalaya, Jabar, lumpuh, akibat perusakan dan pembakaran oleh massa terhadap puluhan bangunan yang terdiri dari kantor polisi, toko, gereja, bank dan pabrik, serta puluhan kendaraan mobil dan motor, yang terjadi sejak pukul 10.00 pagi. Kamis (16/12).

Ungkapan menyejukan yang memberikan harapan bahwa kerusuhan dapat dikendalikan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Akumulasi imaji yang menunjukkan betapa besarnya peristiwa kerusuhan tersebut tercermin juga dalam artikulasi yang menunjukkan akibat dari peristiwa tersebut dalam *head line* berita. Penggunaan kata lumpuh, merupakan metafora yang menunjukkan akibat kerusuhan yang hebat, sehingga seperti orang lumpuh, kota Tasikmalaya tidak berdaya apa-apa.

Dalam gambaran kronologi peristiwa yang dibuat pada tanggal 27 Desember itu juga, imaji yang menunjukkan terdapat sumberdaya material yang hilang akibat kerusuhan.

Pukul 13.00 pusat pertokoan terbesar di Tasikmalaya Matahari yang letaknya agak keluar kota habis terbakar. Sejumlah pegawai toko keluar berlarian sambil matanya sembab menahan tangis. Dalam waktu sekitar dua jam toko swalayan senilai lebih dari Rp.10 milyar dengan tenaga kerja sekitar 250 orang itu habis. (Kompas, 27 Desember 2000).

Modal dan tenaga kerja yang hilang serta duka nestapa mereka akibat kerusuhan mendapat bingkai dari Kompas. Itu semua merupakan eksekusi dari pertarungan untuk merebut kapital material antara kelas ekonomi bawah dan atas. Massa merepresentasikan perlawanan kekuatan kelas ekonomi bawah dan pusat

pertokoan Matahari merepresentasikan sistem perdagangan modern yang dimiliki oleh kelas ekonomi atas.

Sejalan dengan bingkai pada berita pertama yang mengungkap perlawanan dari kelas ekonomi lemah, pada Tajuk Rencana Kompas terdapat bingkai yang menggambarkan bukti rasional berupa sebab-sebab terjadinya tindakan emosional massa, seperti tanpa bersalah turun ke jalan dan melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap simbol-simbol ekonomi yang telah menindas mereka.

Jujur pada diri sendiri kita ingin bertanya, apa komentar kita mengenai warga yang tak ragu-ragu turun ke jalan, membakar dan merusak apa yang menurut mereka mewakili simbol-simbol yang selama ini membuat mereka harus menjalani hidup sulit karena ketidakadilan. (Tajuk Rencana, Kompas, 28-12-1996)

Menurut penglihatan Kompas peristiwa itu sendiri telah banyak dikaitkan dengan aspek politik dan agama namun Kompas melihat hal yang pokok ialah persoalan kehidupan dasar mereka yang selama ini menghimpitnya⁴³. Artinya Kompas melihat bahwa kemiskinanlah yang menyebabkan mereka seperti tanpa bersalah melakukan kerusuhan. Kompas dalam hal ini telah membingkai perjuangan kelas ekonomi lemah terhadap kelas ekonomi kuat, dengan menganggap wajar terjadinya kerusuhan sebagai perlawanan dari ketidak berdayaan kelas ekonomi lemah.

Bingkai Kompas tentang adanya pertarungan kelas ekonomi antara sektor ekonomi modern dan tradisional, kaya dan miskin terlihat dengan dimuatnya *feature* berita Dedy Muhtadi, pada edisi Kompas 28 Januari 1997.

⁴³ Tajuk Rencana Kompas, 28 Januari 1997

Masalahnya berubah ketika kepesatan perkembangan ekspansi pasar perusahaan-perusahaan besar, membuat lahan usaha mereka terguncang. Makin lama para penyalur hingga toko-toko yang dikuasai para pengusaha menengah ke atas yang sekaligus merupakan jaringan pengusaha pasar raksasa, juga melakukan penjualan barangnya secara kredit. Barang-barang toko mulai pesawat televisi hingga mebel dikreditkan sehingga lahan kredit para pengusaha "kredit tradisional" terhempas keluar perekonomian modern. (Dedy Muhtadi, Kompas, 28-1-1998).

Dari artikel ini diperlihatkan bahwa telah terjadi ekspansi besar-besaan dari perusahaan besar yang membuat lahan usaha di Tasikmalaya semakin sempit. Tasikmalaya yang dikenal dengan kota yang memiliki kegiatan perdagangan dengan sistem kredit tradisional, kemudian tergeser oleh usaha-usaha besar yang juga melakukan perdagangan dengan sistem kredit, sehingga sektor usaha ini menjadi bangkrut. Dibidang kerajinan, sebelumnya Tasikmalaya dikenal sebagai kota kerajinan, seperti tikar, payung dan bordir dengan intervensi pengusaha besar para pengusaha kerajinan tersebut berubah menjadi buruh. Gambaran itu seperti tampak dalam kutipan tulisan Dedy Muhtadi sebagai berikut.

Hingga tahun 1996 ini tradisi kerajinan tangan rakyat mampu menyerap tenaga kerja 114.117 orang. Namun karena intervensi pengusaha-pengusaha besar, mereka pun tergelincir jadi buruh. Di bidang bordir misalnya, hanya satu dua orang Tasikmalaya yang bertahan dan sebagian besar jadi buruh. (Dedy Muhtadi, Kompas, 28-1-1998).

Hal yang sama juga digambarkan dalam usaha lain seperti ternak unggas. Usaha ini pun ternyata telah dikuasai oleh jaringan bisnis pengusaha besar. Secara eksplisit, diungkapkan bisnis kapitalis telah menghancurkan usaha mereka.

--- jaringan sudah dikuasai pengusaha-pengusaha besar dari hulu hingga ke hilir. Misalnya usaha peternak ayam (unggas) yang sekarang bukan lagi sektor tradisional, tapi sudah jadi sektor modern. Sarana produksi

peternakan dihasilkan oleh industri besar dengan penghitungan ekonomi bisnis kapitalis. (Dedy Muhtadi, Kompas, 28-1-1998).

Ketiga *genre* diskursus yaitu berita, tajuk rencana dan feature berita, mengakumulasi imaji bahwa kerusuhan yang terjadi merupakan wujud perjuangan kelas ekonomi lemah untuk melawan ketidakadilan dan himpitan kehidupan yang disebabkan bisnis kapitalis. *Genre* berita memberikan satu latar peristiwa atau realitas penindasan dan realitas perlawanan, sedang Tajuk Rencana memberikan penilaian atau *judgment* dan alasan konseptual terjadinya kerusuhan sosial “ karena ketidakadilan”. Sedangkan *feature* berita memberikan bukti-bukti empiris yang menunjukkan alasan dan akibat-akibat terjadinya kerusuhan di Tasikmalaya.

Adanya konflik antar kekuasaan ekonomi modern dan tradisional dapat dirujuk juga kepada teks lain di Republika dan Media Indonesia. Pada edisi 27 Desember 1996, Media Indonesia melaporkan, “Aktivitas bisnis dan perkantoran selama sehari praktis lumpuh. Terutama yang berada di jalur sasaran pengunjung rasa terhenti” (Media Indonesia, 27-12-1996)

Republika juga menurunkan tulisan yang mengungkap permasalahan di kota Tasikmalaya yang disebutnya sebagai “bara dalam sekam”. Artinya ada sumber masalah yang laten sebagai penyebab timbulnya kerusuhan sosial, dan diantaranya diungkapkan adanya tekanan sektor modern terhadap sektor tradisional.

Selama tahun 1996 saja tanpa disadari banyak pihak ada tiga masalah sebagai bara dalam sekam bagi kota yang memiliki penganggur terdaftar di Depnaker sebanyak 7.479 orang itu. Tiga masalah itu menurut catatan Republika meliputi,

relokasi pasar baru, sengketa tanah dan bangunan Hotel Priangan antara pribumi dan non pribumi dan berlarut larutnya masalah pencemaran limbah pabrik sabun.

Dari ungkapan itu, terlihat relokasi pasar baru dan sengketa tanah bangunan hotel pada intinya dalam kerangka menempatkan posisi pengusaha besar di sektor perdagangan dan perhotelan dengan cara menggusur pedagang kecil dan ada pemilik tanah yang dikorbankan. Terkait pada isu tradisional dan modern, juga diungkapkan hubungan antara pribumi dan non pribumi, sebagai permasalahan konflik. Kaum pribumi dikategorikan sebagai kelas yang mewakili pengusaha tradisional sedangkan non pribumi sebagai kelas ekonomi modern.

Adanya kesenjangan antara kelas kaya dan miskin, sebagai sumber konflik dikemukakan oleh Republika berdasarkan rujukan pejabat keamanan, Pangdam III Siliwangi Tayo Tarmadi, sebagai berikut:

Munculnya ketimpangan sosial dan kebijakan publik yang menciptakan kelompok masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, menurut Tayo. "Dapat diibaratkan sebagai tunas dari berbagai kemungkinan timbulnya kerusuhan atau chaos. Apalagi jika Pemda tak melakukan pembenahan kebijakan" (Republika, 7-1-1997).

Gambaran akibat kerusuhan pada akhirnya menimbulkan korban juga pada kaum miskin, sebagaimana digambarkan oleh Kompas, dimana terjadi pengangguran yang digambarkan "ribuan".

Mekipun situasi kota membaik, namun persoalan yang dihadapi Tasiklamaya belum selesai. Ribuan buruh dipastikan menganggur atau kehilangan pekerjaan. Akibat kerusuhan yang berlangsung 26 Desember lalu, puluhan toko, pabrik, dealer dan bank tempat mereka bekerja rusak dan terbakar. (Kompas, 30-12-1996)

Abdurrahman Wahid, ketika menempatkan dirinya sebagai pakar ia menjelaskan secara sosiologis bahwa telah terjadi marginalisasi pengusaha tradisional, dengan sebutan saudagar santri. Akibat penghancuran mereka, maka terjadi protes dan menimbulkan berbagai kerusuhan.

Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid mengatakan, pihaknya belum melihat bukti-bukti yang menunjukkan aksi kerusuhan di Tasikmalaya karena adanya rekayasa kelompok tertentu. Secara sosiologis, kerusuhan itu antara lain bisa disebabkan karena adanya marginalisasi atau penghancuran dari keberadaan saudagar-saudagar santri di wilayah tersebut. " (Kompas, Minggu 29-1-1996)

Untuk memperkuat pernyataannya Gus Dur mengemukakan contoh sebagai bingkai dengan merujuk pada pengalaman sebelumnya di daerah-daerah lain seperti Kudus, Pekalongan dan Tulungagung serta Yogyakarta.

Menurut pengamatan Gus Dur, kondisi saudagar santri lokal di Tasikmalaya telah mengalami kehancuran total seperti juga terjadi di Kudus, Pekalongan, Tulungagung maupun Yogyakarta. Dulu kawasan tersebut merupakan pusat saudagar santri, " katanya. Hancurnya kekuatan niaga santri akibat marginalisasi tersebut menumbuhkan kegelisahan di antara mereka maupun keluarga. (Kompas, Minggu 29-1-1996)

Sosiolog FISIP UI Dr. Sarjono Jatiman menilai penyebab kerusuhan massa secara umum merupakan akumulasi ketegangan sosial dalam masyarakat serta munculnya ketegangan sosial baru. " Sumber-sumber tersebut seringkali tidak disadari sebagai pemicu gejolak sosial. Padahal jika sudah terakumulasi, masalah kecil pun akan memicu terjadinya kerusuhan" katanya di Jakarta, Jumat. (Republika, 18-12-1996).

Republika mengungkapkan keterkaitan antara faktor agama dengan faktor ekonomi yang menjadi imaji kerusuhan sosial dengan mengutip pernyataan pakar

Sosiolog Sarjono Jatiman⁴⁴. Menurut pendapatnya, pada dasarnya kerusuhan itu terkait pada masalah kesenjangan sosial artinya terjadinya konflik antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan sosial yang dominan sebagai kelas *the have* dengan yang didominasi sebagai kelas *the have not*. Namun karena kerusuhan tersebut terjadi di daerah yang mayoritas penduduknya Islam maka ada imaji bahwa kerusuhan digerakan oleh orang Islam. Hal yang sama jika kerusuhan terjadi di daerah mayoritas agama Kristen akan berkembang imaji kerusuhan digerakan oleh orang Kristen. Konflik antar kelas atas dan bawah dari aspek ekonomi juga dirujuk oleh pernyataan pakar lain Aryoso⁴⁵. Menurut pendapatnya, ketidakadilan terhadap kelas bawah, dimana kemiskinan berhimpitan dengan kesenjangan merupakan masalah yang mendasar. Selajutnya Media Indonesia melakukan tindak persuasif, bahwa untuk mengatasi kerusuhan sosial harus memprioritaskan masalah ketidakadilan.

Keterkaitan antar teks tentang pertarungan imaji antara mereka yang mempunya atau *the have* dengan mereka yang serba kekurangan (*the have not*) menunjukkan bahwa dalam liputan kerusuhan terdapat produksi dan akumulasi imaji yang dalam hal ini di bidang ekonomi, yaitu pertarungan ekonomi yaitu antara kekuatan ekonomi lemah dengan kuat. Artinya dalam diskursus kerusuhan Tasikmalaya di dalamnya tersembunyi pertarungan kekuasaan ekonomi atau untuk merebutkan kapital ekonomi. Imaji yang terbentuk ialah telah terjadi dominasi oleh mereka yang termasuk kelas atas dengan menggeser kelas bawah, kelompok masyarakat yang

⁴⁴ Republika, 18 Desember 1996

⁴⁵ Media Indonesia, 30 Desember 1996.

tidak berdaya. Kemudian mereka yang didominasi melakukan perlawanan dalam bentuk kekerasan. Imaji ini dibentuk oleh media, khususnya oleh Kompas sebagai komoditas dalam artikulasi metafora tentang kerugian-kerugian material dan pemilihan sumber-sumber otoritas “pakar” yang mempunyai perspektif sosiologis.

5. Kesimpulan

Dalam kerusuhan di Tasikmalaya, konflik nyata dalam masyarakat dikonstruksi menjadi produk-produk imaji pertarungan antara kekuasaan mayoritas dengan minoritas pemeluk agama, kekuasaan elit dengan kekuasaan massa, kekuasaan antar elit dan kekuasaan ekonomi kuat (*the have*) dengan kekuasaan ekonomi lemah (*the have not*).

Pertarungan antar elit penguasa dengan massa merupakan ajang memperebutkan legitimasi apakah tindakan massa dianggap wajar dalam kapasitasnya sebagai pihak yang lemah dan terdominasi atau elit penguasa yang berjuang mempertahankan kekuasaannya. Dalam diskursus ini imaji yang mendelegitimasi elit kekuasaan medominasi isi media.

Dalam pertarungan antar elit terjadi upaya para elit politik berkompetisi agar tetap eksis melalui pertarungan tentang siapa pihak yang terlibat dalam kerusuhan sosial. Pertarungan elit tersebut merupakan pertarungan elit yang memiliki ideologi massa tradisional dengan elit berbasis massa dengan ideology modern. Pertarungan antar kekuasaan ekonomi lemah dengan kuat dengan menunjukkan bahwa peristiwa kerusuhan telah menegaskan semakin penting dan dominannya kekuasaan ekonomi

kuat. Hal ini ditunjukkan dengan mengungkapkan akibat kerusuhan yang merugikan buruh karena kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu juga dikembangkan imaji bahwa telah terjadi kesalahan struktural dalam kebijakan dan praktek ekonomi yang menggusur usaha dan industri rakyat.

Produk tersebut mempunyai nilai tukar yang tinggi bagi khalayak, karena selain substansi permasalahannya sedang menjadi sorotan publik juga dalam konteks situasi dimana kekuatan hegemonik negara sangat kuat, menutup kemungkinan berkembangnya kekuatan lain. Konflik-konflik yang terjadi berupa perebutan kekuasaan dalam masyarakat merupakan artikulasi perjuangan melawan kekuatan hegemonik negara. Pada saat kekuasaan hegemonik menciptakan keseragaman dalam berbagai bidang kehidupan dalam format penguasa, maka setiap artikulasi yang menunjukkan perbedaan, pengecualian dan perlawanan terhadap dominasi akan menarik perhatian publik.

Akumulasi imaji pada produk-produk tersebut dilakukan dengan pemberian atau penampilan bingkai pada proses penandaan (*significations*) sehingga kerusuhan Tasikmalaya menjadi kasus multi dimensi dan berkembang dalam ruang dan waktu yang luas. Dramatisasi peristiwa kerusuhan dengan penggunaan bahasa yang menciptakan imaji skala kerusuhan yang mempunyai cakupan besar dan luas. Kota santri bagai kota mati. Kerusuhan melanda kota Tasikmalaya. Sementara itu ungkapkan isu yang mengaktualkan kembali isu yang sudah berlangsung lama seperti "Organisasi Tanpa Bentuk atau OTB" dan "Naga Hijau" menunjukkan adanya

jaringan imaji yang berakumulasi dari waktu ke waktu, sebagai bukti dominannya kekuasaan tanda (sign) dalam kehidupan kita.

Dalam pertarungan kekuasaan tersebut., media masih didominasi penguasa dengan mengakumulasi bingkai penguasa melalui penggunaan label yang diberikan kepada pihak yang melakukan kerusuhan sebagai residivis, rampok, garong, OTB, orang yang tidak bertanggungjawab, kelompok yang ingin melakukan kudeta dan makar, bagian dari strategi desa mengepung kota. Ungkapan-ungkapan tersebut mengalir dari penguasa sebagai bentuk kekerasan bahasa yang mengakumulasi imaji bahwa yang mendelegitimasi massa pelaku kerusuhan, dan bentuk perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan imaji mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan sebagai kapital politik.

B. KASUS : SEMANGGI II.

Demonstrasi sebagai sebuah gerakan dilakukan oleh massa yang terdiri dari banyak komponen. Kasus kerusuhan di sekitar kampus Atmajaya atau di sekitar simpang jembatan layang Semanggi pada bulan September 1999 berkaitan dengan peristiwa demonstrasi terhadap kebijakan publik yaitu disetujuinya Rencana Undang-Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU-PKB) untuk menjadi Undang-Undang. Kerusuhan tersebut dikenal dengan nama Tragedi Semanggi II sebagai “seri” kedua setelah tragedi pertama pada bulan Nopember tahun 1998. Imaji yang terbentuk dari sajian media massa ialah imaji pertarungan diantara posisi (1). Rezim pemerintah versus rakyat dan (2). Militer versus Sipil

1. Rezim Pemerintah versus Rakyat

Dua posisi kekuatan yang sedang bertarung dalam arena imaji kerusuhan sosial "Semanggi II", yaitu kekuasaan rezim pemerintah dan kekuasaan rakyat. Rakyat dibingkai sebagai pihak yang berusaha memperjuangkan aspirasinya sedangkan rezim yang berkuasa dikonstruksi sebagai pihak yang berusaha mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya dan melihat ada gerakan yang akan meruntuhkan rezim.

Berita utama Kompas pada hari pertama tentang kerusuhan Semanggi II mengkonstruksi imaji bahwa DPR diposisikan sebagai bagian dari rezim, tidak memiliki kepedulian pada rakyat, dan ketidakpedulian mereka menyebabkan jatuhnya korban. "DPR tak peduli, Korban Berjatuhan" (Kompas, 24 September 1999). Bingkai bahwa DPR merupakan bagian dari rezim yang berkuasa diungkapkan dalam *lead* berita Kompas bahwa DPR yang memutuskan untuk menyetujui RUU PKB adalah produk orde baru.

Ungkapan itu merupakan label⁴⁶ yang diartikulasikan Kompas dalam memposisikan lembaga legislatif ini sebagai bagian dari rezim Orde Baru.

Jakarta, Kompas

Hanya beberapa saat setelah DPR produk orde baru hari Kamis di Jakarta mengetukkan palu untuk menyetujui Rancangan Undang-undang Panangulangan Keadaan Bahaya (RUU-PKB) agar diundangkan, ribuan mahasiswa, buruh, aktivitas partai politik, lembaga non pemerintahan dan

⁴⁶ Konsep Pan dan Kosicki disebut *designator*, yaitu elemen-elemen leksikal – istilah, label, kategori – yang digunakan untuk meladasi suatu dalam struktur sintaksis atau struktur script suatu wacana media (1993: 62).

profesi serentak bergerak menuju Gedung MPR/DPR Senayan. (Kompas, 24 September 1999)

Jika DPR sebagai bagian dari rezim diberi label produk Orde Baru, sebaliknya kekuasaan rakyat dikonstruksi memiliki dukungan kuantitatif dan kualitatif. Dukungan kuantitatif tercermin dalam artikulasi jumlah demonstran yaitu “ribuan” dan dukungan kualitatif dengan mengartikulasikan komponen pendukungnya yaitu mahasiswa, buruh, aktivitas partai politik, lembaga non pemerintah dan lembaga profesi. Komponen pendukung itu merupakan representasi rakyat yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan rezim.

Sementara itu Media Indonesia hanya mengungkapkan narasi plot peristiwa yang terjadi. Dalam *Lead* berita diungkapkan komponen berita : apa, bagaimana dan kapan. Apa : RUU PKB. Bagaimana: disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU dan kapan : kemarin (23 September 1999).

Jakarta(Media). Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), kemarin, tepat pukul 11.40 WIB disetujui DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang. (Media Indonesia, 24 September 1999).

Mengenai gambaran situasi pada saat DPR mengambil keputusan persetujuan RUU PKB, Media Indonesia memberikan imaji suasana rapat yang tegang, dimana di luar sidang terdapat dua kelompok massa yang berhadapan yaitu massa demonstran dan aparat keamanan.

Rapat paripurna itu berlangsung tegang. Disetiap sudut halaman Gedung MPR/DPR tampak aparat bersenjata berjaga-jaga. Di luar halaman, ribuan orang yang menentang RUU itu melakukan aksi unjuk rasa. (DPR Setuju RUU PKB Disahkan (Media Indonesia, 24 September 1999).

Berbeda dengan Kompas dan Media Indonesia, Republika disamping menyajikan fakta peristiwanya juga memuat pernyataan bahwa ada kelompok masyarakat yang pro dan ada yang kontra dan diantara persaingan keduanya telah terjadi klimak, yaitu empat fraksi – artinya seluruh fraksi (Golkar, PDI, PPP, dan ABRI/TNI.). Hal ini menunjukkan konstruksi Republika yang membingkai imaji bahwa dalam pertarungan pro dan kontra RUU PKB telah dimenangkan oleh kelompok yang pro RUU PKB. Kemenangan itu ditunjukkan dengan penyebutan jumlah fraksi yaitu seluruh fraksi di DPR yang telah menyetujui diundangkannya RUU PKB. Hal ini memberi imaji bagi pembaca bahwa keputusan DPR itu memiliki legitimasi yang kuat.

Jakarta,- Pro-kontra soal RUU Penanggulangan Bahaya (PKB) mencapai klimaks. Empat Fraksi di DPR-RI sepakat menyetujui RUU PKB, yang selama ini ditentang berbagai kalangan, untuk disahkan menjadi UU, kemarin. (Republika, 24 September 1999)

Berbeda dengan Republika, Kompas mengkonstruksi imaji yang sebaliknya. DPR dikonstruksi melakukan pemaksaan dan mengabaikan tuntutan rakyat. sebagaimana tercermin dalam berita Kompas yang berjudul “Kendati didemo, DPR setuju RUU PKB”. Frase pertama dalam kalimat judul berita menunjukkan kondisi yang menentang terhadap ide dalam frase kedua sehingga makna yang terbentuk adalah adanya pemaksaan atau perlawanan DPR dalam memutuskan persetujuan RUU PKB. Selain itu dalam mengungkapkan persetujuan DPR terhadap RUU tersebut tidak berdasarkan fraksi tetapi dengan mengungkapkan jumlah anggota DPR yang hadir dari yang seharusnya.

Dihadiri 205 anggota DPR dari 500 anggota DPR- dan ditandai oleh unjuk rasa mahasiswa yang menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), rapat anggota DPR secara aklamasi menyetujui RUU PKB untuk disahkan menjadi UU. (Kompas, 24 September 1999).

Gambaran jumlah anggota yang mengikuti rapat tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian besar anggota DPR yang tidak hadir, walau pun menurut tata tertib mungkin sudah memenuhi korum berdasarkan kehadiran menurut daftar hadir, yaitu 205 dari 500 orang.

Sejalan dengan bingkai Kompas yang tidak melegitimasi keputusan DPR, ditemukan pernyataan-pernyataan yang melegitimasi kekuasaan demonstran. Perjuangan para demonstran, tampak diartikulasikan dalam suatu ungkapan yang memberikan makna retorika "Tekanan demonstran yang begitu tinggi dan sengit menolak RUU itu". Selanjutnya diungkapkan bahwa terjadi bentrokan berdarah dan bentrokan tersebut terjadi karena tekad mereka merangsek ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dihadang aparat. (Kompas, 24 September 1999). Artinya aparatlah yang menyebabkan bentrokan berdarah, yaitu dengan tindakan penghadangan terhadap tekad demonstran. Dalam bentrokan tersebut digambarkan "puluhan mahasiswa terluka akibat tembakan, injakkan, pukulan dan gas air mata". (Kompas, 24 September 1999).

Dalam pertarungan imaji antara kekuatan rezim pemerintah dengan rakyat Kompas mendudukan rezim pemerintah dalam posisi tidak memiliki legitimasi sedangkan para demonstran memiliki legitimasi. Imaji ini diproduksi oleh awak media di satu pihak karena *mainstream* pemberitaan waktu itu yang didominasi oleh

upaya membangun rezim baru dimana rezim yang sedang berkuasa dinilai masih berbau rezim lama. Kecenderungan media untuk mengikuti *mainstream* ini merupakan bagian dari upaya media mengakumulasi kapital mereka dan mempertahankan eksistensi mencari nilai tambah. Pembaca Kompas⁴⁷ yang orientasi ideologisnya heterogen, menyebabkan Kompas berupaya memelihara hubungan baik dengan pembacanya dengan mengkonstruksi isi media sesuai dengan *mainstream* publik saat itu. Dihak lain, ada kondisi yang menyebabkan Kompas menempatkan posisi demikian, yaitu masalah ketidaksamaan ideologis antara Kompas dengan lingkungan otoritas rezim. Sebaliknya kedekatan Republika secara ideologis dengan rezim mendorong produksi dan reproduksi imaji yang melegitimasi tindakan rezim, dan sekaligus membina pasar mereka yaitu pembaca yang secara ideologis memiliki kesamaan.⁴⁸

⁴⁷ Pembaca Kompas terdiri dari kalangan menengah ke atas, dengan orientasi ideologis yang tidak terbatas yang beragama Kristen tetapi juga yang beragama bukan Kristen.

⁴⁸ Republika memiliki kaitan dengan BJ Habibie dimana Republika didirikan oleh ICMi yang ketua umumnya BJ Habibie.

Gambaran bahwa mahasiswa demonstran dalam posisi yang lemah terlihat dari berita “ Sampai pukul 01.00 Jumat dini hari, mahasiswa masih mencoba bertahan di Kampus Atmajaya, sementara aparat keamanan dari luar kampus menembaki mereka dengan gas air mata. Mahasiswa membalas dengan batu” (Kompas, 24 September 1999). Dalam berita tersebut mahasiswa ada dalam posisi terdominasi dalam ungkapan “mahasiswa mencoba bertahan” dan “aparat menembaki mereka” lalu “mahasiswa membalas”

Gambaran konflik antara demonstran dengan aparat diungkapkan dengan melaporkan adanya korban selain dari mahasiswa juga dari pihak aparat keamanan. Namun masih dominan ungkapan yang menunjukkan bingkai bahwa aparat keamanan sebagai pihak yang melakukan represi.

Pukul 23. 30 sebagian mahasiswa keluar dan melemparkan bom molotov. Seorang anggota pasukan penindak rusuh massa (PPRM) terkena bom molotov dan terbakar pakaiannya di bagian punggung ---- Beberapa menit kemudian aparat menyerbu mahasiswa dengan rentetan tembakan dan pukulan. (Kompas, 24 September 1999)

Tindakan balasan dilakukan dengan ungkapan “aparat menyerbu” --- “ pasukan mencoba mencrobos pintu gerbang” ---- “pasukan tertahan lemparan batu” seperti dalam berita Kompas 24 September 1999.

Untuk memberikan gambaran tingkat keprihatinan yang mendalam Kompas merujuk contoh peristiwa serupa pada waktu yang lalu yaitu tragedi Semanggi I pada bulan Nopember 1998 “Situasi yang mengenaskan ini mengingatkan pada tragedi

Semanggi bulan Nopember 1998 yang terjadi di lokasi yang sama. (Kompas, 24 September 1999)

Imaji tekanan yang dilakukan oleh aparat terhadap para aktivis tampak dari penggunaan kata “dipaksa” dalam kalimat “Sejumlah aktivis yang berkumpul di Rumah Susun Penjompongan dihampiri ratusan anggota TNI dan dipaksa membubarkan diri” Label yang diberikan kelompok yang akan melakukan demonstran sebagai “gerakan moral” dan tetap berlangsung walupun ada paksaan untuk membubarkan diri. Hal ini menunjukkan adanya konstruksi imaji positif pada kegiatan demonstrasi terhadap gerakan represi aparat keamanan negara sebagaimana terungkap dalam laporan wartawan bahwa, “niat masyarakat untuk menggelar gerakan moral menentang RUU PKB tetap tak bisa dicegah”. (Kompas, 24 September 1999).

Kompas memberikan satu sikap bagaimana sebaiknya pemerintah berbuat, atau Kompas melakukan suatu tekanan apa yang dilakukan oleh rezim, sebagaimana diungkapkan dalam modalitas “seharusnya” dalam judul berita berikut: “Presiden Seharusnya Tangguhkan RUU PKB” (Kompas, 24 September 1999). Sebagai landasan mengapa harus menangguhkan RUU PKB, ialah kekuasaan rakyat. “reaksi keras masyarakat untuk menolak RUU PKB bisa dijadikan alasan” merupakan bingkai untuk menunjukkan kekuasaan rakyat, dalam ungkapan “Meskipun diragukan Habibie mau mengambil langkah itu, reaksi keras masyarakat yang menolak RUU PKB bisa dijadikan alasan oleh Habibie untuk tidak mengundang RUU PKB pada saat ini. (Kompas, 24 September 1999). Penggunaan reaksi keras masyarakat

menunjukkan artikulasi yang mengeneralisasi keseluruhan anggota masyarakat sebagai rakyat. Sebaliknya Republika menggunakan kata “berbagai kalangan” bukan masyarakat.

Koheren dengan ungkapan bahwa DPR merupakan bagian dari rezim ialah ungkapan adanya kontradiktif antara DPR dengan Rakyat, dalam kalimat bahwa ada diskoneksi antara anggota DPR dengan Rakyat. Padahal sesuai dengan fungsi lembaga ini DPR seharusnya merupakan lembaga yang merepresentasikan suara rakyat. Imaji itu dilegitimasi oleh para pakar dari berbagai Perguruan Tinggi dan LSM.

Sementara sikap ngotot DPR untuk mensahkan RUU mengindikasikan ada diskoneksi antara anggota DPR dengan masyarakat yang memilihnya. Demikian tanggapan yang diperoleh Kompas dari Sosiolog Kartorius Sinaga (Universitas Indonesia) ahli hukum Prof Dr. Soewoto Mulosoedarno (Unair, Surabaya), Prof Dr. Achmad Ali (Unhas Ujung Pandang), Dr. Moh Mahfud (Universitas Islam Indonesia), anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Albert Hasibuan secara terpisah, Kamis (23/9). (Kompas, 24 September 1999)

Komponen pakar yang ditampilkan secara geografis dari berbagai wilayah merupakan konstruksi imaji yang merepresentasikan kekuasaan rakyat, yaitu dari Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Jogjakarta. Sedangkan dari LSM, yaitu Komisi Hak Azasi Manusia yang secara simbolik memberikan dukungan bahwa upaya menolak RUU PKB bagian dari hak asasi manusia.

Ungkapan bernada ancaman diungkapkan melalui ucapan pakar, jika presiden Habibie tidak menolak RUU PKB, bahwa ia merupakan seorang otoriter. Hal ini diungkapkan dalam kalimat hipotetis, “Kalau Presiden Habibie tak mau dicap

otoriter, sebaiknya pemberlakuannya ditangguhkan,” kata Kastorius Sinaga. (Kompas, 24 September 1999).

Kompas juga mekonstruksi imaji adanya pemaksaan sekaligus kecurigaan terhadap DPR yang menyetujui RUU PKB, sebagaimana tercermin dalam pernyataan bahwa “DPR dalam memutuskan RUU PKB, dengan sikap mengotot”. Dengan penggunaan kosa kata mengotot artinya ada upaya memaksakan diri dengan kekuatan kekuasaannya (‘otot”). Imaji kecurigaan bahwa dalam pemutusan itu telah terjadi permainan, diungkapkan dengan melakukan memperbandingkan ketika DPR membahas RUU Minyak dan Gas Bumi, yang menunjukkan adanya perlawanan dari DPR untuk menolak RUU tersebut.

Sikap ngotot DPR untuk menggolkan RUU PKB memang cukup mengherankan. Masyarakat dan anggota DPR tingkat I jelas menyatakan menolak RUU PKB, namun DPR tetap mensahkannya. Sementara DPR justru bisa menolak pembahasan RUU Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang sama sekali tidak menimbulkan gejolak masyarakat. Hanya mungkin dalam pembahasan RUU Migas ada “perlawanan” kuat dari Pertamina. (Dari RUU KKN ke RUU PKB (Metamorfosa yang belum sempurna Kompas, 24 September 1999)

Akumulasi imaji kekuatan rakyat, juga ditunjukkan dengan mengkonstruksi representasi rakyat dengan melaporkan peristiwa demonstrasi penolakan RUU PKB di berbagai daerah dimana DPR dianggap tidak peduli terhadap suara rakyat. Dalam judul berita “Ribuan Mahasiswa Tolak RUU PKB. Juga DPRD dan Polresta DIY (Kompas, 24 September 1999), diungkapkan:

Ketidak pedulian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta tetap menyetujui Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU-PKB) untuk dijadikan undang-undang, Kamis (23/9) tidak membuat

gelombang penolakan dari puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat diberbagai daerah surut. (Kompas, 24 September 1999).

Selain memberikan label bahwa DPR merupakan elemen orde baru, dari aspek kemanusiaan DPR dikatakan tidak mempunyai hati nurani, rasa kemanusiaan, dan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia.⁴⁹ Imaji bahwa rakyatlah yang harus memiliki kekuasaan dominan dari pada negara, hal ini tercermin dari artikulasi Kompas dalam artikel dan tajuk tanggal 24 September 1999. UU PKB merupakan bentuk regulasi yang memberikan kekuasaan kepada Negara khususnya aparat keamanan. Kekuasaan itu "amat besar"

Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) masih dalam perdebatan dan tetap mengundang banyak kecemasan dan pernyataan protes. Adanya Undang-undang tersebut diperkirakan memberi kekuasaan yang amat besar kepada negara dan khususnya kepada aparat keamanan. (Ignas Kleden, Kompas, 24 September 1999).

Imaji kekuasaan presiden BJ Habibie sama dengan pemerintahan orde baru, dicerminkan dalam ungkapan bahwa pemerintahan ala orde baru itu diwariskan kepada presiden BJ Habibie. Kekuasaan yang diwariskan itu merupakan kekuasaan serba berlebihan, sebaliknya kekuasaan rakyat serba kekurangan. Kekurangan kekuasaan itu karena akibat kekuasaan negara yang mempretelinya.

...negara ala Orde Baru yang diwariskan kepada pemerintahan Presiden Habibie, bukanlah negara yang kekurangan kekuasaan dan wewenang, tetapi negara dengan kekuasaan dan kewenangan yang berlebihan, yang sebagiannya diperoleh dari distorsi azas demokrasi. Sebaliknya masyarakat dan rakyat berada dalam kedudukan amat lemah, karena demikian banyak hak politiknya dipreteli. (Ignas Kleden, Kompas, 24 September 1999)

⁴⁹ Kompas, 24 September 1999

Bingkai yang diungkapkan melalui pakar berikut merupakan pembelaan terhadap tafsir bahwa rakyat berada pada pihak yang salah yang tidak memahami RUU PKB. Dalam bingkai ini diungkapkan bahwa menganggap rakyat tidak memahami RUU PKB merupakan kekeliruan dalam melihat realitas politik saat ini⁵⁰.

Sebaliknya pihak rezim sebagaimana diungkapkan oleh Menseneg/Menkeh Muladi memberikan imaji yang sebaliknya, yaitu bahwa RUU PKB lebih demokratis dibanding UU yang ada dan sebelumnya. Ia menilai RUU PKB lebih demokratis.

“Kalau ada penolakan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, soalnya mereka belum tahu isinya betul-betul. Kalau dia membandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1959, itu akan terasa nuansa yang lebih demokratis. Tahun 1959 itu tahun keras, peralihan dari zaman mulainya Dekrit Presiden dan menjelang perebutan Irian Barat, penuh subversi di Indonesia” kata Muladi. (Media Indonesia, 24 September 1999)

Media Indonesia juga mengungkapkan imaji yang bertolak belakang dengan rezim dengan menghubungkan RUU PKB dengan upaya reformasi yang sedang berlangsung. RUU PKB bertentangan dengan reformasi dan demokrasi dan merupakan bagian dari upaya mempertahankan *status quo*. Hal ini diungkapkan dengan mengutip nara sumber yang selama proses reformasi menjadi satu komponen gerakan, yaitu Barisan Nasional.

Penolakan terhadap RUU PKB masih terus berlangsung. Barisan Nasional minta agar UU PKB tidak diberlakukan sebelum SU MPR “Dengan diterimanya RUU PKB oleh DPR, Barisan Nasional mendesak pemerintah penerus status quo sekarang ini, untuk tidak memberlakukannya sebelum SU MPR. Bila ini dilakukan berarti mereka melakukan penghianatan terhadap perjuangan reformasi dan demokrasi yang menjadi tuntutan rakyat. (Media Indonesia, 24 September 1999)

⁵⁰ Kompas, 24 September 1999

Alasan penolakan adalah kecurigaan bahwa RUU PKB dibuat untuk mempertahankan *status quo*, dan kemudian persetujuan RUU PKB menjadi UU merupakan penghianatan.

Akumulasi imaji tidak legitimasinya DPR dalam membahas RUU PKB, dihubungkan dengan keberadaan fraksi yang membahas RUU tersebut. Karena status DPR yang tidak memiliki legitimasi sebagai kekuatan rakyat, maka RUU itu tidak sah. “ Secara politik, keberadaan fraksi-fraksi dan anggota DPR yang membahas RUU PKB sudah tidak *full legitimated* dan tidak lagi mencerminkan sebagai perwujudan polarisasi kekuatan politik rakyat,” demikian PB HMI. (Media Indonesia, 24 September 1999)

RUU PKB sebagai regulasi telah menjadi subyek yang memiliki banyak predikat yang terkait pada kekuasaan rezim yaitu tidak demokratis, status quo, penghianat. Berikut ini RUU PKB dikatakan sebagai bencana dan otoriter. Implikasi pengesahan RUU PKB menjadi UU merupakan “bencana”, sebagai metafora yang menunjukkan imaji kengerian akibat disahkannya RUU PKB. Selanjutnya akan mengembalikan pemerintahan yang otoriter. Bingkai ini diungkapkan oleh media dengan merujuk pendapat pakar, “Ketua PBHI Hendarli melihat pengesahan RUU-PKB menjadi undang-undang sebagai bencana nasional dan hanya mengembalikan otoritarianisme. (Media Indonesia, 24 September 1999).

Legitimasi DPR dalam membahas RUU PKB diungkapkan oleh pakar tatanegara bahwa sebenarnya DPR sudah demisioner dalam ungkapan, “Pakar

hukum tatanegara Prof. Dahlan Ranuwiharjo malah menilai keabsahan RUU itu kurang kuat, karena DPR secara hukum sudah demisioner." DPR sekarang tidak berwenang lagi membuat UU yang prinsipil. (Media Indonesia, 24 September 1999)

Sebaliknya pihak DPR memberikan imaji bahwa produknya yaitu RUU PKB merupakan produk yang baik dimana DPR yang akan datang belum tentu mampu membuatnya.

Kepada anggota DPR yang akan datang, sekiranya RUU PKB ini dinilai masih kurang baik, silahkan besok membahas dan merevisinya. Namun saya tidak yakin saudara-saudara dapat membuat yang lebih baik dari RUU ini," tegas Muslich juru bicara Fraksi Persatuan dan Pembangunan (FPP) saat memberikan pendapat akhir Fraksi. (Kompas, 24 September 1999)

Anggota DPR juga mendelegitimasi para mahasiswa dan demonstran yang menolak RUU PKB, mereka dinilai belum membaca RUU tersebut dan hanya merupakan para pengikut provokator.

Muslich mengingatkan mahasiswa dan demonstran yang menolak RUU PKB, supaya sebelum mengambil sikap tak setuju RUU PKB itu hendaknya membaca lebih dahulu naskah dengan fikiran yang jernih, rasional, dan obyektif. "jangan hanya ikut-ikutan atau percaya pada omongan dan berita provokatif, kata anggota FPP tersebut. (Kompas, 24 September 1999)

Pembelaan anggota DPR terhadap peran DPR tercermin dalam ungkapan anggota DPR di Media Indonesia, Juru bicara Fraksi PPP, sempat bercanda, "Memang para anggota Dewan budek semuanya hingga tidak mendengarkan aspirasi dari bawah" (Media Indonesia, 24 September 1999).

Republika lebih memilih pernyataan yang memiliki label negatif kepada pihak yang tidak menghendaki RUU PKB, yaitu sebagai orang yang berfikir sempit atau tidak berfikir panjang.

Orang yang berfikir sempit atau atau tidak berfikir panjang barangkali memilih tidak perlu ada UU tentang keadaan bahaya,” ujar Muslich dalam pendapat akhir FPP dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Hari Sabarno. (Republika, 24 September 1999)

Sementara itu bingkai yang menunjukkan sikap netral terhadap peran negara dan rakyat, tercermin dalam pernyataan bahwa adanya kecurigaan masyarakat terhadap RUU PKB sebagai bagian dari politik rezim disebabkan oleh masalah komunikasi.

Marzuki bisa memahami ada kecurigaan masyarakat luas, khususnya di kalangan mahasiswa terhadap RUU PKB. Sebab kata dia, pensterilan materi RUU PKB itu berjalan di dalam lembaga yang sering tidak mudah untuk dikomunikasikan. “ Mahasiswa masih menganggap RUU PKB itu sebagai bagian dari proses politik rezim,” katanya. (Media Indonesia, 24 September 1999)

Tuduhan sebagai pemerintah otoriter apabila menolak untuk menunda pensahan UU PKB, tampaknya diikuti oleh Rezim dimana Kompas mengungkapkan dalam *lead* berita sebagai berikut:

Jakarta, Kompas

Setelah didahului demonstrasi besar-besaran dan bentrokan berdarah antara aparat keamanan dengan mahasiswa dan warga masyarakat secara maraton dua hari, Kamis dan Jum'at (24/9), akhirnya pemerintah menunda pensahan Rancangan Undang-Undang Keadaan Bahaya (PKB). (Kompas, 25 September 1999)

Kompas memberikan bingkai bahwa penolakan pensahan RUU PKB oleh pemerintah didahului oleh demonstrasi besar-besaran dan bentrokan berdarah. Artinya peristiwa itu merupakan penyebab dan sekaligus memberikan imaji bahwa kekuasaan rakyat menekan rezim untuk mengambil keputusan menunda berlakunya UU PKB.

Berbeda dengan Kompas, Republika menyajikan keputusan penundaan UU PKB dari perspektif positif untuk Rezim sebagai berikut:

Jakarta - Setelah memicu kerusuhan yang menelan korban, pengesahan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), akhirnya ditunda " Ini menandakan pemerintah saat ini bersikap demokratis karena mendengar aspirasi rakyat," jelas Kapuspen Hankam – TNI Mayjen Sudrajat, Jum'at petang, di Jakarta.

Yang digambarkan bukan imaji tentang demonstran tetapi imaji tentang RUU itu sendiri, yang telah memicu kerusuhan dan korban, namun akhirnya disetujui pula untuk menunda pensahannya menjadi RUU, dan ini dilakukan pemerintah, karena pemerintah sekarang demokratis. Kalau Kompas tekanannya kepada penyebab bentrok mahasiswa dengan aparat, Republika artikulasinya menekankan pada gambaran pemerintah yang berkuasa sebagai pemerintah yang demokratis. " Sudrajat menyatakan, dengan ditundanya UU ini bukan berarti TNI mengalah tetapi justru mempromosikan nilai-nilai demokrasi dengan mendengar aspirasi masyarakat". (Kompas, 25 September 1999).

Media Indonesia tampaknya berusaha menunjukkan *lead* yang netral,⁵¹ dengan hanya menyajikan fakta peristiwa saja. "Jakarta (Media) Pemerintah melalui Mabes TNI mengumumkan penundaan pengesahan Undang-undang Penanggulangan

⁵¹ Dalam liputan kerusuhan sosial termasuk demonstrasi di dalamnya, perjuangan orang kecil diberikan tempat dalam berita Media Indonesia. Demonstrasi yang berulang-ulang tidak mendapat tempat, karena pasar bisa jenuh. Kasus-kasus dalam media paling lama bertahan dalam satu minggu setelah itu tidak lagi menarik. Jika substansi peristiwanya masih berlangsung, mencoba membagi secara proporsional antara kepentingan pasar dan kepentingan idealismenya (Laurens Tato, Hasil wawancara, 2000).

Keadaan Bahaya (UU PKB) sampai batas yang dianggap baik". (Media Indonesia, 24 September 1999).

Diungkapkan lebih lanjut, oleh Mayjen TNI Sudrajat bahwa penolakan tersebut akan menyebabkan bangsa menjadi terancam. Sebab RUU tersebut mengatur bagaimana jika kita menghadapi ancaman dari luar.

Penolakan terus-menerus dari masyarakat terhadap UU dari masyarakat, akan menyebabkan negara ini terancam bahaya. "Kita tidak mempunyai RUU yang mengatur jika ada serangan yang menimpa negeri ini. Karena itu kita mesti berfikir sehat untuk menyelamatkan negara ini. Kita mengharapkan para mahasiswa dan tokoh intelektual tolong baca RUU ini dan sosialisasikan ini untuk keselamatan bangsa" katanya. (Kompas, 25 September, hal 1)

Dari pernyataan tersebut, para mahasiswa dan tokoh intelektual dinilai belum membaca undang-undangnya⁵² seperti tampak dari ungkapan "tolong baca RUU dan sosialisasikan untuk keselamatan bangsa", maka memberi label bahwa gerakan itu tidak memiliki legitimasi.

Kompas memberi imaji pengaruh penundaan pengesahan RUU PKB, menyebabkan suasana pertikaian yang dilukiskan sebagai "medan perang" telah berhenti dan jalan Sudirman lebih lengang.

Usai Sudrajat memberikan pernyataan tentang penundaan pengesahan RUU PKB, situasi di Jalan Sudirman, khususnya di sekitar kampus Atmajaya yang selama dua hari menjadi "medan perang" antara aparat keamanan dengan mahasiswa, maupun dengan masyarakat, terasa lebih lengang. (Kompas, 25 September 1999)

⁵² Menurut Gitlin (1980:7) disebut *trivialization* sebagai salah satu instrumen bingkai yang yang memperlemah gerakan.

Terhadap gerakan demonstrasi tiga media memuat pernyataan panglima TNI Jenderal Wiranto⁵³, dengan menjelaskan bahwa yang demonstrasi tersebut bukan mahasiswa, tetapi preman dan demonstrasi digerakkan oleh kelompok tertentu.

Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto mengatakan aksi demonstrasi menentang UU PKB seperti di Jakarta, bukan lagi gerakan mahasiswa, melainkan aksi yang diciptakan kelompok tertentu menggunakan preman. --- Dengan kata lain, dibelakang aksi demonstrasi itu sekarang nyata-nyata bukan lagi menentang UU PKB, melainkan ingin membuat keadaan menjadi *chaos*. Aksi premanisme telah diciptakan kelompok-kelompok tertentu dan UU PKB hanya dijadikan alat untuk bergerak. (Media Indonesia, 25 September 1999)

Ungkapan tantangan dari pejabat keamanan oleh Media Indonesia dalam kalimat langsung menampakkan imaji personal berupa tantangan langsung terhadap para demonstran.

“Jangan sembunyi di balik gerakan itu. Secara elegan, ayo muncul, siapa, nggak setuju apa, dialogkan dengan pemerintah. Dialogkan dengan aparat keamanan,” tegas Wiranto. Wiranto kemudian menjelaskan, saat para demonstran ditangkap karena tidak memberitahu gerakan mereka, ternyata diantara mereka banyak preman. (Media Indonesia, 25 September 1999, hal 20)

Target yang ditanyakan kepada panglima TNI dijawab dalam bentuk pertanyaan, menyiratkan seharusnya wartawan pun sudah mengetahui. Sebutan pihak yang ada

⁵³ Pengutipan pernyataan Wiranto dan pejabat tertinggi di lingkungan militer dan pemerintahan merupakan sumber otoritas pejabat keamanan sebagai fakta resmi “*official fact*” di bidang keamanan. Dalam kasus lain, misalnya kekerasan di Aceh sumber-sumber militer merupakan sumber dominan. Menurut Eryanto (1999: 4) dalam liputan konflik di Aceh, Kompas tercatat memuat 60 dari 115 berita bersumber dari militer pusat dan daerah, Republika 44 dari 88 berita, dan Media Indonesia 83 dari 121 berita. Dominannya sumber militer dalam kasus Aceh karena absennya jurnalis di wilayah kekerasan di Aceh. Sementara itu dalam liputan Semanggi II, pengutipan pejabat keamanan sebagai tuntutan dalam perimbangan dalam menyajikan sumber berita. Walaupun hanya sebagai *official source*, bingkai yang dibentuk bisa berlainan.

dibalik demonstran sebagai pengecut menunjukkan ada konflik yang terpendam yang tidak bisa diungkapkan.

Targetnya apa Pak? tanya wartawan. Saya juga mau tanya sama kalian targetnya apa? Saya harap mereka tidak bersembunyi secara pengecut di balik aksi demonstrasi. Munculah dan mari berdialog untuk menyelesaikannya. (Media Indonesia, 25 September 1999).

Pada hari bersamaan pernyataan dugaan adanya kelompok yang terlibat, ditemukan juga pernyataan sumber kepolisian tentang dugaan keterlibatan tokoh pemerintahan pada era orde baru, yaitu prof Dr. Subroto dengan judul berita "Prof Subroto Dituding Dalangi Aksi" dengan *lead* singkat "Polisi menduga Subroto sebagai tokoh dibalik aksi demonstrasi yang berlangsung selama dua hari di Jakarta". (Media Indonesia, 25 September 1999).

Media Indonesia menggunakan kata "Prof Subroto dituding", dimana kata ini mempunyai makna sebagai pernyataan tuduhan yang tidak memiliki dasar. Dalam rangkaian berikut, mengemukakan bahwa pejabat tinggi itu akan mengklasifikasi dugaan keterlibatannya. "Dalam waktu dekat, mantan pejabat tinggi negara itu akan diklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam aksi unjuk rasa di sekitar DPR dan kawasan Semanggi itu di Markas Polda Metro Jaya. (Media Indonesia, 25 September 1999).

Jika benar Subroto yang disebut mantan Mentamben, maka tokoh itu saat ini sedang berada di Sidney Australia. "Pak Subroto saat ini berada di Sydney untuk kepentingan medical chek up", kata Sekretaris Subroto, Ny. Rosa di Bimasena, Jakarta kemarin siang menjawab pertanyaan Antara yang berupaya mewawancarai mantan Sekjen OPEC itu. (Media Indonesia, 25 September 1999)

Republika mengungkap pernyataan dari sumber berita yang sama dengan Media Indonesia selain mengungkap dugaan, juga mengutip pernyataan pejabat kepolisian, bahwa polisi punya bukti dan gerakan mereka menyebabkan demonstrasi sangat brutal.

Polda Metro Jaya menemukan bukti sejumlah tokoh diduga melakukan aksi menggerakkan demonstrasi di Jakarta sejak Kamis hingga kemaren. " Para tokoh itu menggerakkan massa hingga kegiatan demonstrasi berlangsung sangat brutal," kata Letkol Pol Drs. Zainuri Lubis di Jakarta kemarin. (Republika, 25 September 1999).

Judul yang digunakan Republika memiliki makna yang berbeda dengan Media Indonesia. Republika menggunakan kata "diduga" yang berkonotasi netral. Sedangkan Media Indonesia menggunakan kata dituding, yang memiliki makna bahwa Subroto pada pihak yang tidak memiliki kesalahan. Walau pun Republika tampak netral, dari kata keterangan obyek kalimat yaitu demo brutal sebagai memberikan bingkai yang mendelegitimasi demonstrasi dimana apa yang dilakukan demonstran sebagai tindakan tidak terkendali dan melakukan kekerasan.

Akumulasi imaji konflik yang terjadi diungkapkan Republika dengan melaporkan sinyaleman Otoritas Keamanan Ibu Kota, tentang massa yang melakukan kerusuhan dan arsiteknya.

Pangdam Jaya TNI Mayjen Djadja Suparman mencurigai adanya gelombang massa dari luar Jakarta yang turut memanaskan situasi Ibu Kota. Mereka inilah yang menjadi arsitek dalam bentrokan antar warga dan aparat keamanan. (Republika, 25 September 1999)

Subyek yang melakukan kerusuhan adalah "mereka yang berasal dari luar ibu kota" menunjukkan bahwa kondisi wilayah yang menjadi tanggungjawab kekuasaannya

sebenarnya ada dalam posisi pihak yang normal sebab yang melakukan kerusuhan bukan dari warga Jakarta.

Argumentasi yang diungkapkan ialah bahwa upaya melibatkan anggota masyarakat dalam peristiwa tersebut dilakukan dengan cara membayar, “Sekarang makin kelihatan melibatkan masyarakat tertentu yang artinya ada hubungan tertentu dan mungkin masyarakat telah dibayar,” Kata Djadja saat ditemui usai menghadiri Rapat Muspida DKI Jakarta kemarin”. (Republika, 25 September 1999). Dengan demikian ada kelompok yang secara ekonomi menggunakan demonstrasi sebagai komoditas material, namun siapa yang membayar tidak ada pemberitahuan. Transaksi antara aktor untuk kepentingan politik dengan warga masyarakat yang secara ekonomi memiliki kebutuhan dan permintaan material.

Karakteristik demonstran yang dibayar tersebut digambarkan ciri-cirinya gerakan dan fisiknya. “Dilapangan, hal itu tampak mereka bergantian datang dan itu bukan warga sekitar. Orangny kurus-kurus tetapi militan” (Republika, 25 September 1999). Ungkapan tersebut merupakan bingkai yang memarjinalkan gerakan mahasiswa dengan sehingga imaji yang terbentuk gerakan itu tidak mempunyai legitimasi, dan merupakan instrumen dalam memperoleh kekuasaan.

Mereka itu banyak premanya karena setelah dicek yang luka-luka di rumah sakit itu ternyata preman, bukan mahasiswa atau pelajar. Siapa yang ada dibelakangnya dan apa maunya ?” katanya. (Prof Soebroto dkk Diduga Gerakkan Demo Brutal Republika, 25 September 1999)

Ungkapan-ungkapan pejabat keamanan tampak memberikan imaji adanya subyek imajiner yang melakukan kerusuhan sebagai kekuasaan yang akan merebut rezim.

Pertanyaan “Siapa mereka” dan Apa maunya”. “Kami sudah tahu orangnya bahkan tempatnya” dengan tanpa menyebutkan orang dan tempat merupakan strategi pengembangan imaji kepada lawan politik dan pembaca. Kepada lawan politik diharapkan mempersempit gerakan dan bahkan mengurungkan gerakan berikutnya. Kepada pembaca dan khalayak umumnya mengembangkan imaji bahwa gerakan mahasiswa tidak murni dan merupakan “alat” dari satu gerakan kekuasaan yang tersembunyi.

Kami sudah tahu tempatnya dan orang-orangnya. Mereka merencanakan anarki kemudian kekacauan (chaos) di Jakarta agar mereka memiliki posisi tawar menawar” kata Yudhoyono dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik di Cilangkap, kemaren. (Republika, 25 September 1999)

Berbeda dengan Media Indonesia dan Republika yang memuat dugaan keterlibatan Prof Dr. Subroto di halaman pertama dan menjadi berita utama, Kompas menyajikannya menjadi bagian dari informasi lain dan ditempatkan di halaman dalam yaitu halaman 11 yang membingkai gerakan mahasiswa tidak didalangi oleh Soebroto dalam sub judul berita “bantahan bahwa demonstran mahasiswa didalangi”. Kompas menanyakan kepada mahasiswa tentang nama-nama tokoh yang disiarkan polisi sebagai pihak yang mendalangi gerakan mahasiswa.

“Saya baru mendengar nama-nama itu. Kalau Cahyono yang pelawak itu tahu. Itu pun tidak kenal,” ujar Ferry anggota Posko Logistik Mahasiswa Universitas Atmajaya. Perwakilan sejumlah gerakan mahasiswa di kampus itu pun dengan tegas menyatakan bahwa aksi mereka murni dilakukan mahasiswa. (Akhirnya, Pemerintah Tunda RUU PKB, Kompas. Hal 1-11).

Dalam setting ini Kompas melakukan *discentring* terhadap isu keterlibatan Subroto sebagai penggerak demonstrasi. Hal ini konsisten dengan bingkai Kompas yang melegitimasi gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral.⁵⁴ Diakhir berita itu Kompas menulis kesimpulan suara mahasiswa apa sebenarnya maksud aparat keamanan dengan menyiarkan tokoh-tokoh yang ada dibelakang gerakan mahasiswa “ Para mahasiswa menilai pernyataan polisi tersebut bertujuan mendiskreditkan dan mengecilkan arti perjuangan mahasiswa”.

Bingkai eksekusi demonstrasi diungkapkan oleh Republika dengan menunjukkan korban tewas dalam angka sebagaimana dalam judul "Dua Hari Demo 4 orang Tewas" Dalam *lead* berita diungkapkan bahwa demo berakhir rusuh kemudian menyebabkan empat orang tewas dalam puluhan terluka.

Aksi demo menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) di kawasan Semanggi (Jakarta) dan sekitarnya yang berakhir rusuh sejak kemarin malam, telah menelan korban tewas empat orang. Sedangkan puluhan lainnya luka berat dan ringan yang dirawat di rumah sakit. (Dua Hari Demo, 4 orang Tewas :Republika, 25 September 1999).

Republika kemudian mengangkat respon masyarakat terhadap demonstrasi yang bersumber dari "*man on the street*"

Aksi demonstrasi itu juga membuat masyarakat terganggu aktivitasnya. Rudi, seorang karyawan swasta, yang berniat menjemput istrinya dari tempat

⁵⁴ Menurut Wakil Pemimpin Redaksi Kompas, wartawan biasanya karena terlalu bersemangat dalam meliput sehingga netralitas terabaikan. Dalam melakukan liputan mungkin tidak berimbang atau ada pemihakan pada pihak-pihak tertentu. Dalam meliput peristiwa demonstrasi menentang rezim orde baru, misalnya si wartawan bersimpati pada gerakan mahasiswa. Pada saat peliputan kongres PDI di Medan, beritanya terbawa arus untuk memberikan pemihakan kepada Megawati, sebab Megawati dianggap orang yang mengalami banyak dipersulit oleh penguasa (ST Soelarto, hasil wawancara, 2000).

kerjanya di gedung Manggala Wanabakti yang berlokasi disamping gedung DPR harus rela mengurungkan niatnya. (Demo Rusuh Tolak RUU PKB: Republika, 24 September 1999)

Para karyawan terutama yang bertugas di sekitar Jl Gatot Subroto dan Jl Sudirman terpaksa berdiam diri di kantor masing-masing. Yudi, salah satu karyawan swasta di Jln Sudirman, misalnya terpaksa menunggu di kantor hingga malam hari menghindari massa yang menyemut di jalan. (Demo Rusuh Tolak RUU PKB: Republika, 24 September 1999)

Menanggapi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusakan tersebut, beberapa kelompok masyarakat kepada Republika mengimbau, agar mahasiswa lebih dewasa sehingga tak merugikan masyarakat. "Jika menyampaikan pendapat sebaiknya adu pikiran," imbau Idi, penjual di kawasan Benhil. (Republika, 26 September 1999).

Republika juga berusaha merujuk elit politik yang memberikan imaji negatif pada pelaksanaan demokrasi dan menyampaikan dugaan maksud unjuk rasa yang bagi elit bertujuan menggagalkan SU MPR.

Menyinggung demo mahasiswa yang menolak UU PKB, Gus Dur mengatakan unjuk rasa yang berbuntut jatuhnya korban jiwa tersebut dilakukan para preman yang membonceng mahasiswa. "Unjuk rasa kemarin itu bukan mahasiswa. Mahasiswa dipakai namanya. Mereka itu preman semua," kata Gus Dur sambil menambahkan bahwa aksi-aksi seperti itu muaranya adalah keinginan untuk menggagalkan SU MPR. (Republika, 27 September 1999)

Pernyataan politis bahwa ia sudah tahu yang berusaha menggagalkan SU MPR tetapi tidak diungkapkan siapa yang berusaha menggagalkan SU MPR tersebut. Bingkai yang diungkapkan oleh Sumber Berita tersebut dengan memberikan contoh pada peristiwa sebelumnya.

"Dulu sidang Istimewa juga ditolak, karena ujung SI adalah SU MPR. Mereka melakukan demosntrasi besar-besaran," tambah Gus Dur. Ia juga menyebutkan sudah tahu yang melakukan itu. (Republika, 27 September 1999)

“Kita sudah tahu siapa yang lakukan itu. Kita juga tidak setuju dengan pemberlakuan UU tersebut karena tidak tepat. Ada orang yang menyatakan setuju atau tidak setuju, UU PKB harus dilawan. Ini arahnya untuk menggagalkan SU MPR kata Gus Dur. (Republika, 27 September 1999).

Sikap Republika tercermin dalam tajuk dengan membuat bingkai bahwa demo mahasiswa tidak murni. “ Demo menjadi tak murni mahasiswa lagi sebab diboncengi khalayak yang tidak jelas identitasnya, yang berdatangan dari sekitar Bendungan Hilir, bahkan dikabarkan dari tempat lain, diangkut truk-truk. (Tindak Dalang Demonstrasi : Tajuk, Republika, 27 September 1999).

Selain membingkai bahwa demonstrasi diboncengi oleh pihak luar, pada Tajuk 28 September mengungkapkan bahwa demonstrasi merupakan upaya pemaksaan kehendak dengan cara-cara kekerasan.

Dapatkah kita pahami, jika pengunjuk rasa melemparkan bom molotov, merusak fasilitas umum, melemparkan kotoran manusia ke aparat, menabrakan kendaraan ke aparat keamanan hingga tewas adalah bagian dari upaya membangun demokrasi. (Tajuk Republika, 28 September 1999)

Kita khawatir unjuk rasa dengan memaksakan kehendak bahkan dengan melakukan kekerasan akan menjadi titik balik upaya bangsa ini membangun demokrasi yang sesungguhnya. (Tajuk Republika, 28 September 1999)

Untuk apa demonstrasi dilakukan, Republika mengungkapkan kekhawatiran bahwa demonstrasi tersebut tidak semata memperjuangkan demokrasi tetapi untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa.

Dan, tidak mengherankan jika ada pihak – setelah mencermati pola unjuk rasa itu – khawatir unjuk rasa tersebut tidak semata-mata untuk memperjuangkan demokrasi, melainkan ada agenda lain, diantaranya menjatuhkan pemerintah yang sah secara tidak konstitusional. (Tajuk Republika, 28 September 1999)

Berbeda dengan Republika, Kompas mengungkapkan bahwa yang memaksakan kehendak adalah DPR, yaitu memaksakan untuk mensahkan RUU PKB.

“Pemaksaan kehendak” untuk merampungkan dan mensahkan RUU PKB pada tanggal 23 September 1989 membawa resiko politik nasional amat berbahaya, mengingat perkembangan situasi politik menjelang SU MPR sekarang sangat potensial melahirkan konflik-konflik politik terbuka, membentuk situasi-situasi konfrontatif dan menghasilkan mundurnya transisi demokrasi. (Tajuk, Kompas, 24 September 1999).

Pemecahan yang ditawarkan oleh Kompas untuk mencegah terjadinya pemaksaan kehendak yang berujung pada konflik, ialah melalui dialog “ Kita berpendapat, juga sekarang ini, dialog agar diusahakan. Usaha dialog agar lebih berkeselamatan daripada membiarkan konflik, aksi kekerasan, bentrokan dan perlawanan. (Tajuk, Kompas, 24 September 1999)

Demikian juga Republika walau pun dalam perspektif yang berbeda menawarkan dialog sebagai wahana penyelesaian masalah.

Dalam kasus penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), misalnya kebenaran absolut seakan menjadi milik pengunjuk rasa dan pers. Pihak luar itu – pemerintah, militer, anggota legislatif dan partai politik – seakan ditempatkan pada posisi salah, meski boleh jadi, jika pengunjuk rasa bersedia berdialog dan membuka ruang pertukaran pendapat, justru kebenaran itu ada pada pemerintah, militer dan legislatif. (Tajuk, Republika, 28 September 1999).

Republika tampak membuat dikotomi dalam kasus penolakan RUU PKB, yaitu demonstran dan pers di satu pihak dengan pemerintah, militer, anggota legislatif dan partai politik di lain pihak. Dari dua posisi tersebut kebenaran absolut ada pada demonstran dan pers. Pihak lainnya ditempatkan dalam posisi salah. Dialog menurut

Republika boleh jadi akan menempatkan kebenaran pada posisi pemerintah, militer dan legislatif

Tentang terjadinya kekacauan dan korban, Kompas mengutip pernyataan Amin Rais sebagai tokoh politik, bahwa hal itu diciptakan oleh provokator untuk menggagalkan SU MPR. “Amin yakin, pelaku penembakan ialah provokator sejati untuk menciptakan kekacauan yang bertujuan menciptakan kekacauan yang bertujuan menggagalkan Sidang Umum MPR” (Kompas, 26 September 1999)

Sejalan dengan Amin Rais, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa bahwa peristiwa penembakan itu sengaja diciptakan untuk memancing mahasiswa dan masyarakat melakukan gerakan, sehingga diharapkan akan menggagalkan SU MPR. “Peristiwa penembakan itu lanjut Muhaimin, telah meningkatkan eskalasi ketidakstabilan, yaitu memancing agar mahasiswa dan masyarakat meningkatkan gerakannya. “Jika eskalasi ini terus meningkat, tujuan akhirnya agar SU MPR gagal dilaksanakan. (Kompas, 26 September 1999)

Sikap presiden sendiri sebagai pimpinan rezim yang berkuasa waktu itu, satu sisi membuat imaji bahwa ia tidak merasa perlu menyalahkan pihak yang mengembangkan konflik, tetapi disisi lain ia mengemukakan adanya kelompok penyusup ke kampus dalam menggerakkan mahasiswa.

Presiden Habibie mengatakan, dalam peristiwa beberapa hari terakhir ini, tidak ada satu pihak pun yang perlu disalahkan atau ditunjuk sebagai pemicunya. Karena itu, Presiden meminta warga kampus dan pengajar untuk bersikap waspada sehingga kampus tidak disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. (Kompas, 26 September 1999)

Ungkapan-ungkapan pejabat rezim yang berkuasa dan tokoh partai politik memberikan bingkai sasaran penyebab konflik ialah sasaran imajiner ialah provokator, penyusup. Ungkapan itu memberikan delegitimasi kepada gerakan dari demonstran sebagai obyek yang disusupi dan diprovokasi, sehingga gerakan itu menjadi tidak murni merupakan suatu perjuangan menentang rezim.

Kerusuhan Semanggi II, bagi media massa khususnya Kompas dan Republika merupakan arena pertarungan imaji untuk menunjukkan apakah rezim pemerintahan yang sedang berjalan memiliki legitimasi atau tidak. Kompas memproduksi imaji yang melegitimasi demonstrasi mahasiswa sebagai kekuatan rakyat, dan persetujuan terhadap RUU PKB merupakan pemaksaan kehendak rezim yang berkuasa. Ungkapan-ungkapan menentang rezim dalam media massa dilakukan secara simbolik dan non simbolik, dilakukan secara implisit dan eksplisit⁵⁵. Sebaliknya Republika mendelegitimasi demonstran sebagai “kendaraan” kekuasaan imajiner yang

⁵⁵ Hal ini dimungkinkan terjadi karena regulasi pers telah berubah. Dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan dalam tatanan dan praktek politik di Indonesia, pemerintahan yang cenderung otoriter berubah menjadi pemerintahan yang mengembangkan demokrasi dan berusaha menegakan supremasi hukum. Iklim ini telah melahirkan tatanan baru di bidang pers, antara lain dicabutnya Permenpen 01/tahun 1984 dan kemudian diganti dengan Permenpen No. 02/Per/Menpen/1998, dimana dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan ketentuan pembatalan SIUPP yang melanggar peraturan. Sementara dalam peraturan mengenai perolehan SIUPP prosesnya disederhanakan dari 16 persyaratan menjadi tiga persyaratan (SK Menpen N0.132/Kep/Menpen/1998).

Selain organisasi di bidang pers yang ada selama ini seperti PWI, SPS, SGP, wartawan dan insan pers lainnya bisa mendirikan organisasi lain. Rekomendasi pemerintah untuk pendirian organisasi tersebut tidak diperlukan lagi (Permenpen No. 02/Per/Menpen/1998. SK Menpen No 133/Menpen/1998). Pada tanggal 13 September 1999, DPR telah menyetujui UU tentang Pers dan Menjadi UU Tentang Pers No 40, tanggal 23 September 1999, yang meniadakan persyaratan perolehan izin usaha penerbitan pers dan mengganti istilah kebebasan pers dengan kemerdekaan pers.

memaksakan kehendak dengan landasan untuk meruntuhkan kekuasaan rezim. Akumulasi imaji dilakukan oleh kedua posisi melalui perluasan jaringan makna komponen pendukung dan penentang, pendominasi dan terdominasi, diabaikan dan ditonjolkan, menyerang dan bertahan. Pertarungan imaji tersebut merupakan upaya memperoleh posisi kekuasaan simbolik atau kapital simbolik. Dorongan pertarungan tersebut terkait pada kedekatan ideologis media dengan kecenderungan rezim yang berkuasa. Republika lebih dekat dengan rezim yang berkuasa yang dipimpin oleh Habibie yang ikut melahirkan Republika. Kompas berasal dari lingkungan Katolik yang berusaha merepresentasikan ideologi yang melandasi institusi dan agen yang menggerakkan Kompas. Media Indonesia tidak mempunyai kepentingan dalam pertarungan imaji ini, dan tidak tampak upaya membingkai pertarungan ini.

2. Militer versus Sipil

Posisi militer dalam ruang kekuasaan di Indonesia menjadi polemik tak berkesudahan. Hal ini terkait pada sejarah tercapainya kemerdekaan RI, dimana militer tumbuh dan berkembang dan bersama-sama rakyat ikut mendirikan Republik Indonesia. Pendulum peranan militer berpindah-pindah walau pun sebagian besar episod berada pada peran militer yang dominan. Dalam posisi itu maka berbagai upaya untuk menggeser pendulum itu ke arah peranan dominasi sipil selalu menjadi isu yang mendapat perhatian, dan menjadi diskursus politik yang menarik banyak pihak. Setiap peristiwa-peristiwa atau kasus konflik-konflik dalam masyarakat sering

berkembang menjadi lokus praktek diskursif mengenai peran militer. Termasuk dalam berbagai peristiwa kerusuhan sosial yang menjadi topik tulisan ini.

RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya dan kerusuhan akibat pembahasan RUU tersebut telah menjadi lokus praktek diskursif. Substansinya itu sendiri antara lain berkaitan dengan peranan militer yaitu pengaturan posisi dan kewenangan aparat keamanan (militer dan polisi) dalam situasi yang dianggap membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Media massa sebagai wahana diskursus mengalirkan berbagai diskursus. Pengalaman masa lalu mengenai praktek-praktek militer telah membentuk kognitif mengenai militer beraneka ragam. Selain itu juga terdapat bermacam kepentingan terhadap peran militer baik dari kalangan militer itu sendiri maupun di lingkungan non militer. Kedua masalah tersebut memberikan dorongan sehingga masalah RUU PKB menjadi pertarungan imaji antara dikotomi kekuasaan militer dan sipil.

Media massa telah menjadi arena pertarungan imaji kedua kekuasaan tersebut. Kompas mengungkapkan adanya aspirasi anti militerisme dengan melaporkan bahwa ada tema-tema poster yang dibawa para demonstran yang anti militerisme. "Berbagai poster anti militerisme, tidak sedikit diantaranya bernada caci maki, diarak massa". (Kompas, 24 September 1999). Akumulasi imaji terlihat dengan penggunaan kata negasi "tidak sedikit" yang membawa poster yang mencaci maki peranan militer dengan tanpa mengungkapkan ungkapan caci makinya.

Bingkai Kompas memberikan imaji bahwa RUU PKB merupakan upaya mempertahankan militerisme dilakukan dengan mengungkapkan rujukan para

demonstran atau nara sumber. " UU PKB jelas merupakan sebuah gejala untuk memberlakukan kembali pendekatan keamanan atau sekurang-kurangnya membuat terasa diperlukan". (Kompas, 24 September 1999).

Ungkapan ini mengembangkan imaji bahwa UU PKB sengaja dibuat sebagai instrumen dalam agar kehadiran militer tetap diperlukan. Bahkan berikut ini, diungkapkan bahwa RUU PKB diusulkan berdasarkan asumsi yang keliru.

UU PKB nampaknya berdiri diatas asumsi – dapat dibuktikan keliru dan mendekati salah kaprah.Yang seharusnya dipikirkan bukanlah Undang-undang keamanan dan penyelamatan negara atau yang semacamnya, tetapi undang-undang keamanan masyarakat dan keselamatan rakyat yang sedang ditimpa berbagai masalah mendesak yang harus ditanggulangi saat ini juga, kalau perdamaian masih dianggap sesuatu yang baik dan perlu. (Ignas Kleden, Artikel: Kompas, 24 September 1999).

Ungkapan Kompas melalui pakar dalam artikel tersebut, tampak membingkai bahwa masalahnya bukan keselamatan negara tetapi keselamatan rakyat. Imaji yang dikonstruksi dalam dikotomi kekuasaan negara dan rakyat, dan UU tersebut tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Argumentasi ini dipertegas dengan mengungkapkan urgensinya mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pengalaman traumatik pada era orde baru menjadi dasar dalam menilai RUU PKB yaitu sebagai wujud konsepsi Hankam lama, yang meletakkan militer pada posisi dominan dengan mengadakan persekutuan dengan komponen lainnya.

UU PKB dinilai sebagai pengejawantahan konsepsi "Hankam lama" yang mengedepankan supremasi otoritas militer. Konsepsi "Hankam lama" dan implementasinya sepanjang orde baru adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang ditandai oleh kuatnya dominasi militer dengan segenap kekuatan kooperatif, persekutuan dan dukungan sipil. (Mulyana W Kusumah, Artikel: Kompas, 24 September 1999)

Usaha-usaha menentang RUU PKB diungkapkan sebagai perlawanan, dan perlawanan ini tidak saja ditujukan kepada kelembagaan tetapi kepada dimensi ideologis yaitu militerisme.

Jadi perlawanan terhadap RUU PKB bukan sekedar ditujukan terhadap prosedur-prosedur kelembagaan penggunaan kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan atau penggunaan militer, akan tetapi lebih jauh terarah pada "dimensi ideologis" yang melatar belakangi spirit dan asumsi politik serta konstruksi hukum UU PKB. (Mulyana W Kusumah, Artikel : Kompas, 24 September 1999)

Kompas tampak sejalan dengan para penulis artikel yang melihatnya dari aspek militerisme, dan menolak kembalinya dominasi militer.

Kita berpendapat, keberatan terhadap RUU. Penanggulangan Keadaan Bahaya, tidak terbatas hanya terhadap materi dalam RUU tersebut. Keberatan itu tampaknya mencakup dimensi yang lebih jauh, yakni keberatan terhadap kembalinya kekuasaan dan peranan politik militer lewat RUU tersebut. (Tajuk Kompas, 24 September 1999)

Ungkapan tadi mengkonstruksi imaji bahwa RUU PKB sebagai wujud upaya menegakkan militerisme, Media Indonesia mengungkap pernyataan Komnas HAM yang memberikan imaji sebaliknya bahwa RUU PKB menutup peluang militer berkuasa melalui kudeta.

Komnas HAM sudah melakukan pengkajian terhadap materi RUU tersebut. Tidak ada lagi peluang jika TNI berniat merekayasa suatu pengambilan keputusan atau melakukan kudeta. (Penilaian Komnas HAM atas UU PKB. Tidak beri peluang TNI Kudeta Media Indonesia, 24 September 1999)

Sejalan dengan itu maka Menhankam Panglima TNI, mengungkapkan bahwa RUU PKB didasarkan pada pertimbangan menggantikan UU N0. 23/Prp/1959 yang lebih represif.

Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto menyatakan langkah DPR menyetujui RUU PKB dijadikan undang-undang, bukan sebuah keputusan nekat atau sewenang-wenang. "Tetapi suatu keputusan yang didasarkan atas kesadaran perlunya segera dibuat suatu undang-undang baru, terutama Undang-Undang PKB sebagai pengganti dari UU No, 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya yang sangat sarat dengan langkah-langkah represif, sarat tindakan yang tidak bernafaskan HAM," kata Wiranto. (Media Indonesia, 24 September 1999)

Dalam pandangan militer justru menunjukkan kondisi sebaiknya, dengan tanpa UU PKB akan terjadi militerisme.

"Jadi seandainya di Indonesia tidak ada UU tentang keadaan bahaya, maka kemungkinan besar yang dapat terjadi adalah timbulnya militerisme karena militer dengan segala macam senjatanya merupakan kelompok "orang kuat" dan jika tidak ada aturan atau rambu-rambu yang membatasinya maka justru dapat berbuat sewenang-wenang. (Media Indonesia, 24 September 1999)

Ungkapan-ungkapan Komnas HAM dan Pejabat Keamanan merupakan pernyataan resmi dan media memuatnya karena kompetensi yang merepresentasikan kekuatan militer. Namun bingkai berita berikutnya Media Indonesia membawa pada suatu imaji bahwa militer telah melakukan praktek-praktek merugikan rakyat dan belum berubah.

Semua pengalaman pahit di masa lalu mestinya harus menjadi peringatan bagi pimpinan TNI dan Polri sehingga rakyat akan tetap merasakan kehadiran sebagai pembela bangsa dan negara, bukan untuk memusuhi rakyat. (Media Indonesia, 25 September 1999)

Kenyataan adanya penolakan terhadap UU PKB, sebenarnya merupakan ungkapan bahwa masyarakat kurang percaya pada militer. Hal itu diungkapkan oleh Ketua FPP Zarkasih Nur saat dihubungi Media kemarin. Menurut Zarkasih, apabila masyarakat menolak UU PKB sebaiknya ditunda saja. "Sebetulnya intinya bukan substansi PKB,

melainkan masyarakat tidak percaya pada militer.” (Media Indonesia, 25 September 1999, hal 20).

Boleh jadi para demonstran itu hanya sedikit yang benar-benar tahu isi RUU PKB, tetapi kenapa pemerintah dan DPR amat bernafsu untuk mengegolkan produk itu yang sejak awal diprotes masyarakat ? Wakil rakyat dan pemerintah seperti sedang mengejar target. Wajar jika sebagian masyarakat curiga, bahwa ada ‘udang di balik batu’(Fokus Media Indonesia, 26 September 1999).

Walau pun Media Indonesia menduga para demonstran hanya sedikit mengetahui benar-benar isi RUU PKB, tetap memberikan bingkai bahwa pemerintah dan DPR memaksakan untuk menyetujui RUU PKB. Media menduga pemerintah dan DPR sedang mengejar suatu tujuan tertentu dan mencurigainya “ada udang di balik batu”,

Media Indonesia membingkai citra militer dalam mempertahankan kekuasaannya dan sejauhmana mereka memperhatikan suara rakyat. “Tragedi berdarah Karnis dan Jumat itu semakin mengukuhkan bahwa penguasa, khususnya militer, memang baru akan mendengar protes masyarakat kalau sudah ada nyawa melayang. (Fokus Media Indonesia, 26 September 1999).

Ungkapan Media Indonesia tersebut menunjukkan karakter militer yang tidak memiliki kepekaan pada suara rakyat serta karakter tindakannya yang cenderung menggunakan kekerasan. Dalam pertarungan imaji kekuasaan militer dan sipil, Media Indonesia mengungkapkan imaji kekerasan militer. Namun demonstran sebagai kekuatan sipil juga digambarkan melalui Media Indonesia melakukan kekerasan sebagai bingkai yang mendelegitimasi tindakan sipil dalam memperjuangkan kekuasaannya.

Dalam kasus kerusuhan sosial yang bermula dari demonstrasi, terdapat upaya menempatkan imaji tentang kelompok yang melakukan kekerasan. Media Indonesia menempatkan posisi pihak demonstran sebagai pihak yang mendapat tekanan dari aparat keamanan. Kampus Atmajaya sebagai basis demonstran mahasiswa sebagaimana dalam judul berita di halaman pertama. " Mahasiswa – Aparat Bentrok, Kampus Atma Jaya Dikepung". Penggunaan kata dikepung sebagai kalimat aktif menunjukkan mahasiswa ada dalam posisi musuh yang harus dilawan. Imaji peperangan terlihat dalam ungkapan *lead* berita " Mahasiswa yang berlindung di Kampus Atma Jaya sesekali melempari petugas dengan bom molotov. Aparat membalasnya dengan tembakan dan gas air mata ". (Media Indonesia, 24 September 1999)

Nara sumber relawan PMI dikutip oleh Media Indonesia menggambarkan apa yang terjadi dalam kepungan " Seorang relawan PMI memastikan banyak orang yang terluka didalam kampus Atmajaya tetapi tidak bisa dievakuasi karena aparat mengepung kawasan itu. (Mahasiswa – Aparat Bentrok, Kampus Atma Jaya Dikepung : Media Indonesia, 24 September 1999)

Mahasiswa digambarkan berusaha mencoba mengepung Gedung MPR/DPR. Artinya mahasiswa juga digambarkan sebagai pihak yang melakukan penyerangan terhadap anggota DPR/MPR sebagai musuhnya. Namun upaya itu dicegah oleh petugas keamanan. Dalam pertarungan imaji ini, digambarkan bahwa "dua demonstran terkapar dengan luka memar" Ungkapan ini memberikan imaji kekerasan

militer dengan bahasa perang, walaupun artikulasi menunjukkan imaji yang meragukan yang mungkin wartawan dalam menulis larut dalam suasana hiruk pikuk demonstrasi. Seorang terkapar setidanya menderita luka yang parah bahkan cenderung tewas, namun dilaporkan yang terkapar itu hanya memar. Jadi tampak media ingin menonjolkan kesan dramatis, sebagai sajian yang dipandang kepada pembaca akan lebih memberi kognitif kekerasan yang terjadi dalam kerusuhan.

Sejak pagi mahasiswa mencoba mengepung Gedung MPR/DPR dari segala penjuru. Menjelang pukul 15.00 WIB, petugas keamanan di Slipi-Palmerah, bergerak maju hingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan dua demonstran terkapar dengan luka memar dan delapan lainnya tertangkap. (Media Indonesia, 24 September 1999)

Gambaran korban yang terjadi pada peristiwa itu dilakukan dengan membandingkan dengan korban pada peristiwa sebelumnya yaitu tragedi Semanggi I. Kekerasan dilakukan terhadap mahasiswa dengan "digebuk, diinjak, dipukuli, ditembaki peluru dan gas air mata"

Inilah demonstrasi yang menelan korban mahasiswa terbanyak setelah Tragedi Trisakti dan Semanggi di tahun 1998. Kemarin, tragedi berdarah itu terulang kembali. Kegigihan ribuan mahasiswa untuk menolak pensahan RUU PKB, berakhir dengan kekerasan. Kembali para mahasiswa digebuk, diinjak, dipukuli, ditembaki peluru dan gas air mata. Sampai Kamis tengah malam, korban-korban masih berjatuhan. (Kompas, 24 September 1999)

Kutipan teks itu memberikan imaji dominasi dan kekejaman militer. Kekerasan yang dilakukan militer, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kompas memberikan bingkai dengan menggambarkan peristiwa awal ketika demonstrasi mahasiswa bergerak menuju DPR/MPR, tentang kematian hak asasi manusia. Artinya

pemerintahan yang ada sekarang sebagai pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia.

Massa Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) membuka barisan dari arah Semanggi dengan membawa keranda bertulisan "Turut Berduka Cita atas Matinya Hak Azasi Manusia" dua karangan bunga dan sebuah boneka dengan poster "Habibie-Wiranto Crimmes Against Humanity" (Kompas, 24 September 1999).

Apa yang dilakukan mahasiswa dalam menghadapi aparat keamanan dilukiskan sebagai upaya perlawanan yang berani." Perlawanan dari mahasiswa tidak kalah sengit. Mereka mendekati mobil penyemprot air kimia itu dengan bom molotov. (Kompas, 24 September 1999). Mahasiswa juga digambarkan mendapat dukungan dari masyarakat. Dan dalam peristiwa ini diungkapkan tidak legitimasinya aparat dimana masyarakat yang mononton bertepuk tangan manakala aparat terdesak. " Perlawanan terhadap aparat juga dilakukan mahasiswa yang didukung massa rakyat dari arah komplek TNI AL. Mereka terlibat perang batu dengan aparat. Sementara masyarakat penonton bertepuk tangan pada saat aparat terdesak " (Kompas, 24 September 1999).

Ungkapan sinisme masyarakat diperkuat oleh pernyataan warga masyarakat yang dikutip Kompas "Beraninya sama rakyat sendiri. Kalau emang berani, lawan tuh tentara Australia", teriak seorang warga. (Kompas, 24 September 1999). Untuk mengembangkan imaji kekerasan yang terjadi antara mahasiswa dengan anggota tentara dicontohkan peristiwa pada tahun sebelumnya, pada tragedi Semanggi I, pada tahun 1998, dengan ungkapan :

Kemarin sore sampai tadi malam, terjadi kembali perkelahian massa dengan anggota Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa berdarah di Semanggi tahun yang lalu praktis berulang, ketika mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk berkelahi dengan tentara. Terdengar ucapan: "sampai kapan tentara yang katanya berasal dari rakyat menghabiskan peluru dan tenaga untuk menghajar rakyat. (Editorial, Media Indonesia, 24 September 1999)

Ungkapan di atas merepresentasikan sikap Media Indonesia yang menentang kekerasan yang dilakukan tentara. Mahasiswa dan warga masyarakat digambarkan turun ke jalan untuk berkelahi dengan tentara. Label yang diberikan kepada tentara sebagai "lahir dari rakyat untuk menghajar rakyat", memberikan bingkai bahwa tentara mempunyai watak dan kebiasaan untuk merugikan rakyat dan telah mengingkari jati dirinya serta melupakan ibu kandungnya yaitu rakyat. Dalam konteks itu lah, RUU dalam bingkai Media Indonesia merupakan alat untuk melegitimasi kekerasan militer terhadap rakyat. "RUU yang semula bernama Keamanan dan Keselamatan Negara (KKN) itu sejak lama ditolak masyarakat karena dianggap akan menjadi alat legitimasi tentara untuk melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri". (Editorial, Media Indonesia, 24 September 1999)

Bukti yang ditunjukkan bahwa TNI sebagai pihak yang melakukan kekerasan dirujuk oleh peristiwa yang lalu yaitu Peristiwa Aceh dan Trisakti serta Semanggi 1998. Namun penyelesaian kasus-kasus itu menunjukkan ketidakpastian dan ketidakjelasan, sehingga Media Indonesia mengungkapkan pesimismenya "Tanya kepada rumput yang bergoyang"⁵⁶. Dan dari rangkaian peristiwa tersebut perangai TNI

⁵⁶ Rumput yang bergoyang, merupakan metafor yang diambil dari lagu Ebiat G Ade, yang mengisaratkan adanya keputusasaan. Rumput yang bergoyang merupakan biasanya karena

dilukiskan semakin defensif dan kalap. “Lihat apa yang terjadi di Aceh. Tengok bagaimana penyelesaian kasus penculikan aktivis. Tanya kepada rumput yang bergoyang apa yang sudah dilakukan terhadap kasus Trisakti dan Semanggi tempo hari. TNI semakin defensif dan kalap”. Editorial, Media Indonesia, 24 September 1999).

Media Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat perubahan makna simbolik dari atribut “bedil, pakaian loreng dan topi baja” sebagai simbol yang membanggakan dalam era perjuangan kemerdekaan menjadi simbol yang menakutkan karena menjadi instrumen kebengisan.

Denyut nadi rakyat dan degup jantung TNI semakin tidak harmonis saja. Kegagahan, ketulusan dan pujian terhadap tentara seperti tercetus dalam roman lagu Kopral Jono hampir tidak berbekas lagi. Bedil, pakaian loreng-loreng, topi baja yang dulu adalah kebanggaan rakyat terhadap tentaranya, kini berubah menjadi simbol-simbol yang menakutkan. (Editorial, Media Indonesia, 24 September 1999)

Apa yang diharapkan sebenarnya hubungan antara tentara dan rakyat sebagai ibu dan anak dan rakyat merupakan “ibu kandungnya” adalah terciptanya harmoni bukan anarki. “TNI, ibu kandungmu, rakyat sangat merindukan harmoni yang hilang itu. Sang anak kandung, TNI, rupanya terlena dengan paradigma, interes dan persepsi sendiri.” (Media Indonesia: Editorial, 24 September 1999)

Gambaran kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kerusuhan diungkapkan oleh Kompas. Penembakan oleh aparat keamanan kearah kampus dilakukan tanpa

angin, jadi bertanya pada rumput yang bergoyang sama dengan bertanya kepada angin, satu tindakan yang sia-sia.

henti dan mahasiswa dalam posisi bertahan di Kampus. Tembakan itu dibalas oleh mahasiswa.

Sebetulnya kekhawatiran bakal terjadinya kerusuhan sudah memenuhi pikiran dan benak warga sejak Kamis (23/9) malam ketika bom-bom dan pistol gas airmata nyaris tanpa henti ditembakkan aparat ke arah mahasiswa yang bertahan di dalam kampus Universitas Atmajaya. Sementara dari dalam kampus batu dan bom-bom molotov beterbangan ke arah aparat keamanan. (Kompas, 25 September 1999).

Kompas mengartikulasikan situasi dalam kerusuhan tersebut sebagai medan pertempuran. "Kawasan perkantoran sepanjang Jl Sudirman dari jembatan layang Semanggi sampai bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat sepanjang Jumat, berubah menjadi 'medan pertempuran' antara masyarakat dan aparat." (Kompas, 25 September 1999)

Sementara itu Media Indonesia menggambarkan peristiwa tersebut dengan penggunaan kata mencekam sebagaimana dalam judul " Semanggi Mencekam Sepanjang Hari" dan *lead* berita "Jakarta (Media): Suasana Ibu Kota, khususnya di Kampus Atmajaya dan Semanggi, sepanjang hari kemarin mencekam menyusul aksi unjuk rasa penolakan UU PKB yang mengakibatkan empat orang tewas". (Media Indonesia, 25 September 1999)

Selanjutnya Media Indonesia menunjukkan tindak represi aparat dengan mengungkapkan berbagai nara sumber dan sekaligus memberikan bingkai bahwa cara kerja aparat itu sebagaimana dilakukan pada orde baru. " Jakarta (Media): Berbagai kalangan menyesalkan tindakan aparat keamanan yang sangat represif

terhadap para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Jakarta Kamis dan Jum'at kemarin. (Media Indonesia, 25 September 1999).

Nara sumber yang diambil ialah Gus Dur sebagai pimpinan LSM dan pimpinan fraksi DPR. Gus Dur menyampaikan ungkapan peringatan " Bila hal itu berlangsung terus, saya memperkirakan dalam waktu dekat rakyat bisa marah dan mengambil alih pimpinan nasional," ujar KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), Ketua Umum PBNU, di Jakarta kemarin. (Media Indonesia, 25 September 1999). Sedangkan Zamharir, anggota F-KP DPR mengungkapkan menyatakan tindakan keras yang dilakukan TNI dan Polri terhadap mahasiswa sudah masuk dalam kategori pelanggaran hak azasi manusia. Demonstrasi mahasiswa seharusnya dihadapi dengan persuasif, tidak dengan tindakan menyakitkan, apalagi kalau mematikan, Ujar Zamharir. (Media Indonesia, 25 September 1999)

Tindakan yang dilakukan aparat lebih dengan represi yang menimbulkan korban dari pada persuasi. Kompas, secara dramatis menggambarkan bahwa mahasiswa kocar-kacir dikejar aparat. Bingkai emosional di gambarkan dengan apa yang terjadi kira-kira pada orang tua mereka "terdengar sayup-sayup jerit hati sejumlah orang tua yang menunggu ihwal anaknya di Kampus. "Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkanlah anak-anak kami..."

Wartawan menyebar dalam kelompok-kelompok kecil , berlari ke sana ke mari setiap kali mahasiswa kocar kacir dikejar aparat, terdengar sayup-sayup jerit hati sejumlah orang tua yang menunggu ihwal anaknya di Kampus. "Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkanlah anak-anak kami..." (Kompas, 25 September 1999)

Judul berita Kompas melukiskan apa yang dilakukan aparat ialah melakukan “tembakan brutal”. Imaji yang terbentuk aparat sudah tidak menggunakan pertimbangan – asal tembak- dan tindakan tersebut merusak perdamaian yang sudah tercipta – yaitu ditanggukannya UU PKB. Tembakan tersebut juga menyebabkan mahasiswa UI jadi korban.--- “ Tembakan brutal Rusak “ Perdamaian” Mahasiswa UI Jadi Korban. (Kompas, 25 September,hal 1)---Artikulasi Kompas “tembakan brutal” dipertegas dengan artikulasi “tembakan membabi buta” dalam *lead* berita.

Tembakan membabi buta aparat pada Jum’at (24/9) malam membuyarkan suasana yang sudah mulai mengarah ke suasana damai. Hanya beberapa saat setelah Kapuspen Hankam/TNI Mayjen TNI Sudrajat mengumumkan penundaan pensahan RUU PKB, sejumlah tentara melakukan tembakan membabi buta dari atas truk yang sedang melaju, ke arah warga dan mahasiswa yang sedang duduk di sekitar RS Jakarta dekat kampus Universitas Atmajaya, Jl, Jenderal Sudirman. (Kompas, 25 September 1999)

Dalam menggambarkan adanya korban, Kompas mengartikulasikan dengan tembakan brutal atau tembakan membabi buta. “ Akibat tembakan brutal dua orang tewas, belasan lainnya luka ----“ dan “ Tindakan membabi buta itu mengakibatkan dua orang tewas. Salah satu diantaranya Yunhap (semester 7 atau angkatan 1996 jurusan elektro, Fakultas Teknik UI). (Kompas, 25 September 1999)

Dalam memberi bukti adanya kekerasan pada peristiwa tersebut Kompas mengutip saksi mata yaitu Hermawan Sulistyo⁵⁷ yang melihat langsung kejadiannya “ Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba dari atas truk sejumlah pasukan melakukan

⁵⁷ Nama Hermawan Sulistyo adalah dikenal publik sebagai seorang pakar dan sering tampil di berbagai media untuk memberikan berbagai komentar baik di Surat kabar

tembakan membabi buta. Suasana menjadi chaos. Massa berlarian mencari perlindungan. Sejumlah orang tersungkur karena tembakan. (Kompas, 25 September 1999)

Imaji bahwa aparat melakukan tindakan represif seperti dalam artikulasi kutipan di bawah ini “aparat melakukan penyerangan” dan mahasiswa melakukan perlawanan “Serangan dari aparat mendapat perlawanan keras dari mahasiswa”

Pada jumat dini hari aparat melakukan penyerangan dengan tembakan peluru hampa, peluru karet, dan gas air mata ke arah mahasiswa, bahkan ke arah kampus. Serangan itu mendapat perlawanan keras dari mahasiswa menggunakan batu dan bom molotov. (Kompas, 25 September 1999)

Tindakan represif digambarkan oleh pengerahan pasukan dalam jumlah besar, sehingga kampus dikepung dan sebagian masuk kampus.

Ditengah perlawanan sengit itu, sekitar pukul 04.00 17 truk yang dipenuhi pasukan anti huru hara, polisi militer dan Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRH) berdatangan di Semanggi. Dalam waktu singkat pasukan mengepung kampus Universitas Atmajaya dan sebagian masuk ke kampus (Tembakan brutal Rusak “ Perdamaian” Mahasiswa UI Jadi Korban. Kompas, 25 September 1999)

Dukungan masyarakat atas posisi mahasiswa yang berada di dalam kampus yang dikepung aparat, dilakukan dengan melaporkan reaksi masyarakat.

Ihwal kampus terkepung dan ribuan mahasiswa didalamnya memang dengan cepat beredar ke seluruh pelosok ibu kota. Sebagian mendengarnya dari radio-radio swasta dan sebagian lagi dari cerita dari mulut ke mulut. Dan hasilnya adalah simpati yang langsung direalisasikan masyarakat --- Begitu bisa menemukan “pintu belakang” para penyumbang tampak tak ingin berlama-lama...(Kompas, 26 September 1999)

maupun Televisi. Pengutipan ini merupakan bentuk dukungan kredibilitas pada imaji yang dikonstruksi bahwa kekerasan itu memang terjadi.

Betapa ketatnya pengepungan digambarkan Kompas dengan melaporkan kesulitan dan kerugian yang dialami masyarakat dan simpati masyarakat kepada gerakan mahasiswa.

Gerbang utama Sudirman telah dijaga ketat aparat keamanan bersenjata lengkap. Para penyumbang terpaksa berputar putar selepas jalan Dr. Satrio lalu memasuki 'jalan-jalan' tikus barulah tiba di "pintu belakang". "Saya takut, tetapi saya harus membantu mahasiswa," ujar seorang ibu yang menolak disebutkan namanya. (Kompas, 26 September 1999)

Korban meninggal dalam peristiwa kerusuhan Semanggi II ada empat orang, namun yang mendapat perhatian besar dari media satu orang, yaitu Yun Hap mahasiswa Universitas Indonesia. Gambaran duka diungkapkan oleh media secara berhati-hati. Kompas misalnya, mengungkapkan siapa yang hadir dalam upacara berkabung. Ungkapan kehadiran dan kiriman karangan bunga mengungkapkan dukungan terhadap perjuangan, setidaknya siapa-siapa yang mendukung kegiatan tersebut. Selain itu juga diungkapkan ucapan simpati. Beberapa laporan menggambarkan kembali rekaman peristiwa . Ungkapan berikut ini menunjukkan tingkat kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, "Mereka tampak begitu ganas," tutur Alif Jayadi, mahasiswa Teknik Elektro UI yang selamat dari tindakan kasar aparat. (Kompas, 26 September 1999).

Media Indonesia menuliskan berita peristiwa kematian mahasiswa UI pada 26 September 1999 dengan judul " Duka Menyelimuti Semanggi" *Lead* berita merinci lagi peristiwa yang tercermin dalam judul berita :

Jakarta (Media): Jembatan Semanggi dan Kampus Atma Jaya yang selama dua hari sebelumnya menjadi tempat perlawanan dan kekerasan,

kemarin berubah menjadi tempat duka. Tabur bunga dan air mata mengiringi para korban yang tewas diterjang peluru aparat. (Media Indonesia, 26 September 1999).

Tempat perlawanan dan kekerasan berubah menjadi tempat duka setelah terjadi penembakan terhadap para demonstran termasuk mahasiswa. Dalam suasana tersebut terdengar kutukan terhadap perilaku aparat keamanan.

Tentang siapa yang melakukan penembakan terhadap Yun Hap masih diperdebatkan. Media Indonesia menunjukkan kontroversi pernyataan pejabat keamanan. Pernyataan Mayjen Jenderal Sudrajat mengenai permohonan maaf ditafsirkan sebagai mengakui bahwa penembakan tersebut dilakukan aparat. Namun di pihak lain ungkapan Mayjen Noegroho Djayoesman mengungkapkan yang melakukan penembakan adalah penembak gelap.

Jakarta (MEDIA): Kapolda Metro Jaya Mayjen Noegroho Djajoesman mengatakan peluru yang menewaskan mahasiswa UI Yan Yun Hap Jumat malam tidak berasal dari senjata aparat, tetapi penembak gelap. Hal ini dikatakan Kapolda dalam konferensi pers kemarin sore yang juga dihadiri Pangdam Jaya Djadja Suparman, Gubernur DKI Sutiyoso dan Jaksa Tinggi Lukman Bachmid serta Kadit Intel Kapolda Metro Jaya Kol Iman Haryatna. (Media Indonesia, 26 September 1999)

Sebaliknya Republika mengungkapkan secara langsung penembakan itu sebagai upaya mendiskreditkan TNI maupun Polri. “ Upaya mendiskreditkan TNI maupun Polri dengan cara menimbulkan kesan bahwa aparat yang menembak mati demonstran di Trisakti maupun Semanggi 1998, tampaknya diulangi lagi pada kejadian kemarin. (Republika, 26 September 1999)

Republika dalam editorial membingkai bahwa para demonstranlah yang melakukan kekerasan. "Kerusuhan cenderung brutal dengan bom-bom bakar (Molotov Cocktail) di lempar-lemparkan ke aparat dan pemerasan serta pembakaran mobil milik pribadi pun terjadi". (Republika, 27 September 1999).

Apa yang dilakukan demonstran, Republika membingkai bahwa tindakan demonstran bukan bagian dari upaya membangun demokrasi dalam ungkapan yang mengajak berfikir rasional, melalui kalimat pertanyaan "Dapatkah kita pahami, jika pengunjung rasa melemparkan bom molotov, merusak fasilitas umum, melemparkan kotoran manusia ke aparat, menabrakan kendaraan ke aparat keamanan hingga tewas adalah bagian dari upaya membangun demokrasi". (Republika, 28 September 1999)

Republika juga kemudian mengutip nara sumber yang memberi bingkai bahwa aparat keamanan dalam posisi defensif. "Kami akan terus di sini sampai mahasiswa itu berhenti melempari dan bikin keributan. Sampai sejauh ini tidak ada rencana untuk menyerbu ke kampus. Dan jumlah yang kami siapkan ini ada 3.000 orang," kata Zainuri. (Republika, 24 September 1999). Aparat ada dalam posisi sebagai obyek kekerasan yang juga dilakukan oleh masyarakat, "Di daerah Bendungan Hilir tadi malam sekelompok warga tak dikenal berlindung di sebelah gedung Daewoo. Mereka ikut melempar ke arah aparat. (Republika, 24 September 1999)

Republika juga memberi bingkai bahwa gerakan itu tidak legitimate dengan melaporkan spanduk yang dibawa demonstran dan komentar yang membawanya, dimana mereka tidak mengerti maksud tulisannya.

RUU PKB itu sendiri nyatanya tak sepenuhnya dimengerti oleh pengunjuk rasa. “Maaf Pak, yang penting kami harus menunjukkan tuntutan itu,” kata seorang pengunjuk rasa, ketika sekelompok aparat keamanan menanyakan maksud tulisan sebuah spanduk yang berbunyi ‘Bebaskan rakyat membawa senjata tajam dan senjata api’ (Republika, 24 September 1999).

Ketidak mengertian demonstran terhadap isi spanduk yang dibawanya merupakan bukti yang ditunjukkan Republika bahwa para demonstran tersebut menjadi alat kepentingan kelompok lain atau kepentingan elit. Apa yang dilakukan elit dalam memperlakukan demonstran digambarkan Republika sebagai melawan kodrat Allah kepada manusia. Seharusnya diperlakukan secara baik-baik, namun diperlakukannya sebagai alat permainan.

Manusia diciptakan Allah sebagai sebaik-baik penciptaan. Itu berarti nyawa mereka bukan alat permainan ‘elit’ dengan misalnya –sengaja- mencari martir untuk lebih ‘menggalakan’ perjuangan politik mereka dengan menempatkan pihak yang diserang sebagai *lame duck* (sasaran yang tak bisa berlutut lagi). (Tajuk, Republika, 27 September 1999).

Republika mengungkapkan himbauan moral, dimana tindakan elit itu tidak patut dilakukan. “Tak patut manusia dijadikan bidak yang ‘hanya bisa maju dan tak boleh mundur’, kalau perlu dikorbankan, apalagi dengan imbalan yang sama sekali tak layak: Sekedar lembaran-lembaran uang. (Tajuk, Republika, 27 September 1999).

Sejalan dengan peringatan yang diungkapkan dalam tajuk Republika, Media Indonesia juga memberikan himbauan senada.

Kepada mahasiswa yang sudah teruji nyalinya menghadapi rezim di massa silam, jangan nodai moral force itu. Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan. Biasakanlah demonstrasi tanpa ada batu melayang, tanpa ada ayunan kayu. Tanpa ada kerusakan sarana umum. Berkatalah dengan bahasa

kaum terpelajar, jangan membalas dengan perilaku barbar. (Fokus Media Indonesia, 26 September 1999).

Namun disini gambaran demonstran tetap dari sisi positif, sebagai mana tercermin dari ungkapan “ Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan” Artinya yang melakukan kekerasan awal adalah pihak aparat keamanan. Selain itu juga memberikan posisi kepada mahasiswa sebagai pihak berpengalaman dalam menghadapi rezim di massa yang lalu dengan ungkapan “mahasiswa yang sudah teruji nyalinya menghadapi rezim di massa silam”

Ketiga media baik secara sadar maupun tidak telah menciptakan, mengakumulasi dan mendistribusikan imaji adanya pertarungan kekuasaan militer dan sipil. Kompas dan Media Indonesia⁵⁸ mengkonstruksi imaji bahwa RUU PKB merupakan instrumen dan wujud dari upaya militer mempertahankan dominasinya. Dipihak lain Republika tidak membingkai bahwa RUU sebagai upaya militer mengembangkan kekuasaan, tetapi membingkai bahwa demonstrasi mahasiswa tersebut digerakan oleh elit kekuasaan, dan mahasiswa melakukan tindakan anarki serta tindakan mereka merupakan alat dari suatu kepentingan elit politik. Akumulasi

⁵⁸ Secara sadar Kompas menampilkan suatu berita tidak sekedar menyampaikan peristiwa tetapi memberikan latar belakang dan aspek-aspek yang terkait untuk memberikan makna dan orientasi kepada pembaca, yaitu memberikan manfaat kepada pembaca sesuai dengan visi dan misi Kompas. (ST Soelarto, hasil wawancara, 2000). Dengan ungkapan ini, Kompas sengaja mengungkapkan permasalahan dan pandangan mengenai peranan militer. Media Indonesia (Laurens Tato, hasil wawancara, 2000) juga mempunyai posisioning dalam meliput peristiwa kerusuhan sosial termasuk demonstrasi di dalamnya yaitu menempatkan perjuangan orang kecil dalam melawan ketidakadilan dan dominasi. Artinya, dalam permasalahan militer sipil pun demikian Media memperjuangkan berakhirnya dominasi peranan militer dalam penyelenggaraan pemerintahan.

imaji pertarungan kekuasaan dilakukan dengan menyajikan tindakan militer yang bersifat represif, dan pernyataan dari para nara sumber yang memberikan analisis dan penilaiannya bahwa RUU PKB secara filosofis merupakan upaya yang mewujudkan militerisme. Akumulasi imaji perlawanan dilakukan sebaliknya dengan membingkai anarki yang dilakukan pihak demonstran, dengan pernyataan dari nara sumber pejabat keamanan dan anggota masyarakat yang dirugikan oleh aktifitas demonstrasi.

3. Kesimpulan

Pengungkapan peristiwa kasus Semanggi II sebagai peristiwa puncak dari gerakan menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) oleh media telah diproduksi menjadi imaji pertarungan antara kekuasaan rezim pemerintah dengan rakyat dan antara kekuasaan sipil dengan militer. Imaji pertarungan antar kekuasaan rezim dengan rakyat diungkapkan dalam pertarungan bingkai media yang melegitimasi rezim atau melegitimasi rakyat. Kompas dan Media Indonesia di satu pihak dan Republika di pihak lain, mengakumulasi imaji dengan membingkai media tentang demonstrasi mahasiswa dalam sikap yang berlawanan. Kompas dan Media Indonesia memproduksi imaji yang melegitimasi demonstrasi mahasiswa sebagai kekuatan rakyat, dan persetujuan terhadap RUU PKB merupakan pemaksaan kehendak rezim yang berkuasa. Sebaliknya Republika mendelegitimasi demonstran sebagai “kendaraan” kekuasaan imajiner yang memaksakan kehendak dengan landasan untuk meruntuhkan kekuasaan rezim.

Dalam pertarungan antar kekuasaan sipil dengan militer, Kompas dan Media Indonesia mengkonstruksi imaji bahwa RUU PKB merupakan instrumen dan wujud upaya militer mempertahankan dominasinya. Di pihak lain Republika tidak membingkai bahwa RUU sebagai upaya militer mengembangkan kekuasaan, tetapi membingkai bahwa demonstrasi mahasiswa tersebut digerakan oleh elit kekuasaan, dan mahasiswa melakukan tindakan anarki serta tindakan mereka merupakan alat dari suatu kepentingan elit politik.

Akumulasi imaji pertarungan kekuasaan dilakukan dengan menyajikan tindakan militer yang bersifat represif, dan pernyataan dari para nara sumber yang memberikan analisis dan penilaiannya bahwa RUU PKB secara filosofis merupakan upaya yang mewujudkan militerisme. Akumulasi imaji perlawanan dilakukan sebaliknya dengan membingkai anarki yang dilakukan pihak demonstran, dengan pernyataan dari nara sumber pejabat keamanan dan anggota masyarakat yang dirugikan oleh aktifitas demonstrasi. Akumulasi imaji tersebut dilakukan oleh kedua posisi melalui perluasan jaringan makna komponen pendukung dan penentang, pendorong dan terdorong, diabaikan dan ditonjolkan, menyerang dan bertahan.

Kedua pertarungan imaji tersebut merupakan upaya memperoleh posisi di dalam ruang kekuasaan politik sebagai kapital politik. Kedua imaji media yang berbeda merupakan konsekuensi hubungan ideologis media dengan struktur kasus tersebut. Republika lebih dekat dengan rezim yang berkuasa yang dipimpin oleh Habibie yang ikut melahirkan Republika. Kompas yang lahir dari lingkungan komunitas Katolik yang berusaha merepresentasikan ideologi yang melandasi

institusi dan agen yang menggerakkan Kompas. Media Indonesia tidak mempunyai kepentingan dalam imaji pertarungan kekuasaan rezim dengan massa, tetapi lebih banyak memberikan perhatian kepada pertarungan antar sipil dengan militer, karena Media Indonesia tidak mempunyai kedekatan ideologis dengan rezim yang berkuasa.

C. KASUS : KERUSUHAN “ KAWASAN CIBADAK MALL” DAN PLAZA GLODOK

Cibadak Mall dan Plaza Glodok merupakan sentra perekonomian di Bandung dan Jakarta. Disekitar area itu terjadi kerusuhan, yang satu terjadi antara penduduk dan pedagang kaki lima, dan lainnya antara pedagang kaki lima dengan aparat keamanan. Cibadak Mall (Cimol) dengan Plaza Glodok telah menjadi lokus praktek diskursif. Media massa memuat peristiwa baik secara sadar maupun tidak memproduksi, mengakumulasi dan mendistribusikan berbagai imaji kepada pembaca.

1. Cibadak Mall

Media Indonesia, Kompas dan Republika melaporkan peristiwa kerusuhan sosial di Bandung, 10 Oktober 1999. Kerusuhan berupa pengrusakan kios-kios atau tenda pedagang kaki lima yang berlokasi di sekitar Cibadak Mall, Bandung oleh warga masyarakat disekitar Mall tersebut. Imaji yang terbentuk dalam liputan media tentang kerusuhan tersebut ialah imaji konflik antara kekuatan kelas ekonomi lemah versus ekonomi kuat.

a. Ekonomi Lemah versus Ekonomi Kuat.

Peristiwa kerusuhan di sekitar Cibadak Mall yang dimuat dalam media mensiratkan imaji perlawanan masyarakat kelas ekonomi lemah yang direpresentasikan oleh warga masyarakat, para pedagang kaki lima dan tukang becak terhadap masyarakat kelas ekonomi kuat yang memiliki peluang ekonomi lebih besar dengan menyelenggarakan usaha-usaha pertokoan permanen. Konstruksi imaji ini tampak dari artikulasi peristiwa kerusuhan dalam judul berita di tiga media, yaitu Media Indonesia, Republika dan Kompas yang mengungkapkan siapa yang mengamuk dan sasaran amukan mereka. Media Indonesia mengungkapkan yang mengamuk itu warga Bandung, sedangkan Republika dan Kompas ialah massa. Sasaran mereka adalah pusat pembelanjaan yang dalam imaji pembaca adalah arena penjualan barang-barang. Republika juga mengungkapkan siapa subyek dan obyek kerusuhan. Subyek pelaku kerusuhan adalah massa sedangkan sasarannya ialah "Cibadak Mall" Kedua media itu merepresentasikan sasaran "amuk" adalah perbelanjaan dan kawasan Mall sebagai lokus diskursif ekonomi kuat.

Kedua subyek kalimat pada judul berita Media Indonesia dan Republika dan juga Kompas sama-sama merupakan bentuk nominalisasi dari pelaku orang banyak yang melakukan tindakan kerusuhan.

Media Indonesia :

Warga Bandung Mengamuk, perbelanjaan Hancur.

Republika:

Amuk Massa Porandakan Kawasan "Cibadak Mall".

Kompas :

Massa Mengamuk, Bandung Tercekam.

Judul berita Media Indonesia, mengungkapkan dua pernyataan yang mempunyai hubungan rujukan. kausal. Pernyataan pertama warga Bandung mengamuk dan pernyataan kedua, perbelanjaan hancur. Warga Bandung merupakan nominalisasi anggota masyarakat yang melakukan tindakan kerusuhan yang merupakan akumulasi imaji wilayah dan partisipan kerusuhan, yaitu warga Bandung yang mengandung makna penduduk seluruh wilayah Kotamadya Bandung. Artikulasi “kawasan Cibadak Mall”, mengandung makna bahwa yang menjadi sasaran amuk massa termasuk pusat pertokoan Cibadak Mall, padahal yang menjadi lokasi kerusuhan ialah lokasi pedagang kaki lima yang berada di sekitar Cibadak Mall. Dengan demikian Imaji yang dijadikan komoditas ialah sebuah perlawanan terhadap Mall yang merupakan simbol gaya hidup modern dimana didalamnya tersedia berbagai komoditas yang bisa memenuhi masyarakat. Bahkan tidak saja menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka tetapi juga menjadi tempat pertukaran nilai yang dimiliki mereka, dengan ukuran-ukuran kapital yang tidak terbatas material. Mereka merasa puas dan telah merasa melepaskan berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka dengan nilai-nilai yang melekat pada produk mode atau makanan atau hiburan yang menjadi ukuran-ukuran gaya hidup idaman masyarakat kelas tinggi. Oleh White dan Hellerick (WWW), Mall dilukiskan sebagai gereja konsumen dimana orang-orang pergi ke Mall sebagai tempat memperoleh kebahagiaan dan merealisasikan mimpi. Sementara itu pedagang

kaki lima, berasal dari lapisan masyarakat yang sebagian besar ada dalam ketidakberdayaan karena mereka miskin. Mereka biasanya dikategorikan sebagai pedagang informal, sebagai kelompok usaha dalam bingkai pemerintah kelompok usaha yang dibina agar mereka bisa berkembang. Namun mereka dalam praktek merupakan pedagang yang sering terusir sewaktu-waktu mereka bisa memperoleh perlakuan yang merugikan mereka.

Ungkapan Kompas menunjukkan yang bertindak sebagai obyek tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi suatu gambaran situasi akibat amuk massa tersebut yaitu “Bandung mencekam”. Judul berita Kompas⁵⁹ itu mengandung makna seluruh wilayah Bandung mencekam, sebagai pernyataan yang mengakumulasi imaji suasana yang mencekam sehingga lebih besar cakupannya menjadi seluruh wilayah Bandung. Padahal peristiwa tersebut hanya terjadi di sebagian kecil wilayah kota Bandung dan yang mencekam juga terbatas. Suasana mencekam juga digambarkan dengan melaporkan peristiwa mondar mandirnya pesawat helikopter yang mengawasi peristiwa kerusakan di kawasan Cibadak Mall tersebut, sebagai ungkapan yang menimbulkan “kecemasan, ketakutan, rasa khawatir”

Konflik yang muncul dipermukaan yaitu konflik horizontal antara komponen kelas ekonomi lemah, sebagai perjuangan agar bisa bertahan hidup. Warga

⁵⁹ Dalam pembuatan judul, posisi Kompas tidak akan membuat judul bombastis. Namun kami menjabari kalau kami tetap konvensional dan kolot akan ditinggalkan pembaca. Seni kami, bagaimana mempermainkan materi pandai-pandai membuat judul, agar tidak bombastis tetapi menarik. Tidak sekedar menyajikan informasi tetapi memberi makna atas berita sehingga orang bisa diajak melakukan refleksi (ST.Sularto, hasil wawancara, 2000).

masyarakat di sekitar pertokoan Cibadak Mall dan tukang becak yang dilaporkan melakukan pengrusakan terhadap lahan pedagang kaki lima, dimana semuanya, warga disekitar Mall, tukang becak dan pedagang kaki lima merupakan masyarakat ekonomi lemah.

Tukang becak merupakan representasi kelas masyarakat miskin yang berusaha eksis dan mendapat ruang usaha mereka. Masyarakat disekitar pertokoan berada pada lingkungan kurang layak sebagai area pemukiman. Tuntutan daerah pemukiman di perkotaan, disekitar perbelanjaan pada umumnya pada posisi marginal secara sosial ekonomi. Perlawanan mereka terhadap tekanan dan pertunjukan kemewahan terungkap dalam sasaran perlawanan terhadap para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima merupakan sasaran antara untuk mengungkapkan perasaan tertekan yang dialami mereka..

Secara keseluruhan dalam sajian media dikonstruksi imaji pertarungan antara ekonomi lemah dan kuat, untuk membebaskan dominasi kekuatan ekonomi kuat. Pedagang kaki lima dengan latar belakang lingkungannya di emper-emper pertokan dan Mall permanen ingin eksis dengan menunjukkan perilaku kuasa mereka yang dalam perspektif warga disekitar sebagai pedagang yang sombong, kasar dan tidak karuan. Mereka ingin menunjukkan posisi kelasnya, sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Aktualisasi mereka kemudian bertabrakan dengan lingkungan masyarakat di sekitar lingkungan mereka yang tidak terlibat dengan kegiatan bisnis mereka. Sebagai sebuah pemukiman di dalam kota – di sekitar pusat perbelanjaan yang memiliki permasalahan tersendiri, yaitu memiliki keterbatasan ekonomi.

Dalam konsep Bhaktin⁶⁰, konflik tersebut merupakan pertarungan antara kelompok kekuatan sentripetal dan sentrifugal. Kekuatan sentripetal merupakan kekuatan yang menghendaki adanya kesatuan, stabilitas dalam suasana harmonisasi. Kekuatan sentrifugal, merupakan kekuatan yang menghendaki berkembangnya keanekaragaman, dan dinamika masyarakat. Perbedaan orientasi kedua kelompok ini, yang berada dalam satu area yang menyebabkan terjadinya konflik nilai yang dimiliki mereka, sehingga masalah etika, kesopanan menjadi bungkus dari kekerasan yang mereka lampiaskan.

Kawasan pemukiman yang berada dalam lingkungan perkotaan, pusat perbelanjaan akan terseret menjadi arena yang bernuansa arena kompetisi, sehingga berusaha menyeret karakter komunitas yang menghendaki kehidupan yang harmonis dan rukun sudah terbangun lama di wilayah tersebut terganggu.

Kekhawatiran dan kecemasan diproduksi media merupakan ungkapan perlawanan terhadap sumber-sumber ekonomi para pemilik pertokoan besar. Kekerasan yang diungkap media seperti tampak dalam *lead* berita Republika yang menunjukkan adanya kecemasan antara lain menggunakan pernyataan, seperti dalam ungkapan : .. sekitar 300 jongko *hancur lebur*. Pemilihan kata hancur lebur

⁶⁰ Mc Quail, menjelaskan sentrifugal dan sentripetal dalam konteks hubungan media dengan masyarakat, apakah mengarah pada upaya mawadahi kekuatan yang mengembangkan keseragaman atau keanekaragaman. Dalam konteks ini konsep ini digunakan untuk menjelaskan fenomena adanya konflik antara kelompok masyarakat yang cenderung memiliki sifat harmonisasi dan statis dengan kelompok yang dinamis dan aneka ragam.

merupakan metafor yang menunjukkan kondisi kerusakan berat sehingga bentuk aslinya tidak terlihat lagi (lebur).

Ungkapan-ungkapan yang memiliki imaji memperbesar intensitas, partisipan dan wilayah peristiwa yang terjadi merupakan akumulasi imaji sebagai output produk kapitalisme industri imaji. Pemilihan kata, penggunaan metafor sebagai kekuatan simbolik, mengalir dengan sadar dan tanpa sadar dari wartawan dengan pertimbangan utama, bagaimana produknya bisa memiliki daya jual yang tinggi.

Imaji kecemasan dan kekhawatiran tersebut merupakan artikulasi akumulasi produksi perlawanan terhadap kekuasaan ekonomi kuat yang mendominasi lahan ekonomi lemah. Gambaran adanya ketakutan pada kelas ekonomi atas, dilaporkan media dalam artikulasi sebagai berikut :

“ Akibat kejadian itu, toko-toko dan pusat perbelanjaan di sekitar daerah itu tutup, dan walaupun ada yang buka hanya satu dua toko. Begitu pula pusat perbelanjaan di jalan Dalem kaum yang berada di dekat Cimol, tak berani buka --- Hal yang sama juga terjadi pada toko-toko di sepanjang jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Astana Anyar yang keduanya berdekatan dengan Cimol” (Media Indonesia, 10 Oktober 1999).

Pembaca surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika merupakan khalayak yang selektif jika dilihat dari kategori sosial ekonomi mereka yang tergolong pada kelompok menengah ke atas, termasuk para pedagang dan pengusaha kuat. Imaji yang terbentuk tentunya akan lebih terkait pada pembaca tersebut. Dalam kondisi terancam secara material melalui berita kerusuhan sosial maka ia akan memiliki tingkat ketidak pastian yang tinggi sehingga akan secara terus menerus mencari informasi dengan meningkatkan akses pada media. Artinya pula ketiga

media tersebut lebih secara sadar dan tidak sadar telah menjadikan kerusuhan sosial sebagai alat tukar (*currency*) untuk keuntungan material dengan berbasis pada ideologi media yang berorientasi pada pengembangan pasar (*market*).

Imaji yang diproduksi oleh ketiga media yaitu “kecemasan, ketakutan, rasa khawatir”, memiliki nilai tukar psikologis bagi konsumen yang secara geografis lebih dekat dengan wilayah kerusuhan. Baik secara sadar dan tidak sadar media menciptakan kebutuhan (*demand*) terhadap informasi bagi masyarakat yang dekat di wilayah kerusuhan. Lokasi peristiwa itu sendiri bagi pembaca di wilayah Bandung dan sekitarnya memiliki nilai daya tarik⁶¹, ditambah artikulasi yang memiliki kapital ekonomi, yaitu informasi yang memiliki nilai material yang diperjuangkan publik karena berkaitan dengan kelangsungan hidup dan mengancam sumberdaya material yang dimiliki. Mengapa media menyediakan informasi yang memiliki nilai kapital ekonomi dapat dilihat dari perspektif ketergantungan media-masyarakat dan khalayak dimana dalam situasi masyarakat yang sedang mengalami krisis berita tersebut akan meningkatkan rasa ketidak pastian, sehingga pasar (khalayak) akan berusaha memperbesar akses kepada media⁶².

⁶¹ Daya tarik orang untuk mengkonsumsi berita dilihat dari dua dimensi yaitu intelektual dan emosional, dan dari keduanya terdapat 10 nilai berita, yaitu: *timeliness, proximity, consequence, human interest, prominence, unusualness, conflict, visual quality, amusement, topicality* (Mc Nanus, 1994: 119-120). Nilai berita dalam konteks kasus ini ialah *proximity*, yaitu kedekatan peristiwa dengan pembacanya.

⁶² Dalam teori ketergantungan (De Fleur, Ball Rockeah, 1966) dijelaskan hubungan tripatriite antara masyarakat, media dan khalayak. Khalayak akan mengakses media jika teknologi media menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ketergantungan ini

Bagi pembaca yang jauh dari lokasi lebih besar memiliki nilai tukar sosial dan politik dari pada nilai tukar psikologis. Nilai tukar sosial, karena artikulasinya memiliki kapital sosial, yaitu menyebabkan hilangnya pengakuan dan hubungan sosial antar komponen masyarakat. Memiliki nilai tukar politik karena artikulasi kerusuhan sosial tersebut menumbuhkan imaji mendelegitimasi penguasa sebagai aparat yang bertanggungjawab terhadap masalah keamanan.

Dalam arena pertarungan imaji tersebut, Kompas berbeda dengan Republika dan Media Indonesia. Kedua media terakhir hanya menunjukkan kehancuran terbatas pada kios-kios pedagang kaki lima, Kompas mengungkapkan kehancuran juga terjadi pada toko-toko lain dan rumah makan Padang.

Akibatnya, sekitar 2000 kios dan tenda serta rumah makan masakan Padang, hancur --- Pusat Kota Bandung mendadak sepi dan mencekam. Toko-toko sepanjang jalur itu ditutup sejak pagi serta ada perintah menutup rumah makan Padang yang dijadikan sasaran amuk massa (Kompas, 10 Oktober 1999).

Apa yang digambarkan Kompas, mengkonstruksi imaji perluasan peristiwa amuk massa antara PKL dengan masyarakat sekitar Cabadak Mall meluas ke kelompok pedagang lain, diungkapkan Rumah Makan Padang sebagai sasaran amuk massa. Pengungkapan rumah makan Padang, tidak saja menunjukkan kelas pedagang. Imaji konflik direkonstruksi tidak saja dalam konteks antara konflik kekuasaan ekonomi lemah dan kuat, kekuasaan bisnis modern dengan kekuasaan bisnis tradisional.

akan meningkat manakala kondisi masyarakat semakin tidak labil atau semakin krisis.

b. Legitimasi versus Delegitimasi rezim pemerintah.

Dalam imaji perjuangan kelas ekonomi lemah, media juga mengartikulasikan imaji yang mendelegitimasi rezim dengan menggambarkan posisi lembaga represi negara yaitu aparat keamanan tidak dalam posisi sebagai pelindung dan penjaga semua golongan masyarakat. Peranan pemimpin warga masyarakat tampak lebih menonjol sebagai pengambil inisiatif upaya mengatasi kerusuhan, dan yang lebih lanjut menghubungi aparat keamanan. Pemihakan aparat keamanan digambarkan Republika: “ Para petugas (keamanan) tak bisa melarang massa yang melakukan perusakan terhadap tenda-tenda PKL. Bahkan petugas memberikan peluang kepada warga yang memang sudah kesal dengan keberadaan PKL di tempat tersebut” . Dalam konteks ini suatu imaji dibangun bahwa aparat penguasa melegitimasai masyarakat untuk melakukan pengrusakan terhadap pedagang kaki lima.

Dalam situasi konflik yang terjadi antara PKL dengan masyarakat sekitar, digambarkan juga imaji ada komponen lain yang menjadi pihak penyebab konflik, sebagaimana diungkapkan dengan sikap, ketua RW 02, “ Ketua RW 02 Ceppy yang berada di lokasi saat kejadian berusaha mengendalikan warganya untuk tidak terus merusak atau membakar. Ia juga menghubungi pihak keamanan supaya peristiwa tersebut tidak meluas dan disusupi pihak luar (Media Indonesia).

“Penyusup” merupakan kekuatan lain yang secara sengaja menciptakan atau mengakumulasi ukuran kerusuhan. Ungkapan penyusup merupakan suatu *depiction*, label yang abstrak yang tidak jelas ditujukan kepada siapa. Ungkapan ini mengkonstruksi satu imaji bahwa terdapat satu kekuasaan anonim namun perkasa

yang bisa menjadikan situasi menjadi kacau. Selanjutnya kewaspadaan terhadap penyusup merupakan komponen retorika agar masyarakat menjadi lebih siap menghadapi berbagai situasi dan selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya situasi kerusuhan sosial dan liputan subyek anonim ini menjadi sumber informasi bagi media untuk menggali dan membuat berita baru yang bisa dijual kepada masyarakat.

Media Indonesia dan Republika menggambarkan pernyataan nara sumber yang menyebutkan PKL, sebagai kelompok pedagang yang selalu bikin ulah, tidak sopan, besar kepala, arogan. Gambaran ini tidak ditemukan dalam Kompas. Pemukulan Adit (PKL) kepada Yanto (*tukang beca*) oleh Republika disebutkan Adit sebagai oknum PKL, pemukulan tersebut diungkapkan oleh tiga media sebagai penganiayaan. Penggunaan kata penganiayaan, menunjukkan dua posisi pihak yang memiliki kekuatan perkas dengan kekuatan yang lemah atau tidak berdaya sebagai pihak yang teraniaya. Pemilihan kata ini dalam perspektif konsumsi media memberikan imaji yang mengundang perhatian dan simpati. Penggunaan *depiction* oknum, bagi pedagang kaki lima menunjukkan bahwa secara struktural pedagang kaki lima merupakan kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam kerusuhan.

Gambaran oknum, memberikan imaji bahwa PKL sebagai salah satu kelas pedagang, memiliki ciri sebagai pihak yang menjadi penyebab kerusuhan, Adit digambarkan sebagai individu bukan sebagai struktur dalam masyarakat. Artinya baik Kompas maupun Media Indonesia, menunjukkan adanya konflik antara struktur dalam

masyarakat sedangkan Republika menunjukkan peran individu, oknum, yang bertindak atas nama pribadi.

2. Kerusuhan Plaza Glodok

GLODOK merupakan lokus praktek diskursif, sebuah kompleks perdagangan yang menyiratkan imaji: barometer ekonomi nasional, simbol kekuasaan ekonomi dominan etnis Cina. Ketika kerusuhan terjadi di lokasi itu, berkembang diskursus tidak saja diskursus ekonomi tetapi juga politik. Dalam kerusuhan di Glodok 13 Mei 2000 terjalin rangkaian peristiwa:

Polisi merazia dagangan pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima protes polisi.

Pedagang kaki lima membakar tempat penjualan Video Compact Disc (VCD).

Massa merusak, membakar dan menjarah pertokoan.

Pedagang kaki lima merupakan strata ekonomi lemah, mereka menjual barang dagangan untuk strata masyarakat ekonomi lemah juga. Oleh karenanya mereka berusaha menjual barang dagangannya dengan harga murah. Dalam mempertahankan hidupnya tidak segan melakukan tindakan melawan hukum sebagai mana dalam kasus ini ialah dengan menjual VCD bajakan dan VCD porno. Polisi adalah aparat represi negara, mereka merepresentasikan kekuasaan pemerintah yang dalam tugasnya menegakan hukum dan menjalankan dan menjaga aturan yang dikeluarkan negara. Massa adalah kumpulan banyak orang tidak saja mewakili pedagang kaki

lima tetapi juga merepresentasikan berbagai kekuatan yang berusaha menunjukkan eksistensinya.

Diskursus media tentang kerusuhan tersebut mengungkapkan perjuangan kelas ekonomi bawah dalam upaya mempertahankan ruang hidup mereka dan juga ajang produksi imaji melegitimasi atau mendelegitimasi rezim pemerintah.

a. Ekonomi Lemah versus Ekonomi Kuat.

Representasi media tentang akibat-akibat yang ditimbulkan kerusuhan di Glodok merupakan artikulasi kekuasaan ekonomi jaringan perdagangan di Glodok. Sebaliknya berbagai pihak penyebab kerusuhan diposisikan dalam *depiction* penjahat ekonomi. Dipihak lain, terdapat ungkapan para pedagang kaki lima ada dalam posisi ketidak berdayaan secara ekonomis dan sosial dipertlakukan tidak adil oleh aparat, merupakan artikulasi yang menciptakan imaji perjuangan kelas ekonomi lemah.

Media berusaha menarik perhatian pembaca dengan membangun imaji traumatik pada peristiwa yang lain, yaitu kerusuhan Mei 1998⁶³ seperti pada judul

⁶³ Kerusuhan besar sebagai akumulasi dari berbagai tekanan yang dihadapi masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dari pemerintahan orde baru. Peristiwa itu sendiri menimbulkan korban dan kerugian cukup besar. Menurut laporan akhir Tim Gabungan Pencari Fakta, jumlah Korban dan Kerugian Sulit ditemukan angka pasti jumlah korban dan kerugian dalam kerusuhan. Untuk Jakarta, TGPF menemukan variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka sebagai berikut:

(1) data Tim Relawan 1.190 orang akibat ter/dibakar, 27 orang akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka; (2) data Polda 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat; (3) data Kodam 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka; (4) data Pemda DKI meninggal dunia 288, dan luka-luka 101.

Untuk kota-kota lain di luar Jakarta variasi angkanya adalah sebagai berikut: (1) data Polri 32 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar; (2) data Tim Relawan 33 meninggal dunia, dan 74 luka-luka.

berita Kompas 14 Mei 2000, "Kerusuhan Mei 1998 Nyaris Terulang". Media Indonesia dan Republika walau pun pada judul berita tidak merujuk peristiwa 13 Mei 1998, namun dalam *lead* berita mengungkapkan hal yang sama. Rujukan pada peristiwa 13 Mei 1998, merupakan reproduksi kecemasan dan kekhawatiran terulangnya pembakaran, penjarahan terhadap pertokoan dan perumahan. *Lead* berita di tiga media merupakan produk imaji kecemasan dan kekhawatiran mengenai peristiwa tersebut. Kompas menyajikan *lead* berikut.

Jakarta, Kompas

Kerusuhan 13-14 Mei 1998 nyaris terulang ketika lebih dari 5.000 orang mengamuk, melempar batu, dan merusak beberapa pertokoan di kawasan bisnis Glodok (Jakarta Pusat), serta di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk (Jakarta Barat), Sabtu (13/5). (Kompas, 15 Mei 2000).

Media Indonesia disamping mengungkapkan gambaran traumatik tersebut juga disertai dengan imaji keberhasilan aparat dalam mengatasi kerusuhan.

Jakarta (Media): Peristiwa Mei 1998, kemarin, nyaris terulang di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Meskipun sempat terjadi kerusuhan dan pembakaran bahkan penjarahan, namun tidak meluas ke kawasan lain karena kesigapan aparat. (Kompas, Mei 2000).

Republika menulis *lead* berita dengan memberikan bobot kualitas kengerian tentang peristiwa Mei 1998, yaitu sebagai sebuah malapetaka. Kerusuhan yang terjadi berupa bentrok antara aparat kepolisian dengan pengedar VCD bajakan.

Sementara itu korban kekerasan seksual yang dicatat dari berbagai sumber sebanyak 52 orang dan perkosaan dan kekerasan sebanyak 14 orang.

Jakarta -- Malapetaka Mei di Jakarta dua tahun lalu nyaris kembali terulang. Kawasan bisnis Glodok dan sekitarnya Sabtu kemarin rusuh setelah terjadi bentrok antara petugas kepolisian dengan pengedar VCD (Video CD) bajakan. Kawasan inilah yang dua tahun lalu ikut luluh lantak dalam kerusuhan Mei, persis tanggal 13 – 14 Mei 1998. (Republika, 15 Mei 2000).

Perasaan traumatik juga digambarkan dengan melaporkan kekhawatiran masyarakat dengan melaporkan kondisi masyarakat pada sasaran peristiwa terjadi. Gambaran warga masyarakat yang gelisah digambarkan dalam *lead* berita Kompas, dengan ungkapan: Pria dan wanita berjaga-jaga dengan wajah tegang menghadapi serangan massa”

Sebaliknya di mulut-mulut jalan kecil, gerbang-gerbang besi, barikade segera dipasang warga. Pria wanita berjaga-jaga dan siaga dengan wajah tegang menghadapi serangan massa. Trauma dan kengerian kerusuhan Mei dua tahun lalu terbayang di wajah mereka. (Kompas, 17-05-2000.)

Rasa tidak aman dan kekhawatiran diungkapkan dengan menggambarkan ketakutan warga masyarakat, yaitu dengan melaporkan upaya warga masyarakat membangun pagar di pintu masuk gang perkampungan dan menutup gerbang tersebut setelah mendengar terjadinya kerusuhan.

"Begitu kita dengar ada kerusuhan di Harco Glodok, kita langsung tutup pintu gerbang setinggi dua meter itu," kata Darwanto, seorang anggota pertahanan sipil (Hansip) Rukun Warga 04 Kelurahan Mapar, di mulut Jalan Kebonjeruk III, Kelurahan Mapar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Pagar yang dibangun dua tahun lalu itu berakses langsung ke Jalan Hayam Wuruk. (Kompas, 17-05-2000)

Artikulasi Kompas tentang peristiwa tersebut menunjukkan adanya imaji perlawanan kelas ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat, sebagaimana terungkap dalam pernyataan bahwa sasaran amuk massa adalah kawasan bisnis walau pun

pihak yang merugikan langsung mereka adalah pihak yang merazia pedagang VCD ialah aparat kepolisian.

Mereka berunjuk rasa setelah aparat Markas Besar Kepolisian RI menertibkan usaha pedagang VCD bajakan itu Sabtu pagi. Kerusuhan di Glodok yang langsung menyedot massa, nyaris menimbulkan kerusuhan yang lebih besar. Kemarahan massa itu berawal dari aksi puluhan pedagang piringan cakram video (video compact disc, VCD) di Glodok, yang mengamuk dengan membakar meja-meja dagangan mereka. (Kompas, 15 Mei 2000).

Artikulasi ketidak berdayaan para pedagang VCD terhadap tindakan aparat keamanan dan pembelaan terhadap mereka terlihat dari gambaran emosional para pedagang. “Merasa tak ada lagi barang yang akan digelar, meja-meja lapak itu akhirnya ditumpuk dan dibakar. Asap pun mengepul dan memasuki toko-toko di Harco Glodok. Api juga menjilat plafon pertokoan elektronik itu.”

Perlawanan kelas ekonomi rakyat sebagai ekonomi lemah, terlihat dengan mengungkapkan teriakan massa di tempat lain.

Ketika suasana di Glodok sudah mereda, di tempat lain sekitar pukul 10.00 massa di Jalan Gajah Mada mulai membakar ban-ban bekas dan sampah di tengah jalan serta melempari kaca-kaca Plaza Gajah Mada. “Hidup rakyat! Hidup rakyat!” teriak beberapa orang. (Kompas, 15 Mei 2000).

Demikian juga sasaran mereka ialah simbol kapitalis, yaitu restoran wara laba

(*franscise*), ruang pameran mobil mewah.

Kaca-kaca di restoran McDonald's pun pecah dengan berbagai lemparan benda keras. Dalam waktu bersamaan, massa di Jalan Hayamwuruk juga memecahkan kaca-kaca depan ruang pameran Tunas Toyota dan Tunas BMW. Massa juga menyeret keluar meja dan komputer di ruang pameran itu ke jalan dan membakarnya. (Kompas, 15 Mei 2000).

Kerusuhan di Glodok mengakibatkan aktivitas ekonomi di tempat-tempat strategis terhenti, karena kekhawatiran peristiwa 13 Mei 1998 terulang "Pusat-pusat pertokoan seperti di Pasarbaru, Manggadua, bilangan Roxy yang biasanya ramai pada akhir pekan, kemarin praktis lumpuh total karena pemilik toko memilih menutup pertokoannya."

Media Indonesia melaporkan kerugian pengusaha lain dengan mengutip langsung komentar pedagang " Para pedagang di Harco Glodok juga menyesalkan karena menderita kerugian jutaan rupiah akibat tokonya tidak buka. "Dalam satu hari saja, saya rugi Rp. 15 juta," kata Alok pemilik toko elektronika Deka Sticker. (Media Indonesia, 15 Mei 2000).

Terhentinya perdagangan di Glodok menyebabkan para pedagang frustrasi, dimana mereka kehilangan peluang memperoleh keuntungan material. Kompas mengungkapkan gambaran terhentinya aktivitas bisnis dengan kerugian material.

"Coba bayangin aja deh. Siapa yang enggak frustrasi kalau harus kehilangan Rp 32 juta-Rp 36 juta selama empat hari ini. Bank menelepon, bahwa akad kredit yang sudah dijanjikan pekan ini terpaksa ditunda," katanya. (Kompas, 17-05-2000.)

Perputaran uang di Glodok terbilang besar. "Coba Anda hitung sendiri. Berapa milyar rupiah yang terpaksa hilang. Katakan saja, ada 700 pedagang dengan omzet penjualan Rp 5 juta per hari per pedagang. Jika empat hari tak menjual, berarti bisa mencapai Rp 140 milyar hangus sia-sia," katanya. (Kompas, 17-05-2000.

Pernyataan persuasif pejabat pemerintah lokal, Walikota Jakarta Barat menghimbau agar para pedagang glodok segera membuka kembali aktivitasnya dilakukan dengan mengemukakan peranan Glodok dalam perekonomian nasional, sebagaimana

diungkapkan oleh Republika. “ bagaimanapun, lanjut Sarimun, hidupnya kawasan Glodok merupakan salah satu indikator bangkitnya perekonomian nasional. Dengan ditutupnya selama dua hari, ujanya lagi, transaksi yang tertunda di pasar elektronik tersebut diperkirakan mencapai milyaran rupiah.” (Hari ini pedagang Glodok Diminta Buka Toko Lagi: Republika 15 Mei 2000). Kutipan langsung media dari sumber berita merupakan artikulasi persuasive (Van Dijk, 1988: 84) kepada pembaca dengan memberikan penekanan akan kebenaran peristiwa yang dialami oleh pedagang.

Republika mengemukakan ungkapan bahwa kejadian Glodok menjadi bagian dari indikator lainnya yang menunjukkan kondisi Indonesia tidak aman. “Kondisi sekarang makin tidak aman. Kalau di Jakarta ada kerusuhan Glodok, di Medan ada perkelahian antar mahasiswa dengan pembakaran”. (Republika, 15 Mei 2000).

Akibat kondisi ini Republika melalui pernyataan anggota DPR, tindakan Polri dianggap tindakan gegabah dan telah menimbulkan akibat yang jauh dalam lingkup nasional. mengakibatkan “...masalah keamanan juga turut memperburuk kurs rupiah dengan meletusnya kerusuhan Glodok Sabtu lalu. Hal itu menunjukkan Polri bertindak gegabah dalam menertibkan pedagang kecil, tegas Paskah. Akibat lebih jauh tegas Paskah, investor semakin takut masuk. (Republika 15 Mei 2000).

Khawatiran itu juga dikemukakan oleh pejabat di bidang perdagangan, dimana kerusuhan Glodok mempengaruhi iklim investasi, pengusaha asing ragu-ragu untuk menanamkan investasinya, sebagaimana dilaporkan Kompas.

Menperindag Luhut Panjaitan menyayangkan terjadinya kerusuhan di Glodok Jakarta dua pekan lalu. Tidak stabilnya iklim usaha dan keamanan di Indonesia membuat pengusaha Singapura ragu-ragu dalam berinvestasi di Indonesia. Akibatnya, kesepakatan investasi sebesar 400 juta dollar Singapura antara Pemerintah Singapura dan kalangan usahanya sempat terancam batal. (Kompas, Selasa, 23-05-2000.)

Selain hilangnya memperoleh kesempatan masuk investor, akibat langsung ialah hilangnya memperoleh devisa dari para wisatawan manca negara. Media Indonesia mengungkapkan para wisatawan manca negara yang sedang berada di Indonesia mempersingkat kunjungannya.

Akibat yang terjadi itu, sejumlah wisman mempercepat liburannya di Ibu Kota. Mereka menggunakan pesawat Garuda GA 408 jurusan Denpasar yang berangkat pukul 12. Wib. Dari pulau Dewata mereka langsung pulang ke negara masing-masing. – Mengapa harus lama di Indonesia. Kerusuhan masih menghantui waktu liburan kami. Kata Catty Mc Couhen (24), turis yang mengaku asal Belanda di Bandara Soekarno Hatta kemarin. (Wisman Percepat Masa Liburannya, Media Indonesia: 15 Mei 2000).

Sejalan dengan laporan Media Indonesia, Republika menyampaikan suara kalangan praktisi pariwisata. “Kerusuhan massal yang terjadi di Glodok, Jakarta, Sabtu (13/5) lalu disesalkan oleh kalangan praktisi Pariwisata Indonesia. Kejadian itu telah menambah parah citra Indonesia dimata wisatawan mancanegara (wisman), ketika citra Indonesia justru mulai akan pulih. (Kerusuhan Glodok Rugikan Pariwisata. Republika: 16 Mei 2000).

Kompas juga melaporkan kerugian apabila bisnis VCD bajakan tetap berlangsung. Disamping kerugian material juga terdapat kerugian non material berupa kreativitas seniman dan mental generasi muda. “Selain merugikan negara Rp 360 milyar setahun, peredaran VCD bajakan itu mematikan kreativitas seniman. Dan,

VCD porno yang diperjual belikan secara bebas dikhawatirkan merusak mental generasi muda". (Operasi VCD Bajakan Dilanjutkan, Kompas, 16 Mei 2000).

Mengenai pelaku kerusuhan, sumber formal Pemerintahan DKI, mengarahkan kepada pihak luar sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam konflik usaha perdagangan VCD. Sasaran nominal ialah "orang luar", berasal dari luar lingkungan Glodok. " Pemantauan Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial (Pusdalgangsos) DKI Jakarta menyebutkan, kerumunan ribuan orang itu berdatangan dari kawasan Tanjungpriok Jakarta Utara serta Jakarta Timur. Kompas mengutip sumber pedagang untuk menunjukkan pihak yang melakukan kerusuhan.

Banyak pedagang mengaku, mereka tidak tahu menahu semakin meluasnya kerusuhan tersebut. Mereka menunjuk adanya sejumlah orang dengan istilah "orang luar" yang melakukan pelemparan dan pembakaran. "Kita enggak tahu dari mana, mereka bukan orang sini," kata seorang warga. (Kompas:15 Mei 2000).

Masuknya orang-orang luar yang melakukan tindak kekerasan, merupakan konsekuensi logis dari sistem politik yang terbuka.

Logis jika kita memperkirakan, hadirnya massa di bawah permukaan yang mudah dipolitisasi surut, ketika sistem politik menjadi terbuka dan dalam sistem yang terbuka itu, setiap orang dan kelompok mendapatkan tempat. (Tajuk, Kompas, 15 Mei 2000).

Dalam perebutan lahan usaha terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh razia yang dilakukan aparat keamanan. Pihak yang dirugikan tersebut kemudian memanfaatkan situasi. " Berkaitan dengan kerusuhan di Glodok, Dadang (Kadispen Polri) mengatakan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Orang-orang itu merasa

dirugikan, sehingga mengumpulkan dan membayar massa untuk berbuat rusuh." (Media Indonesia, 15 Mei 2000).

Jalan pikiran yang diungkapkan ialah berdasarkan perbedaan momentum razia dilakukan dengan kerusuhan yang terjadi. Pada saat razia tidak ada protes, baru setelah dua jam terjadi kerusuhan. Pada saat itulah dimanfaatkan untuk melakukan aksinya.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Penerangan Markas Besar Kepolisian RI Brigjen (Pol) Dadang Garnida, di Jakarta, Senin (15/5). Ia bahkan mensinyalir ada pihak-pihak yang memanfaatkan waktu operasi penggerebekan itu untuk kepentingannya sendiri. "Pembakaran itu terjadi sejak pukul tujuh. Sedangkan saat petugas melakukan operasi, tak ada perlawanan," katanya. (Kompas, 16 Mei 2000).

Perlawanan dilakukan oleh pihak yang dirugikan, yaitu organisasi yang memayungi para pedagang VCD.

Selisih waktu dua jam lebih itulah yang mungkin dimanfaatkan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh operasi kepolisian. Siapa mereka, Dadang tidak bersedia menyebutkan. Namun, informasi yang diperolehnya menyatakan ada organisasi yang menampung para pedagang VCD lagu karoke Indonesia yang bernama Flobamora. (Kompas, 16 Mei 2000).

Kompas juga mengungkapkan perlawanan dari warga masyarakat terhadap massa perusuh. Warga masyarakat merasa terganggu lahan hidupnya jika terjadi kerusuhan yang lebih besar, sebab pertokoan di area tersebut juga menjadi sumber mereka untuk mempertahankan hidup.

Massa yang diistilahkan warga setempat dengan sebutan "orang luar" dengan berani mengejar dan menimpuki aparat dengan batu. Mereka juga merusak, membakar dan mencoba menjarah. Saat itu warga permukiman di kawasan Glodok hanya menyaksikan dari balik gerbang besi mereka. "Kami yang sebagian besar mencari nafkah di sini langsung berdiri di depan gerbang. Tetapi bukan untuk menjaga kampung sini,

melainkan karena kegiatan kami tetap bisa mencari makan," ucap Agus, warga Jalan Kebonjeruk V, Tamansari, Jakarta Barat. (Kompas, 17-05-2000)

Trauma kerusuhan Mei 1998, membuat warga masyarakat melakukan tindakan pengamanan terhadap area pemukiman mereka.

Perlawanan warga terhadap para perusuh itu juga terjadi di Gajah Mada Plaza yang bahu membahu bersama petugas satuan keamanan (satpam). Di berbagai permukiman, mereka bahu membahu tanpa membedakan siapa dan asal usul mereka. "Semua kompak Pak, termasuk mereka yang biasa bekerja sebagai makelar toko aksesoris motor. Saya pun ikut," kata Edi, seorang tukang parkir di jalan itu. Bagi para warga dan mereka yang bekerja di kawasan Glodok dan sekitarnya, kerusuhan berarti menghabiskan pertokoan mereka akibat dirusak, dibakar atau dijarah. "Kan gawat kalau mereka sampai masuk ke sini. Bisa habis semua toko yang ada di sini dan kita bisa enggak cari makan," ucapnya. (Kompas, 17-05-2000)

Trauma kerusuhan Mei 1998, mengakumulasi imaji adanya upaya memperbesar perjuangan untuk mengamankan kapital. Sebagaimana dalam kerusuhan Mei yang lalu, walau pun yang mengalami kerugian besar pada kelompok-kelompok ekonomi kuat dimana selain pertokoan yang mereka miliki terbakar atau hancur, juga telah mengakibatkan hilangnya peluang ekonomi lemah dalam mencari peluang hidup, sebab mereka bergantung pada kekuasaan konglomerat atau perusahaan besar lainnya. Dengan demikian telah dikonstruksi imaji ketergantungan kelas ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat, atau terbentuk imaji kekuasaan ekonomi kuat melanggengkan dominasinya.

b. Legitimasi versus Delegitimasi Rezim Pemerintah

Isu yang berkembang dari sebuah kerusuhan bisanya berkaitan dengan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam menangani kerusuhan dan dugaan siapa yang menjadi penyebab kerusuhan. Posisi rezim pemerintahan dalam dua isu tadi menjadi sentral dikursus yang pada ujungnya memberikan imaji tentang pemerintah apakah masih memiliki legitimasi atau tidak.

Terjadinya kerusuhan dinilai merupakan kegagalan aparat keamanan sebagai lembaga represi negara. Apalagi dalam kasus ini yang menjadi pemicu adalah tindakan aparat kepolian ketika menangani para pedagang CVD. Ungkapan tidak legitimasinya aparat kepolisian, ditunjukkan dengan memberikan imaji bahwa pihak yang melakukan penertiban tidak terkoordinasi dan dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Ungkapan tidak terkoordinasinya pelaksanaan razia digambarkan dengan tidak mengetahuinya Institusi kepolisian di tingkat lokal (Jakarta) mengenai rencana dan pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh Institusi tingkat atasnya, yaitu Markas Besar Kepolisian.

Sejauh ini belum jelas alasannya, mengapa operasi penertiban yang menyangkut pedagang kecil VCD itu langsung melibatkan para petugas dari Markas Besar Polri. Beberapa perwira polisi dari Polda Metro maupun Kepolisian Resort Jakarta Barat menyatakan, mereka tidak mengetahui subuh itu akan ada operasi penertiban. "Kami tidak mengetahui ada oprasi itu," ujar seorang perwira polisi. (Kompas, 15 Mei 2000).

Ketidak tahuan mengenai pelaksanaan razia diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Mayjen (Pol) Nurfaizi:

"Saya memang mendengar akan adanya operasi itu, tetapi saya tidak diberi tahu mengenai hari, tanggal, dan jamnya. Akan tetapi, informasi

seperti itu biasanya memang berjenjang, Markas Besar tidak akan langsung ke Polres, tetapi ke polda Metro dulu," katanya. (Kompas, Senin, 15-05-2000.)

Sementara itu pihak Mabes Polri menyatakan telah melakukan pemberitahuan akan adanya upaya pembersihan oleh pihak Mabes, hanya mengenai waktu pelaksanaan operasi tidak diberitahukan.

Secara terpisah, Kepala Sub-Dinas Penerangan Umum Mabes Polri Kolonel Saleh Saaf, kemarin, mengatakan, Markas Besar Polri telah menginformasikan rencana adanya operasi khusus pemberantasan VCD bajakan dengan sandi Jagat Cipta kepada seluruh polda, termasuk Polda Metro Jaya, satu minggu sebelum operasi. (Kompas: Senin, 15-05-2000.)

Secara tersirat dari pernyataan kepolisian pada tingkat lokal dan tingkat pusat (Mabes) terjadi pertarungan imaji siapa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Glodok. Pihak kepolisian lokal menganggap tidak tahu menahu karena tidak diberitahu. Sedangkan pihak Mabes, menyatakan sudah memberitahu dan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya Razia sebagai tindakan koordinasinya. Namun dalam pelaksanaan operasinya, Mabes Polri merasa tidak perlu memberitahu. Pemberitahuan mengenai waktu pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dari operasi itu.

Namun, tentang waktu pelaksanaan operasi, menurut Saleh, pusat (Mabes Polri) bisa memberitahukan, bisa tidak. Itu bergantung pada hasil yang hendak dicapai. "Tetapi pada saat Satgaspus masuk ke wilayah Polda untuk melaksanakan operasi, pihak Satgaspus pasti memberi tahu bahwa mereka sudah masuk," katanya bersikeras. (Kompas, Senin, 15-05-2000.)

Pernyataan tersebut menyiratkan ungkapan yang menunjukkan ada keterlibatan pihak aparat kepolisian dalam bisnis VCD tersebut sebagaimana diungkapkan oleh perusahaan pengganda VCD, " Menurut Erisman (pengganda VCD), usaha

penggandaan VCD bajakan ini mendapat perlindungan dari seorang perwira tinggi di Polda Metro Jaya”.(Media Indonesia, 15 Mei 2000).

Ungkapan Republika melalui pernyataan Ketua Komisi I DPR menunjukkan koherensi adanya praktek perlindungan aparat kepolisian DKI Jakarta terhadap perdagangan VCD bajakan dan porno. “ Kita juga akan meminta Kapolri memecat oknum yang menjadi backing pembajakan VCD, papar Yusril tadi malam”. (Republika, 15 Mei 2000). Kalimat pernyataan positif akan meminta memecat oknum yang menjadi beking pembajakan, menunjukkan memang ada pembeking yang dilakukan oleh oknum Polri.

Republika pada berita yang sama mengungkapkan bantahan terhadap sinyalemen bahwa Kapolda menjadi beking perdagangan VCD bajakan, dengan memuat keterangan pers, “Tidak benar itu Demi Allah saya tidak ada kaitannya dengan itu. Itu fitnah. Biasa saya ini kan populer mungkin saja nama saya digunakan oleh mereka” (Republika, 15 Mei 2000).

Sebelumnya Kadispen Polri Brigjen Pol Drs. H Dadang Garnida mengemukakan bantahan jika operasi VCD bajakan di Glodok dilakukan karena desakan ASIRI. “Menurutnya, operasi itu telah direncanakan jauh sebelumnya sebagai tindak lanjut munculnya aspirasi masyarakat yang berkembang tentang VCD bajakan. Polisi tidak bekerja untuk ASIRI, tetapi kepada pemerintah” (Republika, 16 Mei 2000)

Media Indonesia dalam kaitan ini melihat perdagangan VCD ini sebagai “gelap tetapi nyata”—“aneh tetapi normal” Perdagangan VCD sebagai suatu industri ilegal

tetapi dapat dengan mudah diperoleh di Glodok yang merupakan pusat urat saraf seluruh sindikasi industri gelap, dan yang menjadi pelindung adalah preman dan aparat.

Nah, apabila ada uang, dan berasal dari dunia gelap, disana pula ada pelindung. Inilah pelindung yang menjadikan dunia gelap sebagai sapi perah. Siapa mereka ? tidak lain hanya dua dunia. Yang satu dunia preman, yang lainnya dunia aparat. Lengkap dengan pembagian tugas dan kapling masing-masing. Dari sinilah kerusuhan Glodok itu harus diterang jelaskan keanehannya.(Media Indonesia: 15 Mei 2000).

Apa yang dilakukan polisi menurut media merupakan tindakan yang keliru yaitu tidak mampu melakukan koordinasi dan terjadinya keterlibatan aparat keamanan dalam sindikasi VCD ilegal.

Polisi bikin blunder. Ingin memberangus industri VCD gelap, hasilnya malah bumerang. Terjadi kerusuhan dan pembakaran. Celaknya, itu terjadi 13 Mei, di Glodok pula, sehingga ramailah orang menghubungkannya dengan kerusuhan Mei yang terjadi dua tahun lalu. (Media Indonesia: 15 Mei 2000).

Mengenai tindakan polisi dalam mengatasi produksi dan pengedaran VCD bajakan atau illegal, Seorang kolumnis dalam mengungkapkan dalam Kompas bahwa:

Ibarat kanker sudah menyebar, hidup-mati pedagang kaki lima ilegal sudah mengakar di mana-mana bagian tubuh kota. Masuk akal kalau terhadap setiap upaya penggusuran apa saja, terlebih yang sudah berurat-berakar, oleh karena sekian lama dibiarkan, pasti dibangkang mati-matian. Ujungnya meledak kerusuhan. Mengapa? Sebab sekalipun pelaku ilegal tahu salah, tentu mereka tetap membela satu-satunya penghidupan ilegalnya. Mereka merasa sudah dilegalkan oleh pungli. (Kompas, Senin, 22-05-2000)

Dari masalah VCD ilegal berkembang berbagai ungkapan yang memberikan imaji aparat pada umumnya yang memiliki oknum sebagai virus kota, baik perparkiran, perizinan, polisi di jalanan dan sudut kota. Tindakan razia VCD bajakan ibarat

membasmi kanker dengan salep obat panu. Metafor ini diungkapkan Kompas dalam artikel yang ditulis oleh penulis luar Kompas (Handrawan Nadesul)

Selain hukum kota harus konsisten dan tegas, aparat harus bersih dari oknum virus penyebab kanker kota. Berapa besar kebocoran parkir, basahnya perizinan, dan bobroknya oknum polisi di banyak sudut kota. Buat kasus Glodok, pegang dulu pabrik VCD bajaknya, baru larang pengecernya. Dengan cara begitu lebih arif mengobati penyakit kota sekaligus mencegah kekambuhannya. (Handrawan Nadesul : Kerusuhan Glodok : Kanker Diobati Salep Panu : Kompas, Senin, 22-05-2000. Hal. 4)

Kerusuhan di Glodok pada era reformasi dimana tatanan di bidang aparat keamanan diubah yaitu secara struktural kepolisian dipisah dari tentara. Namun dalam prakteknya, perubahan tersebut belum terlihat. Peristiwa Glodok merupakan cerminan citra polisi.

Citra polisi, itulah pokok soal. Baju dinas sudah berganti tetapi belum perangai. Polisi sudah dilepaskan dari kendali TNI, tetapi profesionalisme belum lama berdenyut. Bahkan yang elemeter pun diabaikan, seperti faktor koordinasi. (Kerusuhan Glodok Gelap Tetapi Nyata, Tajuk Media Indonesia: 15 Mei 2000).

Delegitimasi pemerintah selain ditunjukkan dengan ungkapan adanya perbedaan kepentingan antara elemen struktur di tingkat lembaga keamanan negara, juga masalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan rodanya. Jaminan keamanan baik fisik maupun sosial belum ada.

Sekarang juga, bertalian dengan kasus Glodok kita harus mengemukakannya lagi. Kendala itu ialah tiadanya jaminan keamanan fisik dan keamanan sosial. Tiadanya kepastian dan konsistensi hukum dan kebijakan. (Jangan Hanya Merasa Untung Karena Kerusuhan Mei '98 Tidak Terulang: Tajuk, Kompas: 15 Mei 2000).

Dan lebih jauh lagi kelemahan pemerintah yang diungkap ialah pada tataran makro penyelenggaraan pemerintahan, yaitu visi, misi dan kebijakannya.

Kurangnya kemampuan pemerintah untuk secara efektif menerjemahkan, mengkoordinasi serta melaksanakan visi, kebijakan dan programnya. Akhir-akhir ini bahkan ditambah munculnya hantu KKN. (Kompas: 15 Mei 2000).

Kompas memberikan delegitimasi Pemerintah dengan mengutip kekesalan warga masyarakat, tentang waktu penyelenggaraan operasi penertiban dari aspek waktunya yang masih memiliki trauma 13 Mei 1998.

Sejumlah warga Glodok menyesalkan operasi penggerebekan yang dilakukan polisi tepat pada tanggal 13 Mei. "Trauma kerusuhan dua tahun lalu saja belum hilang," ujar seorang warga. Bahkan sisa kerusuhan, seperti gedung bekas kerusuhan atau reruntuhan masih terlihat di berbagai sudut kota. (Kompas, 15 Mei 2000).

Penilaian tindakan polisi yang salah juga disampaikan oleh kalangan DPRD DKI, sebagaimana diungkapkan Kompas

Sementara itu, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyalahkan polisi dan pemerintah daerah terhadap munculnya kekerasan massa tersebut. Polisi bersalah karena mereka merazia barang-barang bajakan tanpa lebih dulu mempertimbangkan kondisi obyektifnya. Pemda DKI dinilai bersalah karena tidak menyediakan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima itu. (Kompas, Senin, 15-05-2000)

Kasus kerusuhan tersebut juga menunjukkan ungkapan adanya tindakan pemerintah yang lebih mementingkan kekuasaan ekonomi dan tidak memihak rakyat, sebagai mana tercermin dari kebijakan Pemda yang cenderung memihak pada kaum kapitalis.

Sementara Ugiek Sugihardjo dari Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD DKI menyoroti kebijakan Pemda DKI yang semakin tidak populis. Maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang mencerminkan bahwa kebijakan Pemda DKI tidak berpihak kepada rakyat banyak, namun lebih banyak mengabdikan kepada pemodal. (Kompas, 15-05-2000)

Kompas sendiri melihat aksi reaksi antara aparat kemananan dengan masyarakat merupakan keteledoran.

“Tidaklah mengada-ada, jika juga dipersoalkan, aksi-reaksi itu kebetulan, kesengajaan atau keteledoran? Dari urutan kejadian dan keterangan, kesimpulan sementara lebih mengarah kepada bahwa kejadian itu keteledoran. (Kompas: 15 Mei 2000).

Penyesalan warga tidak saja karena faktor traumatik, tetapi adanya ketidakadilan, sebab menurut warga penjualan VCD ilegal hanya dilakukan kepada pedagang kaki lima, sedangkan penggandanya tidak dilakukan.

Warga Glodok juga mempertanyakan operasi VCD porno dan bajakan yang dilakukan hanya kepada pedagang kaki lima. "Mereka kan hanya penjual. Tangkap dong penggandanya yang di situ-situ juga," kata warga keturunan yang tak mau disebut namanya. (Kompas, 15 Mei 2000).

Ketidakadilan juga berkaitan dengan pilihan penertiban, ternyata penjualan VCD bajakan sudah menyebar ke tempat-tempat pusat perdagangan resmi dan permanen,

Pembajakan, penjualan dan pemakaian VCD bajakan sudah menjadi hal biasa di Jakarta. Bahkan penjual maupun perswaan VCD bajakan telah menyebar ke pelosok Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi maupun daerah lainnya. Di berbagai pertokoan maupun pasar swalayan, para penjual bebas menjualbelikan VCD bajakan. (Kompas, 15 Mei 2000).

Masalah pelanggaran hukum berupa pembajakan juga dilakukan dengan membiarkan bebas bagi para pedagang kelas kakap.

Mata pencarian secara melanggar hukum telanjur dibiarkan melembaga. Melembaga sebab telanjur menjadi satu-satunya tambahan hidup keluarga selama bertahun-tahun. Di balik dalih orang kecil, ke atas para pelanggar hukum kelas teri melihat koruptor kakap dibiarkan enak-enakan bebas. (Handrawan Nadesul , Kompas, Senin, 22-05-2000)

Upaya menegakan keadilan diungkap oleh Kompas tampak lebih banyak faktor retorikanya. "Menurut kenyataannya, realisasinya lambat dan jauh ketinggalan dibandingkan dengan omongan pemerintah, pejabat dan masyarakat perihal akan ditegakkannya hukum untuk kebenaran dan keadilan." (Tajuk, Kompas: 15 Mei 2000).

Ungkapan mendelegitimasi pemerintah dilakukan dengan membandingkan kondisi pada periode sebelumnya, dimana ada upaya untuk tidak menegakan keadilan.

Orang tidak sabar. Kecenderungan main hakim sendiri semakin meluas dan merupakan gejala yang lebih mencemaskan dari periode sebelumnya. Kecenderungan itu semakin garang ketika tampak dalam fase permulaan Orde Reformasi ini pun, tampak adanya upaya-upaya tidak menegakkan kebenaran dan keadilan. (Tajuk, Kompas: 15 Mei 2000).

Kompas mengutip narasumber praktisi hukum yang memberikan bingkai terdapat ketidakadilan dalam bentuk penegakan hukum, yaitu Benny K Harman dan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedy Panjaitan

Menurut Benny, kemarahan para pedagang kaki lima VCD mencerminkan kondisi penegakan hukum dan diskriminasi hukum yang sangat parah. Masyarakat antipati dengan aparat penegak hukum. "Kita sangat cemas dengan fenomena itu. Aksi legal aparat disambut dengan tindakan negatif berupa sikap antipati kolektif," katanya. Benny menilai hal tersebut dapat terjadi karena selama ini terjadi perbedaan perlakuan hukum. "Refleksi para pedagang itu adalah, kok, kita yang diobok-obok. Sedangkan pedagang besar yang melanggar hukum, termasuk koruptor besar tidak terjamah oleh hukum," katanya. Fenomena kemarahan para pedagang itu

mencerminkan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap masyarakat kecil dengan penjahat besar atau penjahat berkerah putih (Kompas, Jumat, 19-05-2000)

Dukungan terhadap pertimbangan mengapa razia dilakukan pada waktu pagi hari sehingga melegitimasi tindakan aparat keamanan dilakukan dengan mengungkap pendapat warga masyarakat. Penggunaan nara sumber warga masyarakat mungkin dilakukan untuk memberikan latar realitas yang bersumber dari masyarakat kecil sebagai upaya melegitimasi tindakan aparat.

"Mungkin polisi mau mengambil langsung VCD pedagang yang masih disimpan di tas, yang belum digelar," kata Beny, seorang warga Glodok. Karena itu, "operasi subuh" itu sangat efektif untuk mengambil semua barang milik pedagang. (Kompas, 15 Mei 2000).

Akibat yang digambarkan dari tindakan para pedagang tersebut ialah dengan mengartikulasikan rasa takut para pelayan wahana publik dan privat, yaitu angkutan kota dan mobil pribadi dan juga instalasi akumulasi kapital yaitu toko elektronik " Akibatnya, tak satu pun kendaraan pribadi maupun mikrolet yang berani melintas. Kekesalan mereka terus memuncak dengan melempari kaca sebuah toko elektronik".

Apalagi jika keteledoran itu dihubungkan dengan keterangan Presiden Abdurrahman Wahid ketika menjawab pertanyaan anggota jemaah shalat Jumat di Ciganjur, 12 Mei lalu. Ditanya kenapa rupiah anjlok terhadap dollar, Gus Dur menjawab, hal itu di antaranya disebabkan oleh banyaknya orang memborong dollar dan pergi ke luar negeri karena khawatir kerusuhan akan terulang pada tanggal 13 dan 14 Mei tahun 2000. (Tajuk, Kompas : 15 Mei 2000).

Pernyataan-pernyataan menyalahkan Polri atau keteledoran Polri dari aspek politis, yaitu pertimbangan pelaksanaan razia pada tanggal 13 Mei dinilai oleh pihak polri bahwa tidak ada dukungan terhadap maksud menyelenggarakan razia untuk membasmi perdagangan VCD bajakan dan VCD porno. “ Namun, terlepas dari keteledoran memperhitungkan aspek politis, Polri mempertanyakan mengapa politisi , termasuk mahasiswa tidak mendukung gerakan pembasmian terhadap hal-hal yang dianggap ‘maksiat’, seperti peredaran VCD porno” (Media Indonesia: 16 Mei 2000)..

Anggota komisi DPR Yasril, menjelaskan bahwa pihak yang melakukan usaha VCD bajakan tergolong pada pihak yang melakukan kejahatan ekonomi. “ Yasril menggolongkan para produser VCD bajakan sebagai penjahat ekonomi, karena selain melanggar hak properti juga mengkacaukan perekonomian. ‘ Itu yang harus dilakukan bila ingin menepis adanya rekayasa di balik pembakaran yang brutal’(Media Indonesia: 16 Mei 2000).

Peristiwa kerusuhan dinilai tidak semata sebagai bentuk kerusuhan tetapi merupakan bentuk aksi untuk melawan kekuasaan rezim pemerintahan yang sedang berlangsung.

Ketua Forum Studi Aksi Demokrasi, Fosad, Faisal Reza Rakhmat meminta Kapolri ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan Glodok. Sekain itu ia menengarai kerusuhan sebagai bentuk merongrong pemerintahan Gus Dur. – Dalam pandangan Faisal bukan tidak mungkin sebagai *test case* untuk menjatuhkan pemerintahan presiden Gus Dur menjelang SU-MPR Agustus mendatang. (Media Indonesia: 16 Mei 2000).

Kerusuhan yang terjadi dinilai masyarakat sebagai refleksi dari konflik antar elit sebagaimana diungkapkan Kompas sebagai berikut:

WARGA mengaku sudah bosan dengan keterpurukan, pertengkaran elite politik serta berbagai pemicu kerusuhan. Sikap saling bahu warga terlihat sangat terasa saat kerusuhan nyaris terulang di Jakarta. "Kami sudah lelah melihat para pejabat hanya ribut melulu," kata seorang warga. Sementara jaminan keamanan terhadap warga seperti terlupakan, kriminalitas dan perampokan terjadi di mana-mana. Padahal masyarakat, apalagi para pelaku ekonomi memerlukan ketenangan berusaha. (Kompas, 17-05-2000)

Mengenai semua tindak kriminalitas dan kekerasan yang semakin meningkat, Kompas melakukan persuasi agar semua pihak merasa ikut bertanggungjawab atas terjadinya berbagai kerusuhan.

JIKA kriminalitas, pelanggaran hukum, aksi kekerasan terjadi dalam bingkai kondisi seperti kita lukiskan di atas, Kamtibmas menjadi tanggung jawab siapa? Andaikata tanggung jawab Polisi semata, dapatkah polisi menghadapi dan menanganinya?

Jika Kamtibmas merupakan tanggung jawab kita bersama, maka kita bersamalah harus menghadapi dan menanganinya. Nalar sehat kita mengatakan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama. (Kompas, 19-05-2000)

Ketiga media⁶⁴ telah memproduksi imaji pertarungan kekuasaan dengan mengartikulasikan imaji delegitimasi pada rezim pemerintah sekarang. Dari segi waktu, razia dipandang tidak tepat karena masyarakat masih memiliki pengalaman traumatik terhadap kerusuhan Mei 1998. Permasalahan struktural di internal instansi

⁶⁴ Menurut Wakil Pimpinan Redaksi Kompas (ST Soelarto, hasil wawancara, 2000) dalam liputan kerusuhan sosial, biasanya Pimpinan Redaksi dalam rapat pagi, memberikan arahan mengenai permasalahan yang mendasar, konteks kerusuhan tersebut secara makro sosial dan politik. Misalnya kerusuhan yang terjadi bisa dilihat dalam konteks adanya polarisasi antara pro dan anti pemerintahan Gus Dur. Orientasi Kompas agar tidak terjebak pada salah satu blok dalam polarisasi tersebut (wawancara dengan ST Soelarto, Juli 2000). Secara struktural arahan pimpinan redaksi mengendaki untuk tidak memihak pada salah satu polarisasi, namun artikulasi yang dilakukan oleh Kompas secara tidak sadar memberikan imaji yang mendelegitimasi rezim.

kepolisian menjadi sumber konstruksi imaji delegitimasi rezim. Ketidakadilan aparat dalam menindak pedagang VCD ilegal dan bajakan juga merupakan bingkai yang mendelegitimasi rezim yang berkuasa. Bahkan lebih jauh lagi tercipta suatu imaji bahwa kerusuhan Glodok merupakan upaya untuk melengserkan presiden, yaitu Gus Dur.

3. Kesimpulan

Dalam kerusuhan Cimol dan Glodok Plaza, pedagang kecil yang menjadi simbol kelas ekonomi lemah yang harus berjuang melawan ekspansi kekuatan ekonomi kuat. Munculnya fenomena tersebut juga berkaitan dengan peranan negara yang mempunyai kekuasaan politik. Oleh karena itu konflik yang terjadi baik diantara komunitas itu sendiri maupun dengan komunitas di luarnya menjadi diskursus media yang memproduksi imaji pertarungan antara kekuasaan ekonomi lemah dengan ekonomi kuat dan juga pertarungan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi rezim pemerintah.

Akumulasi imaji perjuangan ekonomi lemah menghadapi kekuatan ekonomi kuat dilakukan dengan mengembangkan bingkai yang membentuk imaji yang memperluas wilayah kerusuhan dan rasa traumatik terhadap peristiwa yang sudah berlalu, rasa khawatir akan terjadinya kerusuhan dan terulangnya kembali peristiwa yang lalu. Kerugian material dan hilangnya memperoleh peluang para pengusaha besar diungkapkan sebagai bingkai yang mengkonter imaji perjuangan ekonomi lemah, dengan mengembangkan imaji bahwa para buruh atau karyawan kehilangan

lapangan kerja yang biasanya ia peroleh dari pertokoan besar. Ungkapan yang membingkai penderitaan masyarakat akibat pertokoan dan industri besar tidak beroperasi, menunjukkan adanya ketergantungan kekuatan ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat, atau sebaliknya menunjukkan kekuasaan ekonomi kuat masih memiliki kekuatan dominan.

Akumulasi imaji terjadi juga dalam pertarungan antara pihak yang melegitimasi dan mendelegitimasi rezim pemerintah. Delegitimasi pada rezim dilakukan mengembangkan imaji bahwa kerusuhan yang terjadi sebagai kegagalan aparat keamanan dalam menghentikan aksi mereka, cara kerja mereka yang tidak dilakukan tepat waktu, perebutan kepentingan antara birokrat di tingkat pusat dengan lokal, aparat keamanan sengaja membiarkan kerusuhan yang terjadi antar warga, dan kerusuhan terjadi karena adanya *penyusup* pihak luar. Delegitimasi pada massa juga dilakukan oleh media dengan menampilkan bingkai aparat pemerintah bahwa pembajakan VCD merupakan kejahatan ekonomi dan mengapa para mahasiswa tidak mempermasalahkan tindakan ilegal tersebut. Bingkai mendelegitimasi aksi massa dilakukan memberikan *depictions* bahwa kerusuhan yang terjadi merupakan skenario menurunkan pemerintahan yang berkuasa, yaitu Gus Dur ketika itu.

Pertarungan imaji antara kekuasaan ekonomi lemah dengan ekonomi kuat tampak dominasi imaji eksistensi ekonomi lemah dan perjuangannya melawan kekuatan dominasi kekuasaan ekonomi kuat. Sementara itu dalam pertarungan untuk melegitimasi dan mendelegitimasi rezim, lebih didominasi imaji yang mendelegitimasi rezim yang berkuasa. Dalam konteks ini ada centering media dalam

membangkitkan imaji yang berkembang sebagai imaji perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Dalam konteks transisi di bidang politik menunjukkan ada perubahan cara media mengartikulasikan upaya mengkritik ketimpangan dan melawan dominasi rezim. Perubahan artikuasi ini karena terjadinya perubahan tatanan produksi di bidang media dan juga perubahan dalam tatanan politik yang semuanya mengarah pada tatanan kebebasan dan keseimbangan.

E. KASUS TAWURAN ANTAR WARGA DAN ANTAR PELAJAR.

Sekelompok warga saling lempar batu dengan kelompok warga lainnya dan kemudian melebar menjadi pembakaran dan penjarahan terhadap pertokoan dan fasilitas umum. Demikian juga sekelompok pelajar saling melempar batu dengan kelompok pelajar lainnya, kemudian melebar menjadi pelemparan dan membajakan serta penjarahan bus umum. Aksi mereka tidak terbatas pada saling lempar batu tetapi juga terjadi perkelahian massal yang menggunakan benda-benda tajam, seperti clurit, pisau, pedang dan gesper bergerigi. Akibatnya diantara mereka ada yang terluka bahkan terbunuh. Peristiwa itu menjadi lokus praktek diskursif ekonomi dan politik dan media massa telah menjadi arena pertarungan imaji antara berbagai kekuatan dalam masyarakat dan dalam media itu sendiri.

1. Tawuran Antar Warga.

Tawuran warga Matraman Jakarta, terjadi antara massa yang berasal dari wilayah Kebon Manggis – Berlan dengan warga Tegalan, Palmeriam- Kayumanis. Tawuran berulang kali terjadi sejak tahun 1970-an, mulai dari perkelahian antar

warga secara pribadi, sampai pada perkelahian antar geng, antar kampung. Kerusuhan di Matraman, bulan Maret – April 2000, menurut media merupakan kerusuhan terbesar. Gambaran media tampak secara tersurat lebih banyak mengungkapkan jalannya peristiwa tawuran dan akibat yang ditimbulkan. Imaji yang dikonstruksi baik secara sadar maupun tidak adalah pertarungan imaji kekuatan ekonomi lemah dengan ekonomi kuat dan kekuatan yang mendelegitimasi kekuasaan rezim lawan yang melegitimasi.

a. Ekonomi Lemah Versus Ekonomi Kuat.

Kompas, Media Indonesia dan Republika melaporkan rangkaian tawuran kedua kelompok warga yang dipisah oleh Jalan Raya Matraman yang menghubungkan kawasan Senen dengan Jatinegara dan mengungkapkan bahwa pemicunya adalah masalah ekonomi. Di jalan raya antar dua wilayah tempat tinggal warga tersebut terdapat putaran jalan (*U Turn*), tempat kendaraan memutar, dan menjadi tempat pelayanan “jasa” membantu mobil yang akan memutar dengan meminta imbalan uang kepada mobil yang memutar tersebut.

Perebutan lahan putaran itulah menurut ungkapan tiga media di atas yang menjadi pemicu terjadinya tawuran antar warga tanggal 26 Maret 2000. Karena tidak ada perjanjian atau aturan yang disepakati maka perolehan peluang untuk menjalankan jasa itu tergantung pada siapa yang paling dulu melakukan praktek jasa tersebut. Dalam kasus ini yang diperebutkan ialah jasa ekonomi berupa putaran jalan, konflik yang muncul adalah konflik horizontal antar massa untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi (material). “Keributan berawal dari rebutan lahan pemutaran

jalan di Jl Matraman Raya antara kelompok 'Pak Ogah'⁶⁵ dari Kebon Manggis dan Palmeriam yang berseberangan jalan" (Kompas, 29 Maret 2000).

Kompas menggambarkan bagaimana praktek konflik fisik dimulai, dengan diawali pemberitahuan kepada masyarakat. "Titir tiang listrik memang diakui sejumlah warga di Tegalan dan Palmeriam sebagai tanda siap berantem dan warga pun beramai-ramai berkumpul di pinggir jalan Jl Matraman Raya" (Kompas, 2 April 2000).

Ungkapan pengakuan masyarakat akan makna simbol titir yang sudah dianut masyarakat, mengkonstruksi imaji bahwa tawuran yang terjadi sudah meluas dan mendalam serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Perkelahian antar warga itu sudah berulang kali dilakukan dan, Kompas memberikan gambaran bahwa, perkelahian itu dilakukan dengan tanpa berfikir atau merasa melakukan kesalahan. Kompas menggambarkannya malah sebagai suatu kesenangan. Pilihan kata "asik" menandakan adanya kenikmatan dalam menyerang, melempar dan membakar. "Sebagian besar sebenarnya hanya ingin menonton, tetapi tidak sedikit yang kemudian ikut tersulut dan asik ikut melempar, menyerang dan membakar" (Kompas, 2 April 2000).

⁶⁵ Pak Ogah merupakan pemeran dalam film boneka produksi TVRI, salah satu karakter Pak Ogah adalah meminta uang terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan kepada orang lain. Peran pak Ogah ini telah menjadi metafor dalam pengungkapan penjaga putaran jalan yang memungut biaya.

Media Indonesia mengungkapkan hal sama, tentang ketidak pedulian pada kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, dimana Media Indonesia menghubungkannya dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Tidak peduli bahan bakar mau naik per 1 April 2000, kedua belah pihak mengisi botol dengan bensin dan minyak tanah, kemudian sumbunya disulut untuk dilemparkan ke genteng rumah lawan. Naasnya, yang berada di tepi jalan merupakan perkantoran sehingga menjadi sasaran empuk. (Media Indonesia, 29 Maret 2000).

Rujukan konteks peristiwa dengan kebijakan pemerintah akan menaikkan harga BBM ketika itu, yang dikonstruksi bahwa masyarakat tidak peduli pada kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dan mereka lebih mementingkan kemauan emosionalnya untuk melakukan tawuran. Kondisi kontradiktif ini diungkapkan oleh media, dengan mengkonstruksi imaji bahwa sebenarnya yang menjadi sasaran adalah kelompok yang memiliki ekonomi kuat. “Harga minyak naik tetapi minyak dimasukan dalam botol, dibakar dan dilempar”. Apa yang dilempar dan dibakar merupakan sasaran utama kerusuhan.

Sasaran melempar masing-masing lawan berubah menjadi sasaran sumber ekonomi, yaitu toko-toko yang ada di masing-masing seberang jalan. Laporan ini mengkonstruksi imaji adanya sasaran baru di balik sasaran warga masyarakat, yaitu sumber-sumber ekonomi masyarakat.

Republika merujuk peristiwa serupa di wilayah lain sebagai peristiwa yang sama yaitu tawuran warga di kawasan Manggarai, Jakarta yang menggambarkan peralatan apa yang di bawa oleh para pelajar dalam tawuran tersebut.

Sebagaimana bentrokan di kawasan Manggarai, para pemuda dan warga bukan cuma menggunakan senapan angin tapi juga saling melempar bom molotov ke daerah lawan. Mereka membawa tokat besi dan parang yang rupanya sudah lama dipersiapkan mengantisipasi terjadinya bentrokan. (Republika, 30 Maret 2000).

Rujukan peristiwa lain yang sejenis di tempat lain merupakan akumulasi imaji yang mengkonstruksi bahwa fenomena konflik tersebut terjadi dalam ruang yang lebih luas. Selain itu Republika juga memproduksi imaji perasaan emosional yaitu pesimisme dalam menyelesaikan secara tuntas tawuran tersebut. "Bentrok dan damai berulang kali terjadi. Mereka pun berdamai lagi semalam. Sampai kapan?".

Selanjutnya Republika juga memberikan bingkai bahwa kesepakatan tersebut bukan berasal dari warga itu sendiri tetapi atas dasar instruksi pejabat.

Setelah berkali-kali bentrok dan damai, dua kelompok yang bertikai di kawasan Berlan, Matraman Jakarta Timur, kembali diminta menandatangani kesepakatan damai Rabu malam. Perjanjian itu diharap bisa meredam keributan yang terjadi sepanjang waktu. (Republika, 30 Maret 2000).

Ungkapan konflik fisik kedua kelompok massa dari dua kampung, menenggelamkan konflik vertikal yang terjadi, dimana masyarakat ada pada posisi terdominasi secara ekonomis. Konflik di antara warga di dua wilayah dikonstruksi sebagai akumulasi ketidak berdayaan warga secara ekonomis (material).

Dalam situasi seperti itu, kawasan Matraman yang semakin padat dengan kondisi ekonomi yang tidak begitu baik menyebabkan warganya mudah tersulut emosinya. "Apalagi perseteruan di sana sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sudah terakulturisasi dan tertransformasi dari generasi ke generasi," katanya. (Kompas, 3 April 2000)

Selain ungkapan perebutan sumberdaya ekonomi, Kompas juga melaporkan adanya, permintaan uang secara paksa terhadap anak-anak yang sedang membaca

buku atau mejeng. Ini merupakan gambaran adanya pencarian uang dari kelompok sosial ekonomi bawah dengan mengabaikan nilai-nilai etika dan hukum. Mereka yang diminta pun mungkin bukan berada dalam kelompok sosial ekonomi di atas, tetapi sama-sama dalam kelas ekonomi yang sama.

Seperti disebutkan oleh salah seorang tokoh pemuda Berlan yang bernama Trikora alias Bayong dan Ketua RW 04 Benyamin Ahmad, pemicu perkelahian antar kampung Tegalán –Berlan, Tegalán –Kebon Manggis, Berlan-Palmeriam – justru diawali dari tingkahlaku anak-anak mereka yang masih duduk di sekolah dasar, menengah dan atas. Sebut saja pemalakan terhadap sekelompok anak yang sedang asyik membaca di toko Gramedia atau yang sedang mejeng disekitarnya. (Kompas, 2 April 2000)

Jika perebutan putaran jalan dan pemalakan anak yang membaca buku dan mejeng di pertokoan merupakan representasi perjuangan memperoleh kapital material, maka kutipan di bawah ini, berawal dari kapital sosial, satu kebutuhan akan ruang sosial dalam menyalurkan ekspresi serta hasrat agresivitas anggota masyarakat berupa tindakan-tindakan iseng, saling ledek. “Yang paling sering justru anak-anak iseng” Dari seberang jalan mereka melempar batu ke seberang yang lain, dilanjutkan saling ledek, dan kemudian *titir* tiang listrik itu. Maka jadilah tawuran” (Kompas, 2 April 2000).

Gambaran bahwa saling lempar batu merupakan iseng dan saling ledek menjadi penyebab tawuran terjadi menyiratkan bahwa dalam konflik fisik yang terjadi tidak jelas yang diperebutkan oleh kelompok yang bertikai tersebut. Imaji yang tercipta ialah rendahnya ikatan sosial antar mereka. Secara fisik kedua kelompok masyarakat itu terpisah oleh jalan raya yang padat dan arus yang nyaris tak pernah berhenti. Komunikasi antar mereka tidak bisa terjadi sebagai suatu

komunitas, namun juga dalam masing-masing kelompok tidak ada ikatan yang mampu mengendalikan kelompoknya masing-masing.

Terputusnya ikatan sosial dalam masyarakat dan berkembangnya agresivitas merupakan konsekwensi dari terampasnya ruang sosial oleh ruang pribadi yang dikuasai oleh golongan ekonomi kuat. Rendahnya pengendalian kelompok masyarakat masing-masing ditunjukkan dengan bagaimana mudahnya mengumpulkan warga untuk bertikai, dan melakukan pembakaran terhadap beberapa gedung.

Dalam waktu sekejap, jumlah warga yang bertikai mencapai ratusan dan aksi saling lempar batu mulai diwarnai aksi lempar molotov. Saksi mata dilapangan menyatakan melihat seseorang mendatangi Kantor Notaris Ivan Sinyal SH yang kemudian terbakar. Api kemudian menjalar ke bangunan-bangunan di sampingnya. Selain kantor notaris, bangunan lain yang terbakar adalah PT Samudra Guna Darma, sebuah Wartel dan dua rumah kosong. (Kompas, Rabu 29 Maret 2000).

Adanya pembakaran gedung secara sengaja diungkapkan dengan pernyataan saksi mata "seseorang mendatangi Kantor Notaris Ivan Sinyal SH yang kemudian terbakar" Selain itu juga dengan laporan langsung wartawannya dengan laporan sebagai berikut:

Kompas, yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung menyaksikan bangunan yang dibakar kelompok Berlan adalah gedung PT Lautan Berlian Utama Motor, gedung dan ruang pameran Isuzu, Restoran Sari Kuring, Warung Telekomunikasi (wartel), toko PD Usaha Sehat yang menjual aneka makan Jamu, empat rumah di kedua sisi Bank Mandiri cabang Pembantu Matraman. (Kompas, 3 April 2000)

Apa yang disaksikan Kompas merupakan tindakan langsung warga membakar gedung, warga tersebut berasal dari satu kelompok yang bertikai. Yang dibakar tidak

saja fasilitas ekonomi menengah ke atas, tetapi juga kelas ekonomi bawah, seperti kios jamu, rumah penduduk.

Kerusuhan horizontal antar massa di kedua area pemukiman, merupakan penghancuran kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah oleh mereka sendiri. Kompas di bawah ini mengungkapkan akibat yang terjadi dengan terbakarnya sebuah restoran.

Perasaan sedih juga diungkapkan sorang anggota Satpam Sari Kuring. “ Yang tersisa hanya beberapa meja dan beberapa piring . Ini bukan asal perkelahian , tetapi sudah penjarahan namanya. Dan, asal tahu saja Ma, pimpinan kami sudah jelas tidak akan membangun gedung ini lagi. Itu artinya, 50 an karyawan di sini menganggur. Sudah susah, tambah susah lagi, “ tuturnya dengan nada memelas.

Laporan mengenai konsekwensi atau akibat dari pembakaran tersebut berupa hilangnya lapangan kerja yang justru menjadi lahan masyarakat kelas bawah.

Ketiga media memproduksi dan mereproduksi imaji perjuangan masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh ruang ekonomi dan sosial. Pertarungan antar massa yang dikonstruksi oleh media sebagai perjuangan memperoleh kapital material agar bisa bertahan hidup. Pengungkapan latar belakang kerusuhan dan akibat kerusuhan antar massa merupakan akumulasi ukuran konflik yang esensinya ada ketidak berdayaan kelas ekonomi lemah memperjuangkan kehidupan mereka agar bertahan hidup. Ketidak berdayaan dan penghancuran diri golongan ekonomi lemah merupakan konstruksi imaji adanya kekuatan lain yang melakukan dominasi terhadap mereka.

b. Legitimasi versus Deligitimasi Rezim

Kekuasaan massa dalam peristiwa itu diungkapkan oleh media dengan menunjukkan tidak berdayanya aparat keamanan dalam meredakan tawuran. Penggambaran tidak berdayanya aparat keamanan sebagai aparat negara merupakan bingkai media yang menunjukkan tidak legitimasinya pemerintah, sebagai suatu kapital politik. Media Indonesia dan Kompas menjadikan ketidak berdayaan aparat ini pada bagian *lead* berita. Kompas dalam *lead* berita 29 Maret 2000, mengungkapkan kekuasaan massa yang dominan terhadap aparat keamanan.

“Seorang anggota marinir terluka akibat pengeroyokan dan lima bangunan terbakar dalam sebuah keributan antar warga di Jln. Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa (28/3) petang. Dalam keributan sehari sebelumnya, Kepala Kepolisian Sektor Metro Matraman, Mayor (Pol) Marsidi terluka kakinya akibat lemparan batu” (Kompas, 29 Maret 2000).

Kompas menulis dalam *lead* berita “Dua perwira polisi terluka dan sekitar lima kantor ludes terbakar dalam bentrokan antar warga di Jln. Matraman Raya, Jakarta Timur, kemarin sore”. Ungkapan dua perwira polisi terluka dan dua kantor ludes terbakar, mensiratkan makna bahwa korban dalam peristiwa tersebut merupakan ketidak sengajaan dari kerusuhan massa yang tidak menunjuk langsung subyek pelaku yang menyebabkan mereka menjadi terluka.

Media Indonesia di bawah ini mengungkapkan dominasi massa atas aparat keamanan sebagaimana terlihat dari pernyataan bahwa mereka dilempari batu saat meredakan tawuran. Penggunaan kalimat pasif “mereka dilempari” menunjukkan posisi aparat keamanan sebagai sasaran yang pihak yang diperdaya dan didominasi oleh massa. Demikian juga ungkapan Marsidi terpincang-pincang dihajar dengan

batu. Ungkapan menunjukkan pemandangan Marsidi yaitu seorang mayor dihajar sampai terpincang-pincang. Penggunaan kata dihajar memiliki konotasi lebih keras dari pada dilempari. Kata dihajar merupakan kata yang digunakan untuk sasaran negatif, atau berbuat jahat. Artinya disini dikonstruksi imaji kepada pembaca tentang posisi aparat keamanan yang tidak berdaya.

Perwira polisi yang terluka yakni Kapolsek Metro Matraman Mayor Marsidi HP dan Kepala Pusat komando Pengendalian Operasional Polres Jaktim Mayor Hijran. Mereka dilempari dengan batu saat berusaha meredakan tawuran. Mayor Hijran mendapat luka di bagian kepala. Sedang Mayor Marsidi terpincang-pincang dihajar dengan batu. (Media Indonesia, 29 Maret 2000).

Sama halnya dengan laporan Media Indonesia, Kompas juga memberitakan tidak berdayanya aparat kepolisian. "Ketika mulai terjadi pembakaran, seorang anggota Marinir yang berada disalah satu gedung itu melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Namun akibatnya ia malah dikeroyok dan karena cedera terpaksa dilarikan ke rumah sakit". (Kompas, Rabu 29 Maret 2000).

Republika menggambarkan korban pihak aparat keamanan dengan tanpa memberi kesan dramatik, "Perkelahian bukan cuma mengakibatkan kerugian material tetapi juga mengakibatkan dua petugas cedera. Serda marinir Solikhin dan Praka Rahman Slawi Lantamal Kodamar Kelapa Gading dan Kodam Jaya mendapat luka di telapak tangan." (Republika, 30 Maret 2000)

Ketidak berdayaan polisi di laporkan oleh Republika berdasarkan penjelasan Kapolda Metro Jaya Mayjen Polisi Nurfaizi, bahwa polisi memang terlambat mengantisipasi kerusuhan yang terjadi karena sejumlah warga menghalang-halangi. "

anggota polisi yang nekat menenankan warga malah diancam akan dibacok” (Republika, 3 April 2000).

Tidak legitimasinya aparat keamanan digambarkan oleh Republika dengan melaporkan ketidakadilan aparat dalam menangani konflik antar warga, berdasarkan laporan dari salah satu kelompok warga (Palmeriam) yang bertikai. Peran aparat kepolisian menurut warga dari salah satu kelompok ada pemihakan aparat keamanan terhadap satu kelompok.

Menurut Roy, warga Berlan nampaknya di atas angin karena dibeking aparat. “Polisi yang hendak mengamankan tidak mempan. Ketika gas air mata ditembakkan, mereka telah menyiapkan masker.” ungkapnya. “Sebaiknya kirim saja marinir untuk mengamankan. Jangan kirim polisi atau polisi militer. Biasanya warga segan terhadap marinir”. (Tawuran Pecah lagi di Matraman, Repulika, 3 April 2000).

Dominannya kekuasaan massa juga digambarkan dengan mengungkapkan imaji tidak berdayanya rezim pemerintahan lokal menghadapi permasalahan warganya. Ketidakberdayaan rezim pemerintah DKI Jakarta, secara langsung diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso

“Kita harus bisa mencari pokok permasalahannya. Peristiwa ini pasti ada biang keroknya. Masa kerusuhan yang menimbulkan kerugian ini kalian diamkan saja.” Kata Sutiyoso di depan wali kota Jakarta Timur dan jajarannya saat meninjau pertokan yang rusak dibakar massa di kawasan Jln. Matraman Raya, Rabu (5/4).- (Media Indonesia, 7 – April 2000)

Pernyataan ini juga dimuat oleh Republika dan Kompas. Menurut Gubernur, terjadinya tawuran tersebut merupakan tanggungjawab aparat bawahannya. “Masih dengan nada kesal di depan aparatnya, Sutiyoso menjelaskan, seharusnya dalam masalah ini dirinya tidak ikut campur, karena kewenangan mengatasi masalah di

setiap wilayah sudah menjadi tanggungjawab setiap wilayah” (Media Indonesia, 7 – April 2000)

Namun berbeda dengan Gubernur, Pejabat Keamanan mengungkapkan bahwa dalam kerusuhan ini tidak ada provokatornya. “ Kapolri Letjen Rusdihardjo menilai dalam bentrokan ini tidak ada unsur provokator yang memanasi-manasi warga untuk berantem.” (Republika, 5 April 2000).

Ungkapan kelemahan aparat keamanan juga diungkapkan Kompas melalui pakar Psikologi yang meminta aparat bisa bertindak lebih represif. Enoch Markum juga meminta polisi bertindak lebih represif untuk menuntaskan tawuran antar warga itu. "Kalau perlu tempatkan panser-panser di sana jika sudah ada indikasi akan terjadi tawuran," katanya. (Kompas, 3 April 2000)

Kompas, Media Indonesia dan Republika mengungkapkan ancaman Gubernur DKI Jakarta bahwa ia akan mencopot Walikota Jakarta Timur, Camat Matraman, Lurah Kebon Manggis dan Palmeriam jika bentrokan antar warga Matraman terulang lagi. Ancaman tersebut mendapat tanggapan anggota DPRD, yang menyatakan bahwa Gubernur agar tidak lepas tangan.

Menurut Ugiek, rencana Sutiyoso menjatuhkan sanksi terhadap bawahannya justru mengesankan ia hendak lepas dari tanggung jawabnya sebagai pengelola Ibu Kota. Rencana itu menggambarkan ia gagal mengelola Ibu Kota, namun tidak bersedia bertanggung jawab. (Kompas, 8 April 2000)

Menurut pendapat anggota DPRD tersebut yang harus mundur bukanlah para pejabat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan tetapi seharusnya pejabat yang tertinggi, yaitu Gubernurnya .

"Filosofinya, bila suatu negara atau organisasi mendapat prestasi maka yang mendapat penghargaan pemimpin tertingginya. Begitu juga sebaliknya, bila negara atau organisasi memperoleh catatan buruk maka pemimpinnya harus dapat sanksi. Mereka bisa mundur dari jabatannya," kata Ugiek. Soal Kisruh Matraman (Kompas, 8 April 2000).

Ketiga media mengkonstruksi imaji aparat keamanan sebagai tidak mampu menyelesaikan kerusuhan di Matraman. Artinya legitimasi pimpinan lokal dalam menagani kerusuhan tersebut sangat rendah. Delegitimasi pimpinan daerah juga disampaikan secara eksplisit dengan memuat informasi tentang pernyataan-pernyataan atau tuntutan agar pimpinan daerah yang tertinggi yaitu Gubernur diganti.

2. Tawuran Antar Pelajar

Peristiwa tawuran antar pelajar terus berlanjut sampai sekarang. Dari tahun 1997 sampai tahun 2000 di wilayah Polda Metro Jaya⁶⁶ terjadi sebanyak 672 kasus dengan akibat pelajar yang luka 577 dan tewas 74 orang serta kendaraan yang rusak sebanyak 1667 kendaraan. Pelaku yang ditangkap polisi sebanyak 7129 orang. Dari kecenderungan jumlah kasus pada tiap tahun tidak ada kecenderungan yang linier naik atau turun, dan tampak pula banyaknya kasus tidak berkorelasi dengan jumlah korban. Pada tahun 1998 terjadi 230 kasus dengan korban tewas 15 orang tetapi pada tahun 1999 kasus yang terjadi lebih sedikit sebanyak 193 tetapi korban yang tewas merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 32 orang. Tidak ada keterangan resmi hasil pengusutan atau pengadilan mengenai latar belakang peristiwa tawuran antar pelajar tersebut.

Media massa melaporkan peristiwa tersebut setiap kejadian yang timbul terutama apabila tawuran tersebut menimbulkan kerusakan dan korban. Dalam laporan tersebut diproduksi imaji berdasarkan hasil konstruksi para awak media. Apa yang terlihat adalah pertarungan kekuatan antar massa pelajar, dan dibalik penyajian itu terdapat rekonstruksi imaji konflik kekuatan ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat.

a. Ekonomi lemah versus Ekonomi Kuat.

Sama halnya dengan tawuran antara warga khususnya di lokasi-lokasi tertentu di Jakarta seperti kawasan Matraman dan Manggarai- Jakarta, tawuran antar pelajar sudah menjadi peristiwa rutin harian dan media massa melaporkan peristiwa itu sesuai dengan perspektif masing-masing. Apa yang disampaikan media merupakan akumulasi imaji dari ketidak berdayaan masyarakat kelas bawah karena dominasi “kekuatan” ekonomi atas, yang telah mempersempit ruang-ruang sosial, tempat para pelajar menyalurkan ekspresinya. Ketidak berdayan itu muncul dalam konflik-konflik horizontal yang terus berkelanjutan.

Apa yang terjadi dalam tawuran antar pelajar merupakan pertarungan antar massa dengan massa dalam upaya menunjukkan eksistensinya juga merupakan bentuk perlawanan dalam memperoleh ruang hidup mereka. Dalam kasus tawuran pelajar yang terjadi di salah satu sekolah, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta, STM Budi Murni di Pondok Gede Jakarta. Akumulasi imaji konflik diartikulasikan

⁶⁶ Dilaporkan oleh Berita Buana, 22 September 2000 dalam judul berita “Perkelahian

baik dalam judul berita maupun isinya. Dalam *Lead* berita Republika terungkap “ Jakarta—Perkelahian pelajar makin menjadi. Sedikitnya lima ratus pelajar dua STM di Jakarta Timur menyerbu STM Budi Murni di Jl. Raya Hankam. Pondok Gede, Jakarta Timur. Seorang tewas dua luka berat dan 37 lainnya cedera. (Republika, 3 Desember 1999).

Ungkapan “semakin menjadi” menunjukkan ada fenomena yang sama dengan fenomena dari peristiwa sebelumnya. Kata menjadi mengandung makna adanya akumulasi perkelahian pelajar itu semakin besar baik dalam frekuensi maupun intensitasnya. Media Indonesia juga selain mengungkapkan laporan yang terjadi saat peristiwa berlangsung, juga merujuk pada peristiwa lain yang terjadi pada pekan itu. Setelah *lead* berita ditulis “Sebelumnya tiga pelajar juga tewas, yakni Gunawan, 18, pelajar CMU YPM, Irwan, 19; Rustam, 18, di Jaktim” (Media Indonesia, 3 Desember 1999).

Republika memuat informasi rangkaian fenomena tawuran ini dibagian akhir sebagai rujukan ungkapan “semakin menjadi” dengan melaporkan peristiwa sejenis lebih rinci dengan menyebutkan hari peristiwa, pihak-pihak yang terlibat dalam tawuran.

Kompas menyebut sumber dokumentasi dengan mengungkapkan perbandingan dengan tawuran-tawuran sebelumnya, dan menyimpulkan bahwa tawuran kali ini, dengan melakukan penyerbuan ke dalam kelas, merupakan intensitas baru dalam tawuran. Biasanya tawuran terjadi di jalan-jalan umum dan baru

Antar Pelajar Sulit Diredam”, berdasarkan sumber Polda Metro Jaya.

kali ini terjadi dengan melakukan penyerbuan ke kelas. “Dalam catatan Kompas, serbuan pelajar lain ke sekolah dan menyerbu hingga masuk ke dalam kelas baru pertama kali terjadi. (Kompas, 3 Desember 1999).

Imaji konflik antar massa dalam peristiwa yang terjadi diungkapkan dalam artikulasi perlawanan antara dua posisi dimana satu kelompok menyerbu dan menyerang dan kelompok lainnya sebagai pihak yang diserang yang kemudian melakukan perlawanan. Penggunaan kata menyerbu dan menyerang dilakukan oleh tiga media baik dalam judul maupun dalam isinya.

Judul berita, Media Indonesia mengungkapkan:

“Ratusan Pelajar Serbu STM Budi Murni - Satu Tewas saat Sembunyi di Kamar Mandi” (Media Indonesia, 3 Desember 1999).

Republika menulis

“1 Pelajar Tewas, STM Budi Murni Diserbu”

Sedangkan Kompas menulis

“Pelajar Serbu Kelas, Deni Tewas”

Judul-judul ketiga media tersebut sama-sama menunjukkan adanya kelompok yang menyerbu dan diserbu serta korban. Media Indonesia menggunakan pelajar yang melakukan penyerbuan sebagai subyek dalam kalimat aktif. Struktur ini memberikan imaji dominan pada pihak penyerbu dan STM Budi Murni ada pada posisi pasif, tidak memiliki permasalahan. Kompas, walau pun dengan struktur yang sama tidak menyebutkan identitas pelajarnya. Penggunaan kelompok tanpa nama ini mungkin merupakan upaya agar tidak memberikan pengaruh kepada para pelajar

lainnya untuk memperluas konflik. Republika tampak menggunakan kalimat pasif, dengan penggunaan kalimat tersebut memberikan perhatian pada korban sebagai pihak yang tidak berdaya.

Walau pun dalam judul berita tidak menyebutkan identitas kelompok penyerbu, Media Indonesia mengungkapkan jumlah penyerbu yang mencapai ratusan dan berasal dari tiga STM kawasan Jl. Raya Bogor dengan tanpa menyebutkan namanya sekolahnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh *Media*, pukul 10.00, ketika sejumlah pelajar STM Budi Murni sedang mengikuti pelajaran, tiba-tiba datang serangan ratusan pelajar. Para penyerbu berasal dari tiga STM kawasan Jl Raya Bogor. Mereka menyerbu kelas-kelas sekolah itu. (Media Indonesia, 3 Desember 1999)

Sedangkan Republika hanya menyebut ratusan pelajar STM di Jakarta Timur. Kompas walau pun pada *lead* berita hanya menyebut ratusan pelajar gabungan dari sekolah kejuruan, pada isi berita, menyebut sekolah penyerangnya berdasarkan sumber pejabat keamanan.

Polisi yang tiba di lokasi dalam waktu singkat berhasil menangkap delapan orang pelajar penyerang. Tetapi hanya mendapatkan satu bilah clurit sebagai barang bukti. Mereka berasal dari SMK Penerbangan dan SMK Pangbudi Rahayu. Pelaku lainnya sedang kita cari. Kata Kapolsek Cipayung, Ngatemin. (Kompas, 3 Desember 1999).

Tentang apa yang dilakukan para penyerang, Media Indonesia mengungkapkan “ Mereka mengacungkan senjata tajam sambil memburu pelajar STM Budi Murni yang kocar kacir melarikan diri. Selain melukai pelajar, mereka juga menjungkirbalikkan kursi dan meja. (Media Indonesia, 3 Desember 1999)

Kompas mengungkapkan “Merdeka tidak hanya melempari dan merusak sekolah namun ratusan pelajar brutal itu juga menyerbu ke dalam kelas dan melukai dua orang pelajar (Kompas, 3 Desember 1999). Berdasarkan sumber polisi, Kompas lebih lanjut mengungkapkan “sekitar 200 pelajar gabungan itu berlangsung sangat singkat. Hanya sekitar 10 menit,” katanya. (Kompas, Kompas, 3 Desember 1999).

Ketiga media berbeda dalam melaporkan korban penyerbuan. Media Indonesia mengungkapkan.

Nasib naas dialami Deny. Dia mencoba menyelamatkan diri ke kamar mandi. Tetapi, pelajar STM yang menggunakan senjata tajam terus memburunya. Pintu kamar mandi yang ditutup Deny didobrak. Dalam kondisi terjepit, Deny dibacok dan dipukuli ramai-ramai. (Media Indonesia, 3 Desember 1999).

Deny Chandra mengalami luka-luka pada bagian punggung, akibat tusukan senjata tajam. Siswa STM Budi Murni sempat dilarikan ke rumah sakit Haji Pondok Gede. Tetapi karena darah terus mengucur, akhirnya Deny tidak tertolong lagi. (Media Indonesia, 3 Desember 1999)

Dua kutipan ini mengungkapkan proses kekerasan yang dilakukan dan akibat kekerasan yang menewaskan korban. Korban digambarkan dalam posisi sembunyi di kamar mandi kemudian “dibacok dan dipukuli beramai-ramai”. Imaji visual yang digambarkan secara naratif, diungkapkan dengan memberikan tingkat kekerasan dan kengerian. “luka-luka dibagian punggung akibat tusukan benda tajam” dan “darah terus mengalir”.

Sedangkan Republika mengungkapkan setting peristiwa yang berbeda dengan Media Indonesia dimana Republika mengungkapkan bahwa “korban meninggal setelah dihajar habis di sampain WC”.

Korban tewas tercatat atas nama Denny Chandra, 18 tahun. Dia meninggal setelah dihajar habis pelajar penyerbu di samping WC sekolah. Heryanto dan Wahyudin mengalami patah tulang dan luka bacok dikepala. Sedang 37 lainnya cedera terkena lemparan batu. (Republika, 3 Desember 1999).

Kata “dihajar habis” mengungkapkan juga merupakan gambaran kekerasan bahasa yang digunakan media. Dihajar memiliki makna bahwa korban ada pada posisi kurang ajar, yang perlu diajar secara fisik. Dengan artikulasi ini secara tidak sadar telah diungkapkan bahwa pelajar STM yang menjadi sasaran penyerbuan ada pada pihak yang didominasi Sumber Informasi Republika tentang tewasnya Denny diperoleh dari Romi, pengurus sekolah. “Menegenai korban jiwa, Romi menjelaskan saat itu Deny hendak melarikan diri lewat belakang. Dia lari kesamping WC. Lantaran licin, Deny terpeleset. Saat dia tertangkap oleh puluhan penyerang yang datang membawa senjata tajam. (Republika, 3 Desember 1999).

Apa yang dilakukan oleh pelajar STM Budi Murni sebagai kelompok yang diserbu, diungkapkan Republika ialah mencoba membalas serangan. “ Mendapat serangan tiba-tiba ke dalam sekolah, pelajar STM Budi Murni kocar kacir. Mereka mencoba keluar kelas dan membalas serangan. Sebagian mencoba melarikan diri lewat belakang. (Republika, 3 Desember 1999).

Kompas tidak mengungkapkan setting peristiwanya, dan hanya menyebut Deny dibacok dan pembacokan ini merupakan kebrutalan tawuran. “Kebrutalan tawuran itu ditandai dengan dibacoknya Dani dan Wahidin oleh penyerang. Melihat darah bersimbah dari tubuh ke dua korban, para penyerang akhirnya melarikan diri. (Kompas, 3 Desember 1999).

Dalam kasus tawuran di Bogor, antara kelompok pelajar dari Jakarta dengan kelompok pelajar di Bogor, yang telah mengakibatkan tewasnya 15 pelajar dari Jakarta. Akumulasi imaji bahwa kerusuhan merupakan peristiwa yang sering terjadi terlihat dalam artikulasi berikut:

Tawuran Jumat lalu, berlangsung di Jalan Merdeka- Dr Semeru. Usai sekolah, rombongan siswa SMK Pelayaran berangkat ke Bogor menggunakan KRL. Setibanya di Bogor, rombongan menuju Merdeka Mall di Jalan Merdeka, dan langsung ke arah Jalan Semeru untuk mencegat siswa STM Penerbangan.

Keterangan waktu, tawuran Jum'at lalu menunjukkan ada banyak tawuran sebelumnya dan pada Jum'at yang lalu terjadi di Jln. Merdeka. Laporan Kompas mengungkapkan akumulasi imaji tersebut dengan melaporkan keikutsertaan warga dalam tawuran pelajar. "Sejumlah warga yang melihat aksi siswa dari Jakarta itu, lalu turut membantu siswa Bogor". Laporan ini berbeda dengan laporan Media Indonesia yang mengungkapkan bahwa warga masyarakat berusaha untuk melerainya, bukan membantu pelajar Bogor ketika tawuran dengan pelajar Jakarta.

Pada saat tawuran yang melibatkan ratusan pelajar itu, ada yang saling melempar dan bahkan ada yang menggunakan senjata tajam. Melihat keadaan itu, masyarakat setempat keluar untuk berusaha meredam perkelahian, tutur Kapolresta. (Media Indonesia, 29 Maret 1999)

Apa yang dilakukan terhadap pelajar Bogor dan warga yang berusaha melerainya, menggambarkan imaji bahwa pelajar sebagai pihak yang tidak bisa dikendalikan. Mereka tidak berhasil menembus STM Penerbangan sehingga tawuran terhindarkan. "Akhirnya mereka membabi buta menyerang setiap pelajar yang terdapat di Angkot

dan menganiaya penumpang yang mencoba melerainya" ujar Kapolresta. (Indonesia Indonesia, 30 Maret 2000).

Republika menyebut bahwa warga setempat setelah melihat ada perkelahian, berusaha meredam tawuran tersebut, dan tidak melaporkan adanya penganiayaan terhadap warga yang berusaha meredam perkelahian. Pada saat tawuran yang melibatkan ratusan pelajar itu, ada yang saling melempar dan bahkan ada yang menggunakan senjata tajam. Melihat keadaan itu masyarakat setempat keluar berusaha meredam perkelahian. (Republika, 29 Maret 1999.).

Jumlah dan penyebab tewasnya para pelajar mendapat perhatian media, sebagaimana tercermin dalam judul dan *lead* berita masing tiga media. Kompas membuat judul dan *lead* berita pada kesempatan pertama sbb:

15 Pelajar Tewas Tenggelam di Sungai Cisadane

Bogor, Kompas

Lima belas siswa dari SMK Pelayaran di Jakarta tenggelam di sungai Cisadane di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Bogor. Ke 15 siswa itu menceburkan diri ke sungai untuk menghindari dari kejaran siswa STM Penerbangan, Semplak, Bogor dan warga, menyusul tawuran antara siswa kedua sekolah tersebut, hari Jumat (26/3)--(Kompas, 29 Maret 1999).

Dalam judul berita tidak menunjukkan adanya konflik, dan hanya mengungkap faktor yang menarik secara emosional, yaitu tewas tenggelam. Namun demikian dalam isinya terungkap ada konflik antara dua kelompok pelajar yaitu siswa SMK Pelayaran di Jakarta dengan siswa STM Penerbangan. Pihak yang mengejar ialah STM Penerbangan. Bogor.

Media Indonesia memuat judul dan *Lead* berita sbb:

16 Pelajar Tewas di Sungai Cisadane

Bogor – (Media) Sedikitnya enam belas pelajar asal Jakarta, Minggu, ditemukan tewas tenggelam di sungai Cisadane, Bogor. Empat belas mayat sudah ditemukan, sementara dua lainnya, hingga kemarin malam, belum dikirim ke RSUD PMI Bogor. (Media Indonesia, 29 Maret 1999).

Dalam *lead* dan judul berita dan isinya sama sekali tidak terlihat gambaran ada dua kelompok yang sedang konflik. *Lead* beritanya mengungkapkan hanya pada faktor korban dari peristiwa. Namun dengan judul berita tersebut, bisa menciptakan imaji pembaca tentang apa yang terjadi. Berbeda dengan Kompas dan Media Indonesia judul berita Republika, dalam judul berita sudah menyebut peristiwa dan akibat yang ditimbulkan.

Usai Tawuran, 15 Pelajar Tewas Tenggelam

Bogor --- Sedikitnya 15 pelajar Sekolah Pelayaran Menengah (SPM) Baruna dan Aditama, Jaktim tewas tenggelam di sungai Cisadane, Bogor. Mereka ditemukan mengambang dan sudah tak bernyawa oleh penduduk setempat, Ahad kemarin. (Republika, 29 Maret 1999).

Dalam judul terungkap ada dua peristiwa, tawuran dan tenggelamnya 15 pelajar sehingga tewas setelah melakukan tawuran. Republika mungkin ingin memberikan imaji pengaruh negatif dari tawuran, yaitu menimbulkan korban..

Mengenai tawuran yang dilakukan pelajar, media mengkonstruksi imaji yang berbeda di satu pihak membuat imaji bahwa tawuran itu merupakan kelanjutan dari penyebab yang sepele berupa pemukulan antar pribadi. Di pihak lain tawuran yang terjadi dirancang dengan tujuan tertentu untuk membuat kerusuhan di daerah Bogor. Kompas membuat bingkai bahwa tawuran dipicu oleh perkelahian antar seorang siswa STM Penerbangan Bogor dengan seorang SMK Pelayaran Jakarta.

Menurut Kapolresta Bogor Letkol (Pol) Edmon Ilyas, yang didampingi Kapolsek Bogor Barat Lettu (pol) Sapuan Riyanto, tawuran antara siswa SMK Pelayaran di Jakarta dengan siswa STM Penerbangan Semplak itu dipicu oleh perkelahiaan antara seorang siswa SMK Pelayaran Jakarta dan seorang siswa STM Penerbangan Semplak Bogor, 20 Maret lalu.)--- (Kompas, 29 Maret 1999)

Media Indonesia membuat bingkai bahwa tawuran yang terjadi ada yang mengendalikan, bahwa mereka datang ke Bogor untuk menyerang sekolah di Bogor karena disuruh dan dibayar. Media Indonesia tidak menyebut siapa yang membayarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara para pelajar itu mengaku disuruh oleh seorang yang tidak dikenalnya dengan imbalan Rp.20.000 per orang. " Kami diberi uang oleh orang itu Rp. 20.000,- disuruh menyerang sekolah di Bogor dengan naik KRL, kata seorang pelajar yang kini masih ditahan. (Media Indonesia, 29 Maret 1999)

Sejalan dengan itu dalam teks lain, Media Indonesia mengungkap pernyataan pejabat di bidang pendidikan, yang menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa sejak awal kejadian menunjukkan keanehan. Jarak antara peristiwa awal dengan penyerangan ke Bogor selama sebelas hari.

Dalam laporan yang diperolehnya, Indrajati masih mempertanyakan awal kejadian. Data yang masuk menyebutkan pada 13 Maret seorang pelajar SPM dipukul yang belum diketahui asal sekolahnya. Pelajar SPM yang menjadi korban baru mengadu kepada teman-temannya pada 24 Maret . " Ini perlu dipertanyakan. Kenapa melapor setelah sebelas hari kena pukul," tandasnya. (Media Indonesia, 31 Maret 1999).

Koheren dengan ungkapan itu, Republika dengan mengutip sumber kepolisian mengemukakan ada dugaan mereka disuruh untuk membuat kerusuhan di Bogor.

Menurut sumber kepolisian Bogor, diduga para pelajar ke Bogor itu bukan maksud pribadi, tapi ada pihak yang mempengaruhi. "Kepolisian sudah mencium bahwa mereka ada yang menyuruh, dengan tujuan membuat

keusuhan di Bogor. "Dalam waktu dekat polisi akan mengungkap," jelasnya.
(Republika, 29 Maret 1999).

Dalam teks lain, Republika mengungkapkan bahwa para pelajar yang datang ke Bogor karena terpancing oleh isu yang tidak benar.

....para pelajar dari tiga sekolah – SPM Adhitama, SPM Baruna dan SPM Karya Darma – itu datang ke Bogor setelah diberitahu oleh AG bahwa temannya AR baru digebuki siswa STM Penerbangan, Semplak, Bogor. "Padahal itu hanya isu dan setelah di cek tidak benar," kata Edmon. (Republika, 30 Maret 1999)

Sesuai dengan dua imaji yang terbentuk dalam liputan mengenai tawuran pelajar, tewasnya pelajar pun menunjukkan dua imaji: para pelajar itu tewas merupakan musibah, mereka tewas tenggelam karena arus deras setelah mereka menceburkan diri ke sungai Cisadane. Sesuai dengan imaji yang dibentuk Kompas, tewasnya pelajar tersebut diungkapkan dengan menceburkan diri.

"Mereka tewas akibat berupaya menyelamatkan diri dari kejaran petugas, massa dan pelajar, dengan cara menceburkan diri ke sungai yang justru berakibat fatal. Kalau mereka tak kabur, kemungkinan besar justru selamat, tak tewas seperti 41 temannya yang kami periksa di Polresta Bogor," kata Edmon. Kompas, (Kompas, 30 Maret 1999)

Sama halnya dengan Kompas, Media Indonesia juga mengungkapkan laporan polisi bahwa tewasnya pelajar tersebut merupakan musibah karena bermaksud menyelamatkan diri tetapi malah tidak selamat karena tenggelam di sungai Cisadane. Sedangkan menurut Republika, ialah dalam rangka melarikan diri setelah menganiyaya beberapa pelajar dan penumpang di angkutan umum.

Tewasnya pelajar dari ketiga SPM Jakarta di Sungai Cisadane jelas Edmon, murni musibah. Mereka melarikan diri setelah menganiyaya beberapa pelajar dan penumpang kendaraan angkutan umum (angkot) 06 jurusan Semplak –

Parung dan merusak sebuah angkot (Media 29/3).--- (Media Indonesia, 30 Maret 2000).

Berbeda dengan kedua media di atas Republika melaporkan sebab-sebab mereka tewas berdasarkan sumber pelajar yang selamat. Republika mengawali beritanya dengan satu imaji bahwa peristiwa tersebut masih perlu diungkap kembali apa yang menyebabkan terjadi, dengan pernyataan “Tragedi Cisadane menyimpan tanda tanya”.

Menurut kesaksian Sugyono – Salah seorang pelajar yang selamat -- kematian rekan-rekannya bukan semata-mata karena tak bisa berenang. Sebab diseberang sungai Cisadane ternyata sudah ada seorang lelaki kekar bertato dan bercelana jeans yang siap memukuli rekan-rekannya yang berhasil menyeberang sungai. (Republika, 30 Maret 1999).

Ungkapan ini menyimpan tanda tanya, mungkin akan menimbulkan imaji kepada pembaca bahwa ada penyebab lain dari kematian para pelajar. “Seorang lelaki kekar bertato” yang diungkapkan oleh pelajar yang selamat sebagai orang yang menyebabkan kematian pelajar merupakan simbol kriminal.

Fenomena tawuran pelajar yang diungkapkan media menunjukkan akumulasi imaji kekerasan, merepresentasikan solidaritas anggota kelompok serta identitas kelompok. Terhadap fenomena itu, media mengungkapkan adanya protes terhadap lingkungan selain untuk aktualisasi diri juga untuk memperjuangkan hapusnya sumber-sumber penyebab ketidakberdayaan ekonomi. Media Indonesia, dalam konteks ini mengangkat pernyataan Yuwono Sudarsono yang dihubungi terpisah saat peluncuran home page KARIRnet. Menurutnya “tragedi Bogor sebagai akibat dari

ungkapan gejala kolektif, solidaritas kelompok sekolah yang memicu perang antar sekolah". (Media Indonesia: 31 Maret 1999)

Ungkapan mengenai tawuran pelajar juga mengarah pada ungkapan yang menunjukkan lemahnya legitimasi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan media sebagaimana dinyatakan oleh editorialnya.

Agresifitas mereka bukan sekedar melumpuhkan kawan tetapi mengenyahkan (lawan). Yang mengherankan, dunia pendidikan kita tetap berjalan seperti itu-itu juga dari tahun ke tahun. Seperti tak ada upaya mengatasi problem yang amat serius itu. Kualitas pendidikan kita makin melorot, sebaliknya agresivitas untuk saling mengenyahkan makin meningkat. (Editorial, Media Indonesia, 31 Maret 1999).

Menurut Media Indonesia agresifitas pelajar telah meningkat dan pemerintah seperti tidak ada upaya untuk mengatasinya. Ketidakseriusan pemerintah dalam masalah pendidikan diungkapkan oleh media sebagai aspek yang menyebabkan meningkatnya agresifitas pelajar, dengan tidak memperhatikan ruang bagi pelajar untuk melakukan olah raga dan olah jiwa. Dalam media hal ini terjadi pergeseran prioritas dimana kekuasaan ekonomi material menggeser ruang-ruang untuk pendidikan yang seharusnya akan menjadi ruang bagi mengembangkan agresifitas pelajar ke arah positif.

Teramat jelas, selama Orde Baru, dunia pendidikan seperti dibiarkan menjadi potret buram. Bangunan-bangunan sekolah tak lagi memenuhi syarat sebagai tempat belajar. Sangat sedikit sekolah yang memiliki sarana memadai untuk olah jiwa dan olah raga. Lihat saja sekolah kita yang sempit dan tak nyaman. Tanah yang luas selalu diprioritaskan untuk sentra-sentra ekonomi. Ruang bagi agresivitas mereka sebagai orang muda terkunci. (Editorial, Media Indonesia, 31 Maret 1999).

Selain dominasi ekonomi (material), dalam dimensi struktural berupa kebijakan dalam menetapkan prioritas pendirian fasilitas sekolah, juga meningkatnya agresifitas seseorang terkait pada peran para agen yaitu guru-guru dalam melakukan tugas mengajar. Kualitas guru digambarkan oleh Media akan terkait pada gaji yang diterima dan sistem pencarian (rekrutmen) dan pengembangannya.

Sementara itu, guru-guru tak lagi menjadi profesi yang bergengsi. Mereka seperti tak layak mendapat gaji memadai. Logikanya, para guru yang punya tugas mencerdaskan bangsa, seharusnya dijamin dari lulusan terbaik dan diberi gaji yang tinggi. (Editorial, Media Indonesia, 31 Maret 1999).

Ketidak berdayaan masyarakat diungkapkan oleh media dengan mengungkapkan pernyataan keluarga korban, dimana ditunjukkan perilaku perorangan para pelajar tidak sesuai dengan apa yang terjadi.

NAMAT, warga kelurahan Cipayung Jakarta Timur, bersama menantu dan anak perempuannya Minggu (28/3) siang pasrah menghadapi kenyataan anak bungsunya, Rizal, yang terbaring kaku di kamar jenazah RS Palang Merah Indonesia (PMI) Bogor. Anak laki-laki satu-satunya dari lima bersaudara itu ditemukan tewas bersama sekitar 12 jenazah lainnya, yang hari Minggu ditemukan warga setempat di Sungai Cisadane, di belakang Bogor Golf Club (BGC), Bogor Barat. (Kompas, 30 Maret 1999)

Tawuran antar pelajar dilaporkan media dalam plot datar sebagai peristiwa rutin, kekerasan antara massa dengan massa. Gambaran dramatis dalam metafor perang peristiwa tawuran pelajar mengkonstruksi imaji hilangnya ikatan sosial dan rasa kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan adanya imaji dominasi kekuasaan yang mempersempit bahkan menghapus ruang sosial tempat seharusnya pelajar menyalurkan ekspresi di usia remaja. Dominasi kekuatan material ini telah menggeser

ruang sosial sehingga tawuran pelajar sulit diakhiri, dan ketidak berdayaan aparat represi negara dalam melakukan pencegahan terhadap tawuran pelajar.

3. Kesimpulan

Dalam kerusuhan berupa tawuran antar warga masyarakat dan antar pelajar diskursus media memproduksi imaji pertarungan antar kekuasaan ekonomi lemah dengan kekuasaan ekonomi kuat serta antar kekuasaan yang melegitimasi rezim dengan mendelegitimasi rezim pemerintah. Kerusuhan antar warga merupakan konflik di antara warga masyarakat kelas ekonomi lemah. Diantara mereka berebut lahan ekonomi, sehingga tawuran yang terjadi menjadi simbol ketidak berdayaan mereka dalam seting perkembangan kekuatan ekonomi di sekitar wilayah tersebut. Selain menunjukkan eksistensi keberadaan kelompok masyarakat ekonomi lemah secara laten juga menunjukkan perlawanan terhadap simbol kekuatan ekonomi kuat. Aksi mereka tidak saja diarahkan kepada sasaran warga yang oleh mereka dianggap kompetitornya tetapi juga diarahkan terhadap gedung dan fasilitas perdagangan yang merupakan simbol kckuatan ekonomi kuat yang tidak ada kaitan dengan konflik nyata yang mereka alami.

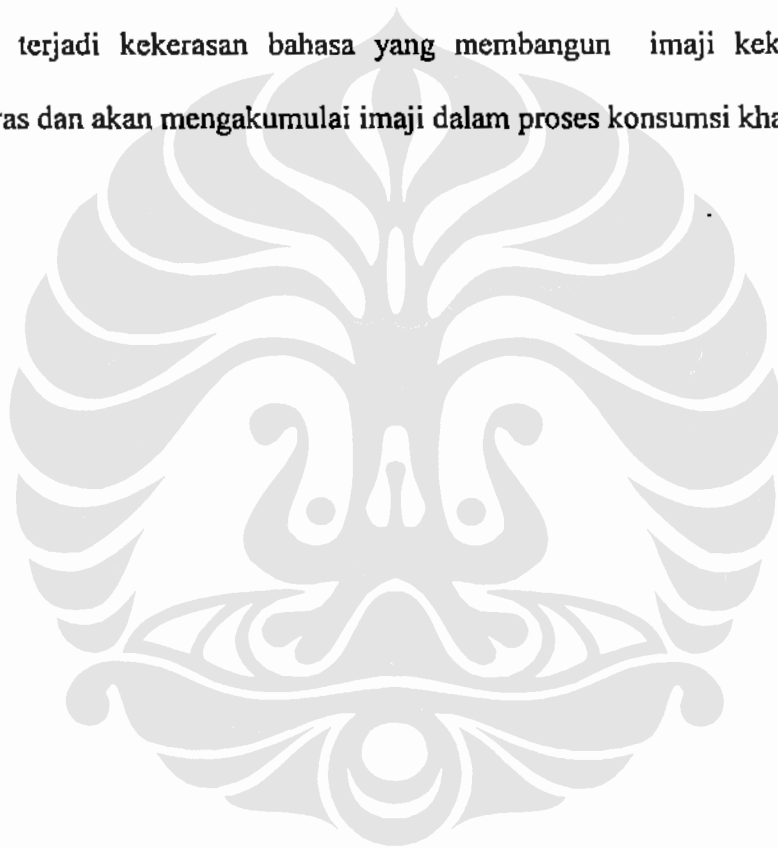
Akumulasi imaji perjuangan kelompok ekonomi lemah dalam media di kembangkan dengan menggambarkan secara naratif peristiwa yang terjadi sebagai lokus diskursif dan ungkapan-ungkapan nara sumber yang menjelaskan akibat yang terjadi dan sebab-sebab yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut. Dalam pertarungan tersebut tampak akumulasi imaji yang terjadi memberikan nilai tambah

(*surplus value*) imaji berupa kekhawatiran dan keputusasaan dan ketidak pastian kelompok ekonomi lemah menghadapi dominasi kekuatan ekonomi kuat.

Sejalan dengan imaji tersebut, media juga memproduksi imaji pertarungan antar kekuasaan yang melegitimasi dan mendelegitimasi rezim pemerintah. Dalam konteks ini peristiwa kerusuhan yang terjadi dihubungkan dengan peranan aparat keamanan dan birokrasi pemerintahan lokal. Kerusuhan yang terjadi sebenarnya sudah berulang, sehingga terulangnya kerusuhan tersebut, diproduksi menjadi imaji kegagalan pemerintahan. Dalam konteks ini terjadi pertarungan bingkai tentang pimpinan yang harus mundur yaitu satu pihak menghendaki yang perlu mundur adalah pimpinan di tingkat bawah dan di pihak lain pimpinan di tingkat puncak pemerintahan daerah.

Imaji yang diproduksi dalam liputan kerusuhan antar pelajar ada kesamaan dalam liputan kerusuhan antar warga, yaitu imaji pertarungan kekuasaan antar kekuatan ekonomi lemah dengan kuat dan pertarungan antara kekuasaan yang menglegitimasi dan delegitimasi rezim pemerintah. Agresifitas pelajar merupakan konsekwensi berubahnya tataruang yang lebih banyak memberikan tempat bagi pengembangan ekonomi yang memfasilitasi para pengusaha besar dalam mengakumulasi kapitalnya. Sementara itu ruang-ruang publik seperti taman dan lapangan bermain dan berolah raga tergusur. Itulah bingkai yang dikembangkan media, yang menunjukkan dominannya kekuasaan ekonomi. Hal ini tidak lain karena difasilitasi oleh kebijakan pemerintah dalam merancang dan mengaplikasikan tataruang di ibu kota. Hal terakhir ini yaitu belum teratasinya tawuran antar pelajar

mendelegitimasi rezim pemerintah. Dalam mempresentasikan peristiwa kerusuhan sosial, media memberikan imaji bahwa tawuran diantara pelajar kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat. Imaji kekerasan yang dilakukan olah pelajar berakumulasi menjadi nilai “kebrutalan, kengerian dan rasa khawatir” dan dipihak kompetitor nya bisa membangun imaji yang bisa memicu perlawanan. Dalam kontcks ini terjadi kekerasan bahasa yang membangun imaji kekerasan nyata semakin keras dan akan mengakumulai imaji dalam proses konsumsi khalayaknya.



BAB VI

IDEOLOGI DAN PERTARUNGAN SUMBERDAYA KEKUASAAN.

Ideologi dan implementasinya dalam praktek media massa menjadi landasan kemana orientasi media diarahkan. Dalam analisis di bawah ini ideologi yang dimaksud ialah ideologi kapitalisme dan yang menjadi permasalahan ialah bagaimana artikulasinya dalam diskursus kerusuhan sosial. Untuk itu akan dikemukakan bagaimana karakteristik artikulasi kapitalisme meliputi produk, akumulasi dan sentralisasi kapital baik material maupun simbolik. Dalam artikulasi tersebut hubungan kekuasaan apa yang diproduksi media. Kedua isu tersebut akan dijelaskan dalam analisis dan interpretasi dari dimensi ontology, tekstual, genealogi dan epistemology sebagai berikut:

1. Dimensi ontologi dan tekstual

Secara ontologis telah terjadi kerusuhan di Indonesia yang kuantitas dan kualitasnya cukup tinggi. Dari tahun 1991 sampai 2000 terdapat 1050 insiden (Jayadi, 2001). Diantara kasus tersebut ialah kerusuhan di Tasikmalaya, Semanggi II, Cibadak Mall (Cimol) dan Glodok Plaza serta kerusuhan antar warga dan antar pelajar merupakan ekspresi konflik dalam masyarakat baik horizontal maupun vertikal. Kerusuhan yang terjadi di Tasikmalaya berupa aksi massa yang merusak pertokoan dan fasilitas umum sebagai buntut dari pemukulan pengajar pesantren oleh polisi di kantor polisi. Kerusuhan Semanggi II merupakan konflik nyata yang terjadi secara

vertikal antar massa demonstran dengan aparat keamanan. Dalam kerusuhan ini massa mahasiswa dan masyarakat berdemonstrasi untuk menuntut agar RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang sedang dibahas di DPR tidak disetujui menjadi UU. Bentrok fisik terjadi antara massa demonstran dengan aparat keamanan.

Kerusuhan Cibadak Mall merupakan konflik nyata diantara warga masyarakat yaitu pedagang kaki lima dengan masyarakat pemukiman di sekitar pasar tempat pedagang kaki lima. Sedangkan kerusuhan di Glodok Plaza merupakan konflik nyata antara para pedagang kaki lima yaitu penjual VCD dengan aparat keamanan. Kekerasan yang terjadi berupa penghancuran dan pembakaran tempat dagangan mereka yang merembet ke pertokoan Glodok Plaza. Kerusuhan antar warga dengan antar pelajar berupa kekerasan masal yang terjadi sesama warga dan sesama pelajar. Dalam peristiwa ini kelompok warga masyarakat saling menyerang kemudian peristiwa ini merembet ke pengrusakkan sarana umum dan pertokoan di sekitarnya.

Secara tekstual kerusuhan-kerusuhan tersebut dalam suratkabar diproduksi, diakumulasi dan disentralisasi dalam berbagai konflik yang lebih luas sebagai konflik simbolik yang mengungkapkan beberapa pertarungan kekuasaan. Artinya dalam tataran simbolik juga terjadi proses komoditisasi konten komunikasi kemudian proses akumulasi sebagaimana dalam tataran kapital (material). Isi komunikasi sebagai komoditas terbentuk melalui proses produksi, dimana nilai komoditas tersebut tidak saja hanya memiliki nilai pakai, tetapi juga nilai pertukaran (*exchange value*).

Komoditas memiliki nilai pakai manakala produk tersebut dipakai atau digunakan untuk kebutuhan sendiri, sedangkan sebagai nilai pertukaran, suatu komoditas akan memiliki nilai manakala dari suatu pertukaran produk diperoleh nilai lebih. Produk yang dimaksud adalah produk dalam arti luas tidak saja produk material tetapi juga pengetahuan, hubungan sosial, kultural. Proses produksi dan sistimatisasi pertukaran nilai ekonomi merupakan hal yang esensial dan faktanya secara ekonomi politik telah mentransmutasi semua nilai (buruh, pengetahuan, hubungan sosial, kultur, alam) ke dalam nilai pertukaran ekonomi (Baudrillard, 1998:133).

Dalam konteks ini, maka konflik nyata antar anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan aparat pemerintah telah menjadi komoditas ekonomi politik yang memiliki nilai tukar ekonomi. Peristiwa kerusuhan sosial sebagai dimensi ontology bagi media, dalam dimensi tekstual berkembang menjadi artikulasi-artikulasi yang menyiratkan imaji konflik yang lebih luas sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai tukar (*exchange value*) kepada khalayak. Imaji pertarungan antar kekuasaan yang terungkap merupakan suatu *common sense* masyarakat yang akan menarik perhatian masyarakat. Dari kasus-kasus kerusuhan di Tasikmalaya, demonstrasi menentang Rencana Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) atau juga disebut kasus Semanggi II, kerusuhan sekitar Cibadak Mal dan Glodok Plaza serta Tawuran warga dan pelajar, mengungkapkan ada beberapa *common sense* sebagai berikut :

Tabel 5

***Common Sense* Yang Diproduksi Media Tentang
Peristiwa Kerusuhan Sosial**

<i>Common Sense</i>			Peristiwa kerusunan
Mayoritas	Versus	Minoritas	Tasikmalaya
Ekonomi Kuat	Versus	Ekonomi lemah	Tasikmalaya, Glodok dan Cibadak Mal, Tawuran Warga dan Pelajar
Legitimasi Rejim	Versus	Delegitimasi rejim	Tawuran Warga dan Pelajar, Semanggi II (RUU PKB)
Elit Penguasa	Versus	Massa	Tasikmalaya
Elit	Versus	Elit	Tasiklamaya
Militer	Versus	Sipil	Semanggi II (RUU PKB)

Dari *Common sense* yang diproduksi dan dijual kepada pembaca menyiratkan bahwa media telah menjadi jaringan dalam pertarungan kekuasaan dengan mengakumulasi kapital politik dan kapital ekonomi, yang keduanya saling terkait.

a. Perebutan Kapital Politik

Suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat merupakan ladang yang terbuka bagi media untuk memproduksi bermacam-macam imaji dan dijual kepada masyarakat baik dalam dimensi politik maupun ekonomi atau dua-duanya. Dalam liputan peristiwa kerusuhan Tasikmalaya tampak berkembang beberapa imaji berupa *common sense* pertarungan antara mayoritas dengan minoritas pemeluk agama, rejim dengan rakyat, elit penguasa dengan massa, elit dengan elit.

Common sense konflik antara mayoritas dengan minoritas kelompok umat agama yang direpresentasikan dalam kerusuhan di Tasikmalaya diikuti oleh teks lain

yang menunjukkan adanya imaji perebutan posisi di pemerintahan. Republika dan Kompas tampaknya di awal peristiwa terjadi memberikan imaji bahwa kerusuhan tersebut tidak berlatar belakang agama. Sementara aparat keamanan mengklaim bahwa dalam kerusuhan yang terjadi pesantren tidak terlibat dan kerusuhan tersebut dilakukan oleh perampok, preman dan garong sebagai tindakan kriminal. Media Indonesia secara eksplisit mengungkapkan kerusuhan tersebut berlatar belakang masalah agama. Pejabat pemerintah dan politisi mengklaim bahwa kerusuhan tersebut merupakan gerakan untuk melawan pemerintahan yang syah, sebagai jaringan gerakan desa mengepung kota, sebagai gerakan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), berusaha menggagalkan Pemilu yang akan diselenggarakan.

Gambaran awal oleh Republika dan Kompas, bahwa kerusuhan di Tasikmalaya bukan persoalan agama didalam teks berikutnya memberikan imaji adanya permasalahan agama. Imaji tersebut diungkapkan Republika dan Kompas melalui tulisan-tulisan wartawan dan pakar yang memiliki bingkai sama dengan masing-masing orientasi media. Hal ini menunjukkan secara struktural media merasa perlu untuk meredam situasi agar kerusuhan tidak meluas dan juga media merasa perlu menjaga hubungan dengan pembacanya. Namun demikian melalui kekuatan agen-agen tetap mengembangkan ideologi media sebagai suratkabar Islam (Republika) dan Katolik (Kompas). Melalui kekuatan agen inilah ideologi mereka dikembangkan.

Republika mengangkat isu pergeseran dominasi kekuasaan dalam pemerintahan dari yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok minoritas berubah

menjadi dikuasai oleh kelompok mayoritas. Hal ini dijadikan pertimbangan logis dalam menduga siapa penyebab terjadinya kerusuhan, yaitu dari kelompok minoritas dengan tujuan untuk memberikan efek delegitimasi pada pemerintah yang dikuasai oleh kelompok mayoritas. Imaji tersebut, hanya ada pada media yang memiliki keterkaitan dengan kelompok mayoritas umat, yaitu Republika. Sedangkan Kompas yang memiliki kedekatan dengan kelompok minoritas mengungkapkan permasalahan yang umum dan mendasar dari fenomena kemanusiaan atau *human interest* serta lebih banyak mengungkapkan alasan rasional sebagai bukan permasalahan agama. Namun demikian melalui otoritas pakar (tulisan pakar) mengangkat isu bahwa kerusuhan yang terjadi atas dasar kecurigaan mayoritas terhadap minoritas, yaitu adanya sikap anti Kristen dari umat Islam

Media Indonesia tampak lebih eksplisit menunjukkan peristiwa kerusuhan tersebut berlatar belakang masalah agama dengan merujuk peristiwa-peristiwa sebelumnya di daerah lain dan secara persuasif menggugah semua pihak untuk menyadari akan bahaya perpecahan bangsa. Ungkapan eksplisit Media Indonesia, tampaknya karena Media Indonesia yang tidak dibebani oleh latarbelakang primordial atau ikatan dengan ideologi agama tertentu sehingga media lebih leluasa memberikan sudut pandangnya.

Pejabat keamanan mengeluarkan ungkapan-ungkapan dengan memberikan label kepada pihak yang melakukan kerusuhan sebagai kelompok resividis, para penjahat, garong. Ungkapan ini mencerminkan sudut pandang institusi keamanan, bahwa pihak yang mengganggu situasi keamanan di suatu wilayah adalah penjahat

sebagai ungkapan normatif sesuai dengan fungsi dan kewenangan institusi mereka. Ungkapan tersebut bisa memberikan satu upaya untuk tidak saling curiga di antara kelompok masyarakat dan antar kelompok masyarakat dengan institusi keamanan dan pemerintahan. Namun demikian, ungkapan pejabat keamanan dalam waktu segera dan klaim dalam stigma pelaku kerusuhan adalah residivis upaya menunjukkan kerusuhan yang terjadi bukan berlatarbelakang permasalahan agama, yang justru memberikan imaji sebaliknya bahwa sebenarnya kerusuhan tersebut memiliki latarbelakang bukan di luar masalah agama. Klaim dan stigma mereka bermakna tirai yang sengaja dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya.

Dalam kasus ini juga terungkap imaji pertarungan antar elit politik, yaitu elit dari kelompok Gus Dur dengan Sumargono dan lainnya. Kelompok elit tersebut saling mengungkapkan pendapat dan dugaan-dugaan bahkan klaim tentang siapa yang menjadi penyebab atau provokator kerusuhan. Artinya media telah digunakan sebagai ajang dalam mendelegitimasi suatu kelompok dan melegitimasi kelompok elit pendukungnya sendiri. Persaingan tersebut dalam dimensi pertarungan memperoleh legitimasi, sehingga memperoleh sumberdaya kuasa yang lebih dari yang lainnya.

Pejabat pemerintahan dan elit politik di lingkaran pemegang kekuasaan memberikan reaksi, tidak dengan perlawanan langsung tetapi dengan mencari sasaran lain. Mereka memberikan identifikasi bahwa kerusuhan dilakukan oleh suatu organisasi yang disebut Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), Organisasi terlarang DI TII yang pernah melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Pernyataan

tersebut merupakan ungkapan dengan satu sudut pandang traumatik pada pengalaman massa lalu dimana terdapat gerakan yang bermaksud melawan pemerintah. Artinya ungkapan pejabat pemerintah tentang kerusuhan tersebut menandakan suatu kekhawatiran ada pihak yang berusaha mengganggu kekuasaannya dan memberikan gambaran kepada publik untuk waspada terhadap pihak-pihak yang berada di balik peristiwa kerusuhan. Ungkapan-ungkapan lain yang lebih eksplisit bahkan diungkapkan oleh pemegang kekuasaan tertinggi Soeharto menyebut kerusuhan yang terjadi sebagai gerakan untuk mengganggu stabilitas, gerakan untuk mengganti ideologi negara Pancasila.

Setelah era orde baru berakhir, tampak terdapat perubahan cara media mengartikulasikan peristiwa kerusuhan. Dalam kasus Semanggi II atau RUU PKB, tampak perebutan kapital politik sangat menonjol dan eksplisit. Ungkapan bahwa rejim yang berkuasa tidak legitimate sebagai mana banyak dibingkai oleh Kompas dan Media Indonesia, sedangkan Republika membingkai gerakan massa yang melakukan demonstrasi terhadap rejim yang berkuasa tidak legitimate. Bagi Kompas dan Media Indonesia yang memaksakan kehendak dan bertindak anarkis adalah penguasa termasuk aparat keamanan. Bagi Republika yang memaksakan kehendak dan bertindak brutal adalah mahasiswa. Bingkai Republika yang memberikan legitimasi kepada pemerintah dan pihak keamanan karena ada keterkaitan struktural antara Republika dengan pimpinan pemerintahan (BJ Habibie) dengan Republika, dimana Republika merupakan surat kabar ICMI dan Habibie merupakan pendiri ICMI. Artinya Republika juga menjaga hubungan dengan khalayak yang tersegmentasi

memiliki menurut orientasi yang mendukung pada kelompok kekuasaan Habibie. Kompas dan Media Indonesia cenderung untuk mengikuti *mainstream* yang memberikan legitimasi kepada setiap gerakan yang diarahkan menentang kekuasaan dan mendapat dukungan kuantitatif. Kecenderungan mengikuti *mainstream* merupakan refleksi upaya memelihara hubungan dengan pasar sehingga dapat meningkatkan akses dan paling tidak mempertahankan akses yang sudah terbangun.

Dalam kasus ini media juga mengembangkan imaji adanya pertarungan antara kekuasaan sipil dengan militer dimana Kompas dan Media Indonesia memberikan makna gerakan untuk menentang RUU PKB merupakan bentuk ketidakpercayaan pada militer dan militer berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Di pihak lain militer mengungkapkan bahwa justru Undang-undang tersebut untuk mencegah terjadinya militerisme. Republika mencoba memberikan imaji bahwa apa yang dilakukan mahasiswa dengan melakukan kekerasan tidak sesuai dengan semangat membangun demokrasi, dan kekerasan yang terjadi merupakan upaya pihak lain dengan tujuan merusak citra militer. Dalam konteks pertarungan itu karena militer merupakan aparat represi negara, maka perbedaan antara sipil dengan militer merupakan *common sense* dari suatu pertarungan kekuasaan simbolik yang mengungkapkan bahwa rejim yang berkuasa tidak legitimate. Demikian juga dalam arena pertarungan antara kekuasaan elit dan massa. elit yang dimaksud adalah elit pemerintahan dan massa yang dimaksud adalah massa yang melakukan aksi demonstrasi.

Dalam kerusuhan berlatar belakang sosial pun seperti kerusuhan warga dan kerusuhan yang berlatar belakang permasalahan ekonomi seperti perdagangan kasus pemberantasan VCD ilegal, tersirat adanya imaji pertarungan kekuasaan, dimana peristiwa-peristiwa kerusuhan antar pelajar atau antar warga yang sudah sering terjadi sejak lama tidak bisa diatasi oleh pemerintah, sehingga mendelegitimasi kekuasaan pemerintah baik pemerintahan pusat maupun lokal.

Apa yang diproduksi media berupa imaji pertarungan antar mayoritas dengan minoritas, antar elit politik dengan elit politik, massa dengan elit penguasa merupakan metafora dari pertarungan imaji dimana di satu pihak melegitimasi kekuasaan dan dilain pihak mendelegitimasi kekuasaan. Akumulasi imaji dilakukan dengan pemberian bingkai yang meningkatkan ruang dan intensitas kerusuhan yang menimbulkan nilai tambah berupa ketidak pastian, ketidak stabilan yang bisa menstimulan khalayak.

Pada era orde baru peristiwa kerusuhan tidak dibingkai langsung dalam imaji yang bisa melegitimasi atau medelegetimasi pemerintah sebab pada era orde baru kelas yang berkuasa bisa membredel media. Pada era itu upaya untuk mengkritik pemerintah tidak mendapat tempat dan ada kekhawatiran media jika melakukan kritik terhadap penguasa, surat kabar tersebut akan diberedel. Pada paska orde baru dimana ketentuan pembredelan sudah tidak ada lagi, upaya untuk melegitimasi dan delegitimasi pemerintah dilakukan secara langsung dalam artikulasi-artikulasi yang menimbulkan lebih banyak lagi dimensi kompetisi, pertentangan bahkan konflik.

b. Perebutan Kapital Material

Imaji pertarungan antar kelas ekonomi merupakan produk dominan tidak saja pada era orde baru tetapi juga pada pasca orde baru. Pada era orde baru, media mengungkapkan imaji kerusuhan sosial dengan lebih banyak menggambarkan kerusakan dan kehancuran material akibat kerusuhan dan melalui pernyataan tokoh atau pakar yang mengungkapkan bahwa telah terjadi penguasaan kelas ekonomi bawah oleh mereka kelas ekonomi kuat.

Dalam kasus kerusuhan di Tasikmalaya, digambarkan protes kelas ekonomi lemah terhadap ketidak berdayaan mereka antara lain dengan melakukan pengrusakan terhadap simbol-simbol ekonomi kuat, seperti pertokoan dan kendaraan-kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan teks lain yang melaporkan pernyataan-pernyataan dari para pakar dan pejabat setempat, bahwa mereka melakukan kekerasan karena tergusur oleh sektor ekonomi modern. Kompas mengakumulasi imaji konflik kelas ekonomi dengan mengartikulasikan akibat kekerasan yang dilakukan berupa bangunan yang rusak, fasilitas umum yang rusak, sedangkan Media Indonesia lebih banyak menggambarkan keperkasaan massa yang melakukan kekerasan.

Pada peristiwa kerusuhan di Cibadak Mall dan Glodok Plaza, juga dikembangkan pertarungan imaji tentang kelas ekonomi. Konflik nyata yang terjadi antara pedagang kaki lima atau pedagang sektor informal dengan pedagang atau kekuatan ekonomi kuat, diungkapkan dengan gambaran upaya kelas ekonomi lemah melakukan pengrusakan sasaran simbolik para pemodal dan para konglomerat. Sektor

informal, pedagang kaki lima adalah representasi ekonomi kelas bawah. Imaji ini diciptakan media, karena *commonsense* publik yang paling dominan ialah kondisi ekonomi masyarakat yang umumnya miskin, sehingga akumulasi simbol-simbol perjuangan kelas miskin di media akan menjadi perhatian masyarakat.

Akumulasi imaji dilakukan dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan dan peristiwa yang dibingkai dalam perjuangan memperoleh kapital dengan menunjukkan kekhawatiran dan rasa cemas kepada masyarakat. Di Jakarta pada kasus kerusuhan di Glodok Plaza, tampak terdapat akumulasi imaji kekhawatiran akan terulangnya peristiwa Mei Tahun 1998 yang menimbulkan kerusakan berbagai sarana dan prasarana masyarakat. Dalam kasus tawuran warga dan pelajar, imaji pertarungan kekuasaan ekonomi terlihat dari ungkapan rasa frustrasi kehidupan kelompok miskin. Walau pun sasaran awal ialah pertarungan antar warga namun sasaran berubah ke obyek lain yaitu instalasi material yang dikuasai oleh golongan kaya.

Imaji yang diproduksi media tentang perlawanan kelas ekonomi bawah pada ketiga media, sepihak menunjukkan *empathy* media dalam memperjuangkan kelas ekonomi lemah. Namun demikian *commonsense* ini bagi media merupakan komoditas yang digunakan sebagai instrumen peningkatan kapital oleh media. Akumulasi imaji perjuangan kelas bawah dilakukan dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang menunjukkan adanya keterlibatan emosional seperti kemarahan satu posisi terhadap posisi lain, pengrusakkan simbol-simbol kelas ekonomi kuat dan juga pengrusakkan terhadap aset sendiri sebagai imbauan persuasif agar ketidakberdayaan kelompok mereka mendapat perhatian.

B. Genealogi berita kerusuhan sosial.

Secara geneologis, berita-berita kerusuhan sosial sebagai suatu diskursus merupakan bagian dari diskursus lainnya yaitu media, negara, khalayak dan masyarakat. Media di Indonesia berada pada situasi pergulatan kapitalisme, yang corak prakteknya tidak sebagaimana ketika ia lahir sebagai suatu sistem produksi yang terkonsentrasi pada individu-individu pemain pasar, dan sebagai bentuk penindasan kaum borjuasi terhadap kaum proletar. Dalam perkembangnya kapitalisme telah mengalami perubahan, antara lain kapitalisme liberal, kapitalisme lanjut, kapitalisme global. Dari perspektif ini kapitalisme di Indonesia pada era orde baru merupakan kapitalisme kroni dimana para pemain dominan merupakan kroni penguasa dengan pengawasan publik yang sangat lemah sehingga justru kapitalisme telah mengukuhkan sistem pemerintahan yang otoriter.

Setelah reformasi bergulir, kapitalisme kroni yang primitif setidaknya mengalami perubahan, dan yang paling menonjol adalah semakin terbukanya pengawasan publik. Semangat untuk menerapkan mekanisme pasar dengan tetap memberikan peranan negara dalam rangka mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat, banyak terperdaya oleh kapitalisme global. Di satu sisi Indonesia harus mengikuti tatanan ekonomi global namun di sisi lain kemampuan (sumberdaya manusia dan infrastruktur) Indonesia dalam kompetisi belum memadai. Indonesia terjerat hutang negara-negara donor, dan semakin jauh dari upaya-upaya memandirikan masyarakat.

Dalam iklim kapitalisme global dan pengawasan publik yang semakin terbuka, permasalahan kolaborasi antara pengusaha dengan penguasa tidak menjadi isu sentral, dan yang menjadi isu ialah bagaimana Partai mempunyai akses kepada sektor-sektor “basah” atau yang kemungkinan memberikan konstribusi dana pada Partai. Data kongkrit konglomerasi antara pengusaha dengan Partai Politik yang berkuasa belum ada, namun suatu kenyataan bahwa sirkulasi kapital masih berada pada mereka yang menguasai ekonomi pada era Orde Baru¹. Kekuatan mereka sudah terlalu besar, walau pun diantara mereka ada yang dinyatakan pailit atau perkembangannya mandek sebagian besar penguasa pada era orde baru masih memegang dominasi. Pemain baru dalam kompetisi di dunia usaha tampaknya belum mampu menggantikan posisi mereka. *Barier to entry* dalam pengembangan usaha mereka bukan lagi dari aturan-aturan monopoli atau aturan lainnya yang memberi keuntungan pada penguasa tertentu seperti yang terjadi pada orde baru. *Barier to entry* lebih banyak pada aspek jaringan pasar dan kemampuan pendatang baru itu sendiri baik pada aspek manajerial maupun permodalan.

Dengan fenomena di atas, praktek media massa termasuk surat kabar secara sadar dan tidak sadar mengembangkan ideologi kapitalisme. Dalam era orde baru corak kapitalisme media mengalami distorsi yaitu pertumbuhan industri media berada

¹ Lin Che Wei, Direktur SG Securitas mengungkapkan adanya resistensi terhadap dua calon pembeli asset BPPN, yaitu pihak asing dan pemilik lama (Kontan, N0.22 Thun VI 4 Maret 2002). Tulisan tersebut memberikan sinyalemen adanya pemilik lama yang mengincar asset BPPN sehingga menunjukkan indikasi bahwa kapital masih dikuasai oleh para pengusaha pada era Orde Baru. Tulisan lain juga menggambarkan bahwa pengusaha-pengusaha lama seperti Salim, Eka Tjipta dan Sjamsul Nursalim belum bangkrut (lihat Kontan No. 7, tahun VI, 12 Nopember 2001, No. 17, Tahun VI, 28 Januari 2002).

dalam format kungkungan penguasa, elit politik dan persekongkolan konglomerat-penguasa. Pasar media didominasi oleh pengusaha yang dekat dengan penguasa di pemerintahan dan para elit politik. Pada pasca orde baru setelah dilakukan deregulasi di bidang media, berkembang para pemain baru dan terjadi kompetisi yang ketat dalam merebut pangsa pasar dengan berusaha memproduksi isi media yang mampu merebut minat dan selera khalayak. Namun demikian dominasi pengusaha media pada era orde baru masih memegang posisi, bahkan justru dominasi semakin kuat dari pengusaha media pada era orde baru semakin kuat, karena tidak ada lagi barier to entry yang berasal dari penguasa berupa aturan perizinan sudah tidak ada lagi.

Dalam posisi tersebut media massa walau pun secara tersurat mengklaim dirinya dengan visi normatif untuk membela keadilan, menyalurkan amanat rakyat, mencerdaskan masyarakat, namun dalam prakteknya para pemilik dan para profesional dihadapkan pada realitas arah dan bentuk kapitalisme yang berkembang. Pada era Orde Baru, media di Indonesia merupakan refleksi dari penerapan kapitalisme kroni, kapitalisme semu (*ersatz capitalism*). Kepura-puraan mengikuti kapitalisme global diwujudkan dengan membuka peluang kepada swasta untuk berbisnis media, namun swasta yang bermain ternyata swasta kroni penguasa. Demikian juga telah terjadi persekongkolan negara dengan organisasi media, yang menempatkan organisasi media, yaitu Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) menjadi kepanjangan tangan penguasa.

Apa yang dilakukan media merupakan refleksi doxa kapitalisme dimana kapitalisme ada dibawah pengendalian penguasa tunduk pada aturan penguasa. Kekerasan struktural oleh penguasa diartikulasikan dalam imaji media sehingga media secara sadar dan tiak sadar mengartikulasikan peristiwa kerusuhan dalam bingkai penguasa. Dengan demikian secara parsial media telah memainkan peranan untuk menjaga hubungan baik dengan pasar tetapi tetap dalam format dominasi kekuasaan.

Resistensi terhadap praktek dominasi penguasa tersebut muncul dalam spekulasi “keberanian” meliputi “kebenaran” yang berakhir dengan pemberedelan dan munculnya media alternatif, media bawah tanah yang terus menerus diburu oleh penguasa. Diantaranya ada yang kemudian pimpinanya ditangkap dan kemudian diadili dan walaupun masuk penjara, media alternatif terus berkembang.

Angin demokratisasi bertiup kencang setelah reformasi bergulir, media lama yang dulu dilarang terbit dan media baru bermunculan. Media di Indonesia sebagai bagian dari sistem kapitalisme (global), tidak saja harus mengikuti tatanan bisnis dunia tetapi juga membuka produk media sebagai komoditas (global).

Walau pun media di Indonesia tampaknya masih berkompetisi dalam pasar nasional namun telah mendapat pesaing media asing yang sudah dengan bebasnya masuk pasar nasional. Sementara itu masyarakat, dalam era transisi berada pada situasi krisis, setelah secara hegemonik menerima nilai-nilai keseragaman berubah menuju tatanan yang menghargai keanekaragaman, dari masyarakat dengan struktur kekuasaan dominan menuju masyarakat yang demokratis. Dalam transisi tersebut,

kebebasan baik dalam mengungkapkan pendapat, sikap dan melakukan tindakan menjadi sebuah *euphoria* dan menjadi arena meluapkan segala bentuk ketidakpuasan, kekecewaan dan ketidakadilan yang telah dialami masyarakat pada era sebelumnya. Aturan-aturan hukum dan norma masyarakat seperti dianggap tidak ada (*anomi*). Kondisi itulah antara lain yang memberikan ruang yang terbuka bagi terjadinya konflik dalam masyarakat yang berujung pada terjadinya kerusuhan sosial.

Khalayak media massa dalam era transisi dewasa ini juga sedang mengalami perubahan. Jika pada era orde baru khalayak kecenderungan melakukan peranan secara individual dan mengembangkan ekspresinya dengan struktur implisit serta terpola dalam dua orientasi politik yaitu mendukung penguasa dan beseberangan dengan penguasa baik secara diam-diam atau terus terang. Setelah reformasi, baik secara sadar atau tidak orientasi khalayak menjadi beraneka ragam sesuai dengan ikatan-ikatan politik yang beranekaragam pula. Pilihan khalayak terhadap media tidak terpola dalam pilihan mana media yang secara kritis dan melakukan perlawanan terhadap penguasa atau sebaliknya memberikan dukungan. Pilihan terhadap media bisa juga atas dasar kesamaan orientasi ideologi khalayak dengan orientasi ideologi media.

Akumulasi kapital material dan simbolik

Khalayak dan isu media sebagai komoditas media massa menjalani proses sirkulasi yang menurut konsep Marx berlangsung dalam formula $C - M - C$ (*commodity - money - commodity*) yaitu menjual suatu komoditas untuk tujuan membeli komoditas (Lenin, V.I, [www. newyouth.com](http://www.newyouth.com)). Dalam konteks khalayak

sebagai komoditas, yaitu rating khalayak (C) dijual oleh pengelola media dengan harga tertentu dari sebuah iklan untuk memperoleh uang (M) yang kemudian digunakan untuk membiayai pembuatan suatu program atau isi media (C). Dalam konteks isu, media massa menjual isu media (C) yang outputnya berupa rating produk media dan pelanggan media dan uang yang diperoleh dari iklan dan pelanggan (M) digunakan untuk membuat produk media lainnya (C).

Dalam masyarakat yang berada dalam masa transisi, media berada pada fase pencarian identitas tentang peranan yang harus dimainkan dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sementara itu tekanan sistem kapitalisme menuntut media untuk melakukan kompetisi dengan berbagai institusi bisnis media baik sesama jenis media maupun dengan jenis media lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun global. Dalam iklim tersebut, peristiwa-peristiwa kerusuhan oleh media massa diproduksi dengan mengembangkan isu disharmoni. Hal ini dilakukan dengan mengeksploitasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan pendapat yang diungkapkan dan digali melalui artikulasi yang tidak hanya mengungkapkan perbedaan sudut pandang tetapi juga perbedaan kepentingan (konflik).

Sebagai institusi kapitalis, media massa berusaha mencari keuntungan atau profit, menurut Marx, formula $M - C - M$ (*money - commodity - money*). Apa yang dilakukan media baik dengan membeli produk jadi atau memproduksi produk sendiri, dijual kepada khalayak dan hasilnya untuk membeli produk lain guna memperoleh keuntungan. Artinya media membeli (mengeluarkan uang untuk memproduksi) isu *disharmony* untuk kemudian dijual kepada khalayak dengan tujuan

memperoleh rating khalayak tertentu untuk dijual kepada para produsen iklan dan memperoleh keuntungan material langsung dari peningkatan omset penjualan dan iklan. Sirkulasi kapital tersebut terus berputar dan terus menerus tanpa akhir kemudian mengakumulasinya menjadi kekuatan dominan.

Sebagaimana dikemukakan di muka, diskursus media di Indonesia mengungkapkan terjadinya akumulasi kapital pada kekuatan kolusi pengusaha orde baru dengan pengusaha, sedangkan pada pasca orde baru sirkulasi tampaknya masih terpusat pada pengusaha media yang dominan pada orde baru.

Kapital yang diakumulasi media melalui sirkulasi yang berlangsung terus menerus tanpa akhir dalam bentuk transaksi diantara produsen dan konsumen . Kapital yang dimaksud di atas merupakan kapital dalam tataran material. Sementara itu dalam aspek non material juga terjadi pertukaran nilai (*exchange value*) dimana secara sadar dan tidak sadar media juga menjalani proses produksi imaji dengan mengartikulasikan kapital lainnya, yaitu sosial, politik dan kultural. Dalam tataran material Media Massa melalui proses C- M- C, secara terus menerus menciptakan kapital (uang) sampai tidak berakhir. Sirkulasi kapital tersebut tidak akan terjadi manakala tidak terjadi sirkulasi dan akumulasi imaji yang diproduksi media yang secara terus menerus menstimulan masyarakat konsumen. Artinya media menciptakan dan mengembangkan imaji secara terus menerus sehingga mampu menciptakan material kapital. Imaji berakumulasi secara terus menerus sehingga melahirkan *surplus value*. Dalam dimensi kapital politik peristiwa-pertistiwa kerusuhan sosial diproduksi menjadi isu yang mendelegitimasi atau melegitimasi

suatu posisi kekuasaan diakumulasi membentuk *surplus value* berupa ketidakpastian atau kepastian yang bagi khalayak merupakan informasi yang dicari sehingga masyarakat akan membeli media tersebut. Demikian juga dalam kapital material, dimana imaji dikembangkan berupa perebutan kapital material yang diakumulasi sehingga menimbulkan *surplus value* berupa kekhawatiran, kengerian, dan rasa putus asa. Kekhawatiran dan kengerian dan rasa tidak aman akan menjadi menjadi komoditas media dalam mengakumulasi kapital material.

C. Epistemologi Sajian Media

Sajian media tampak sedang mengembangkan pluralisme antara lain dengan menyajikan perbedaan-perbedaan pandangan, klaim-klaim, stigma mengenai kerusuhan sosial yang terjadi. Peristiwa kerusuhan disajikan dalam metafor perang dengan dramatisasi yang menarik bagi khalayak. Sajian media tersebut merupakan upaya media untuk menjamin stabilitas agar institusi bisnis media bisa bertahan (*survive*) dan mampu mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya. Dalam memproduksi komoditinya, media sering tunduk pada tekanan massa dan kepentingan pasar dan berbagai kekuasaan yang melingkupinya, yang penting media bisa melangsungkan operasionalnya. Media dalam mempertimbangkan perlu tidaknya memuat berita, jika berkaitan dengan elit tertentu yang memiliki kekuatan massa, atau berkaitan dengan komunitas tertentu maka media berusaha untuk hati-hati dalam mengartikulasikan informasi yang akan disajikannya.

Media senantiasa berusaha untuk mempertahankan kestabilan dalam usaha memperoleh keuntungan baik dalam kepentingan meningkatkan kapasitas mereka atau hanya sekedar bertahan hidup. Untuk menarik perhatian khalayak agar khalayak mau membeli media dikembangkan berbagai produk isi media yang menjadi mainstream publik dan menjadi *commonsense* publik. *Commonsense* publik, dalam penelitian ini berupa cara berfikir secara dikotomis dalam menghadapi suatu obyek misalnya baik atau buruk, tinggi atau rendah, salah benar. Media mengembangkan biakan konten dalam bingkai yang bisa dijual kepada pasar, dan belum menunjukkan posisi yang jelas ruh apa yang menafasi media dalam konteks histories kemasyarakatan. Artinya media massa di Indonesia pada tingkatan institusi bisnis berusaha untuk menjaga stabilitas institusinya agar tetap eksis dan mampu mengembangkan nilai tambahnya. Dalam upaya menjaga stabilitas media maka media mengemas berita-berita kerusuhan sosial dengan artikulasi yang mengungkapkan *commonesense* publik dan yang secara terus bisa mengalir dalam alam imaji khalayak.

BAB VII
PENUTUP
REFLEKSI TEORITIS DAN IMPLIKASI SOSIAL

A. Kesimpulan

Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan media massa di Indonesia ketika masyarakat sedang berubah dari tatanan kehidupan masyarakat yang otoriter menuju tatanan masyarakat yang demokratis, ketika kapitalisme menjadi ideologi dominan di dunia dan bangsa Indonesia sedang gamang dalam mengaplikasikan kapitalisme.

Dalam tataran mikro media telah membingkai peristiwa dan pendapat tentang kerusuhan sosial dalam berbagai isu *disharmony* sebagai komoditas. Imaji yang diproduksi, reproduksi, distribusi dan sirkulasi dalam kasus penelitian ini, ialah meliputi dua kelompok yaitu antara perebutan sumberdaya kekuasaan politik (kapital politik) dan kekuasaan ekonomi (kapital ekonomi).

Kapital politik diperebutkan dengan dilakukan dengan memproduksi, reproduksi dan distribusi, akumulasi imaji bahwa pemegang kekuasaan memiliki legitimasi dan pihak lain tidak memiliki legitimasi. Kekuasaan atau kapital ekonomi diperebutkan dengan mengembangkan imaji yang memberikan legitimasi kepada kelas masyarakat mampu (*the have*) dan tidak mampu (*the have not*) atau sebaliknya.

Dari liputan kerusuhan sosial terungkap adanya artikulasi kapitalisme yaitu produksi, reproduksi, akumulasi imaji yang berusaha memposisikan satu kekuasaan, memenangkan pertarungan kekuasaan, dan menindas kekuasaan lain. Satu peristiwa

menggunakan bahasa sehingga makna dari suatu bahasa bisa berbeda-beda baik antar penyampai, antar penyampai dengan penerima dan antar penerima. Dalam studi ini ditemukan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan sering memberikan makna kekerasan dan konflik tambahan.

Subyek-subyek yang terlibat (para pemain) dalam konflik yang terungkap dalam artikulasi media, pada studi ini ialah berada pada lokus di dalam dan di luar media. Didalam media, yaitu pemilik modal, para awak media, sedangkan di luar media ialah elit politik, penguasa, pengusaha. Untuk apa mereka terlibat dalam konflik studi ini melihat terdapat dua kecenderungan untuk memperoleh legitimasi politik dalam memenangkan pertarungan untuk menduduki posisi kekuasaan di pemerintahan maupun posisi kekuasaan di masyarakat. Selain itu juga mereka bertarung untuk menunjukkan perjuangan untuk menunjukkan eksistensi kelas ekonomi lemah dan melakukan perlawanan terhadap kekuatan ekonomi kuat.

Ketika reformasi belum bergulir, perlawanan pada dominasi penguasa dilakukan lebih dominan dengan metafora dan ungkapan-ungkapan implisit. Sedangkan setelah reformasi bergulir media lebih terbuka dan eksplisit dalam mengartikulasikan peristiwa yang terjadi dan pendapat yang terungkap. Kesemuanya itu dilakukan media sebagai bentuk permainan dan dominasi tanda (sign) untuk menjaga hubungan dengan segmen khalayak demi kepentingan menjaga pasar media untuk mengakumulasi kapital.

Dalam tataran meso, tampak bingkai dan artikulasi media merupakan refleksi dari tatanan dan praktek produksi media serta pertimbangan faktor konsumsi media.

kerusuhan sosial dikembangkan dalam beraneka kontradiksi bahkan konflik . Artikulasi peristiwa dan ungkapan aktor telah berkembang dalam imaji kualitas dan kuantitas konflik yang diperbesar, diperluas dan bahkan diciptakan imaji konflik baru.

Akumulasi imaji konflik yang membiakkan makna konflik merupakan bentuk eksploitasi media massa yang secara sadar dan tidak sadar merepresentasikan para pemain di dalam dan diluar media untuk memperjungkan legitimasi posisi dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan (kapital politik) dan penguasaan sumberdaya ekonomi (kapital material).

Akumulasi imaji konflik merupakan proses peningkatan, pengembangan makna konflik sehingga imaji skala dan intensitas konflik menjadi lebih besar. Akumulasi konflik juga bisa menunjukkan pembiakan makna konflik yaitu manakala dalam melaporkan peristiwa kerusuhan sosial tidak terbatas pada peristiwanya itu sendiri, tetapi mengembangkan dengan konflik-konflik lainnya. Kerusuhan di Tasikmalaya tahun 1996/1997 misalnya, berkembang menjadi imaji konflik antar mayoritas dan minoritas pemeluk agama, ekonomi kuat dengan lemah, konflik antar elit.

Akumulasi imaji konflik tersebut bisa dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Secara sadar artinya media secara sengaja melaporkan atau memunculkan adanya konflik tersebut. Secara tidak sadar ketika media mengartikulasikannya dalam bahasa media terbentuk makna lain. Hal ini didasarkan satu pandangan terhadap bahasa bahwa bahasa memiliki struktur yang tidak permanen, tergantung perspektif yang

menggunakan bahasa sehingga makna dari suatu bahasa bisa berbeda-beda baik antar penyampai, antar penyampai dengan penerima dan antar penerima. Dalam studi ini ditemukan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan sering memberikan makna kekerasan dan konflik tambahan.

Subyek-subyek yang terlibat (para pemain) dalam konflik yang terungkap dalam artikulasi media, pada studi ini ialah berada pada lokus di dalam dan di luar media. Didalam media, yaitu pemilik modal, para awak media, sedangkan di luar media ialah elit politik, penguasa, pengusaha. Untuk apa mereka terlibat dalam konflik studi ini melihat terdapat dua kecenderungan untuk memperoleh legitimasi politik dalam memenangkan pertarungan untuk menduduki posisi kekuasaan di pemerintahan maupun posisi kekuasaan di masyarakat. Selain itu juga mereka bertarung untuk menunjukkan perjuangan untuk menunjukkan eksistensi kelas ekonomi lemah dan melakukan perlawanan terhadap kekuatan ekonomi kuat.

Ketika reformasi belum bergulir, perlawanan pada dominasi penguasa dilakukan lebih dominan dengan metafora dan ungkapan-ungkapan implisit. Sedangkan setelah reformasi bergulir media lebih terbuka dan eksplisit dalam mengartikulasikan peristiwa yang terjadi dan pendapat yang terungkap. Kesemuanya itu dilakukan media sebagai bentuk permainan dan dominasi tanda (sign) untuk menjaga hubungan dengan segmen khalayak demi kepentingan menjaga pasar media untuk mengakumulasi kapital.

Dalam tataran meso, tampak bingkai dan artikulasi media merupakan refleksi dari tatanan dan praktek produksi media serta pertimbangan faktor konsumsi media.

Pada praktek produksi ternyata latar belakang dan orientasi media memberikan warna pada bingkai dan artikulasi media. Media massa secara berhati-hati tetap berusaha melaksanakan kekuasaan strukturalnya dengan dukungan kekuatan para aktor atau agen di lingkungan media¹. Peranan timbal balik antara struktur dan aktor (human agency) inilah yang memberikan kekuatan pada eksistensi media sehingga selamat dari tekanan kekuasaan² dan tetap mendapat dukungan dari khalayaknya. Aturan-aturan dan praktek pengekanan terhadap kebebasan pers menjadi faktor utama yang melandasi karakter produksi teks media pada era Orde Baru.

Pada pasca Orde Baru, setelah aturan yang mengekan kebebasan pers berakhir, aturan paraktek media massa yang ada dinilai anomy. Artinya kekuatan struktur mengambang, sehingga peranan agen menjadi dominan. Namun peranan dominasi mereka dalam mengartikulasikan berbagai peristiwa banyak dipengaruhi oleh desakan pasar dan kekuasaan massa.

Dari aspek konsumsi tampak *mainstream* publik terhadap isu menjadi pertimbangan. Pada pasca Orde Baru *mainstream* publik lebih dominan menyukai hal-hal yang menyuarakan perjuangan untuk melawan kekuasaan yang dominan dan memperjuangkan keadilan dan melawan penyimpangan kekuasaan.

¹ Republika ketika secara keseluruhan membingkai bahwa kerusuhan di Tasikmalaya tidak berlatar belakang permasalahan agama tetapi melalui tulisan wartawannya menunjukkan hal yang sebaliknya yang mencerminkan peran dan sumberdaya Republika itu sendiri. Kompas juga demikian, secara keseluruhan memiliki bingkai yang sama dengan Republika, tetapi melalui pilihan redaksi menampilkan tulisan pakar yang memberikan imaji bahwa kerusuhan tersebut memiliki latar belakang permasalahan agama.

² Pada orde baru ialah kekangan berupa pengendalian hidup matinya media dan arah konten media agar selalu mendukung kekuasaan pemerintah. Sedangkan pada pasca orde baru kekangan bukan dari pemerintah tetapi dari iklim kompetisi dan tuntutan pasar dan dan kekuasaan massa.

Pada tataran makro, apa yang dilakukan media merupakan refleksi dari praktek ekonomi politik di Indonesia. Sirkulasi kapital pada orde baru ada pada lingkaran kolusi penguasa dan pengusaha (termasuk pengusaha media) sehingga konvergensi dua kekuatan itulah menjadi dominan dalam mengendalikan media. Pada pasca Orde Baru sirkulasi kapital masih ada pada kekuatan pengusaha Orde Baru termasuk di bidang media massa. Konspirasi pada tingkat lembaga antara penguasa dan pengusaha tidak menjadi isu, namun dalam tingkat agen sebagaimana dilakukan oleh wartawan³ masih berlangsung. Sementara itu suasana euforia kebebasan pasca dominasi kekuasaan otoriter, menyebabkan masyarakat pun larut dalam euforia pertarungan untuk ruang sosial.

B. Refleksi Teoritis

1. Media massa telah menjadi salah satu rangkaian jaringan industri imaji yang memproduksi, reproduksi dan distribusi serta sirkulasi berbagai imaji kepada publik secara terus menerus tanpa akhir. Dari satu produk imaji berganti atau berubah atau berbiak menjadi imaji-imaji lain sehingga skema pikiran khalayak dikuasai. Sirkulasi imaji yang tanpa akhir tersebut merupakan rangkaian dari spiral sirkulasi kapital (material) tanpa akhir

³ Rosihan Anwar dalam wawancara televisi mengungkapkan adanya wartawan amplop sulit dihindari karena wartawan umumnya miskin. Hal tersebut bisa dipahami sebab mereka dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya memerlukan dana sementara media tidak mampu membiayainya. Fenomena itu semakin menonjol dengan berkembangnya media-media baru pada era reformasi ini yang tidak memiliki modal cukup tetapi berani menyelenggarakan penerbitan, sehingga wartawan yang bekerja di media tersebut sekaligus mencari dana untuk membiayai ongkos produksinya. Dengan fenomena tersebut merupakan suatu indikasi bahwa kolaborasi antara sumber berita dengan wartawan terus terjadi. Artinya kekuasaan "uang" masih menjadi kekuatan dominan.

dimana secara terus menerus media berusaha mengakumulasi kapital sebagai salah satu ciri produk kapitalisme.

Sebagai salah satu jaringan, media memproduksi imaji bersumber dari aneka bahan baku (*ingredient*) yang diolah sehingga imaji yang terbentuk merupakan imaji baru yang mungkin saja berbeda dengan bahan bakunya secara parsial dan obyektif. Imaji pertarungan, kompetisi sebagai ciri moda kapitalisme terus diproduksi dalam industri imaji. Sebagai suatu arena (*field*), industri imaji merupakan suatu ruang berupa setting sosial yang terstruktur. Industri imaji bukanlah merupakan sebuah institusi tetapi merupakan arena pertarungan (*field of struggle*), berbagai kekuasaan dan pertarungan tersebut dilakukan melalui proses penandaan (*signification*) dari tangkapan indrawi kepada artikulasi-artikulasi konseptual dan manusiawi.

2. Media massa sebagai salah satu rangkaian industri imaji secara teoritis berada dalam *frame work (doxa)* kapitalisme sebagai kekuasaan puritan yang perkasa atau powerful (*orthodoxy*). Dalam *doxa* tersebut media massa berhadapan dengan kekuasaan variannya yang terpinggirkan atau terdominasi (*heterodoxy*). Dalam konteks ini *orthodoxy* dalam *doxa* kapitalisme merupakan nilai-nilai yang menghendaki adanya akumulasi kapital dengan memproduksi, distribusi dan sirkulasi baik pada tataran imaji maupun praktik industri yang mempunyai nilai pertukaran yang tinggi sehingga mampu menciptakan nilai pakai sebagai nilai lebih (*surplus value*). Dalam proses pertukaran barang dan jasa menghendaki adanya kompetisi bebas tanpa atau

regulasi yang terbatas. Kekuasaan *heterodoxy* menghendaki alternatif lain yang menginginkan tidak adanya dominasi penguasaan kapital baik dalam tataran imaji maupun dalam tataran praktek industri.

Dalam praktek media di Indonesia pada era orde baru ada kecenderungan kekuatan *orthodoxy* berperan dalam wajah palsu sebab ia bekolusi dengan kekuasaan politik sehingga produksi dan distribusi tidak berlangsung dalam pola kekuasaan *orthodoxy* dalam *doxa* kapitalisme. Pada pasca orde baru dominasi masih dipegang oleh kekuatan lama dan kolusi masih berlangsung walau pun tidak pada tingkat struktural. Sementara itu imaji yang diproduksi media dipandang oleh sebagian masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Artinya *doxa* kapitalisme di Indonesia masih dalam proses pencarian, kapitalisme yang bagaimanakah yang sebaiknya digunakan.

3. Secara teoritis temuan-temuan tersebut memberikan elaborasi terhadap teori ekonomi politik media massa. Dalam konteks proses perubahan masyarakat dari tatanan otoriter menuju demokratis dan kapitalisme global menjadi dominan, maka terjadi pergulatan pencarian dan perumusan *doxa* kapitalisme. Teori ekonomi politik kultural yang menganggap adanya peranan timbal balik (interplay) antara struktur dan aktor pelaku sosial (*human agency*), dalam konteks perubahan masyarakat tersebut menunjukkan peranan aktor pelaku sosial (*agency*) menjadi lebih dominan. Dalam melaksanakan perannya aktor

pelaku sosial tersebut berada pada tekanan kekuasaan massa dan tuntutan untuk mengikuti selera pasar.

4. Secara teoritis temuan-temuan penelitian memberikan penegasan dan kesadaran bahwa media massa dalam konteks tersebut cenderung memproduksi imaji ketidak pastian semakin tidak pasti, kemurnian semakin tidak murni karena media kehilangan pegangan dan larut dalam pertarungan kekuasaan. Industri imaji bisa menciptakan, memperbesar, memperluas, atau mempersempit, memperkecil dan menenggelamkan imaji. Kapasitas tersebut digunakan oleh media dan berbagai pihak untuk melakukan perjuangan dalam memperoleh kekuasaan. Para pemain atau species dalam pertarungan tersebut ialah pemilik media, pemodal, awak media, elit politik, penguasa, militer. Pertarungan tersebut oleh media dijadikan komoditas dalam memelihara kelanggengan institusi bisnis untuk mempertahankan eksistensinya.

C. Implikasi sosial

Media secara sadar dan tidak sadar telah larut pada kompetisi pasar dalam *doxa* kapitalisme yang gamang telah memainkan imaji dimana media dipenuhi oleh gambaran dunia dengan perbedaan, pertentangan, dan persaingan. Awak media menyajikan gambaran tersebut karena memiliki nilai jual yang tinggi dimana media melihat kecenderungan *mainstream* publik ke arah itu. Artikulasi media tersebut yang hanya mengikuti taste (selera) konsumtif yang kurang atau melakukan

pencerahan dalam perjuangan yang tidak jelas apa yang diperjuangkan selain mengakumulasi imaji sekaligus mengakumulasi kapital.

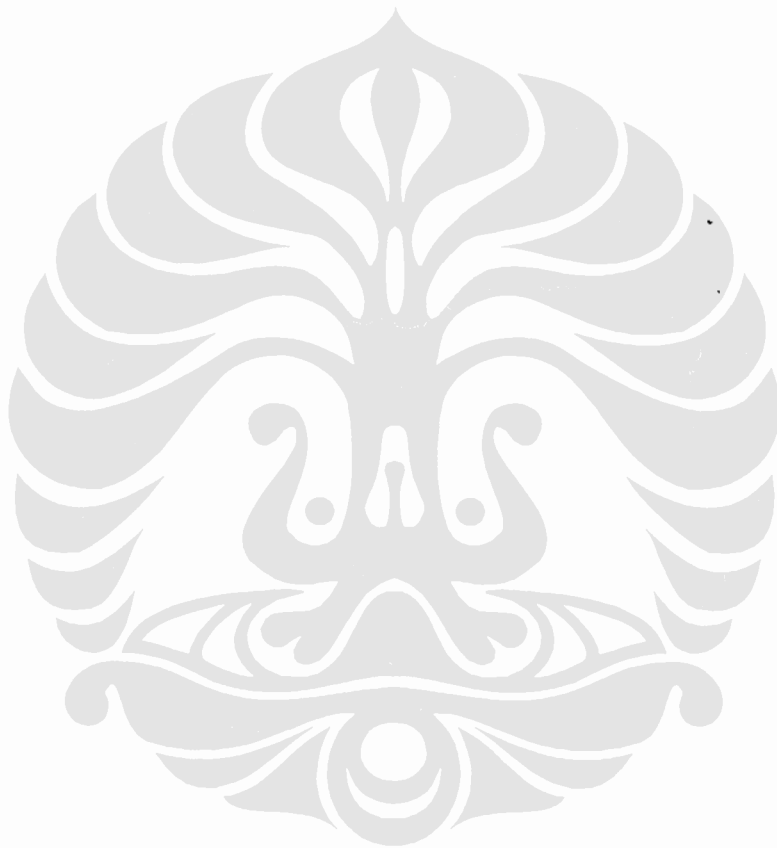
Awak media mungkin secara sadar melakukan dengan sengaja memproduksi imaji perbedaan, pertentangan dan persaingan sebagai strategi “perjuangan” mengakumulasi kapital. Artinya media telah larut dalam pergulatan baik dengan tujuan agar medianya bertahan hidup maupun untuk mengejar posisi unggul dalam kapital material. Kecenderungan media larut dalam memproduksi, reproduksi dan sirkulasi imaji *disharmony* menunjukkan media telah terjebak dalam dominasi kapitalisme global dengan memproduksi imaji perbedaan, pertentangan dan persaingan sebagai komoditas dalam memelihara statusquo kerajaan bisnisnya.

Media di Indonesia telah larut dalam permainan kepentingan berbagai kuasa. Pembiakan imaji konflik mereproduksi imaji realitas konflik yang lebih luas yang kontra produktif dengan upaya menciptakan dunia yang damai dan harmonis. Kepada para pemilik media dan pengelola media kiranya diperlukan refleksi terhadap yang dilakukannya baik sadar maupun tidak selama ini, untuk mempertanyakan roh politik apa dan mau kemana. Dalam konteks ini Pers Indonesia memerlukan perumusan kembali positioningnya dalam iklim kebebasan yang berubah dan transformasi yang cenderung kurang terorganisasi. Dalam ketidak berdayaan masyarakat terhadap cengkraman kapitalisme global diperlukan perjuangan untuk merumuskan *doxa* khususnya di bidang media di Indonesia yang sedang berproses mencari *doxa* baru setelah dominasi kekuasaan otoriter berakhir pada era orde baru.

Pendapat Gramsci sebagaimana ditulis oleh Simon (2000:19) dalam Gagasan Politik Gramsci tentang Politik merupakan peringatan dini bahwa dalam proses pencarian *doxa* perlu memperhatikan ideologi yang ada dan berkembang. Gramsci berpendapat bahwa dalam perjuangan ideologi sebuah kelas yang bergerak maju menuju hegemoni tidak harus menyapu bersih semua sistem ideologi yang ada sebelumnya. Sebaliknya yang lebih penting melakukan transformasi terhadap ideologi-ideologi yang ada dengan tetap mempertahankan dan menyusun kembali beberapa unsur yang paling tangguh menjadi sebuah sistem baru.

Dalam konteks ini tesis Habermas kiranya dapat dijadikan awal menggali kesadaran baru dalam kerangka keluar dari krisis legitimasi terhadap peranan media massa di Indonesia. Habermas (Ritzer: 154, Budi Hardiman: 128) mengemukakan teori rasionalisasi yang mengungkapkan rasionalisasi komunikasi mengarahkan komunikasi bebas dari dominasi sehingga komunikasi terjadi bebas dan terbuka. Media massa adalah bagian dari atau salah satu teknologi komunikasi dan menjadi basis kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud Habermas ialah kekuasaan yang dilegitimasi oleh suara publik yang dibahas dalam ruang publik. Dalam konteks krisis peranan media massa dalam aplikasi kapitalisme yang gamang diperlukan peranan lembaga-lembaga masyarakat lainnya untuk memberikan kontribusi melakukan perimbangan kekuatan kepada media massa sehingga media massa terhindar dari dominasi kekuasaan baik kelas yang berkuasa maupun kekuasaan kapital material. Kapitalisme yang menjadi *doxa* ialah kapitalisme yang memiliki

nurani dan etika membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan kesadaran nasionalisme .



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Albaran, Alan B. 1996. Media Economic. Understanding Market, Industries and Concept. Ames: Ioa State University Press.
- Allor, Martin. 1995. Relocating The Site of Audience. Dalam Oliver Boyd Barret & Crish Newbold. *Approach to Media. Reader*. London : Arnold
- Barret, Oliver Boyd. 1995. The Political Economy Approach. Dalam Oliver Boyd Barret & Crish Newbold. *Approach to Media. Reader*. London : Arnold.
- Baudrillard, Jean. 1981. For Critigque of The Political Economy of the Sign. Translated with an Introduction by Charles Levin. Lelos Press Ltd.
- Bennett, Tony. 1982. Theories of The Media, Theories of Society dalam Michael Gurevitch etall (ed). *Cultur, Society and the Media*, New York: Methuen.
- Boorstin, Danil J. (1971), The Image-A guide Pseudo-Event in America. New York: Atheum.
- Bourdieu, Pierre. 1999. Distinction A Social Critique of the Judgment of Taste. London: Routlege.
- Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of A Theory Of Practice. Translited by Richard Nice. London, NewYork, Melbourne: Cambridge University Press.
- Brown, Gillian. George Yule. 1996. Analisis Wacana - Discourse Analysis. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arif. 1993. Pengantar- Putaran Uruguay : Internasionalisasi Pasar Domestik dalam Martin Khor Kok Peng. Alih Bahasa oleh Wandl S Barata. Imperialisme Ekonomi Baru. Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arif. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.
- Curan, James. 1982. Communications, power and social orders dalam Michael Gurevitch etall (ed). *Culture, Society and the Media*, New York: Methuen.
- Dant, Tim. 1991. Knowledge, Ideology and Discourse, London, New York: Routledge.
- DeFleur, Melvin L, 1983. Millestones in Mass Communication Research, New York: Logman Inc,
- Eldridge, John. 1993. News, Truth and Power dalam John Eldridge (ed). *Getting The Message. News, Truth and Power. Glasgow University Media Group* . London. New York: Routledge.

- Eldridge, John. 1993. Whose Illusion ? Whose reality ? some problems of theory and method in mass media research dalam John Eldridge (ed). *Getting The Message. News, Truth and Power. Glasgow University Media Group* . London. New York: Routledge.
- Emmerson, Donald K (ed). 2001. Indonesia Beyond Soeharto. Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Jakarta: Gramedia.
- Eriyanto. 1999. Militerisasi Kosakata.Pantau-kajian media dan jurnanisme.. Edisi. 06 Oktober-Nopember 1999
- Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold.
- Fairclough, Norman. 1998. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: Logman.
- Fiske, John. 1982. Introduction To Communication Studies. New York: Methuen.
- Fiske, John. 1992. Introduction to Communications Studies, 2nd Edition. London and New York: Routledge
- Foss, Sonja K (at all). 1985. Contemporary Perspectives on Rhetoric. Illinois: Waveland Press, Inc.
- Flournoy, Don Michael (ed). 1989. Analisa Isi Surat kabar Surakabar Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Foucault, Michael. 1977. Power/Knowledge. Selected interviews 1972-1977. Terjemahan Colin Gordon, Leo Marshall, John Mephan, Kate Soper. New York: Pantheon Book.
- Foucault, Michael. 1997. Sex dan Kekuasaan. Alih bahasa Rahayu S Hidayat, Jakarta: Gramedia.
- Fowler, Roger. 1996. Language In The News. Discourse and Ideology in The News. London: Routledge.
- Gallagher, Margaret. 1982. Negotiation of control of the communications industries dalam Michael Gurevitch et al (ed). *Cultur, Society and the Media*, New York: Methuen
- Gamson, W.A, dan A. Modigliani. 1989. Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power : A Constructionist Approach, dalam American Journal of Sociology, Volume 95 (1) hal 1 -37.
- Gamson, WA dkk. 1992. Media images and the social constructions of reality, dalam Annu.Rev Social, 19373-393.

- Giddens Anthony. 1996. *Capitalism and Social Theory. An analysis of the writing of Marx, Durkheim and Max Weber* Cambridge: University Press..
- Giddens, Anthony. 1986. *Central Problems in Social Theory. Actions, Structure and Contradictions Analysis*. Bekerly and Los Angeles : University California Press.
- Gitlin, Todd. 1980. *The Whole World Is Watching. Mass media in the making & unmaking of the new left*. London: University of California Press.
- Golding, Peter and Graham Murdock. 1991. *Culture, Communications, and Political Economy dalam James Curran, dan Michael Gurevitch, (ed). Mass Media and Society*. London, New York, Melbourne, Auckland: Edward Arnold.
- Golding, Peter and Graham Murdock. 1997. *Ideology and The Mass Media: The Question of Determination. Dalam Pete Golding and Garham Murdock, The Political Economy of Media*. Volume I, Cheltenham, UK. Brookfield, US: The International Library of Study and culture.
- Golding, Peter. 1982. *Media Profesionalism in the Third World: The Transfer of an ideology dalam James Curann etall (ed). Mass Communications and Society*, Hongkong : The Open University Press.
- Graber, Doris A. 1989. *Mass Media and American Politics*. Third edition, Washington: CQ Press.
- Hall, Edwart T. 1977. *Beyond Culture*. New York : Anchor Books.
- Hall, Stuart (a). 1986. *Encoding/decoding dalam Stuart Hall, etall (ed). Culture, Media, Language*. London: Hutchinhon & Co.
- Hall, Stuart (b). 1986. *Recent Developments in theories of language and ideology: Critical note dalam Stuart Hall etall (ed). Culture, Media, Language*. London: Hutchinhon & Co.
- Hall, Stuart. 1982. *The rediscovery of 'ideology' : return of repressed in media studies dalam Michael Gurevitch etall (ed). Culture, Society and the Media*, New York: Methuen
- Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif. Ilmu, Masyarakat, Politik & Posmodernisme menurut Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hartley, John. 1994. *Understanding News*. London dan New York: Routledge.
- Hawkes, David. 1996. *Ideology. The New Critical Idiom*. London: Routledge.
- Heck, Marina Camargo. 1986. *The Ideological dimension of Media Message dalam Stuart Hall, etall (ed). Culture, Media, Language*. London: Hutchinhon & Co

- Herbert R. Barringer (ed) (1965), *Social Change in Developing Areas*, Cambridge: Schenkman Co.
- Hidayat, Dedy N. 2000. *Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial*. Dedy N Hidayat dkk (ed). *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemony*. Jakarta : Gramedia
- Hidayat, Dedy N. 2000. *Pers Dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru*. dalam Dedy N Hidayat dkk (ed). *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemony*. Jakarta : Gramedia
- Hikam, Muhammad A.S.. 1996. *Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice*. dalam Yudi Latif dan Idi Sumandy Ibrahim (ed). *Bahasa dan Kekuasaan. Politik Wacana Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Hill, David T. 1994. *The Press In New Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ign. Haryanto dan HW Setiawan. 1998. *Pers Diterpa Krisis. Laporan tahunan. Aliansi Jurnalis Independen-LSP*.
- Indrawati, Sri Mulyani 2000. *Kapitalisme Global Dan Krisis Kepercayaan Terhadap Rezim Soeharto dalam Dedy N Hidayat dkk (ed). Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemony*. Jakarta : Gramedia.
- Infante, Dominic A., Rancer, Andrew & Womack. (1993) *Building Communication Theory. Second Edition*. Illinois: Waveland.
- Jackson, Karl D. *Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis and Communications in Indonesia* dalam Karl D Jackson and Lucian W.Pye (ed), *Political Power and communications in Indonesia*, London: University of California Press, Ltd.
- Lekachman, Robert & Borin Van Loon. *Capitalism for Beginner*. New York: Patheon Books
- Lull, James. 1998. *Media, Komunikasi, Kebudayaan. Suatu Pengantar Global*, Terjemahan A. Setiawan. Jakarta: yayasan Obor.
- Makarim, Nono Anwar. 1978. *The Indonesian Press: An Editor's Perspective* dalam Karl D Jackson and Lucian W.Pye (ed), *Political Power and Communications in Indonesia*, London: University of California Press, Ltd.
- Mc Manus, 1994. John H. *Market Driven Journalism. Let The Citizen Beware ?* London: Sage Publications
- McLuhan, Marshal. 1964. *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: New American Library.
- McQuail, Denis, 1994. *Teori Komunikasi Massa, Terjemahan*, Erlangga, Jakarta,

- Mills, Sara. 1997. *Discourse. The New Critical Idiom*. London, New York: Routledge.
- Mosco, Vincent. 1996, *The Political Economy of Communication*. London: Sage Publication.
- Murdock, Graham. 1982. Large Corporations and Control of Communication dalam Michael Gurevitch etall. (ed). *Cultuer, Society and the Media*, New York: Methuen.
- Nugroho, Bimo. Eriyanto. Frans Sudiarsis. Politik Media Mengemas Berita. Habibie dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka, dan Republika. Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Payne, Michael. 1997. *A Dictionnary of Cultural and Critical Theory*. Malden: Blackwell Publisher Ltd.
- Pye, Lucian W. 1965. Introduction : Political Culture and Political Development. dalam Lucian W. Pye dan Sidney Verba (ed). *Political Power and Political Development*. New Jersey : Princeton University Press.
- Rabinow, Paul. 1987. Foucault Reader. An Introduction to Foucault's thought, with mayor new unpublished material. New York: Pantheon Book
- Rachbini, Didik J. 2001. Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 1996. *Modern Social Theory*. Fourth Edition. New York : The McGraw-Hill Co.Inc.
- Ritzer, George. 1997. *Postmodern Social Theory*. New York : The McGraw-Hill Co.Inc.
- Robinson, Richard and Kevin Hewinson, Garry Rodan. 1993. Political power in industrializing capitalist approaches dalam Kevin Hewson, Ricard Robinson, Garry Rodan. Southeast. *Authoritarianism, democracy and capitalism*. Sydney: Allen & Unwin Ltd.
- Robinson, Richard. 1993. Indonesia: Tensions in state and regime dalam Kevin Hewson, Ricard Robinson, Garry Rodan. Southeast. *Authoritarianism, democracy and capitalism*. Sydney: Allen & Unwin Ltd.
- Schulman, Mark. 1990. Control Mechanisms Inside the Media dalam John Downing, Ali Mohamadi dan Annabelle Sreberny-Mohammadi, *Questioning The Media. Critical Introduction*. New York: Sage Publications.
- Shoemaker, Pamela J dan Stephen D Reese. 1991. *Mediating the Message. Theories of Influence on Mass Media Content*, New York dan London: Longman.

- Simanjuntak, Togi. 1998. Wartawan Terpasung. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Simon, Roger. 2000. Gagasan-gagasan politik Gramsci. Terjemahan dari Gramsci's Political Thought. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smythe, Dallas. 1995. On The Audience Commodity and His Work Dalam Oliver Boyd Barret & Crish Newbold. Approach to Media. Reader. London : Arnold
- Soloski, John. 1997. News Reporting and Professionalism. Some Constraints on Reporting of the News dalam Dan Berkowits, *Social Meanings of News*. Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Sudibyo, Agus. 2001. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LkiS
- Sulistyo, Hermawan. 1993. Represi Politik, Kepemimpinan Ekonomi dan Konsep Penerbitan Pers dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed) *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Suprpto, Eddy. Ing Haryanto. Heru Hendratmoko. Eforia, Konsentrasi Modal dan Tekanan Media Massa. Annual Report 2000-2001. Aliansi Jurnalis Independen-LSPP.
- Surbakti, Ramlan. 1997. Beberapa Bentuk Pengendalian Pers oleh Negara-- Pers, Negara dan Kekuasaan. dalam Hery Akhmadi (ed), *Ilusi Sebuah Kekuasaan*, Surabaya :ISI dan Ubaya.
- Swartz, David. 1997. Culture and Power, The Sociology of Pierre Boudieu. USA: University Chicago.
- Tuchman, Gaye. 1980. Making News A Study in The Construction of Reality. London: The Free Pers.
- Van Dijk, Teun A. 1988. News as Discourse. Hillsdale: Lawrence Erlbaun Associates, Inc.
- van Dijk, Teun A. 1998. Ideology. A Multidisciplinary Study. London: Sage. 1998, inpress, WWW. Let.uva.nl/ideology/ideology.c1-c28.
- Wahid dkk. 1999. Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia. Jakarta : LkiS
- Wallace, Ruth and Alison Wolf. 1980. Contemporary Sociological Theory. London: Prentice-Hall.
- Waston, James. 1998. Media Communications. An Introductions to Theory and Process. London: Macmillian Press LTD.
- Williams Frederick dan Ronald E Rice, E.M. Rogers. Research Method And The New Media. New York: The Free Press.

Wuthnow, Robert. JD Hunter. A Bergersen. E Kurzweil. 1984. Cultural Analysis, The Work of Peter L .Berger, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jurgen Habermas. London : Rotledge & Kegan Paul.

Artikel

Chandler, Daniel. Marxist Media Theory.

<http://WWW.aber.ac.uk/~dgc/marxism.html>.

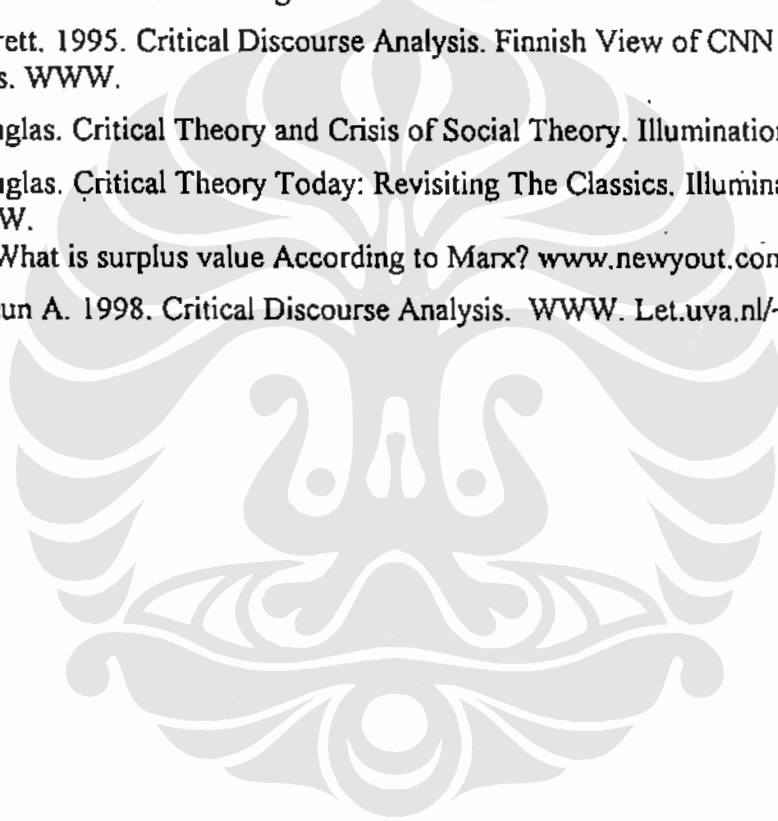
Dellinger, Brett. 1995. Critical Discourse Analysis. Finnish View of CNN Television News. WWW.

Kellner, Douglas. Critical Theory and Crisis of Social Theory. Illuminations. WWW.

Kellner, Douglas. Critical Theory Today: Revisiting The Classics. Illuminations. WWW.

Lenin, VI . What is surplus value According to Marx? www.newyout.com

van Dijk, Teun A. 1998. Critical Discourse Analysis. WWW. Let.uva.nl/~teun/cda.1.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Udi Rusadi

Alamat : Jln. Kelapa Tiga No. 24 Jagakarsa 12620.

Telepon : 7271626

Tempat, tgl lahir : Kuningan, 15 Agustus 1951

Status : Menikah

Nama Istri : Tuti Suciati

Jumlah dan Nama Anak : 4 (Fajram Iman Rusadi, Rema Rahma Suci Rusadi, Anugrah Rahman Rusadi, Isra Nashar Malik Rusadi)

Pekerjaan :

- Asisten Deputi Akreditasi dan Standardisasi - Deputi Sumberdaya Manusia - Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Lektor Kepala di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta.

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :

- Tamat SD Negeri VII Kuningan Tahun 1964
- Tamat SMP Negeri I Kuningan Tahun 1967
- Tamat SMA Negeri Kuningan Tahun 1970
- Tamat Akademi Penerangan Tahun 1974
- Tamat Sekolah Tinggi Publisistik Tahun 1977
- Tamat Pascasarjana Universitas Pajajaran, Program S2 bidang Ilmu Komunikasi Tahun 1986
- Masuk Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Doktor Bidang Ilmu Komunikasi Tahun 1995.